



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN DAIRI

TAHUN ANGGARAN 2024



Ir. Vickner Sinaga, M.M
Bupati Dairi



Wahyu Daniel Sagala
Wakil Bupati Dairi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, karunia serta lindunganNya sehingga kita semua diberi kesempatan dan kesehatan sehingga sampai saat ini dapat melaksanakan aktifitas di kehidupan kita masing-masing. Demikian juga halnya Pemerintah Kabupaten Dairi dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban daerah selama Tahun Anggaran 2024 sampai kepada penyelesaian penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten dairi Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan pemberian kewenangan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah semakin dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik kepada Pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Walaupun pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 belum masa jabatan kami, namun sebagai wujud tanggungjawab sebagai Bupati Dairi dan sesuai amanat ketentuan perundang-undangan, maka LPPD Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sumatera Utara.

LPPD ini pada dasarnya merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan gambaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi secara utuh

selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 serta implementasi berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2024, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap semoga segala upaya kita dalam berkarya membangun Kabupaten Dairi senantiasa memperoleh petunjuk serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sidikalang, 27 Maret 2025



IF. VICKNER SINAGA, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
Foto Bupati Dairi	i
Foto Wakil Bupati Dairi	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
A. Undang-Undang Pembentukan Wilayah	1
B. Data Geografis Wilayah	3
C. Jumlah Penduduk	5
D. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	10
E. Rincian Aparatur Sipil Negara.....	12
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
G. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	23
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	26
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	390
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .	396
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	396
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	398
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci	400
A. Urusan Wajib	412
1. Urusan Pendidikan.....	412
2. Urusan Kesehatan	415
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	419
4. Urusan Perumahan Rakyat.....	424
5. Urusan Trantibumlinmas	427

6. Urusan Sosial.....	432
7. Urusan Ketenagakerjaan	434
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	440
9. Urusan Pangan	442
10. Urusan Pertanahan.....	443
11. Urusan Lingkungan Hidup.....	444
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	446
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	447
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	448
15. Urusan Perhubungan	450
16. Urusan Komunikasi dan Informatika	451
17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	455
18. Urusan Penanaman Modal	459
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	461
20. Urusan Statistik.....	462
21. Urusan Persandian	463
22. Urusan Kebudayaan	464
23. Urusan Perpustakaan	466
24. Urusan Kearsipan	469
B. Urusan Pilihan	471
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.....	471
2. Urusan Pilihan Pertanian	472
3. Urusan Pilihan Pariwisata	473
4. Urusan Pilihan Perindustrian.....	475
5. Urusan Pilihan Perdagangan	479
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
.....	482
1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	484
2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan).....	485
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	486
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) .	486

5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	488
6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Inspektorat)	488
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	489
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	595
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...	596
4.1 Urusan Pendidikan	601
4.2 Urusan Kesehatan.....	630
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	649
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	662
4.5 Urusan Trantibumlinmas	666
4.6 Urusan Sosial.....	687
BAB V PENUTUP	697

LHE SAKIP 2.3 BERADA PADA HALAMAN 728

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di samping kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, daerah mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan : *“Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib*

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) undang-undang tersebut di atas selanjutnya telah diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut antara lain mengatur bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan melalui program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran merupakan hasil perencanaan, kebijakan dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi bersama pemangku kepentingan lainnya melalui tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyelenggaraan urusan desentralisasi diarahkan pada pencapaian sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD maupun pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dairi selama Tahun Anggaran 2024 dengan format laporan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Muatan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Selanjutnya, capaian kinerja penyelenggaraan daerah dimaksud terdiri atas :

- a. Capaian Kinerja Makro
- b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan
- c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024 masih sebatas penugasan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 belum ada tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada desa.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi program dan kegiatan di bidang : kerjasama daerah, koordinasi, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban selama Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyampaian LPPD ini juga dimuat target dan realisasi anggaran baik dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun untuk menjadi pemahaman bersama bahwa LPPD bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Angka-angka yang tercantum dalam laporan khususnya dalam realisasi anggaran ini merupakan laporan keuangan sementara dari masing-masing OPD untuk kebutuhan data dalam LPPD. Sedangkan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan disusun terpisah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan antara angka realisasi keuangan di dalam LPPD ini dengan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang nantinya juga akan disampaikan kepada DPRD.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

a. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Daerah.

Kabupaten Dairi terletak di bagian barat daya Kota Medan, dengan luas 1.927,80 Km (192.780 Hektar) atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang secara administrasi terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan. Secara Astronomi terbentang antara 98° 00 - 98° 38" Bujur Timur (BT) dan 2° 15 - 3° 10" Lintang Utara (LU), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi NAD) dan Kabupaten Karo (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir (Provinsi Sumatera Utara);
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara);

- Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi NAD).

Tabel

Luas Wilayah Kabupaten Dairi Per-Kecamatan Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Sidikalang	5	6	70,67
2	Sitinjo	1	3	40,85
3	Berampu	0	5	53,15
4	Parbuluan	0	11	235,40
5	Sumbul	1	18	192,58
6	Silahisabungan	0	5	75,62
7	Pegagan Hilir	0	13	88,35
8	Lae Parira	0	9	42,75
9	Silima Punga-punga	1	15	60,15
10	Siempat Nempu Hulu	0	12	93,93
11	Siempat Nempu	0	13	105,62
12	Siempat Nempu Hilir	0	10	197,00
13	Tigalingga	0	14	77,00
14	Gunung Sitember	0	8	155,33
15	Tanah Pinem	0	19	439,40
JUMLAH		8	161	1.927,80

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Dairi

b. Topografis dan Iklim.

Wilayah Kabupaten Dairi berada pada ketinggian yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah 400 meter dpl sampai pada ketinggian 1.700 meter dpl. Wilayah yang berada pada ketinggian 400 - 500 meter dpl terdapat di Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Silima Punga Punga, dan sebagian Kecamatan Siempatnempu Hilir. Wilayah yang berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl terdapat di Kecamatan Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kecamatan Berampu, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Tigalingga dan Kecamatan Tanah Pinem. Wilayah yang terletak pada ketinggian 1.000 – 1.500 meter dpl terdapat di sebagian Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sumbul, dan Kecamatan Sidikalang.

Kemiringan lahan bervariasi antara kemiringan lahan 0-2% seluas 6.247,94 HA (3,24%), kemiringan lahan antara 2–8% seluas 62.236,25 HA (32,28%), kemiringan lahan antara 8-15% seluas 31.786,63 HA (16,49%), kemiringan lahan antara 15-25% seluas

26.530,50 HA (13,76%), kemiringan lahan antara 25-40% seluas 30.356,88 HA (15,75%) dan kemiringan lahan di atas 40% adalah seluas 35.623,81 HA (18,48%).

Dengan kondisi topografi wilayah tersebut maka terdapat 3 jenis iklim di Kabupaten Dairi, yakni iklim tropis pada daerah dengan ketinggian kurang dari 500 meter dpl, iklim sub tropis pada daerah ketinggian antara 500-1.000 meter dpl, dan iklim dingin pada daerah ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Dairi sifatnya heterogen, meliputi Suku Batak (Pakpak, Toba, Karo, Simalungun, dan Mandailing), Nias, Minang, Jawa, Aceh, dan Tionghoa. Jumlah penduduk di Kabupaten Dairi pada Semester II tahun 2024 sebanyak 333.355 Jiwa.

Penyebaran penduduk pada masing-masing kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel
Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Per-Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Total	
1	Sidikalang	28.515	28.785	57.300	16.266
2	Sumbul	24.596	24.448	49.044	13.585
3	Tigalingga	12.636	13.107	25.743	8.042
4	Siempat Nempu	10.658	10.782	21.440	6.303
5	Silima Punga-Punga	7.762	8.041	15.803	4.850
6	Tanah Pinem	12.143	12.024	24.167	7.713
7	Siempat Nempu Hulu	10.855	10.826	21.681	6.340
8	Siempat Nempu Hilir	6.349	6.293	12.642	3.616
9	Pegagan Hilir	9.356	9.340	18.696	5.238
10	Parbuluan	14.200	14.181	28.381	7.359
11	Lae Parira	7.832	8.119	15.951	4.774
12	Gunung Sitember	5.683	5.604	11.287	3.462
13	Berampu	4.963	4.777	9.740	2.580
14	Silahi Sabungan	3.073	3.098	6.171	1.886
15	Sitinjo	7.676	7.613	15.289	4.154

TOTAL	166.297	167.038	333.335	96.168
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Sumber Data : DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Tabel

Struktur Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2024

Struktur Usia	Jumlah	Keterangan
75 ke atas	7.982	Usia 60 > 37.850 Jiwa
70-74	6.992	
65-69	10.328	
60-64	12.548	
55-59	15.017	
50-54	16.604	Usia 15-59 210.509 Jiwa
45-49	19.393	
40-44	22.297	
35-39	22.466	
30-34	22.738	
25-29	26.730	Usia <15 84.976 Jiwa
20-24	32.026	
15-19	33.238	
10-14	35.224	
5-9	30.330	
0-4	19.422	333.335 Jiwa
Jumlah	333.335 Jiwa	

Sumber Data: DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Apabila struktur penduduk tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni kelompok usia muda (<15), kelompok usia produktif (15-59), dan kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), maka jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok usia produktif (15-59) sebanyak 210.509 jiwa.

Tabel
Jumlah Penduduk Memiliki KTP Kabupaten Dairi
Per –Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk > 17 Tahun	Jumlah Kepemilikan KTP	%
1	Sidikalang	40.890	40.885	99,99%
2	Sumbul	33.839	33.839	100,00%
3	Tigalingga	18.594	18.591	99,98%
4	Siempat Nempu	15.287	15.286	99,99%
5	Silima Punga-Punga	11.031	11.031	100,00%
6	Tanah Pinem	17.173	17.173	100,00%
7	Siempat Nempu Hulu	15.414	15.411	99,98%
8	Siempat Nempu Hilir	8.777	8.777	100,00%
9	Pegagan Hilir	12.932	12.932	100,00%
10	Parbuluan	18.861	18.859	99,99%
11	Lae Parira	11.324	11.324	100,00%
12	Gunung Sitember	8.080	8.080	100,00%
13	Berampu	6.767	6.766	99,99%
14	Silahisabungan	4.393	4.393	100,00%
15	Sitinjo	10.415	10.413	99,98%
TOTAL		233.777	233.760	99,99%

Sumber Data: DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Tabel
Jumlah Penduduk Memiliki KIA Kabupaten Dairi
Per –Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk < 17 Tahun	Jumlah Kepemilikan KIA	%
1	Sidikalang	16.410	10.880	66,30%
2	Sumbul	15.205	8.495	55,87%
3	Tigalingga	7.149	4.363	61,03%
4	Siempat Nempu	6.153	4.549	73,93%
5	Silima Punga-Punga	4.772	3.477	72,86%
6	Tanah Pinem	6.994	3.263	46,65%
7	Siempat Nempu Hulu	6.267	4.104	65,49%

8	Siempat Nempu Hilir	3.865	2.606	67,43%
9	Pegagan Hilir	5.764	3.547	61,54%
10	Parbuluan	9.520	6.140	64,50%
11	Lae Parira	4.627	3.073	66,41%
12	Gunung Sitember	3.207	2.323	72,44%
13	Berampu	2.973	1.983	66,70%
14	Silahisabungan	1.778	1.208	67,94%
15	Sitinjo	4.874	3.117	63,95%
TOTAL		99.558	63.128	63,41%

Sumber Data : DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Tabel
Jumlah Perkawinan Tercatat Kabupaten Dairi
Per –Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Penduduk Berstatus Kawin	Penduduk Berakta Kawin	%
1	Sidikalang	22.902	11.812	51,58%
2	Sumbul	18.662	6.993	37,47%
3	Tigalingga	10.285	4.586	44,59%
4	Siempat Nempu	8.135	3.620	44,50%
5	Silima Punga-Punga	6.016	2.801	46,56%
6	Tanah Pinem	10.970	3.485	31,77%
7	Siempat Nempu Hulu	8.444	3.471	41,11%
8	Siempat Nempu Hilir	4.777	2.231	46,70%
9	Pegagan Hilir	7.376	2.438	33,05%
10	Parbuluan	10.555	5.101	48,33%
11	Lae Parira	6.128	2.604	42,49%
12	Gunung Sitember	4.564	1.815	39,77%
13	Berampu	3.789	1.891	49,91%
14	Silahisabungan	2.517	1.317	52,32%
15	Sitinjo	6.066	2.976	49,06%
TOTAL		131.186	57.141	43,56%

Sumber Data : DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Tabel
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Dairi
Per –Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Penduduk usia 0-18 tahun	Penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%
1	Sidikalang	16.912	16.853	99,65%
2	Sumbul	15.994	15.812	98,86%
3	Tigalingga	7.471	7.406	99,13%
4	Siempat Nempu	6.505	6.475	99,54%
5	Silima Punga-Punga	4.989	4.971	99,64%
6	Tanah Pinem	7.231	7.168	99,13%
7	Siempat Nempu Hulu	6.566	6.520	99,3%
8	Siempat Nempu Hilir	4.034	4.008	99,36%
9	Pegagan Hilir	6.021	5.972	99,19%
10	Parbuluan	9.884	9.738	98,52%
11	Lae Parira	4.910	4.865	99,08%
12	Gunung Sitember	3.374	3.361	99,61%
13	Berampu	3.017	3.011	99,8%
14	Silahisabungan	1.865	1.841	98,71%
15	Sitinjo	5.038	5.006	99,36%
TOTAL		103.811	103.007	99,23%

Sumber Data : DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

Tabel
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Dairi
Per –Kecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Penduduk usia 0-17 tahun	Penduduk usia 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	%
1	Sidikalang	17.401	17.326	99,57
2	Sumbul	16.098	15.930	98,96
3	Tigalingga	7.582	7.527	99,27
4	Siempat Nempu	6.514	6.479	99,46
5	Silima Punga-Punga	5.051	5.024	99,47

6	Tanah Pinem	7.247	7.184	99,13
7	Siempat Nempu Hulu	6.658	6.620	99,43
8	Siempat Nempu Hilir	4.074	4.050	99,41
9	Pegagan Hilir	6.084	6.036	99,21
10	Parbuluan	10.026	9.876	98,50
11	Lae Parira	4.933	4.892	99,17
12	Gunung Sitember	3.378	3.369	99,73
13	Berampu	3.126	3.120	99,81
14	Silahisabungan	1.888	1.860	98,52
15	Sitinjo	5.129	5.107	99,57
TOTAL		105.189	104.400	99,25

Sumber Data : DKB dari Kemendagri Semester II Tahun 2024 (keadaan 31 Desember 2024)

D. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Sejalan dengan Pembentukan Perangkat Daerah dimaksud, total perangkat daerah kondisi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berjumlah 40 perangkat daerah dan 2 Badan Usaha Milik Daerah. Kondisi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perangkat Daerah dan BUMD Kabupaten Dairi Tahun

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	SEKRETARIAT DAERAH	Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019
2	SEKRETARIAT DPRD	
3	INSPEKTORAT	
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH	

5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <i>UPT. Pemadam Kebakaran</i>
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH
9	DINAS PERHUBUNGAN
10	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN <i>UPT. Pusat Kesehatan Hewan</i>
	<i>UPT. Pembibitan dan Perbenihan Sidikalang</i>
	<i>UPT. Pembibitan dan Perbenihan Gunung Sayang</i>
	<i>UPT. Balai Benih Ikan Silancang</i>
	<i>UPT. Balai Benih Ikan Lae Parira</i>
12	DINAS KEPENDUDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
13	DINAS SOSIAL
14	DINAS KESEHATAN <i>UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi</i>
	<i>UPT. Puskesmas (18 Puskesmas)</i>
	<i>UPT. Gudang Farmasi</i>
	<i>UPT. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119</i>
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	DINAS PENDIDIKAN <i>UPT. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</i>
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (SD)</i>
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (SMP)</i>
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (TK)</i>
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN <i>UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)</i>
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG <i>UPT. Peralatan</i>
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA <i>UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH <i>UPT. Metrologi Legal</i>
	<i>UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu</i>
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
26	KANTOR KECAMATAN SIDIKALANG	
27	KANTOR KECAMATAN SITINJO	
28	KANTOR KECAMATAN BERAMPU	
29	KANTOR KECAMATAN PARBULUAN	
30	KANTOR KECAMATAN SUMBUL	
31	KANTOR KECAMATAN SILAHISABUNGAN	
32	KANTOR KECAMATAN PEGAGAN HILIR	
33	KANTOR KECAMATAN TIGALINGGA	
34	KANTOR KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	
35	KANTOR KECAMATAN TANAH PINEM	
36	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU	
37	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU HULU	
38	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR	
39	KANTOR KECAMATAN LAE PARIRA	
40	KANTOR KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	
41	KANTOR KELURAHAN SIDIKALANG	
42	KANTOR KELURAHAN BATANG BERUH	
43	KANTOR KELURAHAN KUTA GAMBIR	
44	KANTOR KELURAHAN BINTANG HULU	
45	KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT	
46	KANTOR KELURAHAN PEGAGAN JULU I	
47	KANTOR KELURAHAN PARONGIL	
48	KANTOR KELURAHAN PANJI DABUTAR	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Dairi 2024

E. Rincian Aparatur Sipil Negara

Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2024 adalah sejumlah 4.139 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Rincian Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	23	53	94
2.	SEKRETARIAT DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	8	13	26
3.	INSPEKTORAT	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	22	7	36
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	14	9	29
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	3	12	21
6.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	6	14	35
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Trantibumlinmas	13	0	10	22
	<i>UPT. Pemadam Kebakaran</i>		1	0	0	1
8.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	10	7	23
9.	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Perhubungan	11	2	16	29
10.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Urusan Kebudayaan Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Pilihan Pariwisata	6	10	23	39
11.	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Urusan Pangan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	10	59	15	84

	<i>UPT. Pusat Kesehatan Hewan</i>	Urusan Pilihan Pertanian	2	0	0	2
	<i>UPT. Pembibitan dan Perbenihan Sidikalang</i>		2	0	0	2
	<i>UPT. Pembibitan dan Perbenihan Gunung Sayang</i>		2	0	0	2
	<i>UPT. Balai Benih Ikan Silancang</i>		0	0	1	1
	<i>UPT. Balai Benih Ikan Lae Parira</i>		2	0	1	3
12.	DINAS KEPENDUDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	9	23	37
13.	DINAS SOSIAL	Urusan Sosial	5	8	4	17
14.	DINAS KESEHATAN	Urusan Kesehatan	10	14	17	41
	<i>UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi</i>		13	157	13	183
	<i>UPT. Puskesmas (18 Puskesmas)</i>		0	620	0	620
	<i>UPT. Gudang Farmasi</i>		2	4	2	8
	<i>UPT. Pusat Layanan Keselamatan Kesehatan Terpadu 119</i>		2	0	0	2
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Urusan Lingkungan Hidup	7	4	12	23
16.	DINAS PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan	9	24	16	49
	<i>UPT. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</i>		0	4	0	4
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (SD)</i>		0	1220	0	1220
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (SMP)</i>		0	764	0	764
	<i>UPT. Dinas Pendidikan (TK)</i>		0	9	0	9
17.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	Urusan Penanaman Modal Urusan Ketenagakerjaan	7	14	4	25
	<i>UPT. Balai Latihan Kerja (BLK)</i>		2	0	1	3

18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Persandian Urusan Statistik	8	4	6	18
19.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Urusan Pekerjaan Umum Urusan Perumahan Rakyat	12	12	41	65
	<i>UPT. Peralatan</i>		2	0	7	9
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	11	6	25
	<i>UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak</i>		2	0	0	2
21.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	10	4	22
	<i>UPT. Metrologi Legal</i>	Urusan Pilihan Perindustrian	3	0	0	3
	<i>UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu</i>	Urusan Pilihan Perdagangan	2	0	0	2
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Urusan Perpustakaan Urusan Kearsipan	5	6	7	18
23.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7	7	21
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Trantibumlinmas	12	0	15	27
25.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	6	1	11
26.	KANTOR KECAMATAN SIDIKALANG	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	0	2	11
	KANTOR KELURAHAN SIDIKALANG		6	0	2	8
	KANTOR KELURAHAN BATANG BERUH		6	0	0	6
	KANTOR KELURAHAN KUTA GAMBIR		6	0	3	9
	KANTOR KELURAHAN BINTANG HULU		6	0	0	6
	KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT		5	0	0	5

27.	KANTOR KECAMATAN SITINJO	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	0	5	12
	KANTOR KELURAHAN PANJI DABUTAR		5	0	2	7
28.	KANTOR KECAMATAN BERAMPU	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	0	2	9
29.	KANTOR KECAMATAN PARBULUAN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	0	4	13
30.	KANTOR KECAMATAN SUMBUL	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	7	15
	KANTOR KELURAHAN PEGAGAN JULU I		4	0	1	5
31.	KANTOR KECAMATAN SILAHISABUNGAN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	0	4	7
32.	KANTOR KECAMATAN PEGAGAN HILIR	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	0	5	10
33.	KANTOR KECAMATAN TIGALINGGA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	3	11
34.	KANTOR KECAMATAN GUNUNG SITEMBER	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	3	11
35.	KANTOR KECAMATAN TANAH PINEM	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	4	12
36.	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	0	5	15
37.	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU HULU	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	0	4	13
38.	KANTOR KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	0	6	10
39.	KANTOR KECAMATAN LAE PARIRA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	0	3	13
40.	KANTOR KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9	0	6	15

	KANTOR KELURAHAN PARONGIL		4	0	0	4
	Total		402	3064	438	3904
		<i>Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Dairi Tahun 2024</i>				

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **1.260.206.860.974,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. Rp. **1.195.824.688.264,57** atau sebesar **94,89 %** dari target. Realisasi Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.379.074.374,00	100.411.235.107,57	102,07
4.1.01	Pajak Daerah	29.848.000.000,00	21.620.031.867,80	72,43
4.1.01.06	Pajak Hotel	445.000.000,00	437.636.086,00	98,35
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.253.000.000,00	2.932.602.099,80	90,15
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.000.000,00	7.580.000,00	75,80
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	741.912.054,00	123,65
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000,00	7.075.097.847,00	101,07
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	43.670.776,00	109,18
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	4.223.194.795,00	76,79
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000,00	2.819.271.096,00	35,24
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	3.339.067.114,00	66,78
4.1.02	Retribusi Daerah	52.506.397.374,00	60.628.636.118,00	115,47
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	50.185.397.374,00	58.950.915.993,00	117,47
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.821.000.000,00	1.146.462.375,00	62,96
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	531.257.750,00	106,25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.964.954.000,00	11.964.954.686,50	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.059.723.000,00	6.197.612.435,27	152,66
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	49.604.500,00	66,14
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.429.794.490,00	142,98
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	29.561.000,00	29.561.430,00	100,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	42.219.200,00	84,44

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	875.694.000,00	1.896.574.441,18	216,58
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	179.550.000,00	135.100.626,00	75,24
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.849.918.000,00	2.614.757.748,09	141,34
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.379.074.374,00	100.411.235.107,57	102,07
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.148.501.149.600,00	1.083.304.010.242,00	94,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.894.235.000,00	1.045.825.056.797,00	97,21
4.2.01.01	Dana Perimbangan	924.166.251.000,00	894.097.072.797,00	96,75
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	924.166.251.000,00	894.097.072.797,00	96,75
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	136.561.076.000,00	136.561.076.000,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	151.727.984.000,00	151.727.984.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.606.914.600,00	37.478.953.445,00	51,62
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	70.821.914.600,00	37.478.953.445,00	52,92
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.785.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	72.606.914.600,00	37.478.953.445,00	51,62
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.148.501.149.600,00	1.083.304.010.242,00	94,32
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.326.637.000,00	12.109.442.915,00	90,87
	JUMLAH PENDAPATAN	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89

Sumber data : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2024 Unaudit)

Realisasi belanja menurut jenis belanja;

Target belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **1.352.146.553.377,00** dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.248.759.410.799,08** atau sebesar **92,35 %** dari target. Target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat diterangkan pada tabel berikut :

Tabel
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35
5.1	BELANJA OPERASI	998.719.782.947,00	909.963.663.123,20	91,11
5.1.01	Belanja Pegawai	566.654.562.335,00	526.617.182.736,00	92,93
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	409.024.027.472,00	375.106.245.134,00	91,71
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.692.143.975,00	52.399.695.504,00	95,81
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.233.892.438,00	83.499.329.300,00	96,83
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.585.018.056,00	14.788.405.960,00	94,89
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	331.095.474,00	168.221.713,00	50,81
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	401.693.333,00	78,63
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	277.504.920,00	253.591.792,00	91,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.664.651.612,00	338.089.506.105,20	87,66
5.1.02.01	Belanja Barang	80.370.967.624,00	65.257.571.436,00	81,20
5.1.02.02	Belanja Jasa	119.058.404.281,00	105.022.074.325,00	88,21
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.772.579.200,00	10.450.318.889,00	88,77
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.585.165.013,00	52.838.948.103,00	87,21
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.819.852.520,00	4.502.154.735,00	93,41
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.216.290.284,00	49.155.549.251,20	99,88
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.841.392.690,00	50.862.889.366,00	85,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.400.569.000,00	45.256.974.282,00	97,54
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	36.615.353.000,00	35.926.175.000,00	98,12
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.943.970.000,00	4.489.553.282,00	90,81

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	845.246.000,00	845.246.000,00	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	998.719.782.947,00	909.963.663.123,20	91,11
5.2	BELANJA MODAL	144.429.549.430,00	130.216.588.940,88	90,16
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.008.291.934,00	17.448.098.019,00	87,20
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79.000.000,00	67.678.000,00	85,67
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.376.903.000,00	2.363.664.000,00	99,44
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.418.919.100,00	1.361.456.260,00	56,28
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	109.945.800,00	105.435.800,00	95,90
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.236.255.000,00	3.186.370.000,00	98,46
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	170.775.000,00	170.750.000,00	99,99
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.410.553.369,00	2.168.240.000,00	89,95
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	130.566.000,00	36.691.000,00	28,10
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	65.439.200,00	49.993.000,00	76,40
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.002.685.465,00	3.002.104.099,00	99,98
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.000.000.000,00	4.928.465.860,00	82,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.766.834.341,00	22.220.323.063,00	72,22
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.535.715.041,00	20.673.144.013,00	72,45
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.231.119.300,00	647.113.000,00	52,56
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00	900.066.050,00	90,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.768.317.735,00	82.813.149.768,88	96,55
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.400.228.668,00	71.040.302.789,00	96,78
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.368.089.067,00	9.887.012.979,88	95,36

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.000.000.000,00	1.885.834.000,00	94,29
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.884.105.420,00	7.733.870.580,00	98,09
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	65.600.000,00	65.400.000,00	99,70
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	150.000.000,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.668.505.420,00	7.668.470.580,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	1.147.510,00	57,38
	JUMLAH BELANJA MODAL	144.429.549.430,00	130.216.588.940,88	90,81
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55
5.4	BELANJA TRANSFER	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00	100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	100,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	202.827.221.000,00	202.827.221.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35
	SURPLUS/DEFISIT	(91.939.692.403,00)	(52.934.722.534,51)	57,58

Sumber data : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2024 Unaudit)

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan *netto* yang merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Target dan realisasi Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
6	PEMBIAYAAN DAERAH	91.939.692.403,00	91.939.692.402,65	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.423.192.167,00	94.964.692.402,65	124,26
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	18.541.500.236,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	91.939.692.403,00	91.939.692.402,65	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	39.004.969.868,14	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi (Data 2024 Unaudit)

G. PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.977.397.374	58.477.973.993,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	49.327.397.374	58.065.613.993,00

3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	650.000.000	412.360.000,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.514.000.000	2.141.662.125,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	140.000.000	30.695.375,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.000.000.000	689.007.000,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	500.000.000	531.257.750,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	607.000.000	631.202.000,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	267.000.000	259.500.000,00
10	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	15.000.000	9.000.000,00
11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.207.700.463.600	1.135.196.052.146,57
12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	822.622.915.730	754.214.887.238,08
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	434.606.547.381	400.852.075.192,20
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	244.559.239.292	216.955.358.696,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.253.133.100	110.815.011.184,88
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.662.864.450	5.601.614.800,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.258.446.527	15.168.912.276,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.282.684.980	4.821.915.089,00
19	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	89.173.333.158	77.539.627.279,00
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	428.937.000	203.716.000,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.916.691.623	3.680.462.720,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15.616.216.096	14.703.752.241,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	114.170.000	113.920.000,00

24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.710.623.587	10.480.390.051,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.481.782.063	6.150.712.465,00
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.861.543.761	6.469.658.513,00
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.402.423.870	4.910.910.150,00
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.399.944.974	4.217.932.053,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.781.001.365	8.380.082.675,00
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.927.372.559	1.300.215.628,00
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.041.241.839	4.793.294.261,00
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8.244.469.889	7.645.551.219,00
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	44.484.000	44.280.000,00
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	49.450.520	40.398.473,00
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.681.998.700	1.277.241.300,00
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.370.981.312	3.029.693.088,00
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.000.000	97.416.442,00
38	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.836.696.967	21.003.482.343,00
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	567.438.900	78.512.400,00
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.835.280.134	7.941.109.018,00
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.670.940.954	6.958.493.720,00
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	590.288.108	496.033.277,00
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.172.748.871	5.529.333.928,00
44	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.818.699.098	79.685.880.791,00
45	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	237.371.483.932	233.568.636.006,00
46	UNSUR PENGAWASAN URUSAN	9.108.060.239	8.470.302.202,00

	PEMERINTAHAN		
--	--------------	--	--

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (das sein) dengan kenyataan/realitas (das sollen). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Dairi dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah tersebut diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan ini didasarkan pada telaah bab II tentang gambaran umum daerah. Adapun masalah pokok Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1.1.1 Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, maka pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Saat ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat akses pendidikan maupun pemerataan tenaga pendidik.

Dari sisi akses pendidikan, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2020, APK jenjang pendidikan SMP Kabupaten Dairi mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,53 persen, sementara APK jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan terutama jenjang pendidikan SMP masih belum optimal. Hal yang sama juga terjadi di indikator harapan lama sekolah yang masih belum optimal juga. Dari tahun 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah Kabupaten Dairi masih lebih kecil dibandingkan harapan lama sekolah Provinsi Sumatra Utara. Meskipun demikian, harapan lama sekolah Kabupaten Dairi mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Permasalahan pendidikan lain juga berkaitan dengan belum meratanya tenaga pendidik, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan pendistribusian tenaga pendidikan. Pada tahun 2020, persentase guru SD yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan hanya sebesar 64,98 persen, sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan hanya sebesar 87 persen. Selain tenaga pendidik, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh sekolah. Kondisi tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1.1.2 Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, selain sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan strategis di sektor kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2020, AKI mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus dari tahun sebelumnya hanya 74 kasus;
- b) Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2020, AKB sebanyak 6 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya;
- c) Masih tingginya kasus gizi buruk. Pada tahun 2020, jumlah balita gizi buruk sebanyak 111 balita, sementara pada tahun 2019 hanya 7 balita;
- d) Belum optimalnya angka harapan hidup Kabupaten Dairi. Dari tahun 2016 hingga 2020, angka harapan hidup Kabupaten Dairi masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara.

1.1.3 Tingginya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi meningkat sebesar 0,34 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi salah satunya dipengaruhi oleh Covid-19.

Selain persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

1.1.4 Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Namun, seiring dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan tata ruang wilayah, penataan jaringan infrastruktur belum dapat diwujudkan secara baik. Kondisi infrastruktur yang belum berkualitas ini ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kondisi jalan mantap yang belum memadai. Pada tahun 2020, kondisi jalan mantap tidak mencapai target, yaitu hanya 56,51 persen dari target 56,75 persen. Selain ketercapaian target, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa masih ada jalan kabupaten dalam kondisi rusak maupun sedang.
- b. Masih terdapatnya kondisi jembatan yang rusak, dimana sampai tahun 2020 kondisi jembatan dalam kondisi baik masih sebesar 90,12 persen dari target 91,21 persen;
- c. Belum optimalnya layanan air bersih. Pada tahun 2020, cakupan layanan air bersih telah menjangkau 221.134 jiwa dari total penduduk sebanyak 284.304 jiwa. Dengan kata lain, ketersediaan akses air bersih baru mencapai 77,78 persen;

- d. Tingkat kerusakan jaringan irigasi masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar jaringan irigasi berada pada punggung perbukitan. Meskipun demikian, irigasi dalam kondisi baik sudah mencapai 91,31 persen pada tahun 2020;
- e. Masih terdapatnya kawasan kumuh. Pada tahun 2020, capaian realisasi penanganan kawasan kumuh sebesar 29,56 persen dari target 58,42 persen atau capaiannya hanya 50,60 persen.

1.1.5 Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Belum optimalnya pelayanan publik dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM Kabupaten Dairi mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu sebesar 5,71 persen. Selain itu, selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai IKM paling tinggi berada pada tahun 2018, sedangkan nilai IKM paling rendah berada pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum berjalan optimal.

Kondisi riil IKM dapat dilihat di beberapa sektor publik yang langsung menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti sektor kependudukan dan sektor penanaman modal yang masih belum optimal. Di sektor kependudukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, misalnya realisasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) hanya 96 persen. Sementara dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah masih rendahnya penerbitan perizinan sesuai dengan SOP, yaitu masih terdapat sekitar 14,72 persen ijin penanaman modal yang belum dapat diterbitkan sesuai dengan SOP.

1.1.6 Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Pada tahun 2020, lahan kritis Kabupaten Dairi, seluas 12,41 Ha, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 10 Ha.

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah volume sampah yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Kabupaten Dairi juga berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Tabel Permasalahan Pokok Pembangunan di Kabupaten Dairi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum optimalnya Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Minimnya sarana penunjang kegiatan pengajaran
		Ketersediaan ruang kelas yang perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya partisipasi pendidikan PAUD

	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik	Belum optimalnya pemberian bantuan/ apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu
		Minimnya ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan
		Banyaknya guru yang belum tersertifikasi
		Banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan (S1/D4)
		Belum meratanya distribusi guru hingga ke pedalaman
	Belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar	Belum optimalnya penerapan kurikulum 2013
		Minimnya penguasaan terhadap teknologi Pendidikan
		Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi A
		Belum optimalnya pendidikan Kesetaraan (termasuk pengentasan buta huruf)
		Tingginya komplikasi saat kehamilan
		Tingginya komplikasi saat persalinan
		Tingginya komplikasi pasca persalinan/Nifas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kesehatan		
Rendahnya kualitas Kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Tingginya komplikasi saat kehamilan
		Tingginya komplikasi saat persalinan
		Tingginya komplikasi pasca persalinan/Nifas
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Rendahnya kunjungan K1 dan K4
		Kurangnya nutrisi saat kehamilan
		Tingginya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
		Tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Tingginya angka bayi gizi buruk
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
		Tingginya angka balita gizi buruk
		Tingginya angka stunting
		Tingginya angka kesakitan balita
	Rendahnya kualitas Kesehatan masyarakat	Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap
		Minimnya pengetahuan tentang PHBS
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular
		Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular
		Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	Rendahnya status gizi masyarakat
		Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan
		Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan

	Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Kurang meratanya distribusi prasarana kesehatan Kurangnya pemeliharaan prasarana pelayanan kesehatan Kurang meratanya distribusi sarana pelayanan kesehatan Kurangnya pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan Belum optimalnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Kemiskinan		
Masih tingginya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka pengangguran	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
		Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja
		Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja
		Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan
	Penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai	Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial
		Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (tergantung)
	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan	Tidak meratanya akses pendidikan dan distribusi guru
		Kurangnya ekonomi keluarga peserta didik
	Terbatasnya akses kesehatan	Pelayanan tenaga medis Sarana dan Prasarana kesehatan
Infrastruktur Wilayah		
Belum optimalnya akses dan kualitas jaringan jalan	Akses jalur darat belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan jalur strategis kabupaten yang menghubungkan pusat pertumbuhan
		Belum optimalnya pemerataan kualitas jaringan jalan
		Ketersediaan jembatan belum optimal
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun	Perlu ditingkatkannya pengawasan dan kualitas konstruksi jalan dan jembatan
		Masih belum maksimalnya rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten
Belum optimalnya akses terhadap air bersih	Belum optimalnya pemanfaatan air bersih	Inventarisasi sumber air bersih yang layak
		Belum optimalnya jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
		Masih rendahnya kapasitas pengelola

		(masyarakat)
Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum maksimal
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum memadai
		Ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan belum memadai
		Perlu ditingkatkannya kualitas rumah tidak layak/ rusak
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
	Belum optimalnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan
Pelayanan Publik		
Belum optimalnya kualitas Pelayanan publik	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan masih terbatas
		Perlu ditingkatkannya optimalisasi pelayanan adminduk sampai tingkat desa
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan data potensi investasi daerah
Lingkungan Hidup		
Masih rendahnya kualitas Lingkungan hidup daerah	Masih rendahnya cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	Perencanaan lingkungan hidup yang sesuai regulasi belum optimal
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengawasan sumber-sumber pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
		Belum optimalnya penanganan lahan kritis
		Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum optimal
	Belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan limbah B3	Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil Limbah B3 masih rendah
	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
		Belum adanya pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat belum optimal

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan capaian kinerja. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan realisasi kinerja 2019 dan 2020 RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pelayanan Dasar				
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
Melampaui (>)				
Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan			
1.1	Angka Partisipatif Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	>	a. Belum optimalnya akses dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan b. Belum meratanya kualitas tenaga pendidik c. Belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar	a. Sarana penunjang kegiatan pengajaran; b. Ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan c. Kualifikasi Pendidikan guru (S1/D4) d. Pemerataan distribusi guru hingga ke pedalama
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	>		
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	<		
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	<		
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	<		
1.6	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	>		
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
1.7	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	>		e. Optimalisasi penerapan kurikulum 2013
1.8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	>		
1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI	>		
1.10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	>		
1.11	Angka Kelulusan SD/MI	=		
1.12	Angka Kelulusan SMP/MTs	=		
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi	<	a. Rendahnya kualitas kesehatan ibu; b. Rendahnya kualitas kesehatan bayi; c. Rendahnya kualitas kesehatan Balita; d. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat; e. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan; f. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	a. Manajemen resiko komplikasi kehamilan; b. Manajemen resiko komplikasi persalinan; c. Manajemen resiko komplikasi pasca persalinan/Nifas; d. Optimalisasi kunjungan K1 dan K4; e. Optimalisasi nutrisi saat kehamilan; f. Optimalisasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); g. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS;
2.2	Angka Kematian Ibu	>		
2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	<		
2.4	Usia Harapan Hidup	>		
2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	>		
2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	>		

	Standar				h. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; i. Peningkatan status gizi masyarakat; j. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan; k. Optimalisasi kompetensi tenaga kesehatan;
2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<			
2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<			
2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	<			
2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	<			
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	
		Tercapai (=)			
		Melampaui (>)			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	>	a. Belum optimalnya pemerataan kualitas jaringan jalan; b. Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum; c. Belum optimalnya pengawasan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung; d. Belum optimalnya penanganan daerah irigasi (DI); e. Semakin tingginya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan. f. Perlunya pengembangan data base jalan/jembatan infrastruktur dasar.	a. Pengelolaan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan jalan; b. Pengawasan mutu pelaksanaan pembangunan.	
3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	>			
3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	>			
3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	=			
3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	>			
3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	>			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	>	a. Perlu ditingkatkannya kualitas rumah tidak layak/ rusak b. Ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan belum memadai; c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi	a. Dukungan/Fasilitas Pemerintah dalam menjalankan kewenangan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); b. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan	
4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	>			
4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan	>			

	Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan korban bencana belum maksimal; d. Belum optimalnya pengendalian dan	Utilitas (PSU) permukiman; c. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
			pengawasan kawasan kumuh; e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehat perumahan.	serta perencanaan PSU.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	=	a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda b. Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol-PP	a. Peningkatan penegakan Perda b. Peningkatan kerjasama antar lembaga
6	Sosial			
6.1	Tingkat Kemiskinan		a. Rendahnya pendapatan PPKS; b. Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial	a. Optimalisasi pendampingan kelompok rentan; b. Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/ pengembangan kewirausahaan; c. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial; d. Ketersediaan pekerja social yang kompeten
6.2	PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			
6.3	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial			
6.4	Presentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat			
6.5	Terbentuknya desa tangguh bencana			
6.6	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana			
6.7	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana			
Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	=	a. Rendahnya penyebaran informasi lowongan kerja; b. Belum optimalnya kompetensi Angkatan kerja c. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasaranan pelatihan	a. Peningkatan penyebaran inforams lowongan kerja b. Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai pasar kerja c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
1.2	Besaran pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat/ teknologi tepat guna/kewirausahaan			
1.3	Angka sengketa			

	pengusaha pekerja pertahun		kerja	
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<		
1.5	Tingkat pengangguran terbuka	<		
1.6	Jumlah angkatan kerja	<		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan		a. Masih rendahnya kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi; b. Peran perempuan dalam organisasi publik belum optimal; c. Belum optimalnya pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	a. Optimalisasi Peran lembaga pengarusutamaan gender; b. Optimalisasi Peran organisasi perempuan dalam peningkatan partisipasi publik; c. Kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak; d. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; e. Ketersediaan fasilitas penanganan dan pendampingan
2.2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapat Pelayanan Komprehensif			
3	Pangan			
3.1	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100)	<	a. Belum optimalnya diversifikasi pangan b. Belum optimalnya data PPH c. Belum optimalnya ketersediaan pangan d. Belum optimlanya distribusi pangan	a. Peningkatan diversifikasipangan b. penguatan data PPH c. peningkatan akses pangan
3.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	>		
3.3	Persentasen Konsumsi Protein Per kapita	>		
4	Pertanahan			
4.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	<	a. Kurangnya fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah; b. Kurangnya koordinasi penggunaan tanah dan	a. Sistem yang terintegrasi terkait kebutuhan pertanahan dengan rencana pemanfaatan ruang.
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
			pencatatan asset tanah untuk pembangunan.	
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Jumlah Volume Sampah Yang	=	a. Masih rendahnya	a. Penanaman bibit

	Ditangani		peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.	tanaman teduh dan tanaman hias di perkotaan.
5.2	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah di Kecamatan	>		b. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai basis penentuan kebijakan lingkungan hidup.
5.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	>	b. Berkurangnya sumber-sumber air. c. Adanya lahan kritis. d. Masih rendahnya cakupan pengendalian pencemaran udara.	c. Peningkatan pengendalian lingkungan hidup.
5.4	Penurunan Luas Lahan Kritis	<	e. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase wilayah perkotaan f. Minimnya pemahaman aparaturnya tentang mekanisme kerja di bidang kebersihan dan pasar. g. Belum optimalnya cakupan pelayanan Rasio Ketersediaan Petugas Kebersihan. h. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah i. Masih kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu 3R.	d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	>	a. Masih rendahnya kesadaran	a. Peningkatan pelayanan kependudukan
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan b. Belum optimalnya cakupan pelayanan dokumen pencatatan sipil	b. Optimalisasi pelayanan administrasi sampai tingkat desa
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Peningkatan klasifikasi desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya	<	a. Belum optimalnya kapasitas aparaturnya pemerintah desa	a. Optimalisasi pengelolaan potensi desa
7.2	Terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	<	b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	b. Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa c. Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

			d. Belum optimalnya pengelolaan asset desa	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	>	a. Belum optimalnya akses pelayanan dan kualitas Keluarga	a. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung program Keluarga Berencana;
	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmeet need)	<		b. Optimalisasi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi tepat sasaran;
				c. Kapasitas dan ketersediaan SDM Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
				d. Pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
				e. Optimalisasi mitra kerja keluarga berencana
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
9	Perhubungan			
	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	=	a. Masih banyaknya ruas jalan yang belum mempunyai trayek; b. Terminal belum berfungsi secara optimal; c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas; d. Manajemen Lalu Lintas yang belum optimal. e. Masih rendahnya fasilitas kelengkapan jalan; f. Belum optimalnya pemanfaatan dermaga pelabuhan Silalahi.	a. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata; b. Pengontrolan system pelayanan angkutan umum dan barang; c. Pembangunan sarana dan prasarana; d. Optimalisasi kawasan terminal penumpang.
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	=	a. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi b. Belum optimalnya pembinaan KIM	a. Penyusunan master plan system pemerintahan berbasis elektronik b. Optimalisasi tata kelola TIK c. Pembuatan data center

			c. Belum optimalnya SDM pengelola informasi publik	yang terintegrasi
11	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah			
11.1	Jumlah Koperasi Aktif	<	a. Masih rendahnya keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi dengan usaha lainnya.	a. Akses Permodalan UMKM
11.2	Jumlah Usaha Mikro	<	b. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi. c. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya.	b. Peningkatan kapasitas Sosial Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan c. Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM d. Peningkatan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha.
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
			d. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). e. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat. f. Masih rendahnya daya saing produk UMKM. g. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan), baik backward linkages maupun forward linkages.	
12	Penanaman Modal			
12.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	>	a. Belum terjaminnya jaringan internet dalam pengoperasian aplikasi perizinan secara elektronik terintegrasi (OSS). b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal. c. Masih rendahnya cakupan pelayanan informasi peluang investasi. d. Belum optimalnya	a. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif.
12.2	Persentase peningkatan investasi	=		b. Regulasi yang berpihak pada investor.
12.3	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	=		c. Peningkatan dan pembenahan infrastruktur terkait dengan penanaman modal. d. Tersedianya data dan informasi investasi secara elektronik yang lengkap dan mudah

			daya serap tenaga kerja dari realisasi penanaman modal.	diakses.
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Terfasilitasinya pelayanan kepemudaan	<	a. Rendahnya pembinaan dan	a. Partisipasi dalam kompetisi daerah;
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
13.2	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	=	Pemasyarakatan olahraga;	c. Ketersediaan sarana dan pra sarana pelatihan;
13.3	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	=	b. Kurangnya pembinaan organisasi pemuda	d. Kerjasama dengan mitra pembangunan;
14	Statistik			
14.1	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	<	a. Belum optimalnya SDM statistic b. Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral	a. Optimalisasi kualitas data statistik daerah dan sektoral
15	Persandian			
			Belum optimalnya SDM persandian	Ketersediaan sarana dan prasarana serta pelatihan
16	Kebudayaan			
16.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	=	a. Rendahnya komitmen masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan	a. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya; b. Optimalisasi identifikasi sumber sumber budaya; c. Promosi kebudayaan
16.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	<		
16.3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	=		
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		a. Terbatasnya jangkauan dan kualitas pelayanan perpustakaan	a. Kapasitas SDM pengelola perpustakaan; b. Variasi koleksi buku; c. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan
18	Kearsipan			
18.1	Jumlah Arsip Yang Dilestarikan		a. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola arsip daerah b. Belum optimalnya sarana dan prasarana arsip daerah c. Belum optimalnya penggunaan system informasi dalam pengelolaan arsip daerah berbasis digital	a. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah b. Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan
No	Bidang Urusan dan Indikator	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu

	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum tercapai (<)		Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
Urusan Pilihan				
1	Perikanan dan Kelautan			
1.1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		a. Adanya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pelarangan keramba jaring apung b. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan perikanan c. Masih tingginya harga pakan dan bibit d. Pengelolaan ikan (darat) masih secara tradisional	a. Peningkatan pemberdayaan kelompok nelayan b. Peningkatan fasilitasi dan bantuan pakan dan bibit perikanan c. Peningkatan pengelolaan perikanan secara modern
	- Ikan Gabus	>		
	- Ikan Mujair	>		
	- Ikan Nila	>		
	- Ikan Bilih	>		
	- Ikan Mas	>		
	- Ikan Lainnya	>		
1.2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			
	- Ikan Nila	>		
	- Ikan Mas	<		
	- Ikan Lele	>		
2	Perindustrian			
2.1	Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis	<	a. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM. b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk berkualitas. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/ perusahaan. d. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/ perusahaan.	a. Regulasi terkait industri agribisnis. b. Riset dan inovasi terkait industry agribisnis c. Tersedianya bahan baku untuk memperlancar proses produksi.
2.2	Jumlah Produk IKM bidang agribisnis Yang Terasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi	<		
3	Pariwisata			
3.1	Jumlah Objek Wisata Yang berkembang Yang Ditangani	<	a. Belum memadainya infrastruktur di obyek wisata yang sudah ada. b. Minimnya event pariwisata. c. Masih terdapat obyek wisata yang belum dikelola.	a. Penataan obyek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung b. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah pusat. c. Peningkatan
3.2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	<		
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			Minimnya usaha di bidang pariwisata.	d. keamanan dan kenyamanan di sekitar lokasi wisata e. Peningkatan sarana promosi wisata melalui event dan pameran untuk

				mengundang wisatawan lokal
4	Pertanian			
4.1	Produktivitas Tanaman Pangan		a. Belum adanya konsisten petani dalam menanam komoditas pertanian	a. Modernisasi sector pertanian
	- Padi Sawah	<		b. Peningkatan jaringan irigasi
	- Padi Ladang	>		c. Peningkatan pemasaran hasil pertanian
	- Jagung	<		d. Peningkatan kelembagaan pertanian;
4.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		b. Masih tingginya losing produk dan losing time sebelum panen maupun pasca panen	e. Peningkatan pengendalian bencana pertanian
	- Jeruk Manis	<		
	- Kentang	<		
	- Cabe merah	>		
	- Durian	>		
4.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat		c. Belum optimalnya kelembagaan petani	
	- Kopi	>		
4.4	Jumlah Populasi Peternakan		d. Belum optimalnya produksi peternakan;	
	- Babi	<		
	- Ayam	<		
4.5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak		e. Belum optimalnya penyuluhan pertanian	
	- Sapi	>		
	- Kerbau	>		
	- Babi	>		
	- Kambing	>		
	- Ayam	>		
	- Anjing	>		
4.6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang		f. Belum optimalnya Pengendalian bencana pertanian	
	- Ternak Besar	=		
	- Ternak Kecil	na		
4.7	Jumlah Kelompok Tani Yang Terfasilitasi	=		
4.8	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	=		
5	Perdagangan			
5.1	Tersediannya dokumen Informasi Harga Dan Ketersediaan Barang	<	a. Belum optimalnya kerja sama antara	a. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah.
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Pokok (33 jenis)			
5.2	Jumlah Produk bidang agribisnis Yang Dipromosikan	=	a. pasar dengan kelompok binaan pemerintah daerah.	h. Optimalisasi akses dan distribusi barang pokok (33 jenis)
5.3	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Tera ulang	<	b. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/ usaha informal.	
			c. Penggunaan alat	

			UTTP belum memenuhi standar kemetrolgian. d. Belum adanya neraca perdagangan. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas, dan jenis produk. f. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar. g. Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat.	
Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum				
1	Perencanaan			
1.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	<	a. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan	a. Peningkatan sinergi antar dokumen perencanaan
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan	<	b. Belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan c. Belum optimalnya integrasi system	b. Penyusunan indikator kinerja smart-s
1.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	<		c. Pembuatan system pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
1.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	<		
1.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti	<		
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi:	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Belum tercapai (<)		
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
	Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten		d. perencanaan (SIPD) e. Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengendalian dan evaluasi	
2	Keuangan			
2.1	Opini laporan keuangan	=	a. Belum optimalnya kualitas data base pajak b. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah c. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai dan memeriksa data	a. Optimalisasi koordinasi pelayanan pajak daerah
2.2	Penyusunan APBD tepat waktu	=		b. Optimalisasi penerapan teknologi dalam pelayanan pajak dan retribusi
2.3	LKPD Tepat Waktu	=		c. Penerapan reward dan punishment
2.4	Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam KUA/PPAS	=		d. Pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi
2.5	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	<		
2.6	Persentase pencapaian	<		

	target pajak dan retribusi daerah		perpajakan d. Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak e. Belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah	
3	Kepegawaian			
3.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin		a. Belum optimalnya sistem merit dalam penempatan jabatan pegawai b. Belum optimalnya disiplin pegawai	a. Penerapan system merit dalam manajemen kepegawaian
4	Pendidikan dan Pelatihan			
4.1	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	=	a. Masih rendahnya jabatan yang terisi sesuai kompetensi b. Belum optimalnya	a. Peningkatan kompetensi pegawai
4.2	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	=		
4.3	Jumlah PNS yang Diklat	=		
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Fungsional		database terkait kompetensi pegawai	
5	Penelitian dan Pengembangan			
5.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbang daerah yang dihasilkan	=	a. Belum optimalnya SDM Litbang (JF belum ada) b. Belum optimalnya kerjasama dalam mendukung inovasi daerah c. Belum optimalnya penerapan IPTEK bagi masyarakat	a. Penerapan inovasi daerah b. Optimalisasi dukungan pelaksanaan litbang
6	Pengawasan			
6.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	>	a. Masih rendahnya komitmen OPD maupun desa dalam menjalankan TLHP b. Belum optimalnya pendampingan APIP c. Belum adanya perangkat daerah yang menjalankan zona integritas d. Masih adanya temuan berulang	a. Optimalisasi system pengawasan daerah b. Optimalisasi integrasi system pengaduan masyarakat
6.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	<		
7	Sekretariat DPRD			
7.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	>	a. Belum optimalnya	a. Pelayanan kesekretariatan kepada

			penggunaan TIK dalam mendukung tugas dan fungsi DPR. b. Belum efektifnya fasilitasi administrasi dan anggaran untuk	DPRD yang efektif
No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi: Belum tercapai (<) Tercapai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			menopang kinerja DPRD	
8	Sekretariat Daerah			
8.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<	a. Belum optimalnya pendampingan kepada OPD dalam penerapan SAKIP b. Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah c. Belum optimalnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah d. Belum optimalnya kapasitas BUMD e. Indikator belum berorientasi kepada outcome f. Belum terpenuhinya target SPM	a. Pengendalian penerapan reformasi birokrasi
8.2	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah	=		
8.3	Rekomendasi LKPJ	=		
8.4	Nilai LPPD	>		
8.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	<		
8.6	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	=		
8.7	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan	=		
8.8	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terasilitasi	<		
8.9	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	=		
8.10	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan PDAM Tirta Nciho Menurut Wilayah Teknis	<		
8.11	Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	<		
8.12	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	=		
9	Kewilayahan – Kecamatan			
9.1			a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	a. Peningkatan kapasitas desa/kelurahan
10	Kesatuan Bangsa dan Politik			
10.1	Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<	a. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan	Peningkatan pembinaan ormas dan orpo
10.2	Jumlah tokoh agama/adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<	b. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	

10.3	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik	<		
------	---	---	--	--

B. VISI DAN MISI.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan visi, misi dan program dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih (Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH), disesuaikan dan diintegrasikan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi dalam mewujudkan visi **“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dan ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

DAIRI UNGGUL, adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

- 1) **UNGGUL** dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) **UNGGUL** dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

- 3) **UNGGUL** dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dairi, dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
- 3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Misi 1.

Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Dairi. Hampir 72% masyarakat Kabupaten Dairi bekerja di sektor pertanian. Analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri bahkan sudah berpotensi untuk di ekspor.

Untuk meningkatkan daya saing kekuatan ekonomi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan sektor pertanian terutama subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki beberapa keunggulan dan juga mensinergikan dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi (angkutan) agar dihasilkan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dengan tidak mengabaikan sektor-sektor ekonomi lainnya sekaligus untuk menciptakan kondisi ketahanan pangan yang mantap di Kabupaten Dairi.

Konsep pengembangan AGRI UNGGUL menjadi basis pengembangan sektor pertanian yang sinergis dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Dairi. Pengelolaan sistem pertanian terpadu yang cerdas dan modern (*smart farming*) dari hulu ke hilir mencakup: peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang didukung: SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna *alsintan* (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan bahan baku pertanian menjadi bahan jadi atau setengah jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai kebutuhan pasar.

Secara operasional, Misi 1 diaplikasikan dalam pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan Daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk mendukung

industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.

Misi 2.

Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.

Keberadaan manusia sebagai sumber daya yang sangat penting akan memberi nilai tambah dalam pembangunan karena dengan kemampuannya dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas memegang peranan penting dalam proses keberhasilan pembangunan daerah. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas pembangunan daerah. Kuantitas SDM tanpa disertai kualitas yang memadai akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Kualitas SDM adalah mutu SDM yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik.

Sejalan dengan definisi pembangunan daerah yakni pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), maka pembangunan SDM merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu SDM sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Ketersediaan SDM yang unggul merupakan modal utama dalam percepatan pengembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Misi ke-2 merupakan upaya manajemen SDM Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kualitas unggul SDM masyarakatnya untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Dairi yang memiliki derajat kesehatan masyarakat yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudaya serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga memiliki daya saing dalam produktivitas pembangunan Daerah.

Secara operasional Misi 2 diaplikasikan dalam pembangunan sektor kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, dan sektor pembangunan lainnya yang terkait dalam upaya penyiapan dan pembentukan SDM masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, yakni pelayanan perpustakaan, untuk membentuk SDM yang sehat dan cerdas. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM yang produktif, memiliki daya saing dan karakter budaya dilakukan melalui pembangunan sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari pengendalian penduduk, pembinaan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan kepemudaan, pembinaan olahraga dan

pembinaan kebudayaan. Terhadap kelompok masyarakat marginal dan PMKS dilakukan pembinaan tersendiri dengan meningkatkan cakupan layanan pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat.

Misi 3.

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

Kondisi geografis Dairi memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Dairi untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang diharapkan dapat didayagunakan dengan tetap mempertimbangkan faktor kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tidak semata-mata menjadi sumber daya potensial tetapi menjadi sumber daya riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Selain sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pembangunan daerah, potensi pengembangan kepariwisataan yang didukung penguatan usaha ekonomi kreatif dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan peluang yang muncul seiring perkembangan pembangunan kepariwisataan baik secara global maupun nasional. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan peluang dan harapan bagi Kabupaten Dairi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional KSPN Danau Toba dengan fokus pengembangan di Tao Silalahi Kecamatan Silahisabungan, sekaligus mengoptimalkan keberadaan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Dairi, yakni: Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike dalam satu kawasan strategis destinasi wisata, meliputi Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Silahisabungan serta wilayah pendukung Kecamatan Sidikalang.

Pengembangan sektor kepariwisataan yang dikembangkan dalam konsep kepariwisataan berbasis keindahan alam (*nature*), pertanian (*agro*), dan budaya (*culture*) diharapkan akan memberikan *multiplier effects* yang mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat dengan penempatan sektor pariwisata sebagai “*lokomotif penarik gerbong*” peningkatan produksi dan

pemasaran pada sektor pembangunan lainnya, seperti: industri kerajinan, pengolahan produk pertanian, kreatifitas seni dan budaya, kuliner/usaha rumah makan, usaha penginapan, usaha transportasi serta usaha ekonomi kreatif lainnya mulai dari level usaha mikro, kecil sampai menengah.

Pembangunan sektor pariwisata juga dikembangkan dalam konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam konsep pengembangan Desa Wisata yang mengintegrasikan pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pariwisata berbasis ekowisata (*eco tourism*), pariwisata berbasis komunitas (*community-based*), pariwisata berbasis budaya (*culture-based*), pariwisata berbasis *good tourism governance*, pariwisata berbasis *supply and demand* serta pengembangan wilayah/kawasan (*regional development*). Untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dibutuhkan adanya upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat di desa dan peran dari pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa, penyiapan SDM ketenagakerjaan dan peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup.

Misi 4.

Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya government menjadi governance yang menekankan kepada kolaborasi, keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) menjadi pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi titik sentral perhatian segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan teknologi informatika untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Setiap instansi pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan keberadaan teknologi informasi yang ada dalam menyampaikan informasi dan melakukan diseminasi

kepada warga masyarakat. Disisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan rasa aman dengan situasi ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara dengan baik serta akses yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mendapatkan informasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan media dan teknologi informatika secara terbuka dan interaktif.

Secara operasional, Misi ke-4 diaplikasikan pada upaya mewujudkan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, organisasi, administrasi umum, fungsi pendukung DPRD, fungsi pengawasan, serta fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, antara lain: perencanaan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi 5.

Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Pelayanan publik mengandung arti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik berupa pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan barang/jasa publik diwujudkan dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah, penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik sedangkan pelayanan administratif diwujudkan antara lain dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan perizinan, dan pengurusan dokumen administrasi masyarakat lainnya.

Dalam substansinya, pelayanan publik selalu dikaitkan dengan upaya instansi pemerintahan untuk memberikan bantuan/layanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan, oleh karena itu institusi penyelenggara pelayanan publik yang didalamnya terdapat unsur birokrasi menjadi bagian terpenting untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun dalam penyediaan barang dan jasa yang secara langsung dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat berupa penataan lingkungan yang sehat termasuk penyediaan fasilitas sosial dan ruang publik yang layak.

Pelayanan administrasi publik diarahkan kepada pelayanan yang murah, mudah, cepat, transparan serta memiliki kepastian hukum. Untuk itu pedoman pelayanan berupa mekanisme atau prosedur dan persyaratan yang jelas menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi publik yang baik. Selanjutnya kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani kebutuhannya, secara khusus pelayanan publik yang baik dalam bidang pelayanan penanaman modal dan perijinan dan akan meningkatkan nilai jual dan daya saing daerah dalam tataran persaingan ekonomi regional, nasional maupun global yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investasi atau penanaman modal di daerah.

Disisi lain, peningkatan kualitas infrastruktur daerah khususnya infrastruktur prioritas tidak boleh dikesampingkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya sehingga pembangunan infrastruktur bukan sebatas kegiatan pengalokasian dana untuk bangunan fisik belaka, tetapi harus memperhatikan berbagai aspek seperti daya tahan, daya dukung, daya guna dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan dan peluang membuka lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sejak proses perencanaan sampai kepada pengendalian pembangunan infrastruktur daerah perlu dilakukan sesuai NSPK yang mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Menyikapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat, termasuk perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan yang lebih mengarah kepada digitalisasi, maka peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana serta fasilitas pendukung aktivitas pelayanan, termasuk dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan keberadaan teknologi informatika yang lebih handal.

Secara operasional, Misi ke-5 diaplikasikan pada peningkatan kinerja pembangunan pada sektor pelayanan infrastruktur daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, prasarana perhubungan, prasarana pasar, prasarana penyediaan air baku/air minum serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan modal dan perizinan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan layanan komunikasi dan informatika.

TUJUAN DAN SASARAN.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Tujuan (1.1) : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap.

Sasaran (1.1.1) : Meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

Sasaran (1.1.2) : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan daerah.

Sasaran (1.1.3) : Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan.

2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.

Tujuan (2.1) : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran (2.1.1) : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Sasaran (2.1.2) : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

Sasaran (2.1.3) : Meningkatnya cakupan keluarga berencana.

Sasaran (2.1.4) : Menurunnya tingkat kemiskinan.

Sasaran (2.1.5) : Menurunnya tingkat pengangguran.

3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

Tujuan (3.1) : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran (3.1.1) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.

Sasaran (3.1.2) : Meningkatnya pengelolaan pariwisata.

Sasaran (3.1.3) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif.

4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan (4.1) : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Sasaran (4.1.1) : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran (4.1.2) : Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Sasaran (4.1.3) : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana.

Sasaran (4.1.4) : Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Tujuan (5.1) : Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah.

Sasaran (5.1.1) : Meningkatnya infrastruktur dasar.

Sasaran (5.1.2) : Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh.

Tujuan (5.2) : Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika.

Sasaran (5.2.1) : Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Sasaran (5.2.2) : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- Sasaran (5.2.3) : Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik.
- Sasaran (5.2.4) : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

ARAH KEBIJAKAN.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan, sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui pengembangan layanan umum yang unggul.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia Kabupaten dairi yang unggul serta berdaya saing.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera dengan ditopang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan layanan umum yang unggul	Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.	Penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja.	Akselerasi capaian pembangunan yang ditopang sistem pemerintahan berbasis elektronik

Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2021 adalah : ***“Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing”***.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Arah kebijakan pembangunan daerah dan nomenklatur program pembangunan daerah yang dirumuskan juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional agar tercipta sinergisitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024
 VISI : "MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian															
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indikator Tujuan: Tingkat Kemiskinan		Persen	Persen	8,03		8,02		8.00 - 7.80		7.79 - 7.60		7.79 - 7.60	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Indikator Sasaran: Nilai Tukar Petani (NTP)		Persen	Persen	115,21		115,22		115,23		115,24		115,24	
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat	Persen	0,87	9.762,28	0,89	3.285,00	0,91	3.613,50	0,93	3.974,80	0,93	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase luaslahan pertanaman yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai standar	Persen	46,82	-	40,80	-	42,35	-	42,22	-	42,22	
		Indikator Kinerja				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi	

Tujuan	Sasaran	Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	2021		2022		2023		2024		Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan luaslahan yang diolah dengan alsintan	Persen	40,41	-	39,61	-	43,14	-	46,52	-	46,52	
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik	Persen	46,82	5.223,00	48,09	1.000,00	49,38	1.100.	50,66	1.210,00	50,66	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Pesentase Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun/di perbaiki	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase embung pertanian yang dibangun/ diperbaiki	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			

						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase Prasarana penunjang produksi pertanian yang dibangun	Persen	100,00	-	100,00	-	60,00	-	63,00	-	63,00	
				Persentase BPP Kecamatan dalam kondisi baik	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas lahan pertanian yang dilaksanakan pengendalian HPT	Persen	100,00	498,20	100,00	450,00	100,00	495,00	100,00	544,50	100,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persetase luaslahan pangan yang dijamin dengan AUTP	Persen	0,00	-	35,12	-	70,52	-	100,00	-	100,00	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (Veteriner)	Persentase penanganan kesehatan hewan/ter nak	Persen	100	768,07	100	806,47	100	856,80	100	889,14	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			

						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompoktani yang naik kelas	Persen	13,79	419,24	22,26	500	26,47	550	30,68	605	30,68	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase fasilitasi kerjasama Kelompok Tani/ Gapok tandengan pelaku agribisnis yang ditindaklajuti	Persen	0,00	-	0,10	-	0,20	-	0,30	-	0,30	
	Menurunnya pengangguran daerah	Indikator Sasaran: Tingkat PengangguranTerbuka			Angka	1,50		1,32		1.30 - 1. 20	-	1.19 - 1.10		1.19 - 1.10	
			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kebijakan rencana tenagakerja yang dijalankan	Persen	35,00	-	40,00	100.60	45,00	110.66	50,00	121.72	50,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021	2022	2023	2024						

				m		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensi	Persen	Persen	122,57	50,00	693,25	50,00	762,57	60,00	838,83	60,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	Persen	Persen	21,35	22,00	26,46	25,00	29.,11	30,00	32,02	30,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
			Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Persen	Persen	47,75	25,00	113,13	30,00	124,44	30,00	136,89	30,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Progra	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2021	2022	2023	2024						

				m		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 2: Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing															
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia			Angka	72,24		72,87		73,50		74,09		74,09	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks Pendidikan			Nilai	-		68,83		69,72		69,72		69,72	
			Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	Persen	99,88	10.822,00	99,89	6.355,05	99,90	6.990,56	99,91	7.689,61	99,91	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga PAUD yang memiliki Izin	Persen	19,00	-	19,10	-	19,20	-	19,30	-	19,30	
				APK PAUD	Persen	34,00	-	36,00	-	38,00	-	40,00	-	40,00	
				APK SD	Persen	103,12	-	104,04	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				APK SMP	Persen	97,00	-	97,10	-	97,20	-	97,30	-	97,30	
				APM SD	Persen	97,00	-	99,65	-	99,75	-	99,85	-	99,85	
				APM SMP	Persen	95,00	-	95,10	-	95,20	-	95,30	-	95,30	
				Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,45	-	0,35	-	0,25	-	0,15	-	0,15	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2021	2022	2023	2024						

				m		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,85	-	0,75	-	0,65	-	0,55	-	0,55	
				AM SD	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				AM SMP	Persen	99,52	-	99,57	-	99,62	-	99,67	-	99,67	
				Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	Persen	66,00	-	67,00	-	67,00	-	68,00	-	68,00	
				Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	Persen	30,00	-	31,00	-	31,00	-	32,00	-	32,00	
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	58,20	-	59,20	-	60,20	-	61,20	-	61,20	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	28,40	-	29,30	-	30,20	-	31,10	-	31,10	
				Persentase SMP Berakreditasi B	Persen	60,71	-	60,81	-	60,91	-	61,01	-	61,01	
				Jumlah siswayang masuk SMA unggulan	orang	65,00	-	100,00	-	135,00	-	160,00	-	160,00	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	28,90	2.283,99	29,30	2.484,35	30,15	2.732,78	31,20	3.006,06	31,20	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	75,30	-	76,20	-	77,30	-	78,40	-	78,40	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	89,74	-	89,75	-	89,77	-	89,78	-	89,78	
				Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	2,41	-	2,43	-	2,44	-	2,46	-	2,46	
				Persentase guru SD/ MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,49	-	38,51	-	38,53	-	38,55	-	38,55	
				Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	51,77	-	51,79	-	51,81	-	51,83	-	51,83	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Rasio guru/ murid perkelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1:15	-	1:15	-	1:15	-	1:15	-	1:15	

			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelayanan perpustakaan andaerah	Persen	47,00	202.38	47,00	50,00	60,00	55,00	70,00	60,50	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup			Tahun	69,15		69,98		70,81		71,64		71,64	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Persen	100,00	93.079,97	100,00	30.583,65	100,00	33.642,06	100,00	37.006,27	100,00	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	Persen	80,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	

				Prevalensi GiziBuruk	Persen	0,77	-	0,65	-	0,60	-	0,55	-	0,55	
				Prevalensi GiziKurang	Persen	1,30	-	1,20	-	1,10	-	1,00	-	1,00	
				Cakupan bayi/balita giziburuk mendapatka n perawatan Kesehatan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosi s;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	50,00	-	48,00	-	45,00	-	40,00	-	40,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase KLB Ditangani < 24 jam	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan padausia produktif;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupa n Pelayan an kesehat an penderi ta diabete s melitus ;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Cakupan Pelayanan kesehatan orangdengan gangguan jiwa berat;	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase Keluarga dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Persen	93,00	-	95,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase penanganan Kejadian gawat darurat sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	Persen	85,00	-	90,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	
				Persentase tenaga kesehatan yangtelah memiliki sertifikat keahlian	Persen	85,00	-	90,00	-	95,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standart	Persen	80,00	-	82,00	-	85,00	-	87,00	-	87,00	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDMRS (RSUD)	Persen	100,00	1.510,56	100,00	8.626,81	100,00	9.489,49	100,00	10.438,44	100,00	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persentase TTU /TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	72,00	93,81	69,00	307,75	70,00	338,52	72,00	372,37	72,00	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga aktif	Persen	100,00	435,79	100,00	295,07	100,00	324,58	100,00	357,04	100,00	Dinas Kesehatan
				Persentase Posyandu Aktif	Persen	0,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Pengendalian Penduduk	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	Persen	1,89	30,50	1,85	184,94	1,81	203,43	1,73	223,78	1,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Persen	63,13	80,58	68,33	60,00	72,53	66,00	75,73	72.,60	75,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas	Persen	48,14	-	55,56	-	62,96	-	70,37	-	70,37	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakup an anggot a kelompok kegiata n /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB	Persen	71,15	789,98	70,30	793,70	70,45	873,07	70,50	960,37	70,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

	Meningkatnya Standar Hidup	Indikator Sasaran: Pengeluaran per-kapita				10752,4		10958,9		11095,1		11219,5		11219,5	
			Pemberdayaan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	Persen	42,62	646,88	42,62	905,00	43,22	995,50	43,83	1.095,50	43,83	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	Persen	4,80	356,88	5,00	720,00	5,50	792,00	6,00	871,20	6,00	Dinas Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	Persen	43,83	40,00	43,89	500,00	43,95	550,00	44,02	605,00	44,02	Dinas Sosial
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	Persen	100,00	2.578,71	100,00	360,00	100,00	396,00	100,00	435,00	100,00	Dinas Sosial
			Pengarusutaaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan mendapat pelatihan dan peningkata n kapasitas	Persen	0,73	90,15	0,91	349,29	1,10	384,22	1,30	422,64	1,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase OPDyang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	Persen	16,66	-	20,83	-	41,66	-	62,50	-	62,50	
				Persentas e perempuan dalam peningkat an ekonomi keluarga	Persen	68,00	-	70,00	-	72,00	-	75,00	-	75,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase perempuan dalam organisasi publik	Persen	5,70	-	5,80	-	5,90	-	6,00	-	6,00	
			Perlindungan perempuan	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan	Persen	100,00	309,44	100,00	115,70	100,00	127,27	100,00	140,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan Keterpenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak/ Status Kabupaten Layak Anak	Persen	63,00	55,52	65,00	105,35	67,00	115,88	70,00	127,47	70,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan yang mendapatkan pelayanan	Persen	25,00	171,17	27,00	128,94	28,00	141,84	29,00	156,02	29,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2021	2022	2023	2024						

				m		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah															
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka	66,60	-	67,31	-	67,76	-	68,22	-	68,22	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air			Angka	72,00	-	53,81	-	53,81	-	54,01	-	54,01	
		Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara			Angka	82,00	-	85,69	-	85,79	-	85,89	-	85,89	
Tujuan	Sasaran	Indikator or Kinerja Tujuan dan	Program Pembangunan Daerah	Indikator or Kinerja a	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021	2022	2023	2024						

		Sasaran		Progra m		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lahan			Angka	51,00	-	56,49	-	58,20	-	59,91	-	59,91	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanju ti	Persen	1,00	1.612,24	100,00	1.682,52	100,00	1.850,77	100,00	2.035,85	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi	Persen	100,00	228,30	100,00	2.285,80	100,00	2.514,38	100,00	2.765,81	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengawasa n terhadap pelaksanaa n dokumen pengendali an B3 dan limbahB3	Persen	100,00	-	100,00	60.000	100,00	66.000	100,00	72.600.	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persen	100,00	60,00	100,00	150,00	100,00	165,00	100,00	181,50	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	100,00	-	100,00	70,00	100,00	77,00	100,00	84,70.	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Persen	100,00	-	100,00	400.000	100,00	440.000	100,00	484.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	Persen	0,00	-	100,00	241.000	100,00	265.100	100,00	291.610	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbulan sampah	Persen	68,00	11.117,20	73,00	8.449,50	72,00	9.294,45	71,00	10.223,89	71,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persen	24,00	-	35,00	-	40,00	-	45,00	-	45,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	1,00-2,00	-	2,00-3,00	-	3,00-4,00	-	4,00-5,00	-	4,00-5,00	
	Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Indikator Sasaran: Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD			Persen	3,59	-	4,88	-	5,04	-	5,17	-	5,17	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	Persen	30,00	6.961,74	33,00	3.022,00	37,00	3.324,00	40,00	3.656,62	40,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kerjasama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	Persen	63,00	281,74	63,00	553,00	100,00	608,30	100,00	669,13	100,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM kepariwisataan	Persen	40,00	1.048,41	60,00	400,00	80,00	440,00	100,00	484,00	100,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan perdagangan sektor eceran			Persen	5,93		6,72		7,51		8,30		8,30	
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang meningkatkan produksi dan kualitasnya	Persen	20,00	876,40	40,00	1.189,14	60,00	1.308,05	80,00	1.438,85	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
				Persentase IKM yang terfasilitasi permodalannya	Persen	20,00		20,00		20,00		20,00		80,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kerjasama pemasaran produk lokal yang dijalankan	Persen	-	97,24	33 (4 kerja sama)	160,00	33 (4 kerja sama)	176,00	33 (4 kerja sama)	193,60	33 (4 kerja sama)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
				Persentase produk lokal yang dipasarkan secara online	Persen	-	-	15,00	-	15,00	-	20,00	-	50,00	
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	Persen	100,00	240,69	100,00	296,79	100,00	326,47	100,00	359,11	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTP yang sudah tertib ukur	Persen	100,00	200,50	100,00	313,24	100,00	344,56	100,00	379,02	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM

			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	Persen	9 (1 pasar)	133.741	27 (1 pasar)	408.211	27 (1 pasar)	449.032	37 (1 pasar)	493.936	37 (1 pasar)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	Persen	10,00	152,97	12,00	70,52	13,00	77,57	15,00	85,33	15,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan melalui aplikasi online	Persen	70,00	51,51	75,00	336,80	80,00	370,48	90,00	407,52	90,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				IKM Perizinan	Nilai	77,75	-	78,00	-	78,50	-	80,00	-	80,00	

				Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	90,00	-	90,00	-	90,00	-	95,00	-	95,00	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah penanam modal	Persen	21,00	-	22,00	160,00	23,00	176,00	24,00	193,60	24,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	0,00	-	39,00	74,81	40,00	82,29	41,00	90,52	41,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	16,00	75.435	16,00	70,00	16,00	77,00	16,00	84,70	16,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM dengan peningkatan volume usaha	Persen	20,00	1.034,70	20,00	330,00	20,00	363,00	20,00	399,30	20,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM
Misi 4: Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah															
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	D	-	C	-	CC	-	B	-	B	
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP			Nilai	CC	-	B	-	B	-	BB	-	BB	
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	3.220,47	100,00	4.432,79	100,0	4.876,07	100,00	5.363,68	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase bahan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program perekonomian dan pembangunan	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	2.926,69	100,00	2.644,39	100,0	2.908,83	100,00	3.199,72	100,00	Sekretariat Daerah
				Persentase bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kelembagaan	Peringkat Komposit	Tingkat Komposit 3	-	Tingkat Komposit 3	-	Tingkat Komposit 3	-	Tingkat Komposit 3	-	Tingkat Komposit 3	Sekretariat Daerah
Tujuan	Sasaran	Indikator or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur	Persen	85,00	-	90,00	-	95,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase PD dengan IKM Minimal 80	Persen	8,00	-	10,00	-	12,0	-	15,00	-	15,00	
				Persentase PD dengan SAKIP minimal B	Persen	28,00	-	38,00	-	50,0	-	67,00	-	67,00	
				Persentase usulan kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pelayanan protokol administrasi umum yang sesuai standar	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	12.397,18	100,00	14.329,05	100,0	15.761,96	100,00	17.338,15	100,00	Sekretariat DPRD
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan	Persen	100,00	859,99	100,00	770,31	100,0	847,34	100,00	932,08	100,00	BAPPEDA
			Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan indikator kinerja RKPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	896,00	100,00	751,10	100,0	826,21	100,00	908,83	100,00	BAPPEDA
			Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD	Persen	100,00	514,98	100,00	780,05	100,0	858,06	100,00	943,86	100,00	BAPPEDA
				Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
			Program pengembangan SDM	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	78,81	368,12	78,91	1.660,76	79,0	1.826,84	79,13	2.009,52	79,13	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki pendidikan tinggi	Persen	51,95	-	52,38	-	52,5	-	52,49	-	52,49	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program kepegawaian daerah	Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan	Persen	83,09	1.113,60	80,17	1.482,60	77,3	1.630,88	74,34	1.793,90	74,34	BKPSDM
				Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase penurunan disiplin pegawai	Persen	0,42	-	0,42	-	0,2	-	0,17	-	0,17	
	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Indikator Sasaran: Opini BPK			Predikat	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar	Persen	100,00	202,62	100,00	200,43	100,0	220,47	100,00	242,52	100,00	BKAD
				Persentase PD yang realisasi belanja minimal 95%	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)		Tepat Waktu (31 Desember)	
				Persentase layanan penatausahaan keuangan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Persen	65,00	1.460,41	75,00	811,00	75,0	892,10	75,00	981.31	75,00	BKAD
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100,00	1.867,34	100,00	2.535,68	100,0	2.789,25	100,00	3.068,17	100,00	BAPENDA
			Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase pengawasan internal sesuai standar	Persen	90,00	2.243,85	90,00	2.116,00	90,0	2.327,00	90,00	2.560,36	90,00	Inspektorat
				Persentase OPD yang memiliki temuan berulang turun	Persen	90,00	-	90,00	-	90,0	-	90,00	-	90,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentas e pengadua n masyarak at yang diselesaik an	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase OPD yang menindaklanj utievaluasi akuntabilitas	Persen	90,00	-	90,00	-	90,0	-	90,00	-	90,00	
			Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona WBK dan WBBM	Persen	25,00	236,77	38,00	241,00	50,0	265,10	50,00	291,61	50,00	Inspektorat
				Persentase OPD yang telah memenuhi rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	Predikat	B	-	B	-	B	-	B	-	B	
	Meningk atnya pelayana n publik yang prima berbasis Teknolog i Informas i	Indikato r Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Angka	72	-	74	-	77	-	80	-	80	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTPelektronik	Persen	97,00	200,00	99,00	-	100,0	575,13	100,00	575,13	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anakusia 0-17 tahun kurang 1 (satu)hari yang memiliki KIA	Persen	37,00	-	75,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
			Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	98,00	-	99,00	-	99,5	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Perkawinan Tercatat	Persen	20,20	-	27,00	-	50,0	-	75,00	-	75,00	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPDyang memanfaatkan data kependudukan	Persen	28,00	1.245,27	56,00	1.250.,00	84,0	1.375,00	100,00	1.512,50	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklan juti	%	100,00	5.136,81	100,00	10.790,34	100,0	11.869,37	100,00	13.056,31	100,00	Kecamatan
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sesuai dengan standar	%	55,00	26,26	60,00	50,00	65,0	55,00	70,00	60,50.	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan arsip dan keutuhan arsipsesuai dengan NSPK (Norma standar, prosedur dan kriteria) kearsipan	%	25,00	24,76	25,00	50,00	25,0	55,00	25,00	60,50	25,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indikator Sasaran: Indeks SPBE			Angka	2,00	-	2,50	-	2,70	-	3,00	-	3,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	Persen	75,00	2.399,78	75,00	2.511,11	75,0	2.762,22	75,00	3.038,49	75,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	20,00	6.084,95	50,00	5.201,26	75,0	5.721,38	100,00	6.293,52	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid	Persen	100,00	-	100,00	133.302	100,0	146.632	100,00	161.295	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	Persen	100,00	27,18	100,00	167,55	100,0	184,30	100,00	202,74	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Indikator Tujuan: Indeks Rasa Aman			Nilai	-	-	0,91	-	0,92	-	0,92	-	0,93	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

	Meningkatnya ketahanan daerah	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah			Angka	70	-	75	-	80	-	85	-	85	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00	5.546,07	100,00	1.552,70	100,0	1.707,97	100,00	1.878,87	100,00	BPBD
				Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	-	100,00	-	100,0	-	100,00	-	100,00	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00		100,00		100,0		100,00		100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase pelayanan pemulihan pasca bencana	Persen	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penanganan kebakaran yang dilaksanakan	Persen	100,00	859,52	100,00	871,71	100,00	958,88	100,00	1.054,71	100,00	BPBD
	Meningkatnya kohesivitas sosial	Indikator Sasaran: Angka potensi konflik sosial			Jumlah	4	-	3	-	2	-	1	-	1	SATPOL PP
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen	60,00	3.027,26	65,00	2.514,41	70,0	2.765,86	75,00	3.042,47	75,00	SATPOL PP
				Persentase penegakan produk hukum daerah	Persen	80,00	-	85,00	-	90,0	-	95,00	-	95,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	146,19	100,00	150,89	100,0	165,98	100,00	182,58	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	100,00	970,10	100,00	994,10	100,0	1.093,51	100,00	1.202,86	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibangun	Persen	100,00	406,10	100,00	525,00	100,0	577,50	100,00	635,25	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan agama	Persentase fasilitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang sesuai peraturan	Persen	100,00	507,17	100,00	554,40	100,0	609,40	100,00	670,34	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan pencegahan dini potensi konflik di masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	115,98	100,0	127,58	100,00	140,33	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya keberdayaan desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun			Persen	0,59	-	0,61	-	0,63	-	0,65	-	0,65	
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

	Meningkatnya kemandirian desa	Indikator Sasaran: Persentase Desa Maju			Persen	0,043	-	0,050	-	0,062	-	0,075	-	0,075	
			Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Persen	6,60	50,00	19,80	100,00	33,0	110,00	39,60	121,00	39,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	60,00	411,52	80,00	650,00	80,1	715,00	80,25	786,50	80,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tingkat Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa	Persen	40,00	7.058,24	50,00	2.941,56	55,6	3.235,72	61,11	3.559,23	61,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika															
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah		Indikator Tujuan: Indeks Infrastruktur			Persen	47,98	-	49,58	-	51,16	-	51,78	-	51,78	
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Indikator Sasaran: Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar			Persen	70,10%	-	77,09%	-	89,07%	-	89,79%	-	89,79%	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	Persen	6,89	65.262,74	8,21	33.663,83	9,45	37.030,22	10,69	40.733,24	10,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	Persen	64,97	-	65,59	-	66,21	-	66,83	-	66,83	
				Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	90,12	-	90,70	-	91,86	-	93,02	-	93,02	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	Persen	85,61	1.731,71	87,07	600,00	88,52	660,00	89,98	726,60	89,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tanggayang terlayani air bersih perpipaan	Persen	79,54	5.786,90	81,30	1.250,00	83,06	1.375.,00	84,82	1.512,50	84,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentas e kawasan memiliki rencana tata ruang	Persen	100,00	813,79	100,00	2.250,00	100,00	2.475,00	100,00	2.722,50	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase kawasan memiliki rencana rincitata ruang	Persen	6,67	-	40,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerj a Program	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Cakupan wilayah pemanfaat anruang yang terkendali	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	587,17	100,00	300,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangu nanfasilitas kepentingan umum	Persen	3,37	1.441,05	3,00	600,00	3,00	660,00	3,00	660,00	3,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Fasilitas Penyelenggar aan Bangunan Gedung	Persen	100,00	6 000,00	100,00	8.400,00	100,00	9.240,00	100,00	10.164,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Cakupan ketersediaa nbangunan pemerintah	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikat or Kinerja Progra m	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		

				Persentase penyediaa n dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
			Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Persen	71,02	1.078,2 7	71,79	4.150,0 0	72,66	4.565,0 0	73,53	5.021. 50	73,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumaha n dan kawasan permukim an yang memiliki jalan lingkunga n memadai	Persen	64,18	6.267,1 6	68,55	4.300.0 0	72,92	4.730,0 0	77,29	5.203, 00	77,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase	Persentase drainase di wilayah perumaha n dan permukim an	Persen	61,27	1.751,2 6	62,13	1.550,0 0	62,99	1.705,0 0	63,42	1.875, 00	63,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningk atnya kenyama nan dan keselama tan lalu lintas	Indikator Sasaran: Persentas e ketersedi aan sarana dan prasaran a perhubun gan memadai			Persen	55	-	60	-	65	-	70	-	70	
Tujua n	Sasara n	Indika tor Kinerj a Tujua	Program Pembanguna n Daerah	Indik ator Kiner ja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondis i Kinerja pada Akhir	Perangkat Daerah Penanggun g jawab
						202 1	202 2	202 3	2 0 2 4						

		n dan Sasaran		Program		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	R Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Periode RPJMD	
			Program Penyelenggara nLalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan	Persen	60,00	1.078,53	60,00	1.727,95	70,00	1.900,74	70,00	2.090,81	70,00	Dinas Perhubungan
				Cakupan layanan trayek	Persen	10,00	-	10,00	-	10,00	-	15,00	-	15,00	
				Persentase regulasi bidang perhubungan yang tersedia	Persen	60,00	-	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Rencana program/kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Dairi berisi program/kegiatan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program/kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Dengan demikian, program/kegiatan pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Berikut ini Program/Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang direncanakan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut di atas yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					277,274,556,079								67,969,574,330		
1	01	01			PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					273,369,846,262							35,000,000			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,825,600							35,000,000			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dok 0 Dokumen	30,498,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dan a Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	2 Dok 0 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan		
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKip), Perjanjian Kinerja (PK), LPPD, LKPJ dan evaluasi kinerja pern triwulan				5 Dok	15,327,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dan a Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	5 Dok	0	Dinas Pendidikan		
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						272,174,556,080						0			

1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	272,174,556,080	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		14 bulan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						94,603,500							0	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah berkas penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidik				400 berkas	94,603,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		400 berkas	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						702,659,840							0	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah pelaksanaan penyediaan alat-alat listrik				1 tahun	38,174,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah biaya penyediaan alat dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	118,786,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	0	Dinas Pendidikan

1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah biaya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 tahun	44,382,040	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dan a Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah biaya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun	49,054,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dan a Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah biaya bahan bacaan. peraturan perundang-undangan				1 tahun	29,160,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dan a Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 tahun	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											210,817,930,405	30,056,963,295	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											201,824,647,055	0	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											39,881,770	0	

1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	7 dok			39,881,770	0	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										199,817,930,405	0	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan asn	12 bulan			199,817,930,405	0	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										101,794,200	0	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ternilainya berkas daftar usul pak jabatanfungsional	400 berkas			101,794,200	0	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,074,715,580	0	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya alat-alat listrik	12 bulan			31,143,150	0	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			155,450,000	0	
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Akses Pendidikan Untuk Semua		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			tersedianya alat-alat rumah tangga	12 bulan			26,520,150	0	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		(DAIRI CERDAS).		Semua Kelurahan									
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).					Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan			86,550,700	0	

1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 kegiatan			30,000,000	0	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perjalanan dinas tersedianya makan minum rapat dan tersedianya biaya perjalanan dinas	12 bulan 12 bulan			745,051,580	0	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										387,000,000	0	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya Meubelur Kantor danaula Bertambahnya peralatan kerja pendukung kantor tersedianya perlengkapan kantorTersedianya ruang arsip Tersedianya sistem berbasis IT	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 ruang 1 kegiatan			387,000,000	0	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										199,722,000	0	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya listrik, telepon dan air	12 bulan			40,930,000	0	
					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
Kode		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan								
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target	Tolok Ukur	Target						
						(DAIRI CERDAS).		Semua Kelurahan									
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										0	0	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Ruang Perpustakaan	2 Unit			0	400,207,500	

1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kamar Mandi/Sanitasi Air Bersih (MCK) Terpeliharanya Pagar SD	15 Unit 1 Unit			0	703,106,800	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat RumahDinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Ruang Guru SD	2 Unit			0	400,207,500	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya perlengkapan sekolahpenggerak	8 sekolah			1,460,414,100	0	
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedungdan Ruangan										0	0	
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										0	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya Alat Praktik TIK Siswa untukSD Bertambahnya Sarana Media Pendidikan lainnya Untuk SD	10 Paket 5 Paket			0	1,609,146,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya BelajarBatak Terlaksananya Monitoring Evaluasi AKM SD	1 Keg 1 Keg			0	511,391,425	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan KreativitasSiswa	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah Tersedianya Wadah Kompetisi Siswa SD	1 Keg 3 Keg			302,500,000	77,175,000	

1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya kepala sekolah dan guru sekolah penggerak	8 sekolah			200,000,000	0			
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penataan Laporan Penggunaan BOS SD dan SMP	322 sekolah			226,270,000	0			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										1,875,600,000	24,842,466,550			
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya ruangkelas	2 Ruang			0	519,750,000			
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua			Bertambahnya ruangguru	2 Ruang			0	877,800,000			
Kode	Kode				Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
							Kelurahan												
1	01	02	2.02	04	Pembangunan RuangUnit Kesehatan Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya ruang UKS	2 Ruang			0	138,600,000			
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya ruang perpustakaan	2 unit			0	769,981,300			
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya Lab. IPAdan perabotnya Bertambahnya ruang lab. komputer beserta perabotnya Bertambahnya ruang laboratorium dan praktikum	2 unit 5 unit 1 unit			0	2,994,861,100			

1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah								0	0		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya pagarsekolah Tersedianya MCK dan sanitasinya	1 unit 1 unit	0	387,422,200		
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya ruang kelas SMP	9 unit	0	2,375,835,000		
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua			Terpeliharanya ruangguru SMP	2 Ruang	0	1,273,387,500		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
							Kelurahan									
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya laboratorium dan praktikum	3 Ruang	0	761,449,700		
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat RumahDinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah								0	0		
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya ruang perpustakaan dan perabotnya Terpeliharanya toilet guru/siswa	2 Ruang 4 Ruang	0	1,403,146,250		
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya meubeleurGuru Tersedianya meubeleursiswa	500 Set 250 Set	0	1,508,936,000		

101022.0227	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kelengkapan sekolah penggerak	7 sekolah			800,000,000	0	
101022.0232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya beasiswa perguruan tinggi setiap tahun	400 Orang			0	5,500,000,000	
101022.0233	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya buku koleksi perpustakaan	4 Paket			0	115,500,000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
101022.0235	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat-alat lab. IPA Biologi	5 Paket			0	6,081,900,000	
101022.0236	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya monitoring dan evaluasi AKM SMP Terlaksananya penerimaan siswa baru (PPDB)	1 Kegiatan 1 kegiatan			191,275,000	0	
101022.0237	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penerimaan siswa baru	1 Kegiatan			0	72,765,000	
101022.0238	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya prestasi belajar siswa SD dan SMP (apresiasi) Meningkatnya siswa masuk SMA Favorit/unggulan Tersedianya wadah kompetisi siswa	300 siswa 30 Orang 3 Kegiatan			684,325,000	0	

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).										200,000,000		0	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tertatanya SPJ BOS SMP	1 Kegiatan				0	61,132,500	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											1,302,968,300	304,087,520		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target								
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya gedung PAUD	1 unit			1,000,000,000		0	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya ruang kantor administrasi Terpeliharanya ruang kelas yang rusak	1 Ruang 6 Ruang			0	224,046,020		
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bertambahnya APE PAUD	2 Paket			0	80,041,500		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Gebyar PAUD Terlaksananya Hari Pendidikan Nasional Tersedianya wadah kompetisi interaktif siswa PAUD/TK, SD dan SMP Terselenggaranya kegiatan Bunda PAUD	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan			605,936,600		0	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											200,828,000	0		

1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terhadirinya kegiatan hari aksara internasional (HAI) Terlaksananya kegiatan pendidikan keluarga	1 kegiatan 1 kegiatan			135,450,000	0		
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terselenggaranya paketa setara sd, paket b setara smp, paket c setara sma/smk	1 kegiatan			65,378,000	0		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												2,284,350,000	0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												2,284,350,000	0	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Diklat lanjutan guru PAUD Meningkatnya kompetensi pengawas Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Kepala Sekolah Pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Terbinanya Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) SMP Tersedianya calon pengawas sekolah	80 orang 30 orang 1 kegiatan 120 orang 1 kegiatan 100 orang 100 kegiatan			1,847,800,000	0		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kualifikasi guru Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Terlaksananya Pemetaan dan pemerataan Guru SD dan SMP	20 guru 200 orang 1 kegiatan			436,550,000	0		
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN												70,560,000	0		
1	01	05	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												70,560,000	0	

1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Bertambahnya PAUD/TK terakreditasi	15 lembaga		70,560,000	0	
TOTAL													210,817,930,405	30,056,963,295	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											111,155,976,749	0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											80,119,453,749	0	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											18,000,000	0	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ketersediaan Dokumen Perencanaan, pelaporan keuangan, dan pelaporan Kinerja OPD	7 Dokumen			18,000,000	0		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											76,055,976,749	0	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			76,055,976,749	0		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											150,000,000	0	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal	120 Orang			150,000,000	0		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											775,330,000	0	

1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan			13,230,000	0	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan			150,000,000	0	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakandan penggandaan	12 bulan			44,100,000	0	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaandan peraturan perundang-undangan	12 bulan			18,000,000	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat dan kunjungan konsultasi	12 bulan			550,000,000	0	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										257,625,000	0	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan mebeleur Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	1 Paket			150,000,000	0	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket			107,625,000	0	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,122,710,000	0	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah benda pos dan materai	12 bulan			3,528,000	0	

1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan			49,613,000	0		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah honor THL yang terbayarkan	12 bulan			2,069,569,000	0		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										739,812,000	0		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendataan dinas yang terpenuhiperizinan dan pemeliharaannya	12 bulan			260,574,000	0		
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantoryang dipelihara	1 Tahun			250,000,000	0		
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun			229,238,000	0		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												30,583,695,000	0		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												1,426,250,000	0	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang dibangun	3 unit			25,000,000	0		
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah dinas yang dibangun sesuai standart	5 unit			25,000,000	0		

102022.0109	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	1 unit			25,000,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
102022.0110	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pustu dan Poskesdes yang direhabilitasi	5 unit			1,000,000,000	0	
102022.0112	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket			25,000,000	0	
102022.0113	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket			172,500,000	0	
102022.0114	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket			25,000,000	0	
102022.0116	Pengadaan Obat, Vaksin	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Obat dan vaksin yang tersedia	90 persen			25,000,000	0	
102022.0117	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Paket			25,000,000	0	
102022.0120	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes	1 Paket			78,750,000	0	
102022.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										28,857,445,000	0	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan KesehatanIbu Hamil	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							55,478,000	0	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan KesehatanIbu Bersalin	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	100 Persen			0	0	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan KesehatanBayi Baru Lahir	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan bayibaru lahir	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan KesehatanBalita	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standart	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia PendidikanDasar	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Produktif	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah usia produktifyang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	100 persen			85,000,000	0	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Lanjut	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah penduduk usialanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua			Jumlah penderita hipertensi yang	100 persen			150,000,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas

	Program/ Kegiatan	Daerah			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	(Rp.)	(Rp.)	Pembangunan Nasional
	Penderita Hipertensi			Kecamatan, Semua Kelurahan			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart						
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Gangguan Jiwa Berat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan JiwaBerat	100 persen			60,000,000	0	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang Terduga Tuberkulosis	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan KesehatanGizi Masyarakat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah balita dan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar	100 persen			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan KesehatanKerja dan Olahraga	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan kesehatan kerja dan olahraga	18 puskesmas			31,600,000	0	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat	18 puskesmas			31,600,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									

1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	18 bulan			31,600,000	0	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang dipantau secara terus-menerus dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Jumlah penemuan kasus baru kusta, dan jumlah jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan haji sesuai standar	100 persen			200,000,000	0	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah daerah sulit yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai standart	100 persen			350,000,000	0	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Kejadian demam berdarah yang ditangani sesuai standart	48 persen			250,000,000	0	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN dari APBD Kabupaten	90 persen			23,866,187,000	0	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,		umlah Kecamatan yang bersih aman, nyaman, dan sehat	15 Kecamatan			150,000,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Semua Kelurahan									

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Puskesmas yang memperoleh operasional untuk pelayanan	12 bulan			2,978,180,000	0	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas	12 bulan			90,000,000	0	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Puskesmas di reakreditasi	18 puskesmas			25,000,000	0	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah terpenuhinya biaya operasional PSC119	12 bulan			250,000,000	0	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									150,000,000	0	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen yang berisi data/ informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	2 Dokumen			50,000,000	0	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 puskesmas			50,000,000	0	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	5 Set			50,000,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	0	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin	100 persen			150,000,000	0	

1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								307,750,000	0			
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								150,000,000	0			
1	02	04	2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah pengelola apotek dan toko obatyang mendapatkan pembinaan	80 persen		150,000,000	0			
1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga								100,000,000	0			
1	02	04	2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SertifikatProduksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentuyang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah rumah tangganyang memperoleh rekomendasi izin PIRT	100 persen		100,000,000	0			
1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								57,750,000	0			
Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target

1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan	93 persen			57,750,000		0		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												145,078,000		0		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												145,078,000		0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah desa siaga aktif,dan Posyandu Mandiri	69 persen			145,078,000		0		
TOTAL															111,155,976,749		0		

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												47,300,000,000	145,277,690,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												34,046,500,000	39,605,116,000	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	337,750,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Penyusunan DokumenDED Rumah Sakit Penyusunan Dokumen Renja RSUD Sidikalang	1 dokumen5 dokumen			0	5,000,000			

1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja RSUD Sidikalang	7 dokumen			0	332,750,000			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									342,000,000	1,214,127,000			
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor RS	1 Tahun			0	133,100,000			
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor RumahSakit	1 Tahun			0	252,890,000			
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Alat/bahan Rumah Tangga Rumah Sakit	1 Tahun			0	180,373,000			
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Bahan bacaan dan peraturan rumah sakit	1 Tahun			0	13,310,000			
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Logistik Rumah Sakit	1 Tahun			0	301,704,000			
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Makanan dan minumanrapat Rapat-rapat koordinasi-konsultasi keluar daerah	12 Bulan 12 Bulan			342,000,000	332,750,000			
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									850,000,000	182,771,000			
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Meubelair Rumah Sakit	10 unit			0	51,160,000			
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh		Pengadaan Alat Cetakdan Penggandaan	1 Set			850,000,000	0			

1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembangunan Tempat Ibadah (Musholla dan Capel) di RS	1 unit			0	0	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor rumah sakit	25 unit			0	131,611,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,404,500,000	3,461,950,000	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jasa Surat Menyurat	1 Tahun			0	3,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			544,500,000	598,950,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jasa Kebersihan Rumah Sakit	1 kegiatan			2,860,000,000	2,860,000,000	
Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										0	556,518,000	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Direktur	1 unit			0	53,240,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Mobil Ambulance/ Jenazah	7 unit			0	292,820,000	

1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan Rutin/berkala peralatanandan perlengkapan gedung kantor, generator, Instalasi listrik, Lampu Taman dan SIMRS	1 Tahun			0	210,458,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										29,450,000,000	33,852,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang PelayananBLUD	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanBLUD	12 Bulan			29,450,000,000	33,852,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										4,626,686,720	94,568,411,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										3,626,686,720	94,125,741,000		
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembangunan bertahap gedung rumah sakit Pembangunan Lanjutan Ruang Operasi Pembangunan ruang pemulasaran jenazah sesuai standar	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan			0	80,000,000,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan RumahSakit	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah ruang rawat inap, rawat jalan, ruang instalasi, ruang administrasi/kantor dan ruang lainnya	1 Tahun			0	1,124,900,000	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas RS	10 unit			0	39,993,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasaranadan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembuatan IPAL RS	1 paket			0	0	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan dan alat alatpenunjang medik rumah sakit	1 kegiatan			2,495,386,720	11,517,318,000	

1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Kemitraan pengolahan limbah/sampah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)	12 Bulan 12 Bulan			611,000,000	931,700,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutindan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Kalibrasi alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit	1 Tahun 12 Bulan			520,300,000	511,830,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,000,000,000	442,670,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang,			Promosi KesehatanRumah Sakit (PKRS)	12 Bulan			0	32,670,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Kesehatan			Batang Beruh									
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pelayanan pasien miskin dan pasien terlanter	12 Bulan			0	110,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi FasilitasKesehatan di Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Akreditasi Rumah Sakit	2 Bintang			1,000,000,000	300,000,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										0	0	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2. DAIRI SEHAT.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pengadaan SIM-RS/SIRS	1 paket			0	0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										8,626,813,280	11,104,163,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										8,126,813,280	10,478,400,000	

1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Apoteker Dokter Internship dokter spesialis/PPDSSenior Dokter Umum Tenaga Ahli lainnya Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisian Medis, dll, teknis perkantoran	4 apoteker 21 dokter Internship11 dokter spesialis 7 dokter umum 2 tenaga ahli lainnya 205 THL			8,126,813,280	10,478,400,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										500,000,000	625,763,000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.			Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Kompetensi SDM Rumah Sakit, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	125 orang			500,000,000	625,763,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
TOTAL																47,300,000,000	145,277,690,000	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											72,659,093,113	109,156,035,730	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											15,045,256,600	16,532,768,230	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15,000,000	18,000,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			5,000,000	6,000,000		

1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPerangkat Daerah	7 Dokumen				10,000,000	12,000,000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,622,417,300	11,684,659,000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan				10,622,417,300	11,684,659,000	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										80,000,000	91,300,000		
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	1 Tahun				30,000,000	36,300,000	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	1 Tahun				50,000,000	55,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,164,500,000	1,318,185,000		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan,			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun				15,000,000	17,545,000	
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Bangunan Kantor			Semua Kelurahan			bangunan kantor							
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat-alatukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun 20 Unit				350,000,000	412,500,000	

1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun			44,000,000	48,400,000	
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			5,500,000	6,050,000	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya makanandan minuman tamu dan rapat-rapat Terselenggaranya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan 12 Bulan			750,000,000	833,690,000	
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										30,000,000	36,300,000	
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya mebeleur	4 Unit			30,000,000	36,300,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya										0	0	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,140,839,300	2,359,757,230	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya surat-menysurat	1 Tahun			10,000,000	11,434,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah	12 Bulan			95,000,000	108,900,000	

1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Tahun			4,071,678,600	4,478,846,460	
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										992,500,000	1,024,567,000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya alat-alatberat Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			800,000,000	809,792,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya mebeleur	1 Tahun			7,500,000	9,075,000	
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun			165,000,000	181,500,000	
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya alat-alatukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun 1 Tahun			20,000,000	24,200,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										2,250,000,000	13,244,000,000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										600,000,000	805,200,000	

1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen Kebijakan. Norma. Standar. Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air	1 dokumen			500,000,000	660,000,000		
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing										0	0		
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 tahun			100,000,000	145,200,000		
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											1,650,000,000	12,438,800,000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen perencanaan	4 dokumen			500,000,000	1,210,000,000		
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Jaringan Irigasi	825 Ha			1,000,000,000	10,890,000,000		
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya operasional pengelolajaringan irigasi dan koordinasi penyelenggaraan irigasi	1 tahun			150,000,000	338,800,000		
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											1,250,000,000	6,028,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											1,250,000,000	6,028,000,000	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbangunnya jaringanair bersih/air minum	2 Lokasi			750,000,000	1,452,000,000		

1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan										0	0		
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya sambungan rumah (SR)MBR SPAM terbangun	1000 SR			0	3,850,000,000		
1 03 03 2.01 08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya JaringanAir Bersih/Air Minum	2 Lokasi			500,000,000	726,000,000		
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										1,000,000,000	2,640,000,000		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										1,000,000,000	2,640,000,000		
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	1 dokumen			500,000,000	660,000,000		
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya bangunan TPS-3R	3 unit			500,000,000	1,980,000,000		
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										600,000,000	2,915,000,000		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										600,000,000	2,915,000,000		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	1 dokumen			300,000,000	440,000,000		

1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDMDan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya SDM dan Kelembagaan PengelolaAir limbah Domestik	45 unit			300,000,000	550,000,000	
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penye diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sambungan Rumah (SR) SPALD terbangun	500 SR			0	1,925,000,000	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										1,550,000,000	2,577,450,000	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,550,000,000	2,577,450,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan										0	0	
1 03 06 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong	1500 meter			800,000,000	1,544,000,000	
1 03 06 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong	1000 meter			650,000,000	868,450,000	
1 03 06 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem drainase	1 Dokumen			100,000,000	165,000,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										8,400,000,000	2,653,667,500	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										8,400,000,000	2,653,667,500	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya Pemberian IMB dan SLF	1 tahun			150,000,000	266,200,000	

1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan GedungDaerah Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terbangunnya bangunan pemerintah/bangunansosial Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan terpeliharanya	1 unit 1 tahun 4 Unit 5 dokumen2 Unit			8,000,000,000	2,057,467,500	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							bangunan pemerintah/bangunansosial tersedianya dokumen perencanaan Tertatanya Kompleks Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial						
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	1 dokumen			250,000,000	330,000,000	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										6,450,000,000	1,821,050,000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										6,450,000,000	1,821,050,000	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokuemn Rencana, Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual serta Strategi dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen			150,000,000	399,300,000	

1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan terlaksananya penataan komplek bangunan pemerintah/bangunan sosial	1 tahun 100 Unit 2 Unit			6,000,000,000	1,179,750,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya lampuhias dan lampu jalan	200 Unit			300,000,000	242,000,000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										33,663,836,513	57,009,100,000	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										33,663,836,513	57,009,100,000	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual penyelenggaraan kebinamargaan tersedianya dokumen perencanaan	1 dokumen 5 Dokumen			225,000,000	2,640,000,000	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terbangunnya jalan	16 KM			6,438,836,513	10,987,900,000	
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			meningkatnya kualitas permukaan konstruksijalan	36 KM			5,000,000,000	5,500,000,000	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan										0	0	

1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya jalan	42 KM			13,750,000,000	28,591,200,000	
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pemeliharaan rutin jalan di 15 kecamatan	33300 Meter			2,000,000,000	2,200,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 03 10 2.01 12	PembangunanJembatan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terbangunnyajembatan	3 Unit			5,000,000,000	5,000,000,000	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan										0	0	
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanyajembatan	10 Unit			500,000,000	660,000,000	
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	1 tahun			750,000,000	1,430,000,000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										200,000,000	490,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										200,000,000	490,000,000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi terlaksananya SOP Pengawasan dan Evaluasi, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi tersedianya SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 orang 1 Dokumen 1 dokumen			200,000,000	490,000,000	

1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										2,250,000,000	3,245,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1,800,000,000	2,530,000,000	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah kabupate	1 dokumen			1,500,000,000	2,200,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan									
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undanganBidang Penataan Ruang	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 tahun			300,000,000	330,000,000	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										250,000,000	330,000,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTRKabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten	1 dokumen			250,000,000	330,000,000	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	165,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang kabbupaten tersedianya dokumen data base	1 dokumen1 dokumen			100,000,000	165,000,000	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										100,000,000	220,000,000	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi penataanruang terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan	1 tahun 1 dokumen			100,000,000	220,000,000	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										8,600,000,000	53,507,458,400	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										150,000,000	187,000,000	
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										150,000,000	187,000,000	

1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua			terselenggaranya pembangunan saranadan prasarana rumahsederhana sehat	1 dokumen			150,000,000	187,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pengembangan Perumahan			Kelurahan									
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										4,150,000,000	36,489,634,500	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										4,150,000,000	36,489,634,500	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen			150,000,000	605,000,000	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan RumahTidak Layak Huni	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rumah layak huni sederhana sehat	250 unit			4,000,000,000	35,884,634,500	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										4,300,000,000	16,830,823,900	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										4,300,000,000	16,830,823,900	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen perencanaan	5 Dokumen			250,000,000	605,000,000	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diPerumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	4660 Meter			4,050,000,000	16,225,823,900	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										900,000,000	3,096,275,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										300,000,000	550,000,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										300,000,000	550,000,000	

2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan,			tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara	1 Dokumen			300,000,000	550,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan			pertanahan kabupaten						
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										600,000,000	2,546,275,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										600,000,000	2,546,275,000	
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terselenggaranya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Dokumen			500,000,000	2,425,000,000	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untukpembangunan kabupatenuntuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten	1 Dokumen			100,000,000	121,275,000	
TOTAL											82,159,093,113	165,759,769,130	

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										8,966,575,510	9,955,197,811	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,452,155,992	7,097,371,591	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,000,000	22,000,000	

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat 2 Dokumen			20,000,000	22,000,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	7 Laporan			10,000,000	11,000,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,466,575,510	3,813,233,061	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan			3,466,575,510	3,813,233,061	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										10,000,000	11,000,000	
1 05 01 2.03 02	Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										242,000,000	266,200,000	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan serta kelengkapannya Bagi Anggota Sat Pol PP	108 stel			200,000,000	220,000,000	
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparat Satpol PP	12 Bulan			42,000,000	46,200,000	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										460,217,300	518,339,030	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Sidikalang,			Terpenuhinya Komponen Instalasi	12 Bulan			8,923,000	9,815,300	

					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Sidikalang			Listrik dan penerangan bangunan						
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan 12 Bulan			82,733,400	103,106,740	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			6,569,400	7,226,340	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	12 Bulan			7,680,000	8,448,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

		an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasidan konsultasi Ke luarDaerah	12 Bulan			358,773,000	394,650,300	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										48,902,150	41,692,365	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gorden Gedung Kantor	19 Set			30,591,000	21,550,100	
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Perlengkapan GedungKantor	12 Unit			18,311,150	20,142,265	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,003,255,232	2,203,580,755	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan			16,500,000	18,150,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	77 Orang			1,986,755,232	2,185,430,755	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										201,205,800	221,326,380	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan 12 Bulan			351,741,600	386,915,760	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			20,340,000	22,374,000	
1 05 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit 8 Unit			4,995,000	5,494,500	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		GERAK CEPAT)											
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										2,514,419,518	2,857,826,220	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										2,145,650,718	2,452,180,540	

1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dinidan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah KabupatenDairi	60 Laporan			123,954,100	135,000,000	
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penteriban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Berkurangnya Gembel, Pengemis dan orang gila yang berkeliaran Jumlah Siswa yang bolos pada jam pelajaran	12 Bulan 12 Bulan			0	76,318,660	
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penertiban praktek prostitusi,penggunaan miinumana keras dan narkoba	12 Bulan			0	31,895,600	
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya petugas pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang	1400 Orang			3,571,086,436	3,928,195,080	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

		an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					terlatih di masyarakat						
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM SatuanPolisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya Meningkatnya Kemampuan bela diri Aparat Satpol PP Kab.Dairi	108 Orang 108 Orang			33,910,000	37,301,000	
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahandan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparat dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	180 Orang			52,243,400	57,567,740	
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Dalmas (pengendalian massa)	66 Set			150,000,000	150,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										368,768,800	405,645,680	

1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati/WaliKota	15 Kecamatan			149,842,000	164,826,200	
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Bupati/WaliKota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kepatuhan masyarakatdan dunia usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan daerah	70 Laporan			218,926,800	240,819,480	
TOTAL											8,966,575,510	9,955,197,811	

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											8,570,081,835	9,427,450,019	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,429,524,835	7,072,837,319	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20,000,000	22,000,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan realisasi program SKPD	7 Laporan			20,000,000	22,000,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,570,081,835	2,827,090,019	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2,570,081,835	2,827,090,019		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											55,000,000	60,500,000	

1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terpenuhinya pengadaan pakaian, sepatu, topi lapangan	50 Set			55,000,000	60,500,000			
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	1 Kegiatan			0	0			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									778,317,304	856,149,034			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			18,150,000	19,965,000			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terpenuhinya jasa alat tulis kantor Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan 12 Bulan			87,287,304	96,016,034			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan			32,930,000	36,223,000			
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terpenuhinya jasa bahan-bahan bacaan,koran dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			18,150,000	19,965,000			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan 12 Bulan			621,800,000	683,980,000			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									75,000,000	82,500,000			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terlaksananya pengadaan mebel	1 Paket			0	0			
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	12 Unit			75,000,000	82,500,000			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,328,533,696	2,561,747,066			

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan				38,720,000	42,952,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran dan pengamanan kantor	12 Bulan				2,289,813,696	2,518,795,066	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										602,592,000	662,851,200		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas jabatan	12 Bulan				39,407,950	43,348,745	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional lapangan	12 Bulan				400,974,050	441,071,455	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan				150,000,000	165,000,000	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terpeliharanya peralatan gedung kantorr	12 Bulan				12,210,000	13,431,000	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												1,280,557,000	1,408,612,700		
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota												100,000,000	110,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana Alam/Non Alam	1 Dokumen				0	0	

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Meningkatnya jumlah masyarakat menerima pembinaan penanggulangan bencana	500 Orang			100,000,000	110,000,000		
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										630,557,000	693,612,700		
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam	1 Dokumen			0	0		
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahandan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terikutinya kegiatan PRB, dan Jambore Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan			75,000,000	82,500,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasidan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terlaksananya pelatihan peningkatankapasitas personil Satgas BPBD	1 Kegiatan			0	0		
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya peralatan untuk penanggulangan bencana	1 Paket			255,557,000	281,112,700		
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bantuan bahan baku atau peralatan bangunan atau tenaga ahli pendamping bagi masyarakat korban bencana	1 Paket			100,000,000	110,000,000		
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi			Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terpenuhinya dokumen rencana kontijensi bencana alam/non alam	1 Dokumen			0	0		

1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terlaksananya Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional Terlaksananya simulasi kesiapsiagaan segenap stakeholder menghadapi bencana	1 Kegiatan 300 Orang			200,000,000	220,000,000	
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Alam/Non Alam	1 Dokumen			0	0	
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											200,000,000	220,000,000	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			Terlaksananya penanggulangan bencana kejadian luar	1 Tahun			0	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Zoonosis Prioritas						Semua Kelurahan			biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas							
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Fasilitas dan Koordinasi Dana Siap Pakai	12 Bulan 1 Paket			150,000,000	165,000,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana	1 Paket			50,000,000	55,000,000	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penanggulangan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	1 Tahun			0	0	
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											350,000,000	385,000,000	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana	1 Dokumen			0	0	

1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	10 Desa/Kelurahan			350,000,000	385,000,000		
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Paket			0	0		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												860,000,000	946,000,000		
1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												860,000,000	946,000,000	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam	6. Infrastruktur Konektivitas		Kab. Dairi, Sidikalang,			Terlaksananya pencegahan dan	12 Bulan			760,000,000	836,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Daerah Kabupaten/Kota				Wilayah.		Huta Rakyat			penanggulangan bahaya kebakaran								
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	1 Paket			100,000,000	110,000,000		
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Huta Rakyat			Terlaksananya Pembinaan, pendikidkandan pelatihan aparaturn pemadam kebakaran	1 Kegiatan			0	0		
1	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran												0	0	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	1 Kegiatan			0	0		
TOTAL															8,570,081,835	9,427,450,019		

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												5,890,203,930	2,529,600,000	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,545,203,930	976,000,000	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000	15,000,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya penyusunan Laporan	7 dokumen			10,000,000	15,000,000			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,590,203,930	0	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									2,590,203,930	0			
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												458,928,000	525,000,000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan			20,000,000	25,000,000			
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor tersedianya alat tuliskantor	12 bulan 12 bulan			82,928,000	95,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			20,000,000	25,000,000	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan			16,000,000	20,000,000	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya makan dan minuman rapat tersedianya perjalanandinas dalam dan luar daerah	12 bulan 12 bulan			320,000,000	360,000,000	
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										160,000,000	100,000,000	
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Perlengkapan Gedungkantor	10 Unit			160,000,000	100,000,000	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										166,072,000	116,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								20,000,000	0	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan		20,000,000	21,000,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		tersedianya jasa administrasi keuangan	13 bulan		126,072,000	95,000,000	
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									160,000,000	220,000,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terpeliharanya kendaraan dinas operasional terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan 12 bulan		80,000,000	110,000,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terpeliharanya gedung kantor dinas	12 bulan		80,000,000	110,000,000	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
				Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										715,000,000	395,000,000	
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)									165,000,000	170,000,000	

1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat KAT	40 kk				165,000,000	170,000,000		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									550,000,000	225,000,000			
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							350,000,000	120,000,000		
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terbina dan terlatihnyaketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) Terselenggaranya bulan bhakti dalam rangka hari kesetikawanan sosial	60 kk 1 kegiatan				100,000,000	0		
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialKelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terlaksananya penilaian dan pemberian bantuan sarana prasarana organisasi nkarang taruna	1 tahun				100,000,000	105,000,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												720,000,000	133,600,000		
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												720,000,000	133,600,000	

1	06	04	2.01	03	Penyediaan AlatBantu	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuanbagi penyandang disabilitas	40 orang				120,000,000	105,000,000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual,dan Sosial	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										150,000,000	0	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										50,000,000	0	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengadaan Panti Sosial/Rumah Singgah/Rumah Bersama yang menyediakan Sarana Parsarana Pelyanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten	1 unit 20 orang				350,000,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
										Tertanganinya Gelandangan dan Pengemis								

1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		jumlah penyandang disabilitas anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	10 orang			50,000,000	28,600,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									500,000,000	660,000,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									500,000,000	660,000,000	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		tersedianya data penduduk miskin dan PMKS yang valid	16525 orang			450,000,000	605,000,000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terlaksananya koordinasi pelaksanaanpenyaluran Bansos	12 bulan			50,000,000	55,000,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA									360,000,000	255,000,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									160,000,000	55,000,000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		tersedianya peralatan dan logistik bufferstock	1 tahun			80,000,000	55,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan an Nasional					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		tersedianya peralatan dan logistik bufferstock	1 tahun			80,000,000	0	

1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								200,000,000	200,000,000			
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		terlaksananya pemberian tali asih kepada tagana	22 orang		200,000,000	200,000,000		
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										50,000,000	110,000,000		
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										50,000,000	110,000,000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Twerpeliharanya Taman makam pahlawan	12 bulan		50,000,000	110,000,000		
TOTAL													5,890,203,930	2,529,600,000		

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											5,577,281,364	5,801,572,404	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,643,825,664	4,774,771,134	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											16,500,000	18,150,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya dokumen perencanaan	2 dokumen			8,500,000	9,350,000			

2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya laporan kinerja dan keuangan SKPD	5 dokumen			8,000,000	8,800,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,334,370,964	3,334,370,964	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									3,334,370,964	3,334,370,964	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										95,000,000	104,500,000	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	12 orang			95,000,000	104,500,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					dan Fungsi	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										685,094,700	753,604,170	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			18,000,000	19,800,000	

2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan- bahan pembersih kantor	12 bulan 12 bulan			142,000,000	156,200,000	
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggunaan	12 bulan			116,019,700	127,621,670	
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Eksemplar koran			9,075,000	9,982,500	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya perjalanan dinas Terpenuhinya Makanandan Minuman Rapat Tersedianya uang lembur/pengganti uang makan lembur PNS	12 bulan 12 bulan 12 bulan			400,000,000	440,000,000	
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										123,810,000	136,191,000	

2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Mebeulair	1 Tahun			50,000,000	55,000,000	
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			73,810,000	81,191,000	
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										259,050,000	284,955,000	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan			6,050,000	6,655,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya baya telepon, listrik dan air	12 bulan			50,000,000	55,000,000	

2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya jasa perbaikan peralatankantor	12 bulan			30,000,000	33,000,000	
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan			173,000,000	190,300,000	
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										130,000,000	143,000,000	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara Dinas		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional	6 unit 1 Tahun			100,000,000	110,000,000	
Kode	Usuran/ BidangUsuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo			Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun			30,000,000	33,000,000	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										100,600,000	110,660,000	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										100,600,000	110,660,000	

2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya data base tenaga kerja daerah	1 dokumen			100,600,000	110,660,000	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										693,253,200	762,578,520	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										644,000,000	708,400,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilanbagi pencari kerja Terlaksananya pengembangan teknologi tepat guna	32 orang 32 orang 20 orang 16 orang			644,000,000	708,400,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Terlaksananya Penyiapan tenaga kerjasiap pakai berbasis masyarakat						
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										49,253,200	54,178,520	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	16 orang			49,253,200	54,178,520	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										26,467,500	29,114,250	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										26,467,500	29,114,250	

2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenagakerja	500 orang			26,467,500	29,114,250	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										113,135,000	124,448,500	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										73,205,000	80,525,500	
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100 orang			73,205,000	80,525,500	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										39,930,000	43,923,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					Terlaksananya Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	0 orang			0	0	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional LembagaKerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	1 dokumen			39,930,000	43,923,000	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										757,089,600	1,178,173,040	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										70,523,200	0	

2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										70,523,200	0	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen profil investasi	1 dokumen			70,523,200	0	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										160,000,000	598,950,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										160,000,000	598,950,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Terlaksananya Temu Bisnis Penanaman Modal	1 kali			80,000,000	199,650,000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan									
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya promosi investasi	2 kali			80,000,000	399,300,000	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										336,800,000	370,480,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										336,800,000	370,480,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	120 orang			96,800,000	106,480,000	

2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinandan Non Perizinan Penanaman Modal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi Tim TeknisPerizinan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kabupaten Dairi	1 Tahun 1 Tahun			200,000,000	220,000,000	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tertanganinya pengaduan masyarakat	1 Tahun			40,000,000	44,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										114,950,000	126,445,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										114,950,000	126,445,000	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya sosialisasi tata cara penyusunan LaporanKegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	1 Tahun 1 kali			37,950,000	41,745,000	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya sosialisasi tata cara penyusunan LaporanKegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	1 Tahun 1 kali			38,500,000	42,350,000	

2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya sosialisasi tata cara penyusunan LaporanKegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	1 Tahun 1 kali			38,500,000	42,350,000	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										74,816,400	82,298,040	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										74,816,400	82,298,040	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik Tersusunnya Buku IKM	1 Sistem 1 buku			74,816,400	82,298,040	
TOTAL											6,334,370,964	6,979,745,444	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										4,532,583,354	4,927,862,259	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,883,291,054	4,256,904,839	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,000,000	16,500,000	

2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen			9,000,000	9,900,000	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerjaSKPD	2 dokumen			6,000,000	6,600,000	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,877,528,304	3,165,281,134	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. DAIRI SEHAT.					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			2,877,528,304	3,165,281,134	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										474,865,438	522,351,982	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya alat tulis kantor dan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, alat-alat komponen listrik dan intalasi listrik Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, alat-alat komponen listrik dan intalasi listrik	12 bulan 12 bulan			95,570,838	105,127,922	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			29,078,600	31,986,460	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
								Semua Kelurahan									
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Terpenuhinya biaya makanan dan minuman Rapat	12 bulan 12 bulan			350,216,000	385,237,600	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										68,640,000	75,504,000	

2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Gedung kantor Tersedianya perlengkapan Gedung kantor	1 tahun 1 tahun			68,640,000	75,504,000			
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										175,214,112	192,735,523			
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya belanja jasa Surat Menyurat	84 orang/bulan			151,214,112	166,335,523			
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			24,000,000	26,400,000			
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										272,043,200	284,532,200			
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Roda dua dan roda empat Terpenuhinya pajak kendaraan dinas/ operasional roda dua dan roda empat	6 Unit 32 Unit			124,890,000	137,379,000			
Kode	Kode				Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan Rumah Gedung Kanto	1 tahun			147,153,200	147,153,200			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										299,292,300	299,292,300			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										201,980,300	201,980,300			
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta advokasi Dan Fasilitasi PUG bagi Perangkat Desa	169 orang			149,616,700	149,616,700			

2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Sosialisasi/pelatihan GAB, GBS dan TOR	80 orang			52,363,600	52,363,600	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										97,312,000	97,312,000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Peduli HKSR	50 orang			90,892,000	90,892,000	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Industri Rumah Tangga	50 orang			51,866,000	51,866,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										115,703,000	115,703,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										115,703,000	115,703,000	
	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Prioritas Pembangunan an Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							231,406,000	231,406,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										105,350,400	114,120,860	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										17,645,800	17,645,800	

2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan gugus tugas	100 orang			17,645,800	17,645,800	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										87,704,600	96,475,060	
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Penguatan KonvensiHak Anak Jumlah peserta penyelenggaraan hari anak	150 orang 100 anak			76,817,800	84,499,580	
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasHidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kecamatan yang mendukung sekolah ramah anak	3 kecamatan			21,773,600	23,950,960	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										128,946,600	141,841,260	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										128,946,600	141,841,260	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadapAnak Kewenangan Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok Fasilitasi Pengembangan PATBM Jumlah kelompok penerima fasilitas forum anak	30 kelompok4 kelompok			128,946,600	141,841,260	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										244,944,950	254,439,450	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										184,944,950	188,439,450	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										184,944,950	188,439,450	

2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya DokumenGrand Design Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen			149,999,950	149,999,950	
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat Koordinasi Program KKBPk	150 orang			34,945,000	38,439,500	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										60,000,000	66,000,000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal										60,000,000	66,000,000	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2. DAIRI SEHAT.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya KB Barudan Aktif, bekerjasama dengan PKK , IBI dan TNI melaksanakan pelayanan KB	180 orang			60,000,000	66,000,000	
TOTAL															4,777,528,304	5,182,301,709	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											0	0	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											0	0	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									0	0			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											18,567,982,205	19,922,709,000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											18,267,982,205	19,471,013,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000	

2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen perubahan Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen			5,000,000	5,000,000		
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen			5,000,000	5,000,000		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										14,252,982,205	11,354,000,000		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			14,252,982,205	11,354,000,000		
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)													
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										343,750,000	640,000,000		
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) tanaman kopi	5 Orang 10 Kelompok			343,750,000	640,000,000		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										694,004,528	1,365,387,000		

2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan			21,629,000	39,930,000			
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya keperluanalat tulis kantor, Tersedianya alat - alatkebersihan	12 Bulan			132,144,400	305,379,000			
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			125,250,000	241,443,000			
Kode	Kode				Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Keterangan		
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
						Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)													
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan perundang -undangan	12 Bulan			30,000,000	39,930,000			

2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makanan dan minumanrapat dan harian pegawai.	12 Bulan			384,981,128	738,705,000	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									360,000,000	1,403,150,000	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terfasilitasinya penyuluh pertanian	26 unit			0	780,000,000	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tersedianya Mebeleurkantor dan BPP	50 unit			0	223,850,000	
Kode		Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tersedianya peralatan gedung kantor	20 unit			330,000,000	363,000,000	

2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan gedungkantor	5 unit			30,000,000	36,300,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,387,885,472	4,012,206,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik	12 bulan			112,500,000	125,500,000	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dana pendukung administrasi perkantoran dan Penyuluh Pertanian Lapangan	12 Bulan			2,275,385,472	3,886,706,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					GERAK CEPAT)												
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										219,360,000	686,270,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas secararutin dan berkala	72 unit			129,360,000	400,000,000	

2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Kebutuhan jasa perizinan Kendaraan Dinas	1 Tahun			20,000,000	26,620,000	
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12 Bulan			30,000,000	199,650,000	
2 09 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala	1 Tahun			40,000,000	60,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										0	0	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0	
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya										0	0	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										230,000,000	301,696,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										80,000,000	88,000,000	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Termanfaatkannya lahan pekarangan untuk pengembanganpangan	10 Desa			80,000,000	88,000,000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										100,000,000	158,696,000	

2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan pola konsumsi dan suplai bahan	1 Laporan			100,000,000	158,696,000			
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										50,000,000	55,000,000			
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pameran bahan pangan/hasil olah berbahan dasar panganlokal	2 Pameran			50,000,000	55,000,000			
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										70,000,000	150,000,000			
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										70,000,000	150,000,000			
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tertanganinya daerah rawan pangan	15 Desa			70,000,000	150,000,000			
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														400,000,000	452,000,000		
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														400,000,000	452,000,000	
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												150,000,000	177,000,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas PembudiDaya Ikan Kecil	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemdampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan sebagai kelompok percontohan	10 Kelompok			150,000,000	177,000,000			
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												250,000,000	275,000,000		

3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3. AGRI UNGGUL					Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan kec.Lae Parira Tersedianya operasional UPTD Perbenihan dan pembibitan Kec.Sumbul	1 Tahun 1 Tahun			250,000,000	275,000,000	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										5,285,000,000	39,220,614,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										3,185,000,000	24,836,017,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										2,835,000,000	21,656,017,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan alsintan/operasional	1 tahun			70,000,000	450,101,000	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3. AGRI UNGGUL		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pembibitan dan Pembenihan Terlaksananya Kegiatan Pembibitan dan	1 Tahun 1 Tahun 100 Ha 100 Ha 10			2,765,000,000	21,205,916,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

							Pembenihan Kecamatan SidikalangTerlaksananya penerapan metode optimasi lahan padi gogo Terlaksananya penerapan metode SRI padi sawah Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Populasi Budidaya Ternak Kecil Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Penerapan LBNF (Low Budget Natural Farming) Terlaksananya revitalisasi UPTD perbenihan dan pembibitan Terlaksananya Sosialisasi penerapan sistem kartu tani Tersedianya Bibit Tanaman Jagung Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan, Bibit Kopi Bibit Kakao Bibit Kemiri Bibit Gambir Pohon Pelindung Kopi Tersedianya Bibit Unggul Komoditi Perkebunan pada UPTD Sidikalang dan UPTD Gunung Sayang,	Kelompok15 Demfarm2 Unit 15 Kecamatan 11000 Kg 360000 Batang 70000 Batang 205000 Kg/ gram/ Batang					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Tersedianya sarana produksi tanaman hortikultura Bibit jeruk manis , Bibit kentang, Bibit Wortel, Bibit Tomat, Bibit Cabe Merah, Bibit Kubis, BibitManggis, Bibit Durian, Bibit Duku, Bibit Alpukat,Bibit Petay, Bibit Jengkol						
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota										350,000,000	1,780,000,000	
3 27 02 2.05 04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya alat dan mesin pengolah pakanternak	5 unit			0	400,000,000	
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternakdan Hijauan Pakan Ternak	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatana Produksi Budidaya Ternak Unggas	10 Kelompok			350,000,000	1,380,000,000	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain										0	1,400,000,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dariDaerah Kabupaten/Kota Lain	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya populasi ternak (sapi potong dan kerbau)	8 Kelompok			0	1,400,000,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										1,000,000,000	7,832,400,000	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										1,000,000,000	7,832,400,000	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jaringan irigasi tersier	6 unit			1,000,000,000	3,600,000,000	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			embung pertanian	5 unit			0	600,000,000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										0	0	
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dam parit	15 unit			0	1,800,000,000	
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertaniandi Kecamatan serta Tersedianya sarana Pendukung BPP di Kecamatan	5 unit			0	1,832,400,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										0	0	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER										300,000,000	773,950,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										300,000,000	773,950,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan/TernakTersedianya Alat, Bahan dan Obat- obatan Kesehatan	25 vaksin 25 Jenis			300,000,000	773,950,000	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Hewan.						
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										300,000,000	3,102,000,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										300,000,000	3,102,000,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), Insektisida, Fungisida,Agen hayati Tersedianya bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), Insektisida, Fungisida,Rodentisida ,Agen Hayati	3000 Kg/liter 11000 Kg/liter			300,000,000	3,102,000,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										500,000,000	2,676,247,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										500,000,000	2,676,247,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kursus Tani Pelatihan Softskill Terlaksananya Demplot Percontohan Penyuluh Pertanian Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan Penyuluh Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	22 desa 116 orang 169 unit 3 Kelembag aan 12 Kali			320,000,000	1,256,247,000	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbinanya Desa Percontohan Binaan Tim PKK	25 Desa			90,000,000	1,060,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3. AGRI UNGGUL.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Optimalnya balai penyuluhan pertanian	9 BPP			90,000,000	360,000,000	
													TOTAL	24,252,982,205	59,595,323,000	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												20,246,686,962	22,035,459,658	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5,149,116,962	5,665,028,658	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												24,200,000	27,620,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										14,200,000	16,620,000			
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			10,000,000	11,000,000				
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,246,686,962	3,571,355,658	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan			3,246,686,962	3,571,355,658				
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												121,000,000	133,100,000	

2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Diklat Formal Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur	5 Orang			121,000,000	133,100,000	
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						GERAK CEPAT)											
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											660,445,000	726,489,500	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan			14,520,000	15,972,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			65,125,000	71,637,500	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			36,300,000	39,930,000	

2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			12,100,000	13,310,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan			532,400,000	585,640,000	
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											619,525,000	681,477,500	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	10 unit			56,410,200	62,051,220	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	17 unit			430,948,100	474,042,910	

2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit				132,166,700	145,383,370		
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										58,685,000	64,553,500			
					Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan				4,235,000	4,658,500		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan air	12 Bulan				54,450,000	59,895,000		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										418,575,000	460,432,500			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan				201,720,000	221,892,000		

2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan			14,000,000	15,400,000		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan an Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunanlainnya	12 Bulan			187,755,000	206,530,500		
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			15,100,000	16,610,000		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												1,758,745,000	2,137,723,500		
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												408,000,000	448,800,000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan	2 Dokumen			408,000,000	448,800,000		
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												1,350,745,000	1,688,923,500	

2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan	1 Dokumen			850,745,000	935,819,500		
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan				
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
			GERAK CEPAT)															
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen pengkajian dampak lingkungan	1 Dokumen			0	203,104,000		
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									500,000,000	550,000,000		
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												1,682,525,000	1,850,777,500		
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												200,000,000	220,000,000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpantaunya kualitas lingkungan hidup, terpenuhinya pengembangan data dan informasi lingkungan dan terpenuhinya operasional laboratorium	1 Dokumen			200,000,000	220,000,000		
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												110,000,000	121,000,000	

2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyuluhan dan pengendalian polusidan pencemaran	25 Usaha			110,000,000	121,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	pada Masyarakat	an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										1,372,525,000	1,509,777,500	
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Rehabilitasi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembangunan pencegah longsor ramah lingkungan terlaksananya peningkatan konservasidaerah tangkapan air dan sumber-sumber air dan terpenuhinya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan SDA	3 Unit 10000 Batang			1,372,525,000	1,509,777,500	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										2,285,800,000	2,074,380,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										2,285,800,000	2,074,380,000	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penyusunan profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen			400,000,000	0	

2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya RTH dan terlaksananya pengembangan RTH	1 Tahun			1,885,800,000	2,074,380,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										60,000,000	66,000,000	
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										60,000,000	66,000,000	
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengelolaan B3 dan limbah B3	20 Usaha			60,000,000	66,000,000	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										150,000,000	165,000,000	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										150,000,000	165,000,000	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	25 Usaha			150,000,000	165,000,000	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH										70,000,000	77,000,000	
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										70,000,000	77,000,000	

2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidanglingkungan	1 MHA			70,000,000	77,000,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										400,000,000	440,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										400,000,000	440,000,000	
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup dan lomba pengetahuan lingkungan hidup tingkat Kabupaten Dairi	50 Sekolah			400,000,000	440,000,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										241,000,000	265,100,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										241,000,000	265,100,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembinaan sekolah menuju adiwiyata Terpenuhinya koordinasi penilaiankota sehat/adipura Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup	30 Sekolah 1 Tahun 1 Tahun			241,000,000	265,100,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										8,449,500,000	9,294,450,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah										8,449,500,000	9,294,450,000	

2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan sampah	1 Dokumen			150,000,000	165,000,000	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Penataan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua			Terpenuhinya operasionalisasi persampahan, tersedianya Pakaian	1 Tahun			5,204,500,000	5,724,950,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan			Kerja Lapangan Petugas Kebersihan, Tersedianya Makanan Tambahan (Ekstra Puding), terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung ADM Teknik Perkantoran dan terlaksananya peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan						
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	100 Orang			150,000,000	165,000,000	

2 11 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan KerjasamaPengelolaan Persampahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	1 Dokumen			0	0	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sarana dan prasarana persampahan, terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan persampahan, tersedianya alat	1 Tahun			2,945,000,000	3,239,500,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		GERAK CEPAT)					pengangkutan sampahdan tersedianya lahan tempat pembuangan sementara						
TOTAL											20,246,686,962	22,035,459,658	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										8,466,707,767	10,431,768,247	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,216,707,767	9,031,768,247	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,000,000	20,000,000	

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya laporancapaian kinerja dan realisasi kinerja OPD	20 dokumen			22,000,000	20,000,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,666,707,767	4,960,707,767	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			4,666,707,767	4,960,707,767	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										630,939,520	1,606,000,000	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik	100 %			25,000,000	30,000,000	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			Terpenuhinya alat tulis kantor dan biaya peralatan dan	100 %			244,939,520	802,000,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan			perlengkapan kantor							

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100 %			96,000,000	104,000,000	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan kantor	100 %			15,000,000	15,000,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										250,000,000	655,000,000	
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											970,000,000	1,080,000,000	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan gedungkantor	100 %			400,000,000	540,000,000	
	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %			570,000,000	540,000,000	
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											764,060,480	773,060,480	

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya biaya rehabilitasi gedung kantor	100 %			44,000,000	47,000,000		
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100 %			49,000,000	55,000,000		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												1,250,000,000	1,400,000,000		
2	12	04	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												1,250,000,000	1,400,000,000	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pelayanan administrasikependudukan	100 %			1,250,000,000	1,400,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
TOTAL															8,466,707,767	10,431,768,247		

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												6,994,613,501	7,410,010,664	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,303,048,465	3,455,010,664	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												12,000,000	15,000,000	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12 Bulan			12,000,000	15,000,000			
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,494,613,501	2,494,613,000	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2,494,613,501	2,494,613,000			
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												427,494,000	594,000,000	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan			9,500,000	12,000,000			
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			90,000,000	110,000,000			
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			30,000,000	40,000,000			
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan			8,000,000	12,000,000			
					Urusan/ BidangUrusan				Indikator Kinerja								Keterangan		

Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
				Kelurahan									
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan			289,994,000	420,000,000	
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										148,000,000	100,000,000	
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksanya pengadaanlemari Arsip Tempahan	2 set			50,000,000	0	
2 13 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Printer	4 unit 4 unit			98,000,000	100,000,000	
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										108,437,664	109,397,664	
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Surat Menyurat	12 Bulan			2,040,000	3,000,000	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ersedianya air dan listrik Kantor	12 Bulan			19,989,600	19,989,600	
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri					Tersedianya tenaga pendukung administrasi / teknisperkantoran	4 Orang			86,408,064	86,408,064	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										112,503,300	142,000,000	

2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas / Operasional	1 unit			76,503,300	80,000,000		
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan gedungkantor	1 unit			30,000,000	50,000,000		
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			6,000,000	12,000,000		
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA												100,000,000	50,000,000		
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa												100,000,000	50,000,000	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	2 Kali			50,000,000	50,000,000		
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kerjasama antar desa	100 %			50,000,000	0		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												2,941,565,036	3,205,000,000		
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												2,941,565,036	3,205,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan an Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan	2 Kali			160,000,000	200,000,000		

2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi perbub Jumlah Perbup yang ditetapkan Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa	161 Desa 6 Perbub 161 Desa			160,000,000	180,000,000	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perdes tentangAPB Desa yang ditetapkan Persentase desa dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuanyang berlakuTerlaksananya Pembayaran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	161 Desa 100 % 100 % 12 Bulan			2,351,565,036	2,400,000,000	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembinaan AparaturPemerintah Desa	161 Desa			100,000,000	200,000,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)		Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembentukan Bumdes dan Bumdes Bersama	25 Bumdes			85,000,000	150,000,000	

2	13	04	2.01	11	Fasilitasi PenyusunanProfil Desa	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Profil Desa sesuai standard	27 Desa			50,000,000	60,000,000		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Cepat berkembang	5 Desa			115,000,000	115,000,000		
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												650,000,000	700,000,000		
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												650,000,000	700,000,000	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %			50,000,000	100,000,000		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk terlaksananya Jambore	15 Posyantek des 2 Kali			150,000,000	150,000,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Kelurahan			Teknologi Tepat Guna							
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya swadaya gotong -royong masyarakat dalam pembangunan desa	15 Kecamatan			100,000,000	100,000,000		

2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Desa binaan PKK yang diperlombakan	10 Desa			350,000,000	350,000,000	
TOTAL															6,994,613,501	7,410,010,664	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											6,956,180,367	4,400,000,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,278,230,367	2,554,255,000	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											2,000,000	2,200,000	
2	15	01	2.01	01	PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen			2,000,000	2,200,000		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,956,180,367	0	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gaji danTPP ASN	12 Bulan			2,956,180,367	0		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											150,000,000	165,000,000	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan SDM	1 Tahun			150,000,000	165,000,000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											688,000,000	756,800,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan			15,000,000	16,500,000		

2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jenis dan jumlah alat tulis kantor Penyediaan alat danbahan kebersihan kantor	12 Bulan 12 Bulan			85,000,000	93,500,000	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			18,000,000	19,800,000	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Bahan Bacaan	12 Bulan			20,000,000	22,000,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapatyang tersedia Rapat-Rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan 12 Bulan			1,100,000,000	1,210,000,000	
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											18,750,000	20,625,000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya peralatan gedung kantor (televisi monitor CCTV)	5 unit			18,750,000	20,625,000	
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											558,448,384	614,293,222	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Biaya Rekening Air danListrik	12 Bulan			40,000,000	44,000,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya gaji THL	12 Bulan			518,448,384	570,293,222	
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											904,851,616	995,336,778	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terusnya pajak/STNK kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			24,851,616	27,336,778	

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan			650,000,000	715,000,000		
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			30,000,000	33,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan			200,000,000	220,000,000		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												1,677,950,000	1,845,745,000		
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												797,950,000	877,745,000	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira Kab. Dairi, Silahisabungan, Silalahi III			Coldplast Deliniatur/Patok Tikungan Marka Jalan/Marka putih Pagar pengaman jalan Papan Nama Jalan RPPJ uk. 120x120 m Zebra Cross	450 m 240 unit 500 meter 100 m 20 unit 3 unit 100 m			1,595,900,000	1,755,490,000		
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												250,000,000	275,000,000	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jumlah Kendaraan Laik Jalan	5000 kendaraan			190,000,000	209,000,000		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpeliharanya saranadan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 unit			60,000,000	66,000,000		
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												240,000,000	264,000,000	

2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas, warning light/traffic light dan CCTV	290 unit			140,000,000	154,000,000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terbentuk dan terlaksananaya Forum LLAJ sehingga	1 Dokumen			100,000,000	110,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
										terlaksanan koordinasi kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan							
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									190,000,000	209,000,000		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan RekomendasiAndalalin	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terlaksananya apel dan kampanye tertib berlalu lintas pada sekolah-sekolah Terwujudnya pengamanan lalu lintaspada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu/darurat	11 kegiatan 20 hari			190,000,000	209,000,000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									200,000,000	220,000,000		
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Penataan Jaringan Trayek Perkotaan/Perdesaan Terlaksananya inspeksi,audit dan pemantauan keselamatan angkutan umum dijalan Tersedianya Data Base pelayanan angkutan dijalan Kabupaten/Kota	1 Peta Jaringan Trayek 4 Kegiatan 1 Dokumen			400,000,000	440,000,000	
TOTAL															6,956,180,367	4,400,000,000	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												12,070,014,452	11,877,236,879	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,357,638,117	4,068,739,644	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,000,000	24,200,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Renja Dinas Kominfo	1 Dokumen			11,000,000	0			
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	2 Dokumen			11,000,000	24,200,000			
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,370,871,152	2,607,958,267	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji ASN	1 Tahun			2,370,871,152	2,607,958,267			
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												110,000,000	0	
2	16	01	2.05	01	Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0			
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan			110,000,000	0			
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												700,766,000	765,828,800	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			Kab. Daiiri, Semua Kecamatan,			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	12 Bulan			16,522,000	16,423,990			

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Bangunan Kantor			Semua Kelurahan									
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan			108,064,000	113,406,810	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			22,000,000	22,000,000	
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			48,180,000	107,998,000	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luardan Dalam Daerah Tersedianya Makanan Minuman	12 Bulan 12 Bulan			506,000,000	506,000,000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										106,682,400	109,789,900	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Mebeleur	20 Unit			0	30,580,000	
2 16 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Perlengkapan GedungKantor	1 Tahun			106,682,400	79,209,900	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										706,031,005	176,955,680	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			Tersedianya Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan			143,000,000	143,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas

	Program/ Kegiatan	Daerah			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	(Rp.)	(Rp.)	Pembangunan Nasional
				Semua Kelurahan									
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			16,500,000	16,977,840	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Jasa Tenaga Honor	12 Bulan			546,531,005	16,977,840	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										341,287,560	384,006,997	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bulan			118,448,660	137,827,987	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional	1 Tahun			31,000,000	4,047,010	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun			165,000,000	216,383,200	
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor	12 Bulan			26,838,900	25,748,800	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										2,511,115,400	2,186,965,957	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										2,511,115,400	2,186,965,957	

2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower)	1 Tahun			88,605,000	50,101,117	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Kontendan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Yang BersifatPenyuluhan Bagi Masyarakat(Baliho, Spanduk dan Banner)	1 Tahun			385,000,000	257,011,040	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendokumentasian SPM Kominfo Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan komunikasi dan Informasi(menyiar)	12 Bulan 100 % 12 Bulan			383,196,000	293,799,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Aplikasi Lapor Call Center 112PPID	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			332,000,000	83,454,800	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Informasi Publik(Rilis Pers) Yang Dihasilkan Jumlah Informasi PublikYang Dihasilkan Jumpa pers Media Center	4200 eks tabloid 10 Media 4 kali 1 Media Center			1,166,000,000	1,282,600,000	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura)	6 Kelompok15 Kelompok			0	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
								Terlaksananya Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM									

2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kualitas SDM Bidang komunikasi dan Informasi	1 Tahun			101,314,400	220,000,000		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Mediadan Kemitraan Komunitas			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya BAKOHUMAS di Kabupaten Dairi	1 BAKOHUMAS			55,000,000	0		
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												5,201,260,935	5,621,531,278		
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												433,763,000	139,055,109	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tereksposnya potensi Program Pembangunandan Hasil Pembangunan di Kab. Dairi melalui Website	12 Bulan			55,418,000	14,921,500		
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sistem dan Jaringan Internet yang baru	10 Titik			378,345,000	124,133,609		
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												4,767,497,935	5,482,476,169	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaanwebsit e	12 Bulan			96,211,500	105,832,650		
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem KomunikasiIntra Pemeintah			Kab. Dairi, Semua Kecamatan,			Tersedianya Bandwith Internet	144 Titik			3,336,399,145	3,780,039,059		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Daerah						Semua Kelurahan											
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis PemerintahanBerbasis Elektronik			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Sistem Aplikasi Kepemrintahanuntuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government	12 Bulan			990,000,000	1,252,067,410		

2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi	1 Tahun			344,887,290	344,537,050	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										133,302,400	16,855,542	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										133,302,400	16,855,542	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										133,302,400	16,855,542	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Termutakhirnya Data Statistik Sektoral	28 Data			23,146,200	16,855,542	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Data Statistik Daerah	100 %			110,156,200	0	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										167,554,300	29,900,530	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										167,554,300	29,900,530	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										33,000,000	29,900,530	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terciptanya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Daerah	1 Jarkom sanda			33,000,000	29,900,530	
	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Kabupaten/Kota												
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										134,554,300	0	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terkelola dan Terpeliharanya Materiil Sandi, Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian serta Jaring Komunikasi Sandi Daerah	50 Peserta			134,554,300	0	
TOTAL															12,370,871,152	11,923,992,951	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											555,610,000	320,771,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											100,000,000	0	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											100,000,000	0	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Koperasi yang Melakukan RAT	35 Koperasi			100,000,000	0		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											200,000,000	0	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											200,000,000	0	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pelaksanaan LTTK Tk. Kabupaten dan Tk. Wilayah	25 Koperasi			200,000,000	0		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											255,610,000	320,771,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											255,610,000	320,771,000	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pelatihan kewirausahaan	30 orang			155,450,000	192,995,000		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			terlaksananya pengembangan usaha mikro	100 UKM			100,160,000	127,776,000		
					Urusan/ BidangUrusan					Indikator Kinerja							Keterangan	

Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		keativitas (DAIRI KREASI).		Kelurahan									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										2,094,702,720	2,255,538,800	
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,445,000	6,000,000	
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,445,000	6,000,000	
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersediarnya jasa air listrik telepon	12 bulan			5,445,000	6,000,000	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										646,902,720	864,712,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										646,902,720	864,712,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya sosialisasidan revitalisasi pasar tradisiol	1 tahun			646,902,720	864,712,000	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										212,355,000	98,826,800	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										212,355,000	98,826,800	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pengumpulan pengolahan publikasidata harga barang pokok dan barang penting	33 komoditi			136,125,000	14,973,800	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			terlaksananya fasilitasi operasi pasar dan pasar murah	15 kecamatan			76,230,000	83,853,000	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

	(satu) Kabupaten/Kota	inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kelurahan									
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										700,000,000	681,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										700,000,000	681,000,000	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terikutinya pameran promosi perdaganganan pameran	1 kegiatan			150,000,000	175,000,000	
3 30 05 2.01 03	Pameran DagangLokal	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terikutinya pameran pomosi perdaganganan pameran lainnya	1 kegiatan			100,000,000	11,000,000	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang BagiProduk Ekspor Unggulan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tterlaksananya misi dagang bagi produk ekspor	1 kegiatan			100,000,000	110,000,000	
3 30 05 2.01 05	Peningkatan CitraProduk Ekspor	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya kampanye peningkatan citra produk ekspor unggulan kab Dairi	1 kegiatan			200,000,000	220,000,000	
3 30 05 2.01 06	Pembinaan PelakuUsaha Ekspor	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			terlaksananya bimtek fasilitasi kemudahan pelaku usaha ekspor	1 kegiatan			150,000,000	165,000,000	
Kode	Urusan/ BidangPemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kelurahan									
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										380,000,000	440,000,000	

3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										380,000,000	440,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksnanya sidang tera/tera ulang	500 UUTP			190,000,000	220,000,000	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah UUTP yangdiawasi	600 UUTP			190,000,000	220,000,000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										150,000,000	165,000,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										150,000,000	165,000,000	
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya sosialisasi ketentuandibidang cukai	150 pedagang			150,000,000	165,000,000	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										6,188,160,000	2,125,362,000	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,207,210,000	930,317,000	
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24,200,000	27,000,000	
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya renstra danrenja perangkat daerah	2 laporan			12,100,000	14,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
		(DAIRI KREASI).											
3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja realisasi	7 laporan			12,100,000	13,000,000	

3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,672,319,992	0	
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedinya gaji dan tunjangan asn	12 bulan			3,672,319,992	0	
3 31 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										50,000,000	133,100,000	
3 31 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya pendidikandan pelatihan formal	12 bulan			50,000,000	133,100,000	
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										907,420,008	329,723,000	
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bulan			24,200,000	26,620,000	
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			tersedianya keperluanalat tulis kantor	12 bulan			125,810,000	216,491,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		keativitas (DAIRI KREASI).		Kelurahan									
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			46,958,000	62,654,000	

3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianyabahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	12 bulan				13,000,000	23,958,000	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Makanandan Minuman Rapat	12 bulan 12 bulan				697,452,008	0	
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										90,000,000	133,100,000		
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersediaya perlengkapan gedungkantor	12 bulan				90,000,000	133,100,000	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										220,000,000	0		
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			tersedianya petugas jaga malam/penjaga kantor tenaga teknismetrologi	12 bulan				220,000,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
		kreativitas (DAIRI KREASI).		Kelurahan														
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										243,270,000	307,394,000		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraaninas operasional dan ikhtisar realisasi kinerja realisasi	12 bulan				150,000,000	190,000,000	

3 31 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa perbaikan pemeliharaanrutin mebeleur	12 bulan			12,520,000	17,569,000	
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			80,750,000	99,825,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										980,950,000	1,195,045,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										980,950,000	1,195,045,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peningkatan jumlah kapasitas pelaku IKM	100 orang			240,000,000	270,000,000	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan Pemberdayaan	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			terfasilitasnya kegiatan dekranasda	1 kegiatan			740,950,000	925,045,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Industri dan Peran Serta Masyarakat	inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		Semua Kelurahan									
TOTAL											8,838,472,720	4,701,671,800	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Prioritas

						Daerah			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangu nan Nasional		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												8,567,783,286	4,582,654,832	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,986,884,286	2,693,904,832	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												11,000,000	12,100,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Daiiri, Sidikalang, Batang Beruh			Tersusunnya Renja SKPD	1 Dokumen				5,500,000	6,050,000		
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Daiiri, Sidikalang, Batang Beruh			Tersedianya LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan				5,500,000	6,050,000		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,437,579,454	0	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dantunjangan ASN	12 Bulan				4,437,579,454	0		
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												50,000,000	55,000,000	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Daiiri, Sidikalang, Batang Beruh			Bimbingan Teknis bagi Aparatur	5 Orang				50,000,000	55,000,000		
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												705,000,000	775,500,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Daiiri, Sidikalang, Batang Beruh			Tersedianya PeralatanListrik Kantor	12 Bulan				10,000,000	11,000,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Daiiri, Sidikalang, Batang Beruh			Alat Tulis Kantor Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan 12 Bulan				180,000,000	198,000,000		

2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Tersedianya PeralatanRumah Tangga Kantor	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Tesedianya Surat Kabardan Majalah	12 Bulan			15,000,000	16,500,000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah	12 Bulan 12 Bulan			400,000,000	440,000,000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										130,000,000	143,000,000	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Meja/Kursi/Lemari Arsip	8 Buah			50,000,000	55,000,000	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Peralatan Kantor (Laptop/Komputer /Printer)	8 Unit			80,000,000	88,000,000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,353,304,832	1,376,304,832	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Jasa Rekening Telepon,Air dan Listrik	12 Bulan			230,000,000	253,000,000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Bulan			1,123,304,832	1,123,304,832	

2	19	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300,000,000	332,000,000		
2	19	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan		110,000,000	121,000,000	
2	19	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pajak Kendaraan Dinas	12 Bulan		7,000,000	7,700,000	
2	19	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan		30,000,000	35,000,000	
2	19	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 Unit		153,000,000	168,300,000	
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								650,000,000	786,500,000		
	Kode		Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								650,000,000	786,500,000		
2	19	02	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Seleksi Bhakti PemudaAntar Provinsi (BPAP)	50 Orang		100,000,000	110,000,000	
2	19	02	2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	100 Orang		100,000,000	110,000,000	

2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemudatan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda	1 Kegiatan			50,000,000	55,000,000		
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	40 OKP			0	71,500,000		
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Seleksi dan Pelatihan Anggota Paskibraka	45 Orang			400,000,000	440,000,000		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												930,899,000	1,019,750,000		
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												620,000,000	682,000,000	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	7 Cabor			100,000,000	110,000,000		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Saranadan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola (Tigalinggadan Tanah Pinem) Pemeliharaan Rutin Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion Utama Sidikalang	3 Unit 2 Unit			520,000,000	572,000,000		
2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												227,000,000	250,000,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly dan Sepak Bola	2 Cabor			150,000,000	165,000,000		
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Fasilitasi Event Olahraga Dalam/Luar Daerah	7 Cabor			77,000,000	85,000,000		
2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												83,899,000	87,750,000	

2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Wasit/Juri /Pelatih	25 Orang			25,000,000	25,250,000		
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	1 Kegiatan			58,899,000	62,500,000		
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												0	82,500,000		
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												0	82,500,000	
Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan TingkatDaerah	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Penyelenggaraan Kegiatan PerkemahanPramuka	1 Kegiatan			0	82,500,000		
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												1,862,796,168	1,952,000,000			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												1,042,796,168	1,160,000,000		
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												800,000,000	880,000,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pagelaran KebudayaanPesta Budaya Njuahnjuah Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	1 Pagelaran1 Pagelaran			800,000,000	880,000,000		
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												100,000,000	110,000,000	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepadaPihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pemberian Bantuan Bagi Group/KelompokKesenian	5 Group			100,000,000	110,000,000		
2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota												142,796,168	170,000,000	

2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Daerah	1 Kegiatan			142,796,168	170,000,000			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												200,000,000	220,000,000			
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												200,000,000	220,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pelathan Tari dan Musik Tradisional	2 Kelompok			200,000,000	220,000,000			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												620,000,000	572,000,000			
2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												50,000,000	55,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pendataan CagarBudaya	1 Dokumen			50,000,000	55,000,000			
2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												570,000,000	517,000,000		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Operasional Gedung Nasional Djauli Manik	12 Bulan			70,000,000	77,000,000			
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembangunan Pagar Jalan menuju Aek Sipaulak Hosa Silalahi Pembangunan RumahAdat Jojong Pakpak (Desa Bangun I Kecamatan Parbuluan)	300 Meter 1 Unit			500,000,000	440,000,000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														3,975,000,000	4,327,500,000		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														3,225,000,000	3,502,500,000	
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota												2,600,000,000	2,600,000,000		
3	26	02	2.01	03	Pengembangan DayaTarik Wisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Renovasi Sarana dan Prasarana Pariwisata (Portal, Bahtera Nuh, Kanopi Taman Golgata,Ka"bah Mesjid, Toilet Penginapan Gereja dan Open Stage)	6 Unit			2,600,000,000	2,600,000,000			
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												75,000,000	82,500,000		

3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			DED Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	1 Dokumen			75,000,000	82,500,000	
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenDairi (DAK FISIK)	4 Paket			0	0	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										550,000,000	820,000,000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo danSilalahi Pengembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Kelembagaan Pariwisata	12 Bulan 15 Desa			550,000,000	710,000,000	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pengembangan, Pengelolaan Desa Wisata dan Kelembagaan Pariwisata	15 Desa			0	110,000,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										350,000,000	385,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										350,000,000	385,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Publikasi Pariwisata	1 Kegiatan			100,000,000	110,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran PariwisataBaik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Event Pariwisata	3 Event			250,000,000	275,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										400,000,000	440,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										200,000,000	220,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Prioritas Pembangun an Nasional	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							

3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (DAK NON FISIK)	7 Paket				0	0	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsian Konservasi Ekonomi Kreatif	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Fasilitasi Promosi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan				200,000,000	220,000,000	
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											200,000,000	220,000,000	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Bimtek Ekonomi Kreatif	100 Orang				100,000,000	110,000,000	
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Fasilitasi Sarana Dalam mendukung Ekonomi Kreatif	1 Paket				100,000,000	110,000,000	
TOTAL																14,405,579,454	10,862,154,832	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											3,912,901,962	3,498,901,962	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,385,901,962	3,066,901,962	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											30,000,000	33,000,000	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tercapainya penyusunan laporan	5 Laporan			30,000,000	33,000,000		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,512,901,962	2,512,901,962	

2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			2,512,901,962	2,512,901,962	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30,000,000	0	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya diklat formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan			30,000,000	0	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										545,000,000	395,000,000	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan			15,000,000	0	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya perlengkapan layanan perpustakaan	12 bulan 12 bulan 12 bulan			92,000,000	0	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			68,000,000	0	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).									40,000,000	45,000,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya makanandan minuman rapat Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan 12 bulan			330,000,000	350,000,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										10,000,000	15,000,000	

2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Ternuhinya peralatan gedung kantor (infokus)	1 unit			10,000,000	15,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										102,000,000	0	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya pembayaran telpon, listrik dan air	12 bulan			15,000,000	0	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya kebutuhan tenaga pendukung Adm. Teknik Perkantoran	12 bulan			87,000,000	0	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										156,000,000	111,000,000	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya pajak perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit 4 unit			111,000,000	111,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan 12 bulan			31,000,000	0	
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 unit 2 unit			14,000,000	0	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										527,000,000	432,000,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										390,000,000	292,000,000	

2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Layanan Perpustakaan Eletronik	1 Tahun			10,000,000	20,000,000			
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan diTingkat Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			adanya Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan	1 Ranperda			160,000,000	30,000,000			
2	23	02	2.01	08	PengembanganBahan Pustaka			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Bertambahnya Jumlah Koleksi di Mobil Pintar dan Mobil Perpustakaan Keliling	300 Eksemplar			45,000,000	49,500,000			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Koleksi	1000 Eksemplar			175,000,000	192,500,000			
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											137,000,000	140,000,000			
Kode				Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi BerbasisInklusi Sosial			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan desa dan perpustakaan umum kabupaten	5 perpustakaan			137,000,000	140,000,000			
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											100,000,000	120,000,000		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												50,000,000	60,000,000			
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											50,000,000	60,000,000			
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya audit kearsipan unit kerja di lingkungan pemerintahkab. Dairi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan arsip unitkerja di lingkungan pemerintah kab. dairi	41 Unit kerja 41 Unitkerja			50,000,000	60,000,000			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP												50,000,000	60,000,000			
2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun											50,000,000	60,000,000			

2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Bawah 10 (sepuluh) Tahun			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya verifikasi dan validasi arsip usul musnah dan ANRI tersedianya daftar arsip usul musnah, arsip statis, dan arsip dinilai kembali	2000 Arsip 3000 Arsip			50,000,000	60,000,000		
															TOTAL	4,012,901,962	3,618,901,962	

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												44,526,210,753	47,889,300,863	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												37,449,015,753	40,105,019,863	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												194,000,000	213,400,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah	2 Dokumen			15,000,000	16,500,000			
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya DokumenRKA Sekretariat Daerah	1 Dokumen			12,000,000	13,200,000			

4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Dokumen DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen			12,000,000	13,200,000	
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA dan DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen			10,000,000	11,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									15,000,000	16,500,000	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dairi dan Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah	1 Tahun			130,000,000	143,000,000	
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11,991,210,753	12,066,000,000	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			11,931,210,753	12,000,000,000	

4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tertatanya Administrasi Laporan Keuangan	1 Dokumen				30,000,000	33,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)														
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	1 Tahun				30,000,000	33,000,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											45,000,000	49,500,000		
4	01	01	2.03	02	Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya pengawasan terhadapBarang Milik Daerah Sekretariat Daerah	1 Tahun				15,000,000	16,500,000	

4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah/Buku Aset Semester dan Tahunan	1 Tahun			30,000,000	33,000,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										303,530,000	333,883,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	1 Tahun			45,000,000	49,500,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SekretariatDaerah	1 Tahun			30,000,000	33,000,000	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									178,530,000	196,383,000	

4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)							50,000,000	55,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								7,653,705,414	8,538,743,000	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun		150,000,000	165,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
			Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Jasa Laundry	1 Tahun		350,000,000	385,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Tersedianya Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid	1 Tahun		242,231,400	266,455,000	

4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Media Cetak dan Online Yang Ditangani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	1 Tahun			162,680,000	178,948,000	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya kendaraanan Kebutuhan lainnyauntuk pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten Dairi	1 Tahun			2,312,128,000	2,543,340,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang							8,873,332,028	10,000,000,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,193,181,500	2,412,500,000	

4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional danPengadaan Sepeda Motor Operasional	1 Tahun			1,000,000,000	1,100,000,000	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya pengadaan perlengkapan, Peralatan dan Mobilairdan peralatan dapur Gedung Kantor	1 Tahun			1,193,181,500	1,312,500,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										8,212,801,040	8,927,315,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Pengadaan Materai, Perangko dan BendaPos Lainnya	1 Tahun			56,650,000	62,315,000	

4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang							12,300,000,000	13,530,000,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang			Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1 Tahun			2,006,151,040	2,100,000,000	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,035,020,046	3,338,512,863	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun			536,018,560	589,620,000	

4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun			1,495,195,330	1,644,714,863	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Jabatandan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantordan Rumah Jabatan	1 Tahun			621,070,156	683,178,000	
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan, Peralatan, Mobileur Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun			382,736,000	421,000,000	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										1,163,125,000	1,279,438,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun			195,505,000	215,056,000	

4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									142,620,000	156,882,000	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya MedicalCheck Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun		50,000,000	55,000,000	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Meningkatnya SDM Bupati dan Wakil Bupati dan Terlaksananya Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rangka Pembangunan	1 Tahun		775,000,000	852,500,000	
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										1,235,570,000	1,359,127,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Tahun		600,000,000	660,000,000	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil KepalaDaerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Tahun		420,000,000	462,000,000	

4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan RumahTangga SekretariatDaerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Tahun			215,570,000	237,127,000	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi										800,000,000	880,001,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Tersedianya serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS	1 Tahun			425,866,300	468,453,000	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Tersedianya Buku	1 Tahun			155,000,000	170,500,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Petunjuk Teknis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik						
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Bimtek Reformasi Birokrasi	1 Tahun			73,506,000	80,857,000	

4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasidan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										40,000,000	44,000,000	
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi	1 Tahun			105,627,700	116,191,000	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											621,872,000	706,600,000	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terfasilitasi Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Terlaksananya FasilitasiKunjungan	100 %			200,000,000	220,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)						Kerja/Inspeksi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah						
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya naskah pidato/ sambutan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah dan Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100 %			150,000,000	165,000,000	

4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Kegiatan Seremonial Kabupaten Dairi dalam bentuk advetorial	100 %			271,872,000	321,600,000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										4,432,797,000	4,876,340,000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan										1,510,815,000	1,662,180,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Rekomendasi LKPJ, Terlaksananya Fasilitasidan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan, Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi, Terlaksananya kegiatan Forkopimda dan Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Tahun			799,750,000	880,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ASN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, Terpilih kecamatan terbaik kabupaten dan diperlombakan ke Tingkat Provinsi, Cakupan penegasan batas antar daerah dantitik koordinat batas yang disepakati dan Cakupan data rupa bumi/alam yang disurvey dan dihimpun	1 Tahun			521,290,000	573,420,000	

4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Nilai LPPD, Persentase SPM perangkat daerah dan Jumlah ASN Setda yang mengikuti bimtek	1 Tahun			189,775,000	208,760,000	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										2,159,895,000	2,375,885,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Keagamaan Yang dilaksanakan	1 Tahun			1,421,800,000	1,569,480,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait KesejahteraanSosial	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS(SD dan SMP)	1 Tahun			210,095,000	220,105,000	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait KesejahteraanMasyarakat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	1 Tahun			528,000,000	586,300,000	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										762,087,000	838,275,000	

4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jenis Produk Hukum daerah yang terfasilitasi, Jumlah Produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang dikaji oleh peraturan perundang-undangan yang terbaru dan lebih tinggi, Tersusunnya rencana aksi hak azasi manusia dan pelaksanaan peduli HAM Kabupaten Dairi dan Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum	1 Tahun			272,292,000	299,500,000	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Semua			Persentase Fasilitas bantuan hukum,	1 Tahun			382,485,000	420,734,000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kecamatan, Semua Kelurahan									
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpublikasinya produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) dan Tersedianya serta terlaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1 Tahun			107,310,000	118,041,000	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										2,644,398,000	2,907,941,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										962,160,000	1,057,476,000	

4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedia SDM yang handal tentang BUMD, Terlaksananya Seleksi Direktur Perumda Air Minum Lae Ncho dan Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD	1 Tahun			439,000,000	482,000,000	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas dan Cakupan pengendalian inflasi daerah	1 Tahun			237,140,000	260,854,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan	1 Tahun			286,020,000	314,622,000	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										400,000,000	440,000,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya dokumen analisis standar belanja dan Tersedianya dokumen standar satuan harga.	1 Tahun			150,000,000	165,000,000	

4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah, Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi dan Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun			150,000,000	165,000,000	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasidan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									100,000,000	110,000,000	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										1,282,238,000	1,410,465,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barangdan Jasa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Cakupan fasilitasi administrasi Pengadaan Barang/Jasadengan baik dan Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang danJasa	1 Tahun			1,022,113,000	1,124,325,000	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlatihnya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasasecara elektronik dan Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	1 Tahun			152,745,000	168,020,000	

4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Sidikalang, Sidikalang			Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasadan Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun			107,380,000	118,120,000	
TOTAL											44,526,210,753	47,889,300,863	

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD											38,578,861,158	39,192,907,241	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											24,249,805,758	24,863,851,841	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,961,400	14,257,540	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya renstra danrenja	12 bulan			5,478,000	6,025,800		
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)								7,483,400	8,231,740			
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,578,861,158	2,836,747,273	

4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									2,578,861,158	2,836,747,273	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,358,446,780	1,494,291,458	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan									1,069,990,000	1,176,989,000	
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
						Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									288,456,780	317,302,458	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2,881,532,600	2,946,771,460	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									19,737,500	21,711,250	

4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									444,055,500	488,461,050	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan									188,595,600	207,455,160	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									13,320,000	13,320,000	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD										2,215,824,000	2,215,824,000	
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										997,576,920	997,576,920		
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									880,799,620	880,799,620	

4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									116,777,300	116,777,300	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										741,624,000	741,624,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										128,850,000	128,850,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									612,774,000	612,774,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										457,802,900	503,583,190	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									403,352,900	443,688,190	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									54,450,000	59,895,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										14,141,000,000	14,141,000,000	

4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem									13,931,000,000	13,931,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									210,000,000	210,000,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD									1,080,000,000	1,188,000,000		
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan RumahTangga DPRD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									1,080,000,000	1,188,000,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									14,329,055,400	14,329,055,400		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									1,676,074,900	1,676,074,900		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									1,676,074,900	1,676,074,900	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									10,834,441,000	10,834,441,000		

4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan										9,672,901,000	9,672,901,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)													
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										1,124,950,000	1,124,950,000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										36,590,000	36,590,000	
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												1,818,539,500	1,818,539,500	

4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)								230,560,000	230,560,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan								4,763,938,500	4,763,938,500	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)														
TOTAL														38,578,861,158	39,192,907,241	

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN												7,333,931,907	0	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,001,534,907	0	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												20,000,000	0	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2022 Tersedianya Dokumen Renja OPD Tahun 2023	1 Dokumen1 Dokumen			10,000,000	0			
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan OPD	1 Laporan 1 Laporan			10,000,000	0			
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,600,030,763	0	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			3,600,030,763	0			
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												50,000,000	0	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	8. Inovasi Pelayanan Publik dan	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Meningkatnya Kapasitas Sumber DayaAparatur	100 %			50,000,000	0				
					Urusan/ BidangUrusan				Indikator Kinerja								Keterangan		

Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	dan Fungsi	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,243,482,000	0	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan			4,844,000	0	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Alat-alat Kebersihan Tersedianya KeperluanAlat Tulis Kantor	1 tahun 1 tahun			138,306,000	0	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun			61,989,000	0	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	1 tahun			7,166,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)				Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Tersedianya Makanandan Minuman Rapat	1 tahun 1 tahun			1,031,177,000	0	
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										716,100,000	0	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	1 unit			572,000,000	0	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Lemari Buku	1 Unit			44,100,000	0	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang		Laptop Printer	5 Unit 3 Unit			100,000,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target				
					an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								228,596,144	0			
5	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik	12 bulan		34,178,000	0		
5	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Dana Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Dana Jasa Supir Tersedianya Dana Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang 1 orang 7 orang		194,418,144	0		
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,326,000	0			
5	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin Dan Berkala Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun 1 tahun		55,125,000	0		
5	01	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Secara Rutin Dan Berkala	1 tahun		16,538,000	0		
Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
				an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor Secara Rutin Dan Berkala	1 tahun			55,125,000	0		
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin Dan Berkala	1 tahun			16,538,000	0		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												751,107,000	0		
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												678,243,000	0	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pengolahan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik	1 Sistem			89,736,000	0		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 Tersusunnya DokumenRKPD Tahun 2023	1 Dokumen1 Dokumen			588,507,000	0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Daerah Kabupaten/Kota				an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)													
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												72,864,000	0	

5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasidan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksannanya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan			72,864,000	0		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												581,290,000	0		
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												306,290,500	0	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Koordinasi PelaksanaanTujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG Terlaksananya Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak AzasiManusia (RAN-HAM) Kabupaten Dairi	1 Laporan 1 Laporan			154,255,500	0		
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Koordinasi PelaksanaanAksi Konvergensi Stunting Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Terlaksananya Koordinasi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			152,035,000	0		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target	
											Penanggulangan Kemiskinan Daerah.							
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												82,467,000	0	

5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Koordinasi Bidang Perekonomian	1 Laporan			41,233,500	0	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	1 Laporan			41,233,500	0	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											192,532,500	0	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Koordinasi Pembangunan DaerahBidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	1 Kegiatan 1 Laporan			192,532,500	0	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											666,600,000	0	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											666,600,000	0	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											217,800,000	0	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Semua Kecamatan,				Tersedianya Kajian Sosial	3 Kajian			217,800,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	Sosial	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan														
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											363,000,000	0	

5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersusunnya dokumenkajian penelitian dan pengembangan	1 Dokumen			181,500,000	0	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan danPangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersusunnya dokumenkajian penelitian dan pengembangan	1 dokumen			181,500,000	0	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										85,800,000	0	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Diseminasi Inovasi Daerah	1 Laporan			85,800,000	0	
TOTAL															8,000,531,907	0	

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN										8,241,064,016	9,477,223,618	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,167,064,016	5,942,123,618	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,000,000	23,000,000	

5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Renstra, Renja dan Laporan Evaluasi Renja	3 Dokumen			10,000,000	11,500,000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya LAKIP, LKPJ, Laporan Realisasi Keuangan dan Pengadaan setiap bulannya	3 Laporan			10,000,000	11,500,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,759,064,016	4,322,923,618	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya dan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			7,482,128,032	8,604,447,236	
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
						Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			18,000,000	20,700,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										139,800,000	160,770,000	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangandan Aset	41 SKPD			39,800,000	45,770,000	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Meningkatnya SumberDaya Aparatur	12 Bulan			100,000,000	115,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										636,200,000	731,630,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya PeralatanListrik	12 Bulan			14,000,000	16,100,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan			164,000,000	188,600,000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihankantor	12 Bulan			0	0	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			100,200,000	115,230,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan sebagaisarana informasi	12 Bulan			8,000,000	9,200,000	
Kode	Kode				Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya makanandan minuman rapat dan biaya perjalanan dinas	12 Bulan			700,000,000	805,000,000	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										100,000,000	115,000,000	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan			100,000,000	115,000,000	
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya perlengkapan gedungkantor	12 Bulan			0	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										222,000,000	255,300,000	

5	02	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya dan paket pengiriman	12 Bulan			15,000,000	17,250,000	
5	02	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	12 Bulan			17,000,000	19,550,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						

5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	12 Bulan			200,000,000	230,000,000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										290,000,000	333,500,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya pajak kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			200,000,000	230,000,000	
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya Mebeleur	12 Bulan			0	0	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BKAD Kab Dairi	12 Bulan			50,000,000	57,500,000	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan			40,000,000	46,000,000	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										2,208,000,000	2,539,200,000	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,077,000,000	1,238,550,000	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA danPPAS	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Bukua KUA dan PPAS APBD	2 Dokumen			130,000,000	149,500,000	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA danPerubahan PPAS	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Buku KUA dan PPAS P. APBD	2 Dokumen			110,000,000	126,500,000	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Asistensi penelitian RKA SKPD	41 SKPD			14,000,000	16,100,000	
	Urusan/ BidangUrusan				Indikator Kinerja								Keterangan

Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Asistensi penelitian Perubahan RKA SKPD	41 SKPD			13,000,000	14,950,000	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Asistensi penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD	41 SKPD			60,000,000	69,000,000	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Asistensi penelitian Perubahan DPA dan Anggaran Kas SKPD	41 SKPD			30,000,000	34,500,000	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerahtentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentangAPBD dan Penjabaran APBD	2 Dokumen			360,000,000	414,000,000	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan	8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Sidikalang,			Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang	2 Dokumen			360,000,000	414,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Sidikalang			Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD						
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										337,000,000	387,550,000	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terkelolanya gaji PNS dan Non PNS, Pengajuan GU, TU danLS	41 SKPD			102,000,000	117,300,000	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya monitoring dan penatausahaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Bulan			82,000,000	94,300,000	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran KasDaerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pelaporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Pelaksanaan/Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	41 SKPD			88,000,000	101,200,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	41 SKPD			65,000,000	74,750,000	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										534,000,000	614,100,000	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Pelaksanaan Pertanggungjawaban Akuntansi Berbasis AkruaI	41 SKPD			0	0	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan PrognosisRealisasi Anggaran	4 Laporan			132,000,000	151,800,000	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan			172,000,000	197,800,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen			202,000,000	232,300,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Penyelesaian KerugianDaerah	12 Bulan			14,000,000	16,100,000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaandan Pengeluaran	41 SKPD			14,000,000	16,100,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											110,000,000	126,500,000	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaandan Penyaluran Bantuan Keuangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terlaksananya Penyaluran Dana Desadan Alokasi Dana Desauntuk 3 (tiga) Tahap	161 Desa			140,000,000	161,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					

		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga(BTT)	12 Bulan			80,000,000	92,000,000	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan DanaBagi Hasil Kabupaten/Kota	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersalurinya Dana BagiHasil Kabupaten Dairi	161 Desa			0	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah										150,000,000	172,500,000	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Sistem Aplikasi berbasis Akruaal terhadap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator dan Kasubbag Keuangan	41 SKPD			150,000,000	172,500,000	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										866,000,000	995,900,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										866,000,000	995,900,000	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya RKBMDdan RPBMD	41 SKPD			40,000,000	46,000,000	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan BarangMilik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tercatatnya Barang Milik Daerah pada BukuInventaris	41 SKPD			340,000,000	391,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		GERAK CEPAT)											

5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya HargaJual Lelang Aset	41 SKPD			200,000,000	230,000,000	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BarangMilik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terdatanya seluruh BMD Pemkab Dairi yang didukung oleh Bukti Kepemilikan yang Sah	41 SKPD			56,000,000	64,400,000	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BarangMilik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terdatanya seluruh pemegang/pemakai BMD pada PemkabDairi	41 SKPD			59,000,000	67,850,000	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya keakuratan data Barang Milik Daerahpada setiap SKPD	41 SKPD			55,000,000	63,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya LaporanBarang Milik Daerah	41 SKPD			116,000,000	133,400,000	
TOTAL											8,241,064,016	9,477,223,618	

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangu nan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN											7,525,531,488	63,010,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,969,846,848	63,010,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											22,715,000	0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja	4 dokumen			9,456,000	0		

5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja	5 Laporan				13,259,000	0	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,525,531,496	0		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										3,525,531,496	0	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										72,000,000	0		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Terlaksananya BIMTEKuntuk PNS	30 Orang				72,000,000	0	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					dan Fungsi	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kecamatan, Semua Kelurahan										
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										530,527,000	0		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat-alat listrik dan penerangankantor	12 bulan				10,642,500	0	

5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan	12 bulan 12 bulan			85,351,500	0	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya belanja cetak dan penggandaan	12 Bulan			29,683,000	0	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,			Tersedianya surat kabar	12 Bulan			4,850,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan										
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya makanandan minuman harian pegawai dan rapat- rapat dalam pelaksanaan tugas- tugas Tersedianya perjalanan dinas tersedianya uang lembur dan penggantiuang makan lembur dalam pelaksanaan tugas-tugas	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan			400,000,000	0	
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											544,107,352	0	

5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengelolaan suratmenyurat	12 Bulan			2,723,000	0	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa telepon, internet, airdan listrik	12 Bulan			66,140,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya tenaga administrasi	12 Bulan			475,244,352	0	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										274,966,000	63,010,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional KendaraanRoda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 2 (dua) Tersedianya jasa perizinan/ perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 3 unitdan kendararaan roda dua 7 unit	10 unit 12 Bulan			111,956,000	0	

5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit			100,000,000	0	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin perforasidan genset, Terpeliharanya perlengkapan gedung	12 Bulan 16 Unit			63,010,000	63,010,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					kantor						
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										2,555,684,640	0	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										2,555,684,640	0	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data pajak daerah dan retribusi daerah	24 Laporan Pajak			120,000,000	0	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penyusunan ranperda tentang tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame	3 peraturan			135,416,600	0	

5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah retribusi daerah kepada masyarakat	1 Kegiatan			77,542,000	0	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya aplikasiSIP PBB P2, BPHTB dan Sistem Aplikasi Pajak Yang Terintegritas	3 Aplikasi			400,000,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran ObjekPajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran datawajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame	12 Bulan			120,000,000	0	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data PBBP2 berbasis SIG	60000 Objek Pajak			20,000,000	0	

5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendataan/Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB P2 terlaksananya pendetilan Peta ZNT	3000 NOP 6 Kecamatan			445,415,400	0	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercetaknya SPPT PBBP2 dan DHKP	130000 NOP			437,270,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		GERAK CEPAT)											
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB danPBB-P2 Terlaksananya pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB danPBB-P2	6000 Berkas BPHTB 6000 berkas PBB P2			157,139,400	0	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rekonsiliasi pajak restoran, MBLB dan PPJ	12 Laporan Rekonsiliasi			96,134,600	0	

5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan,pajak mineral bukan logam dan batuan	12 bulan			162,904,400	0	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatandan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktif/ganda	12 Bulan			105,617,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan,pajak mineral bukan logam dan batuan	12 Bulan			199,227,240	0	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan RetribusiDaerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercetaknya tiket retribusi daerah	1365 Blok Tiket			79,018,000	0	
TOTAL											7,525,531,488	63,010,000	

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN												4,856,593,682	5,446,751,068	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,506,013,682	3,847,813,068	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												14,100,000	15,510,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan			14,100,000	15,510,000			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,649,399,266	2,914,339,193	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 bulan			2,649,399,266	2,914,339,193			
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												537,106,352	584,315,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			43,000,000	44,000,000			
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya peralatandan perlengkapan kantor	12 bulan			140,000,000	154,000,000			
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			74,912,704	76,000,000			
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan	12 bulan			20,000,000	22,000,000			
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan			296,650,000	326,315,000			
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												76,000,000	83,600,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya kursi pejabat dan meja rapat	14 buah			25,000,000	27,500,000			
					Urusan/ BidangUrusan				Indikator Kinerja								Keterangan		

Kode	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	9 unit			51,000,000	56,100,000	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										116,408,064	128,048,875	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya jasa telepon, air dan listrik	12 bulan			30,000,000	33,000,000	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			tersedianya jasa pelayanan umum kantor (administrasi dan kebersihan)	12 bulan			86,408,064	95,048,875	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										113,000,000	122,000,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perizinan kendaraan operasionalatau lapangan	12 bulan			40,000,000	44,000,000	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan			33,000,000	34,000,000	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			40,000,000	44,000,000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										1,350,580,000	1,598,938,000	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										47,000,000	51,700,000	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terkoordinasinya pelaksanaan administrasi pemberhentian	229 orang			47,000,000	51,700,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN										201,000,000	221,100,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan MutasiASN						tertatanya mutasi jabatan	3 kegiatan			150,000,000	165,000,000	

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				Terkelolanya kenaikan pangkat ASN	742 orang			51,000,000	56,100,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN											972,354,000	1,127,889,400	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				meningkatnya kapasitas kinerja ASN	558 orang			543,500,000	656,150,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				terkelolanya pendidikan lanjutan ASN	15 orang			428,854,000	471,739,400	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											130,226,000	198,248,600	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan DisiplinASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				terlaksananya pembinaan disiplin ASN	41 OPD			0	55,000,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				terkelolanya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	10 orang			130,226,000	143,248,600	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											1,660,765,584	1,826,842,143	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											1,660,765,584	1,826,842,143	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis											820,765,584	902,842,143	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan PemerintahanKonkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang				terselenggaranya pengembangan kompetensi, teknis umum, inti dan pilihanbagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusanpemerintahan umum	459 orang			820,765,584	902,842,143	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											840,000,000	924,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangun an Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	186 orang			840,000,000	924,000,000		
															TOTAL	6,517,359,266	7,273,593,211	

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01				INSPEKTORAT DAERAH												8,858,614,428	11,491,875,870	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,501,614,428	8,181,875,870	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,000,000	20,000,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	7 laporan			10,000,000	20,000,000				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,358,614,428	4,794,475,870	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			4,358,614,428	4,794,475,870				
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												487,200,000	1,330,000,000	

6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas SDM APIP	13 orang			75,000,000	520,000,000	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua			Meningkatkan wawasan dan pengetahuan APIP	12 bulan 46 orang			824,400,000	1,620,000,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Undangan	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlatihnya aparatur Inspektorat						
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											613,800,000	1,078,000,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan			9,000,000	16,000,000	

6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya alat tulis kantor Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan 12 bulan			193,000,000	226,000,000	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			75,000,000	96,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			1,800,000	10,000,000	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya makandan minum Terpenuhinya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 12 bulan			335,000,000	730,000,000	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										595,000,000	330,000,000	

6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					Terpenuhinya kebutuhan kendaraandinas operasional	1 unit			445,000,000	0	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua			Terpenuhinya meubilleur	12 bulan			50,000,000	100,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan									
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	12 bulan 12 bulan			100,000,000	230,000,000	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										175,000,000	221,000,000	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya biayajasa surat menyurat	12 bulan			5,000,000	10,000,000	

6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya rekening majalah/surat kabar, air, listrik dan telepon	12 bulan			20,000,000	35,000,000	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya tenaga supir, tenaga kebersihan, penjaga	12 bulan 12 bulan			150,000,000	176,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					kantor dan operator						
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										262,000,000	408,400,000	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terrpenuhinya biaya jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional	13 unit 1 tahun			208,000,000	258,400,000	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh			Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			54,000,000	150,000,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										2,116,000,000	2,960,000,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										2,026,000,000	2,615,000,000	

6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya laporan pembinaan dan pengawasan internal	40 obrik			509,000,000	700,000,000	
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan					Tersusunnya laporan kinerja pemerintah Kabupaten Dairi dan opd sesuai dengan	40 obrik			170,000,000	300,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					kaidah yang berlaku						
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi dan opd sesuai dengan sapd dan kapd	40 obrik			197,000,000	400,000,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pengawasan desa	161 desa			510,000,000	500,000,000	

6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbitnya Sertifikat Kualitas Belanja Modal Terlaksananya koordinasi instansi vertikal Tersedianya dokumen aparatur yang melaporkan penerimaan gratifikasi Tersedianya dokumen tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi	12 bulan 1 tahun 1 dokumen1 dokumen			500,000,000	575,000,000	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	8. Inovasi Pelayanan		Semua Kabupaten/			persentase temuan aparat pengawas yang	90 persen			140,000,000	140,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Hasil PemeriksaanBPK RI dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ditindaklanjuti						
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										90,000,000	345,000,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			persentase penetapankasus kerugian daerah	65 persen			50,000,000	225,000,000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselesainya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKNdan penyalahgunaan kewenangan	100 persen			40,000,000	120,000,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										241,000,000	350,000,000	

6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi										241,000,000	350,000,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN pemerintah KabupatenDairi dan aparatur pemerintah desa	12 bulan			35,000,000	100,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya level kapabilitas APIP Level 3 Meningkatnya maturitas SPIP Level 3 Persentase nilai persepsi	3 level 3 level 66 persen			206,000,000	250,000,000	
TOTAL											8,858,614,428	11,491,875,870	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidikalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											11,611,554,550	43,560,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,844,384,430	43,560,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											7,260,000	7,260,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianyan Laporan Lakip,LKPD, tersedianya Renstra dan Renja	1 Tahun			7,260,000	7,260,000		

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,516,789,000	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			4,516,789,000	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									472,972,430	36,300,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun			43,076,000	36,300,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya ATK Kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun			441,132,860	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			64,130,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			terpenuhinya dan diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Terpenuhinya makan dan minuman dalam melaksanakan rapat-rapat	1 Tahun			145,200,000	0	
Kode					Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									105,028,000	0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya mebeleur kantor Meja Biro, Tersedianya Mobebelur Kursi Putar sandaran rendah tanpa sanadara tangan	14 Unit 9 unit			56,628,000	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya Laptop Tersedianya Printer	5 Unit 3 Unit			36,300,000	0	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang			Tersedianya peralatan gedung kantor dan sarana prasarana lainnya	1 unit laptop			12,100,000	0	

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										617,584,000	0	
7	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya benda - benda pos	1 Tahun			5,566,000	0	
7	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air, listrik	1 Tahun			36,300,000	0	
7	01	01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Meja, Kursi, Komputer, Televisi, CCTV, Infocus, Laptop, Sound System	1 Tahun			78,650,000	0	
7	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersedianya Tenaga Pendukung Jasa Pelayanan Umum 4 Org dan Kepling 47 Orang	1 Tahun			497,068,000	0	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										124,751,000	0	
7	01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			Kab. Dairi, Sidikalang,			Terpeliharanya Kendaraan Dinas,	1 Tahun			72,721,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kelurahan			terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinasRoda 4 dan Roda 2							
7	01	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terpeliharanya mobelier	1 Tahun			9,680,000	0	
7	01	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			30,250,000	0	
7	01	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya Gorden Kantor	10 set			12,100,000	0	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										5,474,569,820	0	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										90,635,300	0	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya pelaksanaan musyawarah di Desa	6 Desa			24,744,000	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Pembinaan KIM, Pembinaan Kepemudaan, terlaskannya bulanbakti gotong royongdan terlaksananya Pembinaan TP.PKK Terselenggaranya Pembinaan KIM,	5 Kelurahan6 Desa			65,891,300	0	
Kode	Urusan/ BidangPemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
										Pembinaan Kepemudaan, terlaskannya bulanbakti gotong royongdan terlaksananya Pembinaan TP.PKK							
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											5,383,934,520	0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						Terfasilitasinya pelaksanaan musyawarah di kelurahan	5 Kelurahan			23,634,000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembangunan drainase, Pembangunan jalan, Pemeliharaan jalan/gang setapak, terwujudnya gapura kelurahan	5 Kelurahan			3,850,863,590	0	

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan pelaku usaha UMKM,Terselenggaranya pembinaan KIM, Terselenggaranya pembinaan kepemudaan, terlaksananya bulan bakti gotong royong, terlaksananya pembinaan TP PKK	5 Kelurahan			1,494,136,930		0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perlombaan Kelurahan terbaik tingkat Kecamatan	5 Kelurahan			15,300,000		0		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												261,906,300		0		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												261,906,300		0	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terselenggaranya Upacara Hari hari Besar Nasional	2 Kegiatan			159,783,300		0		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya Kegiatan MTQ,Pesparawi, Safari Natal, Safari Ramadhandan Pesta Njuah-njuah	5 Kegiatan			102,123,000		0		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												30,694,000		0		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												30,694,000		0	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RPJMDesa, RKPDesas dan APBDDesa)	6 Desa			12,334,000		0		

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa			Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perlombaan desa tingkat kecamatan ,pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 Desa			18,360,000	0		
															TOTAL	11,611,554,550	43,560,000	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												4,987,462,842	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,461,962,842	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,550,000,000	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2,550,000,000	0				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												382,462,842	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I			Tersedianya Penerangan kantor	1 Tahun			13,500,000	0				

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I			Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan kantor	1 Tahun			148,962,842	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	1 Tahun			20,000,000	0	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	1 Tahun			200,000,000	0	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											145,500,000	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			tersedianya peralatandan perlengkapan gedung kantor	100 %			145,500,000	0	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											209,000,000	0	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Tersedianya benda benda pos	100 %			6,000,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %			15,000,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	1 Tahun			188,000,000	0	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											175,000,000	0	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %			40,000,000	0	

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Mebel	100 %			20,000,000	0		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %			50,000,000	0		
Kode	Urusan/ Bidang	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
						an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %			65,000,000	0		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1,225,000,000	0		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												125,000,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terlaksananya musrenbang desa dankecamatan	100 %			25,000,000	0		

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terlaksananya bulan bhakti gotong royong diwilayah kecamatan, kegiatan pembinaan PKK, Kelompok informasi masyarakat , pembinaan Kepemudaan, Pembinaan bulan balita	100 %				100,000,000	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,100,000,000	0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan			Terlaksana pembangunan saranadan prasarana di	100 %				900,000,000	0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangun an Nasional		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Julu I			kelurahan									
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	1 Tahun				200,000,000	0		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													225,000,000	0		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													225,000,000	0	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terselenggaranya upacara hari-hari besarnasional	100 %				125,000,000	0		

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengembangan keagamaan , keseniandan kebudayaan daerah	100 %			100,000,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										75,500,000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										75,500,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes	100 %			38,000,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan			Terfasilitasunya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			37,500,000	0	
TOTAL															4,987,462,842	0	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silima Pungga-Pungga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											4,475,952,833	4,923,548,116	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,993,363,257	3,292,699,582	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8,800,000	9,680,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 laporan			3,300,000	3,630,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	5 laporan			5,500,000	6,050,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,399,049,924	2,638,954,916	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			2,399,049,924	2,638,954,916		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											300,984,530	331,082,983	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Silima Pungga			Tersedianya peralatan listrik	1 tahun			20,515,880	22,567,468		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target	Prioritas Pembangunan Nasional

				Bangunan Kantor	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Pungga, Parongil									
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 tahun			61,007,650	67,108,415	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun			34,661,000	38,127,100	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Tersedianya biaya perjalanan dinas dan makanan dan minumanrapat dan tamu	1 tahun			184,800,000	203,280,000	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										56,485,000	62,133,500	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga,			Tersedianya mebeleur kantor (Kursi Kerja) Tersedianya mebeleur kantor (Meja Kerja)	3 Unit 3 Unit 1 Set			21,615,000	23,776,500	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Parongil			Tersedianya mebeleur kantor (Meja Pelayanan)					
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		ersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	3 Unit Printer3 Unit Laptop			34,870,000	38,357,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,616,453	141,478,098	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Tersedianya benda- benda pos dan materai	1 tahun			4,837,800	5,321,580
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Tersedianya biaya telepon, listrik dan air	1 tahun			12,892,000	14,181,200
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 tahun			110,886,653	121,975,318
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)										

7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,427,350	109,370,085			
7	01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional, Roda Empat 1 Unit,Roda Dua 1 Unit	1 Tahun		43,570,450	47,927,495			
7	01	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Terpeliharanya mebeleur kantor	1 Tahun		6,820,000	7,502,000			
7	01	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit		34,115,400	37,526,940			
7	01	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Tahun		14,921,500	16,413,650			
Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,244,428,576	1,368,871,434			
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									67,320,000	74,052,000		

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan			Terlaksananya musrenbang kecamatan dan terfasilitasinya musrenbang desa	1 Tahun			9,020,000	9,922,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakatdan Bulan Balita	1 tahun			58,300,000	64,130,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,177,108,576	1,294,819,434	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terlaksananya musrenbang kelurahanparongil	1 Tahun			6,710,000	7,381,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga,			Terlaksananya pembangunan saranadan prasarana di kelurahan	1 tahun			960,556,189	1,056,611,809	
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional					
			Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Parongil												

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 tahun			209,842,387	230,826,625	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										172,161,000	189,377,100	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										172,161,000	189,377,100	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terselenggaranya upacara HUT RI	1 Tahun			98,975,800	108,873,380	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terlaksananya kegiatanMTQ, Kegiatan Njuah- njuah, kegiatan Pesparawi	1 tahun			73,185,200	80,503,720	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										66,000,000	72,600,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										66,000,000	72,600,000	
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil			Terfasilitasinya penyusunan peraturandesada dan peraturan kepala desa	15 desa			18,700,000	20,570,000	

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil		Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15 desa			47,300,000	52,030,000	
TOTAL														4,475,952,833	4,923,548,116	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												2,723,146,296	2,810,027,626	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,322,147,296	2,368,929,226	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												16,000,000	17,600,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)								8,000,000	8,800,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)								8,000,000	8,800,000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,854,330,000	1,854,330,000	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan								1,854,330,000	1,854,330,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										185,130,000	203,643,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Siempat Nempu,								12,100,000	13,310,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Bangunan Kantor	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan										
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor											42,350,000	46,585,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan								18,150,000	19,965,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan								112,530,000	123,783,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										109,025,296	119,927,826		

7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)								35,000,000	38,500,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan						61,925,296	68,117,826	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan						12,100,000	13,310,000	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										99,704,000	109,674,400	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							2,420,000	2,662,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik			Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							16,940,000	18,634,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							80,344,000	88,378,400	
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan an Nasional					
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
						an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										57,958,000	63,754,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							39,930,000	43,923,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							9,680,000	10,648,000	

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							8,348,000	9,183,000		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												185,695,000	204,264,000		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												185,695,000	204,264,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Siempat Nempu,							75,500,000	83,050,000		
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional						
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Semua Kelurahan													
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)									110,195,000	121,214,000		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												134,280,000	147,708,000		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												134,280,000	147,708,000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							78,650,000	86,515,000		

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							55,630,000	61,193,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										81,024,000	89,126,400	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										81,024,000	89,126,400	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							10,604,000	11,664,400	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan							70,420,000	77,462,000	
TOTAL															2,723,146,296	2,810,027,626	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigalingga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													

7	01				KECAMATAN									2,968,659,296	0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,339,436,296	0		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7,260,000	0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja,dokumen perencanaan	12 Bulan		7,260,000	0			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,672,659,296	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)							1,672,659,296	0			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									221,729,000	0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya peralatanlistrik	12 Bulan		13,976,000	0			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor	12 Bulan		45,193,000	0			
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			22,869,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya biaya Perjalanan dinas, tersedianya makan dan minuman kantor	1 Tahun			139,691,000	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										224,700,000	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya perlengkapan gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12 Bulan			120,820,000	0	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	12 Bulan			103,880,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
	Bangunan Lainnya	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					lainya										
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										53,887,000	0	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman	12 Bulan				1,652,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya biaya telepon,listrik dan air	12 Bulan				11,435,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya Jasa Pelayanan UmumKantor	1 Tahun				40,800,000	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										159,201,000	0		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			PenyediaTersedianya pemeliharaan kendaraan dinas atauoperasionalan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan				56,300,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				2,541,000	0	

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan			31,000,000	0		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunanlainnya	12 Bulan			69,360,000	0		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												179,773,000	0		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												179,773,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Terselenggaranya Musrenbang di desa, kelurahan dan kecamatan	12 Bulan			28,133,000	0		
Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Terlaksananya bulanbakti gotong royong, pembinaan PKK, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan KIM dan Bulan Balita	12 Bulan				303,280,000	0					
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													350,160,000	0					
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													350,160,000	0				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			TerselenggaranyaPerayaan HUT-RI	12 Bulan				156,920,000	0					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga			Terlaksananya perlombaan MTQ, Pesparawi dan KegiatanNjuah-juah.	12 Bulan				193,240,000	0					
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan						
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangun an Nasional					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													99,290,000	0					
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													99,290,000	0				

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga				Tersusunnya dokumen Perencanaan RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa	12 Bulan			35,410,000	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga				Terselenggaranya perlombaan desa tingkat kecamatan	12 Bulan			63,880,000	0	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga								0	0	
TOTAL																2,968,659,296	0	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Pinem

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN											2,738,489,527	2,990,038,480			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,278,689,527	2,484,258,480			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											11,000,000	12,100,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			LKIP Renja	1 Dokumen3 Dokumen			11,000,000	12,100,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh			Laporan KeuanganLaporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen1 Dokumen			11,000,000	12,100,000				

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,550,489,527	1,705,538,480	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh			Tersedianya biaya Gajidan Tunjangan ASN	1 Tahun		1,550,489,527	1,705,538,480	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									287,085,500	293,794,050	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			Tersedianya peralatanlistrik	1 Tahun		25,300,000	27,830,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			Tersedianya alat tiis kantor dan tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		107,800,000	118,580,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		44,000,000	48,400,000	
								Buluh								
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh			Terlaksasananya perjalanan dinas dalam /luar daerah dan tersedianya makanan dan miuman rapat	12 bulan		397,071,000	392,778,100	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									141,350,000	155,185,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			Kursi rapat Lemari arsip tempahan	30 unit 1 unit		99,000,000	108,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			laptop printer Taplak meja rapat	5 unit 3 unit 10 buah		216,700,000	238,370,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									122,444,500	134,688,950	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh			Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman	12 Bulan		14,850,000	16,335,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh				Tersedianya biaya telepon , listrik dan air	12 Bulan			27,500,000	30,250,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh				Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Tahun			89,994,500	98,993,950	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											166,320,000	182,952,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas	1 Tahun			80,850,000	88,935,000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh				Terpeliharanya mebeleur	1 Tahun			5,500,000	6,050,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh				Terpeliharanya gedung kantor dan terpeliharanya rumah dinas	1 Tahun			60,500,000	66,550,000	

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			19,470,000	21,417,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									191,400,000	210,540,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									191,400,000	210,540,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh		Terfasilitasinya musrenbang di desadan terlaksananya musrenbang kecamatan	1 Tahun			41,800,000	45,980,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh		Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong,terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat , terlaksananya bulan balita	1 Tahun			149,600,000	164,560,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									173,800,000	191,180,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									173,800,000	191,180,000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, Semua Kelurahan		Terselenggaranya upacara hari-hari besarnasional	1 Tahun			77,000,000	84,700,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta		Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian	1 Tahun			96,800,000	106,480,000	

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, Regional, dan Nasional	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Buluh			dan kebudayaan daerah						
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										94,600,000	104,060,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										94,600,000	104,060,000	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh			Terfasilitasinya penyusunan peraturandes dan peraturan kepala desa	19 Desa			24,200,000	26,620,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Tanah Pinem, KutaBuluh			Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	19 Desa			70,400,000	77,440,000	
TOTAL											2,738,489,527	2,990,038,480	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pegagan Hilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											2,082,591,749	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,838,264,449	0	

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,260,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Tersedianya laporan LAKIP, RENJA	2 laporan		7,260,000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,375,591,749	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		1,375,591,749	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								185,829,500	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Tersedianya peralatan listrik	1 Tahun		12,100,000	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Bandar		Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun		58,174,500	0	
						Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Huta Usang							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Bandar Huta Usang		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	1 Tahun		24,805,000	0	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan		terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga lain	12 bulan			90,750,000	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									52,133,912	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Bandar Huta Usang		Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			52,133,912	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									82,396,000	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Bandar Huta Usang		Tersedianya benda benda pos	1 Tahun			4,840,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Bandar Huta Usang		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun			14,520,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan		Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / Teknis perkantoran	1 Tahun 1 Tahun			63,036,000	0	

7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135,053,288	0	
7	01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun		67,618,088	0	
7	01	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Terpeliharanya Mebeleur kantor	1 Tahun		10,000,000	0	
7	01	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya rumah dinas.	1 Tahun		30,770,200	0	
7	01	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, tersedianya perlengkapan gedung kantor.	1 Tahun		26,665,000	0	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								75,425,000	0	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								75,425,000	0	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan		Terlaksananya musrenbang desa dankecamatan	1 Tahun			20,570,000	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan		Terlaksanananya bulanbakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita.	1 Tahun			54,855,000	0	
7 01 05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										129,877,800	0	
7 01 05 2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										129,877,800	0	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, BandarHuta Usang		Terselenggaranya upacara hari-hari besarnasional	1 kegiatan			50,017,800	0	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan		Terlaksananya pengembangan keagamaan, keseniandan kebudayaan daerah	1 Tahun			79,860,000	0	
7 01 06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										39,024,500	0	
7 01 06 2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										39,024,500	0	

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan			terlaksanya evaluasi Ranperdes tentang APBDes	13 desa				11,951,600	0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desaterbaik serta terselenggaranya pembinaan dan	13 desa				27,072,900	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional		
					Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					pengawasan pemerintahan desa								
TOTAL																2,082,591,749	0	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Parbuluan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											2,542,915,240	2,797,206,764	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,093,825,240	2,303,207,764	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											13,000,000	14,300,000	

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 laporan			5,000,000	5,500,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	5 laporan			8,000,000	8,800,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,516,915,240	1,668,606,764	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1,516,915,240	1,668,606,764	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										290,000,000	319,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan			Tersedianya peralatan listrik	1 Tahun			30,000,000	33,000,000	
					Bangunan Kantor	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		IV									
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun 1 Tahun			100,000,000	110,000,000	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			30,000,000	33,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya biaya perjalanan dinas pegawai Tersedianya minuman rapat dan tamu	1 Tahun 1 Tahun			130,000,000	143,000,000	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											110,000,000	121,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			tersedianya mebeleur kantor	1 Tahun			50,000,000	55,000,000	
						Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun 1 Tahun			60,000,000	66,000,000	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											79,810,000	87,791,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya benda- benda pos dan materi	1 Tahun			7,000,000	7,700,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya Biaya Rekening Air Tersedianya Biaya Rekening Listrik Tersedianya Biaya SuratKabar	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			8,000,000	8,800,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Tahun			64,810,000	71,291,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										84,100,000	92,510,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas	1 Unit Mobil 1 Unit Sepeda Motor			52,000,000	57,200,000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Terpeliharanya mebeleur kantor	1 Tahun			10,000,000	11,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas	1 Unit 1 Unit			12,100,000	13,310,000	

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV			Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Tahun			10,000,000	11,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)																
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												145,000,000	159,500,000		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												145,000,000	159,500,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan			Terlaksananya musrenbang Desa dan Kecamatan	1 Tahun		39,000,000	42,900,000			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wikayah kecamatan	1 Tahun		106,000,000	116,600,000			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												206,800,000	227,480,000		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												206,800,000	227,480,000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perayaan HUT RI ke 77	1 Kegiatan		96,800,000	106,480,000			

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua			Terlaksananya KegiatanMTQ Terlaksananya Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			110,000,000	121,000,000		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, Regional, dan Nasional				Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan			Pesparawi Terlaksananya KegiatanPesta Njuah Njuah								
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												97,290,000	107,019,000		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												97,290,000	107,019,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya penyusunan peraturandesas dan peraturan kepala desa	11 Desa			27,290,000	30,019,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11 Desa 11 Desa			70,000,000	77,000,000		
TOTAL															2,542,915,240	2,797,206,764		

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01					KECAMATAN										2,032,309,846	831,258,000	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,753,729,846	501,824,000	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,286,309,846	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			1,286,309,846	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										195,325,000	232,926,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersedianya penerangan kantor	12 bulan			8,470,000	10,249,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor tersedianya peralatan dan bahan kebersihankantor	12 bulan 12 bulan			56,705,000	66,417,000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua			Persentase keperluan cetak dan penggandaandibanding kebutuhan yang dicetak dan	12 bulan			19,150,000	21,962,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target	Prioritas Pembangunan Nasional
						Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan			digandakan							

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ lembaga lain Tersedianya makanandan minuman rapat	12 bulan 12 bulan			111,000,000	134,298,000			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									101,290,000	62,224,000			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tersedianya motor lapangan, karena kondisi infrastruktur	12 bulan			39,865,000	0			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan		Tersedianya perlengkapan gedungkantor	12 bulan			34,200,000	29,282,000			
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan		Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan			27,225,000	32,942,000			
Kode	Kode		Kode		Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
						an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									60,390,000	73,072,000			

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan			2,420,000	2,928,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersedianya alat alat listrik dan penerangankantor	12 bulan			7,260,000	8,785,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihankantor	12 bulan			12,100,000	14,641,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan			38,610,000	46,718,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											110,415,000	133,602,000	

7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan 12 bulan			81,730,000	98,892,000	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terpeliharanya mebeleur	12 bulan			3,000,000	3,630,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kenyamanan bekerja digedung kantor Terpeliharanya rumah dinas	12 bulan 12 bulan			42,350,000	51,244,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan 12 bulan			24,200,000	29,282,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										79,430,000	93,181,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										79,430,000	93,181,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya musrenbang di desadan terlaksananya musrenbang kecamatan	12 bulan			20,100,000	23,958,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Pembinaan TP. PKK Kecamatan Terlaksananya bulan bakti gotong royong Terselenggaranya pembinaan kelompok informasi masyarakat Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di kecamatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan			59,330,000	69,223,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										110,000,000	133,100,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										110,000,000	133,100,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terselenggaranya upacara hari-hari besarnasional	12 bulan			44,000,000	53,240,000	

7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengembangan keagamaan, keseniandan kebudayaan daerah	12 bulan			66,000,000	79,860,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										89,150,000	103,153,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										89,150,000	103,153,000	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa)	12 bulan			19,150,000	21,962,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Terselenggaranya perlombaan desaterbaik tingkat kecamatan	12 bulan 12 bulan			70,000,000	81,191,000	
TOTAL											2,032,309,846	831,258,000	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										2,487,912,000	2,802,064,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,053,222,000	2,323,905,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,200,000	14,520,000	

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											13,200,000	14,520,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,758,763,000	2,000,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											1,758,763,000	2,000,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											132,550,000	145,805,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan								9,350,000	10,285,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											37,400,000	41,140,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											11,000,000	12,100,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											74,800,000	82,280,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											39,600,000	43,560,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel											13,200,000	14,520,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											13,200,000	14,520,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangun an Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya											13,200,000	14,520,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											48,059,000	52,865,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											15,829,000	17,412,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											2,200,000	2,420,000	

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											8,030,000	8,833,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											22,000,000	24,200,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											61,050,000	67,155,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											33,000,000	36,300,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											12,100,000	13,310,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											15,950,000	17,545,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											159,500,000	175,450,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											159,500,000	175,450,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										22,000,000	24,200,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan		terselenggaranya Musrenbang di desadan kecamatan	1 tahun			137,500,000	151,250,000				

7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								200,200,000	220,220,000		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								200,200,000	220,220,000		
7	01	05	2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								95,700,000	105,270,000		
7	01	05	2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								104,500,000	114,950,000		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								74,990,000	82,489,000		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								74,990,000	82,489,000		
7	01	06	2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								18,590,000	20,449,000		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
7	01	06	2.01 02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa								26,400,000	29,040,000		
7	01	06	2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								30,000,000	33,000,000		
TOTAL											2,487,912,000	2,802,064,000			

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lae Parira

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											2,029,072,839	745,157,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,804,012,839	497,591,000	

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7,260,000	7,986,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan							7,260,000	7,986,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,351,274,839	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1,351,274,839	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									231,836,000	255,020,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan							13,310,000	14,641,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan	1 Tahun 1 Tahun			57,596,000	63,356,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan			Tersedianya Cetakandan Penggandaan	1 Tahun			25,410,000	27,951,000		

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan				Tersedianya Makanandan Minuman Rapat Terselenggaranya Rapat Koordinasi danKonsultasi	1 Tahun 1 Tahun				135,520,000	149,072,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											69,817,000	76,379,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan									17,787,000	19,566,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan									52,030,000	56,813,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											43,153,000	47,469,000		
Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Tersedianya Bendabenda pos	1 Tahun				1,650,000	1,815,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan						6,050,000	6,656,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan		Tersedianya Tenaga Harian Lepas untuk Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun			38,478,000	42,326,000	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										100,672,000	110,737,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan						69,212,000	76,133,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					GERAK CEPAT)											

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan								4,840,000	5,324,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan								18,150,000	19,965,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan								8,470,000	9,315,000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												59,290,000	65,219,000		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												59,290,000	65,219,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI		Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan		Terfasilitasinya Musrenbang Desa Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	9 Desa 1 Kecamatan					14,520,000	15,972,000	
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode
									</									

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Lae Parira, Semua Kelurahan			Tersedianya Cetakandan Penggandaan	1 Tahun			44,770,000	49,247,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										133,100,000	146,410,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										133,100,000	146,410,000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Lae Parira, Semua Kelurahan			Terlaksananya perayaan HUTRI ke 77	1 kegiatan			78,650,000	86,515,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Daiiri, Lae Parira, Semua Kelurahan							54,450,000	59,895,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										32,670,000	35,937,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										32,670,000	35,937,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Daiiri, Lae Parira, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen			10,890,000	11,979,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangun an Nasional						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
					an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan							21,780,000	23,958,000	
													TOTAL	2,029,072,839	745,157,000	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Sitember

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												1,877,019,012	2,196,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,525,120,012	2,196,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,260,000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersusunnya RENJA, RENSTRA, LAKIP dan LPPD SKPD	4 Dokumen			7,260,000	0				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,175,019,012	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			1,175,019,012	0				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												197,913,000	0	

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya instalasi listrik kantor yang baik	1 Tahun			5,261,000	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Gunung Sitember,			Tersedianya Peralatandan Perlengkapan kantor yang baik	12 bulan			39,517,000	0	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Gunung Sitember									
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor	1 Tahun			6,655,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun			146,480,000	0	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											22,494,000	0	

7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Printer Tersedianya saranapendukung gedungkantor (laptop)	1 Unit 1 Unit			22,494,000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										39,985,000	2,196,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Gunung Sitember,			Terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun			1,997,000	2,196,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Gunung Sitember										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			12,298,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya jasa pelayanan umumkantor	12 bulan			25,690,000	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										82,449,000	0	

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya kendaraan dinas yang nyaman	1 Tahun			28,350,000	0		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung			Tersedianya mebeulerkantor yang memadai	1 Tahun			5,324,000	0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan an Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Sitember											
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya gedungkantor yang nyaman	1 Tahun			42,120,000	0		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang baik	1 Tahun			6,655,000	0		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												21,296,000	0		
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												21,296,000	0	

7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terciptanya efektivitas pelayanan kepada masyarakat	1 Tahun			42,592,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										129,927,000	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										129,927,000	0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terlaksananya musyawarah pembangunan desadan kecamatan	1 Tahun			46,620,000	0	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terciptanya pembinaan organisasi kepemudaan, TP PKK, dan terlaksananya bulan balita	1 tahun			83,307,000	0	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										112,530,000	0	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										112,530,000	0	

7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Tahun			46,585,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Tahun 1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuandan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember			Terselenggaranya upacara HUT RI	1 Kegiatan			6,050,000	0	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengembangan kesenian, keagamaan dan kebudayaan daerah	1 Tahun			59,895,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										88,146,000	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										88,146,000	0	

7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya penyusunan peraturandes a dan peraturan kepala desa	8 Desa			11,713,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terlaksananya perlombaan desa, terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8 Desa			55,137,000	0	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi pelaksanaanpembangunan di wilayah kecamatan	1 tahun			42,592,000	0	
TOTAL											1,877,019,012	2,196,000	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Berampu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											1,807,408,012	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,611,872,012	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,100,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Perencanaan	3 Bulan			2,500,000	0		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tersedianya laporan Keuangan da Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun			7,600,000	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,252,997,012	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										1,252,997,012	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											148,810,000	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor	12 Bulan			6,050,000	0		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor			Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tersedianya alat tulis kantor dan alat kebersihan	12 Bulan			48,400,000	0		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas	

				Program/ Kegiatan	Daerah			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangun an Nasional			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			19,360,000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Makan Minum Rapatdan Perjalanan Dinas	12 Bulan			75,000,000	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									56,870,000	0		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Dairi, Berampu, Berampu							56,870,000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									73,560,000	0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tersedianya benda-benda pos	12 Bulan			1,500,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	12 Bulan			19,360,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Tenaga Harian Lepas	12 Bulan			52,700,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	
					Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										69,535,000	0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			tersedianya pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan	12 Bulan			49,500,000	0	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			terpeliharanya rumahdinas dan kantor	12 Bulan			10,285,000	0	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			9,750,000	0	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										70,906,000	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										70,906,000	0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan			Terselengggaranya Musrenbang di kecamatan	1 Kecamatan			24,200,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Pembangunan di Desa	an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Berampu			Terselenggaranya gotong royong, pkk, kim, kepemudaan danbulan balita	5 Desa			46,706,000	0	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										102,850,000	0	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										102,850,000	0	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan			Terselenggaranya HUTRI	2 Kegiatan			48,400,000	0	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan			MTQ, Pesparawi, Pesta Njuah njuah, safari Ramadhan dan Natal	4 kegiatan			54,450,000	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										21,780,000	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										21,780,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan			Perlombaan Desa dan Pengawasan dan Pembinaan Desa	5 Desa			21,780,000	0	
TOTAL											1,807,408,012	0	

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silahisabungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												648,046,000	2,100,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												387,654,000	2,100,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												9,249,000	2,100,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Silahisabungan, Silalahi I			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %			1,989,000	2,100,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	100 %			7,260,000	0				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												188,760,000	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan listrik	100 %			12,100,000	0				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	100 %			45,980,000	0				

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		GERAK CEPAT)											
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %			18,150,000	0	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah Tersedianya makanandan minuman rapat dan tamu	100 % 100 %			112,530,000	0	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										79,860,000	0	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan gedungkantor	100 %			36,300,000	0	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 % 100 %			43,560,000	0	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangun an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									39,605,000	0	
7	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan		Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman	100 %		4,235,000	0		
7	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan		Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	100 %		9,680,000	0		
7	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan		Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	100 %		25,690,000	0		
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									70,180,000	0	
7	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %		54,450,000	0		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional	100 %				6,050,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	100 %				4,840,000	0	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100 %				4,840,000	0	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												97,042,000	0		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												97,042,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya musrembang desa, terlaksananya musrembang kecamatan	100 %				24,200,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Terlaksananya bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan balita Terlaksananya pembinaan TP PKK kecamatan Terselenggaranya pembinaan kepemudaan di kecamatan Terselenggaranya pembinaan KIM	100 % 100 % 100 % 100 %			72,842,000	0	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										121,000,000	0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										121,000,000	0	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Terselenggaranya upacara hari besar nasional	100 %			48,400,000	0	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengembangan keagamaan, keseniandan kebudayaan daerah	100 %			72,600,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										42,350,000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										42,350,000	0	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Silahisabung			Terfasilitasinya penyusunan peraturan	100 %			18,150,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							

			Peraturan KepalaDesa	Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		an, Semua Kelurahan			desa dan peraturankepala desa					
7	01	06	2.01	02	Facilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Silahisabung an, Semua Kelurahan		Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		24,200,000	0
												TOTAL	648,046,000	2,100,000

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sitinjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											4,230,269,950	1,098,866,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,518,958,950	668,589,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											7,260,000	7,986,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Keuangan, Lakip dan Renja	3 Laporan			7,260,000	7,986,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,930,186,950	0	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1,930,186,950	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										281,953,000	338,343,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan listrik	1 Tahun			14,400,000	17,280,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua			Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor	1 Tahun			96,164,000	115,397,000	
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan									
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			24,480,000	29,376,000	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah	1 Tahun				146,909,000	176,290,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										95,730,000	78,876,000		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	1 Tahun				95,730,000	78,876,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										105,617,000	126,740,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua			Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman	1 Tahun				4,320,000	5,184,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan											
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya telepon,listrik dan air	12 Bulan				19,200,000	23,040,000	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Kepala Lingkungan di Kelurahan Tersedianya Tenaga Harian Lepas Pada Kantor Camat	5 Orang 1 Orang				82,097,000	98,516,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										98,212,000	116,644,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional	1 Tahun				77,760,000	93,312,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	1 Tahun				20,452,000	23,332,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)													
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												29,554,000	35,064,000		
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												29,554,000	35,064,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terlaksananya bulan bakti gotong royong, Terlaksananya Bulan Balita Terlaksananya Pembinaan KelompokInformasi MasyarakatTerlaksananya Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan PKK	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun				29,554,000	35,064,000	

7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										1,472,957,000	144,653,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										18,000,000	24,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kelurahan kecamatan	1 Tahun			18,000,000	24,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,454,957,000	120,653,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem		Kab. Dairi, Sitingjo, Panji Dabutar			Terlaksananya pembangunan saranadan prasarana di kelurahan	1 Tahun			1,349,200,000	0	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan an Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Panji Dabutar			Terlaksannya Pemberdayan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan			105,757,000	120,653,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										185,760,000	222,912,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										185,760,000	222,912,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitingjo, Semua Kelurahan			Terlaksananya UpacaraHari Besar Nasional	1 Tahun			43,200,000	51,840,000	

7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengembangan Keagamaan, Kesenianandan Kebudayaan Daerah	1 Tahun			142,560,000	171,072,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										23,040,000	27,648,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										23,040,000	27,648,000	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua			Tersusunnya dokumen perencanaan (RPJMDes,RKPDes, dan	3 Desa			17,280,000	20,736,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Desa	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kelurahan			APBDes)						
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Desa			5,760,000	6,912,000	
TOTAL											4,230,269,950	1,098,866,000	

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													

8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								3,131,302,092	3,747,974,092		
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,681,320,335	3,161,974,092		
8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,000,000	20,664,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersusunnya Renstradan Renja	2 dokumen		12,000,000	14,000,000		
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja laporan	5 dokumen		6,000,000	6,664,000		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,131,302,092	2,131,302,092			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya gaji dan tungangan ASN	12 bulan		2,131,302,092	2,131,302,092		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								357,378,500	706,152,000			
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun		7,000,000	23,153,000		
Kode					Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
					Bangunan Kantor	Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)				kantor							

8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan			59,046,800	81,034,000	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan			7,010,000	17,364,000	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			13,947,700	34,729,000	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya bahan bacaan, koran dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			8,520,000	17,364,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangun an Nasional						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
					an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dan terpenuhinya makanandan minuman	12 bulan			261,854,000	532,508,000	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										43,509,380	138,349,000	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya mebeleur kantor (meja,kursi, lemari, filing kabinet)	11 unit			24,612,380	55,000,000	
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya perlengkapan kantor(pengadaan laptop)	2 unit laptop			18,897,000	83,349,000	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										81,125,048	83,315,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggara		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya benda- benda pos dan materai	12 bulan			999,000	2,315,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					an Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)												

8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya telepon, air dan listrik	12 bulan			15,320,000	16,000,000		
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya jasa tenaga adminstrasi perkantoran	12 bulan			64,806,048	65,000,000		
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											50,005,315	82,192,000		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas (1 unit kendaraan dinas roda 4)	1 tahun			50,005,315	82,192,000		
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												150,897,100	201,000,000		
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												150,897,100	201,000,000	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terfasilitasinya pembinaan terhadap forum kemitraan dalam	1 forum 250 orang			100,551,100	150,000,000		
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan		
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, BinekaTunggal lka dan Sejarah Kebangsaan		Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)					rangka pengembangan wawasan kebangsaan Terlaksananya sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan										

8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah forum kemitraan dalam rangka pengembanganwawasan kebangsaan	100 orang 2 forum			100,692,000	102,000,000	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										94,102,100	127,000,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										94,102,100	127,000,000	
8 01 03 2.01 01	Penyusunan ProgramKerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terlaksananya pendidikan politik	15 parpol			76,296,200	80,000,000	
Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											

8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	4 laporan			111,908,000	174,000,000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										50,000,000	78,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										50,000,000	78,000,000	
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang dibina	59 Ormas/LSM			100,000,000	156,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan an Nasional
		Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)											
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										39,000,000	55,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										39,000,000	55,000,000	

8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Jumlah Laporan Fasilitas/Pembinaan /Monev di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Pencegahan/Penyalahg unaan Narkotika	6 laporan			78,000,000	110,000,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										115,982,557	125,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										115,982,557	125,000,000	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Dairi Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik	1 forum 15 Kecamatan			76,000,000	80,000,000	
Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju(Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												

8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang			Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah	180 laporan			79,965,114	90,000,000	
TOTAL											3,131,302,092	3,747,974,092	

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pengaturan mengenai jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

SPM Kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi 2020-2024, terdiri atas :

SPM Pendidikan.

Jenis pelayanan dasar, terdiri atas :

- 1) Pendidikan anak usia dini.
 - 2) Pendidikan dasar.
 - 3) Pendidikan kesetaraan.
- a. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- b. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan :
- 1) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
 - 2) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar.
 - 3) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan

a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis.

- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - c. Penerima pelayanan dasar :
 - 1) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil.
 - 2) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin.
 - 3) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
 - 4) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita.
 - 5) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
 - 6) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif.
 - 7) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
 - 8) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
 - 9) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
 - 10) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
 - 11) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
 - 12) orang dengan risiko terinfeksi virus HIV untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV.

SPM Pekerjaan Umum

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- c. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum yaitu setiap warga negara.

SPM Perumahan Rakyat

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas :
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - 2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Penerima pelayanan dasar :
 - 1) Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - 2) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

SPM Trantibumlinmas

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas :
 - 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2) Pelayanan informasi rawan bencana.
 - 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

c. Penerima pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan :

- 1) Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten dan peraturan kepala daerah kabupaten.
- 2) Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 3) Yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

SPM Sosial

a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan :

- 1) Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) Anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) Lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
- 4) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

- 5) Korban bencana kabupaten untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator	2023	2024	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,18	75,88	0,7
	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,13	74,38	0,25
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,32	13,53	0,21
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,88	9,89	0,01
	Rata-rata Pengeluaran Per-kapita Per Tahun (Ribu Rupiah)	10.969	11.355	386
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,47	7,10	-0,37
	Jumlah penduduk miskin	21.420	20.400	-1020
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,93	0,79	-0,14
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,15	-0,02
	Garis Kemiskinan (Rupiah)	463.360,00	502.924	39.564
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,23	1,43	0,2
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04	4,97	-0,07
5	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	35,87	38,39	2,52
6	Gini Ratio	0,24	0,21	- 0,03

Keterangan

1. Indeks Pembangunan Manusia

- Umur harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang anak yang baru lahir dengan kondisi kualitas kesehatan dan penunjangnya di tahun tertentu.

- Harapan lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah yang akan ditempuh oleh anak berusia 7 tahun yang baru memasuki sekolah formal di tahun ini.
- Rata-rata lama bersekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- Pengeluaran per kapita menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat (per orang) secara rata-rata terhadap barang dan jasa. Pengeluaran per kapita ini menunjukkan dampak dari perekonomian di lingkungan masyarakat.

2. Angka Kemiskinan

- Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar nya baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar non makanan. Penurunan angka kemiskinan ada kaitannya dengan harga komoditas pokok yang relatif stabil sehingga tidak menekan penduduk berpehasilan menengah kebawah. Penyaluran dan penggunaan bantuan dari pemerintah seperti BPNT, PKH dll cukup membantu penduduk berpenghasilan menengah kebawah memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks kedalaman kemiskinan semakin kecil menunjukkan semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga penduduk miskin semakin dekat untuk keluar dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Indeks keparahan kemiskinan semakin kecil menunjukkan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil, sehingga kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil.

3. Angka Pengangguran

- Garis Kemiskinan, Garis kemiskinan mengalami kenaikan dipengaruhi oleh kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat. Walaupun garis kemiskinan naik akan tetapi tidak membuat jumlah penduduk miskin semakin besar.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
 - TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.
4. Pertumbuhan Ekonomi
- Untuk mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi adalah dengan membandingkan PDRB riil periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi tahun 2024 menjadi 4,97
5. Pendapatan Per kapita (Juta Rupiah)
- Pendapatan perkapita adalah rata-rata dari pendapatan yang diperoleh seorang penduduk dari aktivitas perekonomian yang bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Secara rata-rata, pada tahun 2024 seorang penduduk di Kabupaten Dairi mampu menghasilkan pendapatan sebesar 38,39 juta rupiah atau meningkat drastis sebesar 5,75 Juta Rupiah dari tahun 2020, yaitu 32,64 Juta Rupiah.
6. Gini ratio *)
- Gini ratio merupakan indikator ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Gini ratio berkisar dari 0 sampai 1, dimana koefisien 0 menandakan pemerataan secara sempurna, yaitu seluruh penduduk memiliki pendapatan yang benar-benar sama.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintah sesuai dengan indikator masing-

masing urusan pemerintah dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$6.537/11.321 \times 100\% = 57,74\%$	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$37.934/39.740 \times 100\% = 95,45\%$	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$17.357/21.761 \times 100\% = 79,76\%$	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$277/1.781 \times 100\% = 15,55\%$	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$231/333.335 \times 100\% = 0,69\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	$2/2 \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$3.851/4.413 \times 100\% = 87,26\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$3.804/3.804 \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$3.705/3.807 \times 100\% = 97,32\%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$19.422/19.422 \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$19.985/61.501 \times 100\% = 32,33\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$137.663/210.509 \times 100\% = 65,39\%$	Dinas Kesehatan	

		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$33.071/37.850 \times 100\% = 87,37\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$54.221/74.732 \times 100\% = 72,6\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$3.892 / 3.892 \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$374/402 \times 100\% = 93,03\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$8.243 / 8.243 \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$8.679/7.556 \times 100\% = 87,06\%$	Dinas Kesehatan	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak terdapat kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten Dairi.
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		Tidak terdapat kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten Dairi
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$10.554,47/11.175 \times 100\% = 94,45\%$		

		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$72.592/95.121 \times 100\% = 76,32\%$		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$67.830/83.841 \times 100\% = 80,90\%$		
		Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$85/85 \times 100\% = 100\%$		
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$865,77/1.605,29 \times 100\% = 53,93\%$		
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$20/100 \times 50\% = 40\%$		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-		Tidak terdapat proyek yang menjadi kewenangan pengawasan Kabupaten Dairi yang menyebabkan kecelakaan
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$69/69 \times 100\% = 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak terdapat Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program di Kewenangan Kabupaten Dairi

		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak Terdapat kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten Dairi yang ditangani melalui Pemugaran, Peremajaan, dan Pemukiman Kembali
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$9.858/83.841 \times 100\% = 11,76\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$3227/83.841 \times 100\% = 3,84\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$4/4 \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$4/4 \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$1.872/1.872 \text{ Jiwa} = 100\%$	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$372/329.341 \times 100\% = 0,11\%$	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$358 \text{ Orang} / 358 \times 100\% = 100\%$	BPBD	

		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$31/31 \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10 Menit	BPBD	
6	Urusan Sosial	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$397/402 \times 100\% = 98,75\%$	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$442 \text{ KK} / 442 \text{ kk} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
7	Urusan Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	DPMPTSPK	Tidak tersedia anggaran dalam penyusunan RTKD
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$350/196.244 \times 100\% = 0,18 \%$	DPMPTSPK	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$12.693.880.000.000/196.244 \times 100\% = 6.468.416.868,796$	DPMPTSPK	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$2/170 \times 100\% = 1,18\%$	DPMPTSPK	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$312/346 \times 100\% = 90,17\%$	DPMPTSPK	
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$3.594.210.285/1.040.180.253.064,1 \times 100\% = 0,3455373\%$	DP3AKB	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$31/31 \times 100\% = 100\%$		
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$23/167.038 = 9,18 \text{ per } 100.000$		

9	Urusan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$45.991,79 \text{ ton} / 35.304,57 \text{ ton} \times 100\% = 130\%$		
10	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$5.576/5.996 \times 100\% = 92,99\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak Terdapat Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Tahun 2024
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$527.975/547.161 \times 100\% = 96,49$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tersedianya tanah untuk masyarakat.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak terdapat Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee di Kewenangan Kabupaten Dairi
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Dinas Pekerjaan	Tidak Terdapat Izin Membuka

				Umum dan Tata Ruang	Tanah yang Diterbitkan guna Ketersediaan Tanah Untuk Masyarakat
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak terdapat sengketa tanah garapan yang ditangani melalui mediasi
11	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab./Kota	IKLH Kab. Dairi = $(0.376 \times 30\%) + (0,405 \times 30\%) + (0,219 \times 40\%) = 77,90\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab./Kota	$16.379,22 \text{ Ton}/48.666,91\text{Ton} \times 100\% = 33,66\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$28 \text{ Usaha} / 33 \text{ Usaha} \times 100\% = 84,85\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$233.760/233.777 \times 100\% = 99,99\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$63.128/99.558 \times 100\% = 63,41\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$104.400/105.189 \times 100\% = 99,23\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	$24 \text{ PD} / 24 \text{ PD} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	$7/21 \times 100\% = 33,3\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$4/121 \times 100\% = 3,3\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	3,01	DP3AKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$17.732/34.225 \times 100\% = 51,81\%$	DP3AKB	
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$6.946/34.225 \times 100\% = 18,98\%$	DP3AKB	
15	Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 X bobot angkutan jalan) + IK2 X bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 45,61	Dinas Perhubungan	
		V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	Dinas Perhubungan	

16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$40/40 \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	$8/8 \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Presentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	$231537/333.335 \times 100\% = 69,46\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$39/261 \times 100\% = 14,94\%$	Disperindagkop dan UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$10479/21.038 \times 100\% = 4,97\%$	Disperindagkop dan UKM	
18	Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(dalam Miliar) $1.129.410.000 / 7.588.660.000 \times 100\% = 14.88\%$	DPMPTSPK	
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	$721 \text{ Orang} / 89.449 \text{ Orang} = 0,8\%$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan	$9.520 \text{ Orang} / 89.449 \text{ Orang} \times 100\% = 10,64\%$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	10 Medali	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	

				Pemuda dan Olahraga	
20	Urusan Statistik	Persentasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	20/41 = 48,78%	Diskominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	20/41 = 48,78%	Diskominfo	
21	Urusan Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	Diskominfo	
22	Urusan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	0/9 x 100% = 0%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
23	Urusan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	(12.75 + 10.92 + 13.74) + (2.12 + 1.82) = 41,35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,23 Poin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Urusan Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. Tahun 2009 tentang Kearsipan)	79,9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i) / 6 T = (0 + 0 + 0 + 936 + 299 + 0) / 6 = 33,30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Urusan Pilihan					

1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	$3.642,024 \text{ ton} / 71417 \text{ ton} \times 100\% = 5,099$	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2	Urusan Pertanian	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	$433152,7 \text{ ton} / 68016,05 \text{ Ha} \times 100 = 68016,05 \text{ ton/Ha}$	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$23.380 - 780.639 / 780.639 \times 100\% = 97,01\%$		
3	Urusan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$593 \text{ Orang} - 677 / 677 \text{ Orang} \times 100\% = -12\%$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/ Kota	$251.622 - 264.865 = -13.243 \text{ Orang}$ $264.865 \text{ Orang} \times 100\% = -4,99\%$		
		Tingkat Hunian Akomodasi	$96 \text{ Kamar} / 588 \text{ Kamar} \times 100\% = 16,39\%$		
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	$\frac{324580000000}{100411235107.57} \times 100\% = 2,55\%$		
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	$\frac{4.079.767.864}{100411235107.57} \times 100\% = 4,06\%$		

4	Urusan Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$514-104 / 514 \times 100\% = 1,98\%$	Disperindagkop dan UKM	
		Presentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0		
		Presentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	$95 / 514 \times 100\% = 18,48\%$		
		Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kota	0		
		Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	0		
5	Urusan Perdagangan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	$80/30 \times 100\% = 26,66\%$	Disperindagkop dan UKM	
		Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	Realisasi 41.497.200 RDKK 80.279.000 = 51,69%		
		Presentase alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)	$486/627 \times 100\% = 77,51\%$		

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini			
	Outcome	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6.246 orang	56,17 %
		Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	11.120 orang	
	Output	1	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi	84 lembaga
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 siswa
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 siswa
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	309 orang
		5	Jumlah pendidik pada PAUD	343 orang
		6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	132 orang
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	55 orang
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Outcome	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	37.934 orang	96,02 %
		Jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	39.507 orang	
	Output	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	281 lembaga

		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 siswa
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
	Outcome	Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama		17.357 orang
		Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan		21.708 orang
	Output	1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 siswa
		2	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	40.224 siswa
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21.370 siswa
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.437 orang
		5	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	667 orang
		6	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.011 orang
		7	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.527 orang
		8	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.006 orang
		9	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	268 orang
		10	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	470 orang
		11	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	219 orang
		12	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.671 orang
		13	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.441 orang
		14	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	273 orang

		15	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65 orang
		16	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	328 orang
		17	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	152 orang
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
	Outcome	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan		277 orang
		Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan		78.304 orang
	Output	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	0
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	277 orang
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	30 orang
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	19 Orang
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	19 orang
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	272 orang
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3 orang

2. Urusan Kesehatan

1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk			
Outcome	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan		152	0,05%
	Jumlah penduduk di kabupaten/kota		333.335	
Output	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1
2	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
Outcome	Jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi		1	50%
	Jumlah rumah sakit di kabupaten/kota		2	
Output	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		1
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
Outcome	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		3.851	87,26%
	Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota		4.413	
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		623.192
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		1.050
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
Outcome	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan		3.804	100%
	Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota		3.804	

	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		18.050
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		1.050
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
Outcome		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		3.705	97,32%
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota		3.807	
Output		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		28.645
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		1.050
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard				
Outcome		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		19.422	100%
		Jumlah balita di kabupaten/kota		19.422	
Output		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		63.3997
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		1.089
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard				
Outcome		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		55.286	94,47%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota		58.520	
Output		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		304.490
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		1.131
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard				

	Outcome	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		137.663	83,58%	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota		164.712		
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			658.377
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.131	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard					
Outcome	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		33.071	96,68%		
	Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota		34.206			
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			69.683	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			1.131	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard					
Outcome	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		54.221	72,6%		
	Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota		74.732			
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			147.192	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1.131	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard					
Outcome	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		3.892	100%		
	Jumlah penderita DM di kabupaten/kota		3.892			

	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.607
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.121
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard			
	Outcome	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		374
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota		402
				93,03%
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.237
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard			
	Outcome	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		8.243
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota		8.243
				100%
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25.164
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.079
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard			
	Outcome	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		8.679
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota		7.556
				87,06%
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24.351
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.129

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)		-	%
	Outcome	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	-	Ha
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	-	Ha
	Output	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Ha
		2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	M
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		-	%
	Outcome	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Ha
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota	-	Ha
	output	1 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	-	Ha
		2 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	Ha
		3 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	Dokumen
		4 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Dokumen
		5 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		94,45%	%
	Outcome	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	10.554	Ha

	Output	luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota		11,175	Ha
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	45,95	%
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	48,08	%
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	49,04	%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			76,32%	%
	Outcome	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota		72.592	RT
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.		95.121	RT
	Output	1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada	Dokumen
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	ada	Dokumen
		3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ada	Dokumen
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	ada	1 Dokumen
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dokumen
5	Persentase jumlah rumah tangga yang Memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			80,90	%
	Outcome	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL		67.830	Unit
		Jumlah rumah di Kabupaten		83.841	Unit
	Output	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	3.977	Unit
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Unit

		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3.977	Unit
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Unit
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Unit
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.977	Unit
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	%
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	%
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	%
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	%
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	20	%
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1,02	%
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	4,75	%
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota			100	%
	Outcome	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya		85	Dokumen
		Jumlah IMB yang berlaku		85	Dokumen
	Output	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	%
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun 2023	79	Dokumen
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ada	Dokumen
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	Ketetapan
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Unit
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Unit

		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	Unit
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	9	Unit
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			53,93	%
	Outcome	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap		865,77	KM
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota		1,605.29	KM
	Output	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1,605.29	KM
		2	Panjang jalan yang dibangun	15	KM
		3	Panjang jembatan yang dibangun	2	Unit
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	16	KM
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	18	KM
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	KM
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	M
		8	Panjang jalan yang dipelihara	33	KM
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	12	M
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			40	%
	Outcome	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis		20	Org
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota		50	Org
	Output	1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1	Dokumen
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	156	Org
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	156	Org
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dokumen
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dokumen

	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dokumen
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dokumen
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dokumen
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dokumen
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	Dokumen
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dokumen
	12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	Dokumen
	13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dokumen
	14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	74	Dokumen
	15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dokumen
	16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dokumen
	17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dokumen

		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Unit
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	1	Unit
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Unit
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Unit
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dokumen
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dokumen
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			0	%
	Outcome	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi		0	Paket
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		309	Paket
	Output	24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Tidak Ada Kejadian
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Kegiatan

4. Urusan Perumahan Rakyat

1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana kabupaten/kota			100	%
	Outcome	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020		69	Unit
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		69	Unit
	Output	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Unit

		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Unit
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	RT/KK/Jw
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Unit
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Unit
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Unit
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Unit
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	RT/KK/Jw
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Ha
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota			0	%
	Outcome	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni		0	RT
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		0	RT
	Output	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	342	RT

		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	57.058	RT
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Ha
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			1,84	%
	Outcome	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)		2,54	Ha
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		138,60	Ha
	Output	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	138,60	Ha
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	342	Unit
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	4,64	Ha
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			11,76	%
	Outcome	Jumlah unit rumah tidak layak huni		9.858	Unit
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		83.841	Unit
	Output	1	Jumlah rumah di kab/kota	83.807	Unit
		2	Jumlah unit PK RTLH	342	Unit
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	25.596	Unit
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Unit
		5	Rasio rumah dan KK	89,51	%
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	0	Unit
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			3,84	%
	Outcome	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU		3227	Unit
		Jumlah unit rumah kab/kota		83.841	Unit
	Output	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	10	Lingkungan
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	63.406	Unit
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3.700	Unit
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3.977	Unit

	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	Lingkungan
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1000	Unit
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	Pengembang
	8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	-	Pengembang
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Pengembang

5. Urusan Trantibumlinmas

1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
Outcome	Jumlah pengaduan yang ditangani		4	100%
	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		4	
Output	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		-
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		1.492 orang
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		7 Perda/Perkada
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang
	5	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum		13 SOP
	6	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi		3 Kendaraan Dinas Roda 4 5 Kendaraan Dinas Roda 2

				94	Set Pakaian Anti Huru-Hara
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
Outcome	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan			4	100%
	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			4	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			1.872 Jiwa	100%
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			1
	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			100%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			829	100%
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			-
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			-
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			100%
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan			100%
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			100%

		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	358 Orang	100%
	Output	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	-
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	119 Kejadian bencana 100%
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	46 orang 100%
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	293 Orang 100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Outcome	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	31 Kejadian	100%
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	31 Kejadian	
	Output	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0 Layanan
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, saranaprasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 Pos

		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	4 Kecamatan 82 orang
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	4 Pos
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	- Mobil 5 Unit - Baju Tahan Panas 10 Pasang - Sepatu Tahan Panas 11 Buah - Topeng (masker) Gas - Masker Asap 15 Buah - Helmed 20 Buah - Nozzle Pemadam Kebakaran uk. 1,5" 9 Buah

				- Selang Penyiram Pemadam Kebakaran Rubber Uk. 1,5" x 20 m 12 Gulung - Selang Penyiram Pemadam Kebakaran Rubber Uk. 1,5" x 30 m 12 Gulung - Y Connection/Pembagi Air 4 Buah - Senter Kepala 30 Buah - Resevoir 1 Pos
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Tidak Ada

		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak Ada
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			
	Outcome		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10 Menit 77,4%

6. Urusan Sosial

	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				
	Outcome	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		200	100%
		Populasi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		200	
	Output	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		21 Orang
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		1.444 Orang
		3	Jumlah Tim Reaksi cepat yang dibentuk		-
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dijangkau		23 Orang
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		-

	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	325 Orang
	7	Jumlah rumah singgah / shelter / tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket sandang	10 Orang
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	46 Orang
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah / shelter	-
	11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-
	13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-
	14	Jumlah pekerja sosial profesional dan / atau TKS dan / atau relawan sosial yang disediakan	-
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah / shelter dan / atau pusat kesejahteraan sosial	199 Orang
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	29 Orang
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1 Orang
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2 Orang
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1 Orang
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	18 Orang

2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten\kota			
	outcome	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	438 KK	100%
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	438 KK	
		1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	438 KK
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	80 KK
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-
		4	Jumlah paket pemakaman khusus bagi kelompok rentan	-
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-
		6	Jumlah pekerja sosial profesional /tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawan sosial yang tersedia	36 orang

7. Urusan Ketenagakerjaan

1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
Outcome	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD			0	(RTKD Kabupaten Dairi sampai saat ini belum disusun karena keterbatasan anggaran)
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota			0	
Output	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.			RTKD Belum ada

		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.			Tidak Ada (Nihil)
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.			0 perusahaan (belum ada)
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
	Outcome	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi			350 orang	0,18 %
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan			196.244 orang	
	Output	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n	9	100%
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	9	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	5 orang	100%
					Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	5 orang	3.52%
					Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	
		4	Persentase penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	142 orang	5.00%
					Jumlah penganggur pada tahun n	

		5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	110 orang	87.30 %
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	126 orang	
		6	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	27 orang	19.01%
				Jumlah lulusan pada tahun n	142 orang	
		7	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	2 (dua)	40%
				Jumlah seluruh LPK pada tahun n	5 (lima)	
		8	Persentase LPK yang memiliki Perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	5 (lima)	100%
				Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	5 (lima)	
		9	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	126 orang	88.73%
				Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	142 orang	
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan			Tidak ada
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			Tidak ada

3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
	Outcome	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)			Rp	Rp.
		Jumlah tenaga kerja			196.244 orang	
	Output	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	170 Perusahaan	100%
				Jumlah perusahaan pada tahun n	170 Perusahaan	
		2	Data tingkat produktivitas total	Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun n	Tidak ada (Nihil)	0 %
				Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n	Tidak ada (Nihil)	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
	Outcome	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			2 Perusahaan	1.18 %
		Jumlah perusahaan			170 Perusahaan	

Output	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	5 Perusahaan	2.94 %
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	170 Perusahaan	
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	Tidak ada (Nihil)	0%
			Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh	2 Perusahaan	
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n			26 orang
	4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	Tidak ada (Nihil)	0 %
			Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	5 Perusahaan	
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	129 Perusahaan	75.88 %
			Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	170 Perusahaan	
	6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	Tidak ada (Nihil)	0 %
			Jumlah perusahaan pada tahun n	170 Perusahaan	
	7	Jumlah mogok kerja			Tidak ada (Nihil)
	8	Jumlah penutupan perusahaan			Tidak ada (Nihil)

		9	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada (Nihil)
		10	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Tidak ada (Nihil)
		11	Jumlah perselisihan PHK	Tidak ada (Nihil)
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	5 orang
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Tidak ada (Nihil)
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Tidak ada (Nihil)
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	0% (Nihil)
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
	Outcome	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	312 orang	90.17 %
		Jumlah pencaker yang terdaftar	346 orang	
	Output	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota.	Tidak ada (Nihil)
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota.	346 orang
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota.	13 BKK
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota.	Tidak ada (Nihil)
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.	2 orang
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota.	Tidak ada (Nihil)
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Tidak ada (Nihil)
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).	Tidak ada (Nihil)
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.	Tidak ada (Nihil)

		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.	252 orang
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	Tidak ada (Nihil)
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	Tidak ada (Nihil)
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	Tidak ada
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	Tidak ada

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
	Outcome	Jumlah ARG pada Belanja langsung APBD			2.066.726.500,-	0%
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD			1.352.146.533.377,-	
	Output	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			40 Perangkat Daerah
2		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/Kota			22 Lembaga	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten					
	Outcome	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi			31 orang	0,0005%
		Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)			121.978 orang	

	Output	1	Jumlah media massa (cetak Elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE Pencegahan kekerasan terhadap anak			1 Layanan
		2	Jumlah Lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			1 Layanan
		3	Persentase Korban Kekerasan anak terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	31 Orang	100%
				Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten	31 Orang	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			20 Lembaga
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			0 Lembaga
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
	Outcome	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		23 orang	9,18 per 100.000	
		Jumlah Penduduk perempuan di kabupaten		158.077 orang		
	Output	1	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			20 Organisasi
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			0 Orang
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			0 Lembaga
		4	Jumlah Lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten / kota			0 Organisasi

	5	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang dievaluasi	1 Kebijakan
	6	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga
	7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%

9. Urusan Pangan

1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
Outcome	Jumlah cadangan pangan	45.991,79 ton	130%
	Jumlah kebutuhan pangan	35.304,57 ton	
Output	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak
	2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak
	3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada
	5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada
	6	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak
	7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak
	8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak

10. Urusan Pertanahan

1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			100	%
	Outcome	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi		943,908	Ha
		Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		943,908	Ha
	Output	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Rekomendasi
2.	<i>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>			49,44	%
	Outcome	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		2,65	Ruas/Lokasi
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		5,36	Ruas/Lokasi
	Output	1	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	-	Ketetapan
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.			100	%
	Outcome	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi		943,908	Ha
		Luas izin lokasi yang diterbitkan		943,908	Ha
	Output	1	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	-	Ketetapan
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tersedianya tanah untuk masyarakat.			-	Ha
	Outcome	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;		-	Obyek
		Jumlah penerima tanah obyek landreform		-	Obyek
	Output	1	Dokumen Izin membuka tanah	-	Dokumen
5.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			0	%
	Outcome	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani		0	Dokumen

		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0	Dokumen
Output	1	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	-	Dokumen

11. Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab./Kota			
Outcome	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITL 40%) IKA = Indeks Kualitas Air	IKLH Kab. Dairi = (0.376 x 30%) + (0,405 x 30%) + (0,219 x 40%)	77,90
	IKU = Indeks Kualitas Udara ITL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
Output	1 Hasil Perhitungan Provinsi terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA)		69,50
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		94,30 62,01
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab./Kota			
Outcome	Total Volume Sampah Yang Dapat Ditangani Total Volume Timbunan Sampah Kabupaten/Kota	16.379,22 Ton 48.666,91Ton	33,66%

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Outcome	Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/ Kota			28 Usaha Yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan (Tidak menyampaikan laporan pengawasan terhadap usaha/kegiatan)	84,85%	
	Usaha dan/ atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			33 Usaha		
Output	1	Usaha dan/ atau kegiatan dilakukan pemeriksaan				Ada
	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah PPLHD yang ada	Tidak ada	0%	
			Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota	3 Usaha/Kegiatan		
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda Jumlah Usulan MHA	Tidak ada Tidak ada	0%	
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	Tidak ada	0%	
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah MHA yang ada	Tidak ada		

	6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	1 pengaduan masyarakat pada tahun 2024	100%
--	---	---	-------------------------------------	--	------

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1	Perekaman KTP elektronik					
	Outcome	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP			233.760	99,99%
		Jumlah Penduduk 17 tahun keatas			233.777	
	Output	1	Penerbitan akta perkawinan			57.141
		2	Penerbitan akta perceraian			574
		3	Penerbitan akta kematian			9.383
		4	Penyajian data kependudukan			Ada
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
	Outcome	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA			63.128	63,41%
		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari			99.558	
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun					
		Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran			104.400	99,23%

	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun fungsi	105.189	
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	24	100,00%
	Jumlah seluruh OPD selain catpil dan kecamatan	24	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	Persentase Pengembangan Desa Tertinggal			
	Outcome	Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	7	33,3%
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun – n)	21	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
	Outcome	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	4	3,3%
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun – n)	121	
	Output	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	9 Desa
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	- Desa
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	161 Desa	

		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	113 Desa
--	--	---	--	----------

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	TFR (Angka Kelahiran Total)				
Outcome		7			
	TFR=	$\sum_{i=1}^7 ASFR_i$	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$		
	5				
		i=1		3,13	3,13
	TFR	= Angka Kelahiran Total			
	ASFR	= Angka Kelahiran Menurut Kelompok umur			
	b _i	= Jumlah Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu			
	p _i	= Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama			
	I	= Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok umur 20-24,..., i=7 untuk kelompok umur 45-49)			
	k	= Bilangan Konstanta biasanya 1000			
Output	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di perda kan			Tidak Ada

		2	Media Usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			22,9 (PK 24)
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	ASFRi		9,5 (PK 23)
				ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun		9,5 (PK 23)
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (adokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (adokasi dan KIE)	70.762	68.0% (PK 24)
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (adokasi dan KIE)	131.593	
		5	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
	Outcome	Jumlah peserta KB Aktif Modern			17.732	51,81%
		Jumlah Pasangan Usia Subur			34.225	
	Output	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP	19	100%
				Jumlah Faskes	19	
		2	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Peserta KB Aktif	10.486	31,74%
				Jumlah PUS	33.036	

		3	Pemerintah daerah provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif		27
		4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	1.538	40,43%
				Jumlah sasaran peserta KB Pasca Persalinan	3.804	
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
	Outcome	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani			6.946	18,98%
		Jumlah Pasangan Usia Subur			34.225	
	Output	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		MOP (33 Akseptor)	0,18%
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	6.103	34,41%
				Jumlah Keluarga PBI	17.732	

15. Urusan Perhubungan

1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota				
	Outcome	Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 X bobot angkutan jalan) + IK2 X bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan			

	Output	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C tersedia	1	100%	
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan jalan	1		
		2	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala				616 unit kendaraan
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif	1	1,12%	
				Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan perdesaan	89		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota				100%
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota						
	Outcome	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

1.	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	
----	--	--

	Outcome	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			40 OPD	100 %
		Jumlah OPD			40 OPD	
	Output	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaring Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi dijaring intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40 OPD	100 %
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40 OPD	100 %
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			YA
	2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi				
	Outcome	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			8 Layanan	100%
		Jumlah layanan publik			8 Layanan	
	Output	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	4 Kegiatan	100%
				Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah	4 Kegiatan	

		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan Administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	13 Layanan	76,47%
				Jumlah layanan	17 Layanan	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2 Layanan	11,77%
				Jumlah layanan	17 Layanan	
		6	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	8 System Elektronik	100%
				Jumlah system elektronik	8 System Elektronik	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan Pemerintah	4 Layanan	23,53%
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	17 Layanan	
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	

		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat Data pemerintah	Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	1 Layanan	12,5%
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	40 Layanan	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	40 OPD	100%
				Jumlah perangkat daerah	40 OPD	
		13	Presentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Presentase ASN pengelola TIK yang tersertifikat kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	1 ASN	5,26%
				Jumlah ASN pengelola TIK	19 ASN	
		14	Tersedianya peraturan daerah kepala daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			
3.	Presentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui kebijakan Dan Program					
	Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi					
	Outcome	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya			231537	69,46%
		Jumlah penduduk			333335	
	Output	1	Persentase komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemda yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	91	100%
				Komunitas masyarakat atau Mitra komunikasi pemerintah Daerah	91	

		2	Presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STROKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	8	100%
				Konteni nformasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	8	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	8	100%
				Diseminasi dan layanan informasi publik	8	

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas				
	Outcome	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset			39
		Jumlah seluruh koperasi			261
					14,94%
	Output	1.	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	4
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	45
		2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	-
					0 %

				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	-	
		3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	39	14,94%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	4	8,16%
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	49	
		5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40	15,32%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	95	1,18%
				Jumlah anggota koperasi yang ada	8000	
		7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	4	1,53%
				Jumlah koperasi yang ada	261	

		8.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya	30	11,49%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		9.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12	4,56%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	14	5,36%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	50	19,16%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendamping kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	14	5,36%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
		13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	14	5,36%
				Jumlah koperasi yang ada	261	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
	Outcome	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha			4.419	16,35%
		Jumlah usaha mikro keseluruhan			21.038	

	Output	1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	1.047	4,9%
				Jumlah wirausaha yang ada	21.038	
		2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	0	0%
				Jumlah usaha kecil yang ada	21.038	
		3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	300	1,42%
				Jumlah usaha kecil yang ada	21.038	
		4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	33	0,15%
				Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	21.038	
		5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	500	2,37%
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	21.038	
		6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	300	1,42%
				Jumlah usaha mikro yang ada	21.038	
		7.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1.047	4,97%
				Jumlah usaha mikro yang ada	21.038	

18. Urusan Penanaman Modal

1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota			
	Outcome	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota		(dalam Miliar) Rp 1,129.41
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota		(dalam Miliar) Rp 7.588,66
				14.88%
	Output	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Belum ditetapkan / belum ada (Telah ditetapkan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal tetapi fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang bisa diberikan kepada investor belum diatur dan ditetapkan dalam peraturan pelaksana)
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak) Tidak ada

	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Tidak ada
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Tidak ada
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Tidak ada
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak ada
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2 Konsultasi
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	2.747 izin
	9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten/kota	(dalam Miliar) Rp. 8,718.07
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	263 orang
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	239 unit
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	10 kali

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				
	Outcome	Jumlah pemuda (16-30) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota		721 Orang	0,8 %
		Jumlah pemuda (umur 16-30) di Kabupaten/Kota		89.449 Orang	
	Output	1	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		50 Orang
		2	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan				
	Outcome	Jumlah pemuda (16-30) yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota		9.520 Orang	10,64 %
		Jumlah Pemuda (umur 16-30) di Kabupaten/Kota		89.449 Orang	
	Output	1	Jumlah Pemuda yang mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda		0
		2	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		124 Organisasi
3	Peningkatan Prestasi Olahraga				
	Outcome	Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional			10 Medali
	Output	1	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan Pendidikan		36 Orang
		2	Jumlah Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah		1 Event (FORKI)

20. Urusan Statistik

1	Persentasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
	Outcome	Jumlah OPD yang menggunakannya data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			20 OPD	48,78%
		Jumlah OPD			41 OPD	
	Output	1	Tersedianya buku profil daerah			1 Buku
		2	Jumlah survey statistik			9 OPD
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			25 OPD
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS			8 OPD
		5	Jumlah kompilasi statistik sektor yang mendapat rekomendasi dari BPS			9 OPD
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	25 OPD	100%
				Jumlah kegiatan statistik sektoral	25 OPD	
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata sektoral	25 OPD	100%
				Jumlah indikator statistik sektoral	25 OPD	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
	Outcome	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			20 OPD	48,78%
		Jumlah OPD			41 OPD	

21. Urusan Persandian

1	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
	Outcome	Jumlah nilai area per keamanan informasi			-	0 %
		Jumlah area penilaian			-	
	Output	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	-	0 %
				Jumlah kegiatan strategis yang ada	-	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	2 Aplikasi	100 %
				Jumlah SE yang ada	2 Aplikasi	
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	39	100%
				Jumlah SE yang ada	39	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan	40	100%
				Jumlah titik pada PHKS	40	

22. Urusan Kebudayaan

1

Terlestarikannya Cagar Budaya					
Outcome	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan			0	0 %
	Jumlah cagar budaya yang terdata			9	
Output	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	1 Objek (Gednas)	
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	1 Objek (Gednas)	
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	1 Objek (Gednas)	
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standar isasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi+ Jumlah lembaga di standarisasi+ jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	6 Sanggar Tari, 3 Sanggar Moccak dan 3 Sanggar Musik	
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	0	
	6	Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	0	
	7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikanizinkeluarprovinsi	0	

	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan+ dikembangkan + dimanfaatkan)	0
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0
	12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pegelolaan museum	0
	13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	9 Orang
	14	Pembentukan tim ahli cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0
	15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	2 Orang
	16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + Jumlah SDM Museum	0
	17	Penigkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0
	18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0
	19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0

23. Urusan Perpustakaan

23	Urusan Wajib Perpustakaan					
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat					
Outcome	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat				(12.75 + 10.92 + 13.74) + (2.12 + 1.82)	41,35%
Output	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	$\frac{61.930}{285.481} \times 100\%$	0,363%	
			Jumlah penduduk di wilayahnya			
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara	$\frac{59.991}{285.481} \times 100\%$	0,0290%	

				online aupun onsite		
				Jumlah penduduk di wilayahnya		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	$\frac{974}{285.481} \times 100 \%$	0,0313%
				Jumah penduduk di wilayahnya		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{54}{425} \times 100 \dots$	0,000099%
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		

		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				476 orang				
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat										
Outcome	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)			425 + 64.027 + 974 + 14 + 54 + 4.831 + 282/308.674				70,23 Poin			
	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan										
	UPLM 2 = Ketercukupan koleksi										
	UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan										
	UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan										
	UPLM 5 = Perpustakaan ber - SNP										
	UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan										
	UPLM 7 = Anggota perpustakaan										
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =										
		Σ	X 100						UPLM		
									ALM		
Output	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya					-				

	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-

24. Urusan Kearsipan

1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. Tahun 2009 tentang Kearsipan)				
Outcome	T = (a + i + s + J) / 4			T = (100 %+ 100% + 100 %+ 0 %) / 4	75%
	T	= Tingkat ketersediaan arsip			
	a	= Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			
	i	= Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			
	s	= Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			
	j	= Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			
Output	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	86	100%
			Jumlah seluruh arsip aktif	86	
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	153	100%
			Jumlah seluruh arsip in-aktif	153	

		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	332	100%
				Jumlah arsip statis	332	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	...	0%
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	...	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
Outcome	T = (m + b + g + a + c + i) / 6			$T = \frac{1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0}{6} = \frac{3}{6}$		79,9%
	T	= Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				
	m	= Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK				
	b	= Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK				
	g	= Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan				
		dan pemekaran daerah kabupaten/Kota dengan NSPK				
	a	= Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK				
	c	= Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK				
	i	= Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat terurup dengan NSPK				

	output	1	Pemusnahan arsip yang sesuai dengan NSPK	-
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	-
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai dengan NSPK	-
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk dftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	332
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK ...	-

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

1.	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten				
	Outcome	1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya kabupaten Dairi Tahun 2024	3.642,042 ton	5,09ton
		2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap kabupaten Dairi Tahun 2024	71417 ton	

Output	1	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Tidak ada
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Tidak ada
	3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Dairi yang diterbitkan	Tidak ada
	4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	61 Orang
	5	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	87.125 ekor

2. Urusan Pilihan Pertanian

1.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun				
Outcome	Jumlah produksi pertanian pangan (Padi) per hektar per tahun			92.338 ton	54,73 ton/Ha
	Luas panen			16.872,50 Ha	
Output	1	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan		156.393
	2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	30	100%
			Jumlah prasarana yang dibangun	30	
	3	Penertiban izin usaha pertanian	Jumlah fasilitas penerbitan izin usaha pertanian		Tidak ada
	4	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	30	100%
			Jumlah prasarana yang dibangun	30	

		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi	0	0%
				Jumlah usulan usaha pertanian	0	
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
	Outcome	Jumlah kejadian penyakit/ kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)			23.380 – 780.639	97,01%
		Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)			780.639	

3. Urusan Pilihan Pariwisata

1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
	Outcome	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)			593 Orang	-12,40%
		Jumlah wisatawan tahun n-1			677 Orang	
	Output	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			0
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			18
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota			
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			593 Orang
5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			6 Event	

		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/Kota			0
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri			6
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi		0
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	360 Orang	100 %
				Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	360 Orang	
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			25 Desa		
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/ Kota					
	Outcome	Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1		251.622 - 264.865 = - 13.243 Orang	- 4,99 %	
		Jumlah wisatawan tahun n-1		264.865 Orang		
3	Tingkat Hunian Akomodasi					
	Outcome	Jumlah kamar yang terjual		96 Kamar	16,39 %	
		Jumlah kamar yang tersedia		588 Kamar		

4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku			
	Outcome	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	$\frac{4.079.767.864}{12.693.880.000.000} \times 100 \%$	0,03 %
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD			
	Outcome	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	$\frac{4.079.767.864}{82.196.234.749} \times 100 \%$	4,96 %

4. Urusan Pilihan Perindustrian

1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota				
	Outcome	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	514-504	1,98%	
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	514		
	Output	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	
2.	Presentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
	Outcome	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut		0%	

	Output	1.	Presentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan :	-	
				a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	-	
3.	Presentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait					
	Outcome	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan			95	95%
		Jumlah izin yang dikeluarkan			-	-
	Output	1.	Presentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-	Tidak ada ijin diterbitkan

		2.	Presentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	-	-	Tidak ada ijin diterbitkan
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-	-	
4.	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
	Outcome		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		-	-	Tidak ada ijin diterbitkan
			Jumlah izin yang dikeluarkan		-	-	
5.	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kota						
	Outcome		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		-	-	Tidak ada ijin diterbitkan
			Jumlah izin yang dikeluarkan		-	-	
	Output	1.	Presentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) lintas	Jumlah raelisasi izin yang diterbitkan	-	-	

			daerah kabupaten/kota				
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-	-	Tiadak ada permohonan atau pengajuan izin
6.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini						
	Outcome	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianyan informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi Bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar /energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi			-	-	
	Output	1.	Presentase data perusahaan kawasan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasterhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kotadi SII Nas	38	7,1%	

		perusahaan kawasan industri dikabupaten/kota				
			Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan idustri lintas kabupaten/kota	-	-	

5. Urusan Pilihan Perdagangan

1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan					
	Outcome	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		80	26,66%	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota		30		
	Output	1.	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko Swalayan		0 3	0%
		2.	Presentase penerbitan TDG	Jumlah permohonan TDG	2	16,66%
				Jumlah gudang	12	
		3.	Presentase gudang yang tidak mempunyai TDG		-	-
		4.	Presentase penerbitan STPW yang tepat waktu		-	-
		5.	Presentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat daerah kabupaten/kota		-	-
		6.	Presentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		-	-

		7.	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	12	8,33%	
		8.	Presentase koefisien variasi harga antar waktu	33	7,2%	
2	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk					
	Outcome	Realisasi		41.497.200	51,69%	
		RDKK		80.279.000		
	Output	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan $x = \frac{a}{b \times c} \times 100 \%$ X= Presentase jumlah pupuk yang disalurkan a= Jumlah pupuk yang disalurkan b= Target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c= RDKK (Rencana Defenitif aka Kebutuhan Kelompok)		69%	
6	Presentase alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)					
	Outcome	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan		486	97,2%	
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota		500		
	Output	1	Presentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan		97,2%	

	2	Presentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perencanaan keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rp.190.885.385.691,00.- / Rp.1.352.146.553.377,00.- x 100% = 14,12%		
		Rasio PAD	Rp.98.379.074.374,00.- / Rp.1.260.206.860.974,00.- x 100% = 7,81%		
		Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rp.1.147.149.332.337,00.- / Rp.1.352.146.553.377,00.- x 100% = 84,84%		
		Opini Laporan Keuangan	WTP		
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 / 940 x 100% = 0%		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	52/940 x 100% = 5,53%		
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	143.360.270.408,- / 1.040.180.252.064.1,- x 100% = 13,78%		
		Melihat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	49.658.345.183,- / x 100% = 26,10 190.258.129.710		
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	797/1.137 x 100% = 70,09%		

		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$272/1.137 \times 100\% = 23,92\%$		
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$87/272 \times 100\% = 31,99\%$		
	Manajemen Keuangan	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	$\text{Rp. } 1.248.759.410.799,1 / \text{Rp. } 1.352.146.553.377 \times 100\% = 7,64\%$		
		Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	$\text{Rp. } 100.411.235.107,57 / \text{Rp. } 98.379.074.374.- \times 100\% = 2,06\%$		
		Assets Management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya)		
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya)		
			3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya)		
			4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)		
		Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\text{Rp. } 39.004.969.868,14 / \text{Rp. } 1.236.219.013.955,5 \times 100\% = 3,15\%$		
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	$38.493.022.652 / 44.763.398.138 \times 100\% = 85,99\%$		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah(public access fiscal information)	$3/3 \times 100\% = 100\%$		
	Inspektorat	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2		

		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
--	--	--	---------	--	--

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan			
	Outcome	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rp.190.885.385.691,00.-	14,12%
		Jumlah APBD	Rp.1.352.146.553.377,00.-	
2	Rasio PAD			
	Outcome	Jumlah PAD	Rp.98.379.074.374,00.-	7,81%
		Jumlah Pendapatan pada APBD	Rp.1.260.206.860.974,00.-	
3	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			
	Outcome	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures	Rp.1.147.149.332.337,00.-	84,84%
		Jumlah belanja APBD	Rp.1.352.146.553.377,00.-	

4	Opini Laporan Keuangan			
	Outcome	Opini Laporan Keuangan	WTP	100,00%

2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama				
	Outcome	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n		0	0%
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		940	
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif				
	Outcome	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		52	5,53%
		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		940	
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan				
	Outcome	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan		143.360.270.408,-	13,78%
		Total belanja langsung		1.040.180.252.064.1,-	
4	Melihat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah				
	Outcome	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		49.658.345.183,-	26,10%
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		190.258.129.710	

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian/BKPSDM)

1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	Outcome	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas		797	70,09%
		Jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah		1137	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	Outcome	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)		272	23,92%
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1.137	
3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	Outcome	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi		87	31,99%
		Seluruh jumlah fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		272	

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD			
	Outcome	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	Rp. 1.248.759.410.799,1..-	7,64%
		Total belanja APBD dikurangi satu	Rp. 1.352.146.553.377.-	

2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD			
	Outcome	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi-1	Rp. 100.411.235.107.57.-	2,06%
		Total PAD dalam APBD	Rp. 98.379.074.374.-	
3	Assets Management			
	Outcome	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Ya
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Ya
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya
		4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya			
	Outcome	Nilai realisasi SiLPA	Rp. 39.004.969.868.14.-	3,15%

		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rp. 1.236.219.013.955.5.-	
--	--	---	---------------------------	--

5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)

1	Informasi ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)			
	Outcome	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	38493022652	85,99%
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	44763398138	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah(public access fiscal information)			
	Outcome	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	3	100%
		Total jumlah dokumen yang telah terinci	3	

6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	Outcome	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	100%
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
	Outcome	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	100%

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah disajikan melalui laporan kinerja yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja yang menggambarkan progres pencapaian kinerja termasuk didalamnya laporan hasil perbaikan kinerja yang dilakukan dan merupakan solusi yang telah ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu instansi pemerintah wajib menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk diinformasikan kepada masyarakat serta dilaporkan ke Pemerintah Daerah Atasan dan Kementerian/Lembaga. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 secara umum menyajikan capaian kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja akhir Tahun RPJMD yang meliputi: perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 (akhir tahun RPJMD), perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik ditingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional atau *benchmark* kinerja (sepanjang datanya tersedia). Selain uraian kinerja tersebut, laporan kinerja juga menginformasikan kualitas atas capaian kinerja yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja, perolehan prestasi yang terkait sasaran atau indikator kinerja utama serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke tahun yang akan datang.

PERJANJIAN KINERJA BUPATI DAIRI TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	130,10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	BB
3	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	3. Opini BPK	Predikat	WTP
4	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Informasi	4. Indeks SPBE	Poin	3
5	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Informasi	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87,50
6	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	6. Indeks Infrastruktur	Persen	63,35
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7. Indeks Pendidikan	Poin	70,43
8	Meningkatnya kualitas kesehatan	8. Angka Harapan Hidup	Tahun	74,60
9	Meningkatnya standar hidup	9. Pengeluaran Per kapita	Rp (x 1.000)	11.219,5
10	Meningkatnya kemandirian desa	10. Indeks Desa Membangun	Poin	0.66
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79

Cara Pengukuran Capaian Kinerja

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

Contoh indikator kinerja: Nilai tukar petani (NTP)

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realiasi kinerja} \times 100\%}{\text{Target kinerja}}$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

Contoh indikator kinerja : tingkat pengangguran terbuka

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realiasi}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan, hasil perhitungan relasi kinerja merupakan nilai kinerja. Nilai kinerja dengan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel
Rentang Nilai dan Predikat Kinerja

Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
> 100	Sangat Berhasil
= 100	Berhasil
50 - < 100	Kurang Berhasil
< 50	Tidak Berhasil

Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD periode Tahun 2019–2024 (Perubahan) dengan realisasi masing-masing indikator pada Tabel sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	130,10	146,97	112,97	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	70,43	70,55	100,17	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,60	74,38	99,71	Kurang Berhasil
4	Meningkatnya standar hidup	Pengeluaran Per Kapita	Rp.x 1.000	11.219,5	11.355	101,21	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79	77,90	98,61	Kurang Berhasil
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	87,22	Kurang Berhasil
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Berhasil
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	Indeks SPBE	Poin	3	2.69	89,67	Kurang Berhasil
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87,50	89,97	102,82	Sangat Berhasil

11	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Poin	0,66	0,67	101,52	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Indeks Infrastruktur	Persen	63,35	60,07	94,82	Kurang Berhasil

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pembahasan terhadap capaian kinerja arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Dairi bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian dari masing-masing indikator kinerja.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Petani** Kabupaten Dairi tahun 2024 dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan sebesar 130,10 poin, dalam hal mengetahui realisasi kinerjanya hanya memperbandingkan dengan realisasi NTP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yang telah menetapkan realisasi sebesar 146,97 poin (keadaan Desember 2024), adapun perbandingan target dan realiasi NTP tahun 2024 untuk Kabupaten Dairi hanya menggunakan data realisasi NTP Provinsi Sumatera Utara diakibatkan tidak adanya tersaji data NTP dalam Kabupaten Dairi Dalam Angka sebagaimana telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten Dairi tahun 2024.

Dengan menggunakan data NTP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 146,97 poin, apabila dilakukan perbandingan NTP Kabupaten Dairi dengan target sebesar 130,10 poin maka capaian kinerja sebesar 112,97% dengan predikat kinerja kategori sangat berhasil, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

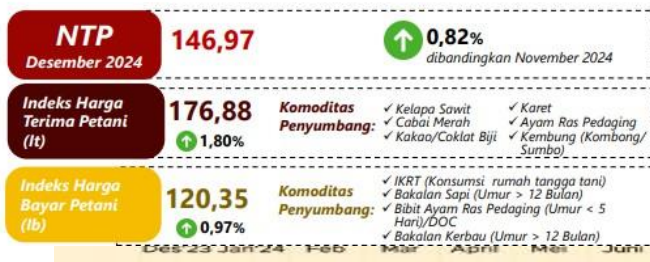
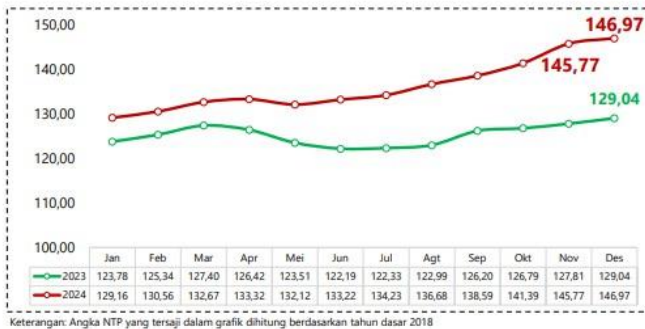
Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Petani

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Nilai Tukar Petani (NTP)	Perbandingan Indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani	Poin	130,10	146,97	112,97

Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan realisasi NTP Tahun 2023 yakni sebesar 129,04 poin (desember 2023), maka terhadap realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 17,93 poin atau 13,90% atas realisasi tahun lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, NTP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 terealisasi sebesar 146,97 poin atau lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 130,10 poin sehingga persentase capaiannya terhadap target adalah sebesar 112,97%. Kenaikan NTP pada Desember 2024 disebabkan oleh naiknya NTP empat subsektor, yaitu NTP subsektor Hortikultura sebesar 3,21 persen, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,24 persen, NTP subsektor Peternakan sebesar 0,40 persen, dan NTP subsektor Perikanan sebesar 0,07 persen. Sementara itu, NTP subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 0,93 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2024



NTP Subsektor	Nov-24	Des-24	Perubahan (%)
Tanaman Pangan (NTPP)	99,68	98,76	↓ -0,93
Hortikultura (NTPH)	84,34	87,05	↑ 3,21
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	206,53	209,09	↑ 1,24
Peternakan (NTPT)	95,05	95,43	↑ 0,40
Perikanan (NTNP)	99,73	99,80	↑ 0,07
- Nelayan (NTN)	100,81	100,95	↑ 0,14
- Pembudidaya Ikan (NTPi)	95,78	95,61	↓ -0,18

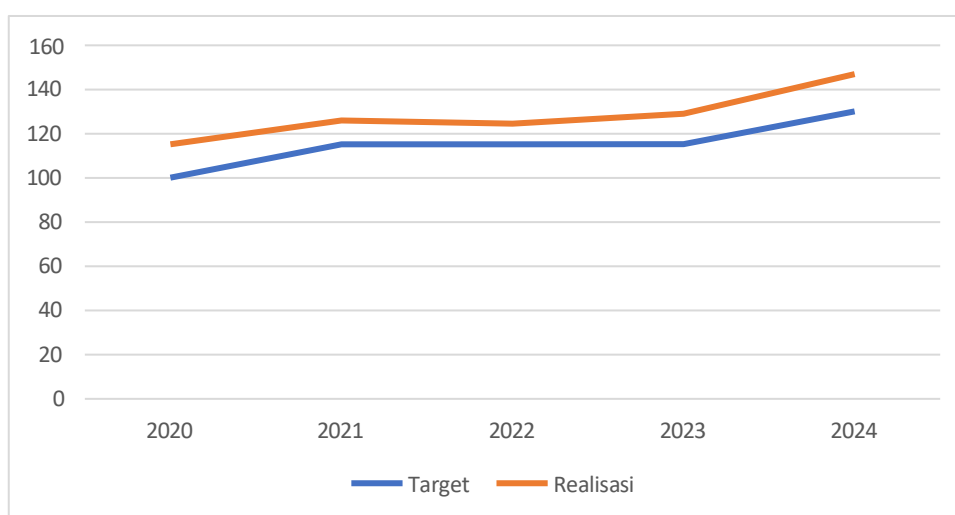
Adapun Kenaikan NTP Tahun 2024 (kondisi Desember) dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2024 sebesar 146,98 atau naik sebesar 1,72 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.
2. Survei Harga Produsen Gabah di Sumatera Utara pada Desember telah mencatat 107 observasi transaksi penjualan gabah di 13 Kabupaten terpilih dengan komposisi terbanyak didominasi oleh Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 63 observasi (58,88%), disusul Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 23 observasi (21,50%), dan Gabah Luar Kualitas sebanyak 21 observasi (19,63%).
3. Di tingkat petani pada Desember, harga gabah tertinggi senilai Rp7.292 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas IR 46 di Kabupaten Toba. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.100 per kg berasal dari Gabah Kualitas GKP varietas Inpari 32 di Kabupaten Simalungun.
4. Di tingkat penggilingan pada Desember, harga gabah tertinggi senilai Rp7.392 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas IR 46 di Kabupaten Toba. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.150 per kg berasal dari Gabah Kualitas GKP varietas Inpari 32 di Kabupaten Simalungun.
5. Rata-rata harga gabah kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 5,21 persen dari Rp6.589 per kg pada November menjadi Rp6.932 per kg pada Desember. Kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP) juga mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dari bulan sebelumnya yaitu dari Rp5.740 per kg menjadi Rp5.761 per kg.
6. Rata-rata harga gabah kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 6,45 persen dari Rp6.717 per kg pada November menjadi Rp7.150 per kg pada Desember. Kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP) juga mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen dari bulan sebelumnya yaitu dari Rp5.896 per kg menjadi Rp5.909 per kg.

CAPAIAN NILAI TUKAR PETANI TAHUN 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	100,1	115,21	115,09
2021	115,22	125,95	109,31
2022	115,22	124,56	108,11
2023	115,23	129,04	111,98
2024	130,1	146,97	112,97

Trend Peningkatan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024



Selanjutnya dengan uraian di atas, apabila dilakukan perbandingan realisasi NTP Provinsi Sumatera Utara pada masing-masing sub sektor dengan realisasi kinerja sub sektor pertanian Kabupaten Dairi Tahun 2024 sehingga NTP di Kabupaten Dairi dapat dicapai dengan dipengaruhi beberapa hal :

1. Indikator Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) dengan target yang ditetapkan sebesar 2.842 ton terealisasi sebesar 3.713,44 ton dengan capaian sebesar 130,66% hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya di sentra produksi Keramba Jaring Apung (KJA) Kecamatan Silahisabungan.
2. Indikator Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan dengan target 125% terealisasi sebesar 130,27% dengan persentase capaian sebesar 104,21%.

Indikator produktivitas pertanian komoditi yang diukur antara lain: untuk tanaman pangan adalah padi dan jagung, dimana padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Padi sawah terealisasi sebesar 56,4 kw/ha lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 58,1 kw/ha sehingga tingkat capaian sebesar 98,08% hal ini dikarenakan berkurangnya luas lahan Kabupaten Dairi seluas 558 ha dari 6.399 ha pada tahun 2022 menjadi 5.841 ha pada tahun 2024. Upaya untuk peningkatan produktivitas padi sawah perlu dilakukan dengan cara intensifikasi pertanian melalui: penggunaan benih unggul, penerapan cara bercocok tanam yang baik dan benar serta penanggulangan hama dan organisme pengganggu tanaman yang tepat.

Sedangkan untuk padi ladang terealisasi sebesar 50,4 kw/ha lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 39,2 kw/ha dengan tingkat capaiannya sebesar 103,08 % hal ini didukung dengan kegiatan pengembangan optimasi lahan (padi gogo) demi peningkatan ketahanan pangan.

3. Produktivitas tanaman jagung dengan target yang ditetapkan sebesar 61,1 kw/ha terealisasi sebesar 60,68 kw/ha sehingga tingkat capaian sebesar 99,31% . Hal ini dikarenakan kondisi cuaca dan serangan hama penyakit akibat perubahan iklim sehingga banyak petani jagung yang mengalami penurunan hasil panen dari tahun sebelumnya.

Permasalahan:

1. Naiknya Harga sarana produksi pertanian.

Harga Sarana produksi mempengaruhi nilai tukar petani karena akan meningkatkan pengeluaran petani terhadap biaya produksi pertanian, sehingga apabila semakin besar pengeluaran petani akan berdampak menurunnya nilai tukar petani.

2. Fluktuasi Harga Jual Petani. Kenaikan harga jual yang diterima petani seringkali tidak sebanding dengan kenaikan harga sarana produksi yang dibayarkan petani dalam proses produksi atau budidaya.

Solusi :

1. Mendorong petani untuk menggalakkan pemakaian pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia serta penumbuhan petani/ kelompok tani penangkar benih/ bibit pertanian. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan biaya produksi pertanian.
2. Peningkatan pembangunan Prasarana pertanian seperti jalan Pertanian/Jalan usaha pertanian dan Jaringan irigasi
3. Peningkatan Jumlah dan mutu alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Petani**, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Petani

NO	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat	(Luas pertanaman yang menggunakan bibit bersertifikat pertahun dibagi Total luas pertanaman komoditi pertahun) dikali 100	Persen	0,93	5,42	582,80
2		Persentase luas lahan pertanaman yang menggunakan	(Luas lahan yang menggunakan pupuk bersubsidi dibagi luas lahan yang diusulkan	Persen	42,22	68,41	162,03

NO	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
		pupuk bersubsidi sesuai standar	menggunakan pupuk bersubsidi) dikali 100				
3		Cakupan luas lahan yang diolah dengan alsintan	Luas lahan yang diolah dengan alsintan dibagi Jumlah luas tanam tanaman pangan dan hortikultura) dikali 100	Persen	46,52	50,02	107,52
4	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik	(Panjang irigasi teknis tersier dalam kondisi baik dibagi Panjang irigasi keseluruhan) dikali 100	Persen	50,66	48,80	96,33
5		Persentase Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	(Panjang Jalan usaha tani dan jalan produksi yang dibangun dibagi Target pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi) dikali 100	Persen	100,00	94,72	94,72
6		Persentase BPP Kecamatan dalam kondisi baik	(Jumlah BPP dalam kondisi baik dibagi Jumlah BPP) dikali 100	Persen	100,00	100	100
7	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas lahan pertanian yang dilaksanakan pengendalian HPT	(Luas pengendalian HPT dibagi Jumlah luas lahan yang diserang HPT) dikali 100	Persen	100,00	22,37	22,37
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (Veteriner)	Persentase penanganan kesehatan hewan/ternak	(Jumlah penanganan kesehatan hewan/ternak dibagi Jumlah populasi hewan/ternak) dikali 100	Persen	100,00	59,00	59,00
9	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani yang naik kelas	(Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi Jumlah kelompok tani keseluruhan) dikali 100	Persen	30,68	35,65	116,20
10		Persentase fasilitasi kerjasama Kelompok Tani/Gapoktan dengan pelaku agribisnis yang ditindaklanjuti	(Jumlah kelompok tani yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelompok tani keseluruhan) dikali 100	Persen	0,30	0,48	160,00

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2} \times 100$	Poin	70,43	70,55	100,17

Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 70,55 poin dari target 70,43 poin atau tercapai sebesar 100,17 %. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator dengan predikat kinerja **sangat berhasil**.

Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 69,93 Poin. Realisasi tahun 2024 ini meningkat sebesar 0,62 Poin atau 0,89% dibandingkan realisasi tahun lalu.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$
$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Dairi adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain indeks pendidikan, komponen penyusun IPM adalah Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. IPM lebih komprehensif dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan indikator Pendapatan

Domestik Bruto/Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) yang hanya mencakup aspek ekonomi saja.

Hal ini berdampak baik bagi kualitas pendidikan di Kabupaten Dairi. Meskipun indeks pendidikan setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi permasalahan selalu timbul. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Kabupaten Dairi adalah bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,57 dengan selisih 0,02. Berikut dijelaskan rumus dari hasil perhitungan Indeks rata-rata lama sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah sehingga diperoleh Indeks Pendidikan.

Perhitungan Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2024

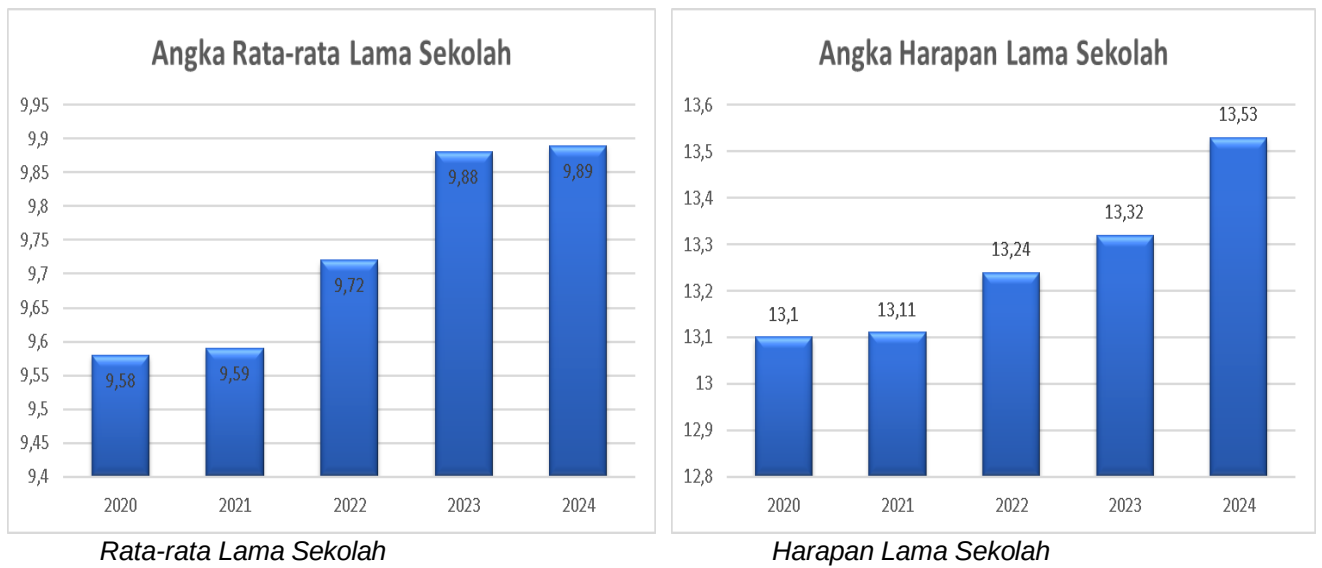
IHLS	=	$\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	=	$\frac{13,53-0}{18-0}$	=	$\frac{13,53}{18}$	=	0,75
IRLS	=	$\frac{RLS - RLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$	=	$\frac{9,89-0}{15-0}$	=	$\frac{9,89}{15}$	=	0,659
Indeks Pendidikan	=	$\frac{IHLS + IRLS}{2}$	=	$\frac{0,751+0,659}{2}$	=	0,7055x100	=	70,55

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian Indeks Pendidikan adalah Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang.

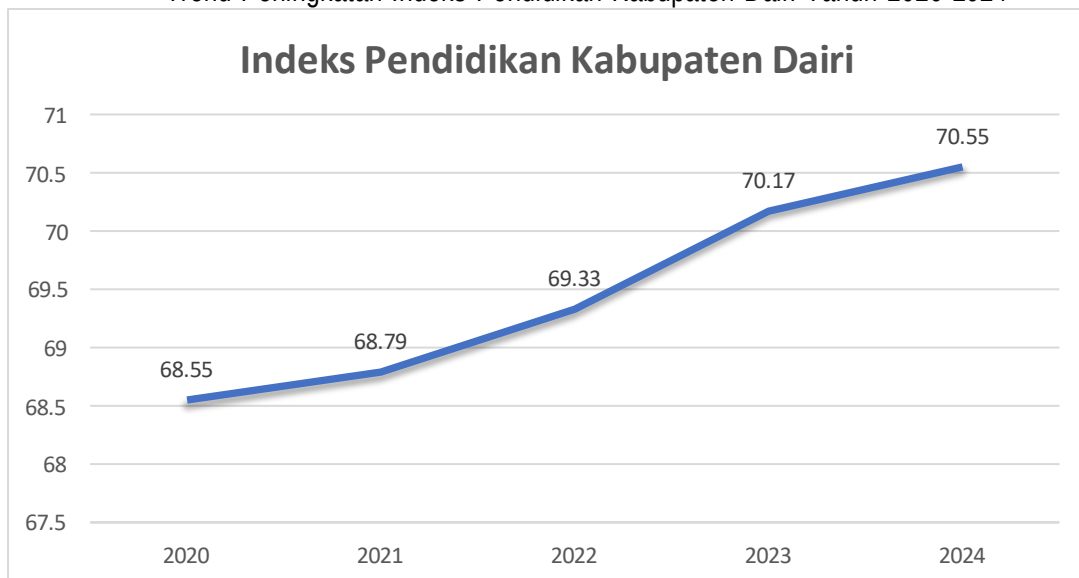
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi tahun 2024 mencapai 9,89 poin dan Angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,53 tahun sementara pada tahun sebelumnya angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,88 tahun dan Harapan lama sekolah mencapai 13,32 tahun yang bersumber dari BPS Kabupaten Dairi. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi. Hal ini berarti, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan, maka diharapkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi akan menurun. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Dairi.

Dari Tabel dan Grafik Angka Rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan Lama sekolah dari tahun 2020 ke tahun 2024 mengalami kenaikan, artinya analisis keberhasilannya sangat berhasil. Angka rata-rata lama sekolah Pada tahun 2020 sebesar 9,54 pada tahun 2021 sebesar 9,58 pada tahun 2022 sebesar 9,72 dan pada tahun 2023 sebesar 9,88 dan tahun 2024 menjadi sebesar 9,89. Berikut di bawah ini tabel dan grafik angka rata-rata lama sekolah :

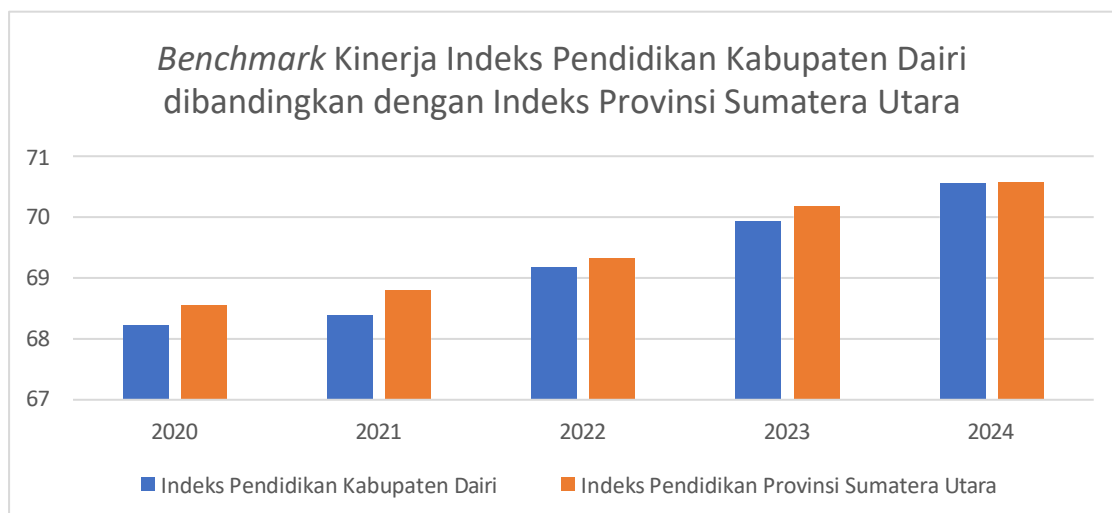
Gambar
Trend Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024



Trend Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



*Benchmark Kinerja Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi dibandingkan dengan
Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*



Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 masih dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami progres kenaikan. Pada tahun 2020 Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar 68,23 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,55 poin dengan selisih sebesar 0,32 poin. Pada tahun 2021 Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar 68,38 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,79 poin dengan selisih sebesar 0,41 poin. Pada tahun 2022 Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar 69,17 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,33 poin dengan selisih sebesar 0,16 poin. Pada tahun 2023 Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar 69,93 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,17 poin dengan selisih sebesar 0,24 poin. Pada tahun 2024 Indeks Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar 70,55 poin sedangkan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,57 poin dengan selisih sebesar 0,02 poin. Selisih perbandingan poin tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,41 poin sedangkan perbandingan selisih poin terendah pada tahun 2024 dengan poin sebesar 0,02 poin.

Pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Dairi merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah karena hal ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) juga ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan telah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan Indeks Pendidikan yakni terimplementasi dalam penganggaran program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan baik dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru,

penambahan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pengadaan sarana prasarana sekolah, termasuk sebagai upaya penuntasan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.



Komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menyelesaikan masalah Pendidikan

Permasalahan :

1. Masih terdapat Guru yang belum terlatih.
2. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, antara lain ruang kelas dan *mobileur*, selain itu dalam menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer, masih banyak satuan pendidikan belum memiliki komputer dan jaringan internet yang memadai serta laboratorium komputer.
3. Kekurangan bahan belajar dan mengajar sekolah. Kemendikbudristek telah meluncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar serta Kabupaten Dairi secara khusus sudah me-launching

Gerakan Dairi Merdeka Belajar diharapkan platform tersebut menambah literasi serta sebagai media dan bahan belajar mengajar di sekolah.

4. Pendistribusian dan pemerataan guru melalui penerimaan PPPK belum mampu memenuhi ketersediaan guru di daerah yang sulit dijangkau.

Solusi :

1. Dalam rangka peningkatan kompetensi Guru, Dinas Pendidikan akan lebih memperhatikan mutu Guru di Kabupaten Dairi dengan merancang Program kegiatan pelatihan Guru serta meningkatkan kompetensi Guru. Hal ini juga dalam rangka mempercepat tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk peningkatan kompetensi guru serta pembinaan secara terus menerus dalam peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi.
2. Untuk menurunkan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Dairi setiap tahunnya akan berusaha menambah kuota calon penerima Program Indonesia Pintar serta melakukan validasi data siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (kartu KIP) bagi siswa/i yang dengan status ekonomi kurang mampu dan akan merumuskan program pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sebagian anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana prasarana penunjang berupa pengadaan TIK (*chrome book*). Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Dairi, Dinas Pendidikan akan lebih berupaya mencari dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk pemerataan tenaga pendidik khususnya di daerah terjauh, maka kedepan pengadaan dan pengangkatan guru PPPK akan diprioritaskan ke daerah-daerah terjauh dan berbasis kebutuhan DAKL serta komitmen penempatan formasi sesuai kebutuhan organisasi.
5. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, melibatkan seluruh stakeholder yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan karena pendidikan itu bukan saja tanggungjawab pemerintah tapi tanggung jawab bersama.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

NO	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	(Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf dibagi banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas) dikali 100	Persen	99,91	99,55	99,64
2		Persentase lembaga PAUD yang memiliki Izin	(Jumlah lembaga PAUD yang memiliki izin dibagi jumlah lembaga PAUD keseluruhan) dikali 100	Persen	19,30	12,28	63,63
3		APK PAUD	(Jumlah peserta didik PAUD yang terlayani pada lembaga PAUD dibagi jumlah anak usia 5-6 tahun) dikali 100	Persen	40,00	35,42	88,55
4		APK SD	(Jumlah siswa SD/MI yang terlayani di sekolah dasar dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun) dikali 100	Persen	100,00	95,16	95,16
5		APK SMP	(Jumlah siswa SD/MI yang terlayani di sekolah dasar dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun) dikali 100	Persen	97,30	87,00	89,41
6		APM SD	(Jumlah siswa SD/MI umur 7-12 tahun yang terlayani di sekolah dasar dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun) dikali 100	Persen	99,85	93,72	93,86
7		APM SMP	(Jumlah siswa SMP/MTs umur 13-15 tahun yang terlayani di sekolah menengah pertama dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun) dikali 100	Persen	95,30	73,39	77,01
8		Angka Putus Sekolah SD/MI	(Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah dibagi dengan jumlah SD/MI keseluruhan) dikali 100	Persen	0,15	0,11	126,67
9		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	(Jumlah siswa SMP/MTs yang putus sekolah dibagi dengan jumlah SMP/MTs keseluruhan) dikali 100	Persen	0,55	0,05	190,91
10		AM SD	(Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dibagi siswa yang duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTs) dikali 100	Persen	100,00	98,82	98,82

NO	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
11		AM SMP	(Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dibagi siswa yang duduk di kelas 1 jenjang SMA sederajat) dikali 100	Persen	99,67	105,37	105,72
12		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	(Jumlah sekolah SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 10000) dikali 100	Persen	68,00	69,10	101,62
13		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	(Jumlah sekolah SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 10000) dikali 100	Persen	32,00	29,94	93,56
14		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	(Rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan) dikali 100	Persen	61,20	76,20	124,51
15		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	(Rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan) dikali 100	Persen	31,10	73,26	235,56
16		Persentase SMP Berakreditasi B	(Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi minimal B dibagi dengan jumlah sekolah SMP/MTs	Persen	61,01	83,14	134,63
17		Jumlah siswa yang masuk SMA unggulan	Jumlah siswa SMP yang masuk SMA Unggulan) dikali 100	Orang	160,00	34,00	21,25
18	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	(Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dibagi dengan jumlah guru PAUD) dikali 100	Persen	31,20	38,48	123,33
19		Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	(Jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dibagi dengan jumlah guru SD/MI) dikali 100	Persen	78,40	87,71	113,15
20		Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	(Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dibagi	Persen	89,78	94,37	105,11

NO	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
			dengan jumlah guru SMP/MTs) dikali 100				
21		Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	(Jumlah guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru PAUD) dikali 100	Persen	2,46	5,24	213,01
22		Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	(Jumlah guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru SD/MI) dikali 100	Persen	38,53	38,51	99,95
23		Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	(Jumlah guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru SMP/MTs) dikali 100	Persen	51,83	54,75	105,63
24		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Jumlah guru SD dibagi dengan jumlah murid SD	Rasio	1:15	1:13	86,66
25	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelayanan perpustakaan daerah	Pelayanan perpustakaan daerah	Persen	70,00	63,11	90,16

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Angka Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup sejak lahir	Tahun	74,60	74,38	99,71

Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 74,60 tahun dari target 74,38 tahun atau tercapai sebesar 99,71 %. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Kesehatan** dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 99,71 % dengan predikat kinerja **Kurang Berhasil**.

Realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 74,13 tahun jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 sebesar 74,38 maka terdapat kenaikan sebesar 0,25 tahun atau 0,34 %. Apabila dilakukan perbandingan realisasi Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi tahun 2024 dengan rata-rata 74,38 tahun dengan realisasi Umur Harapan Hidup penduduk Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dengan rata-rata 73,90 tahun maka umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Dairi lebih tinggi 0,48 tahun.

Perhitungan Angka Harapan Hidup masih memedomani Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian dalam periode tahunan. Angka Harapan Hidup adalah lama hidup (tahun) yang diharapkan akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Semakin tinggi capaian nilai AHH di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu, berarti semakin tinggi derajat kesehatannya.

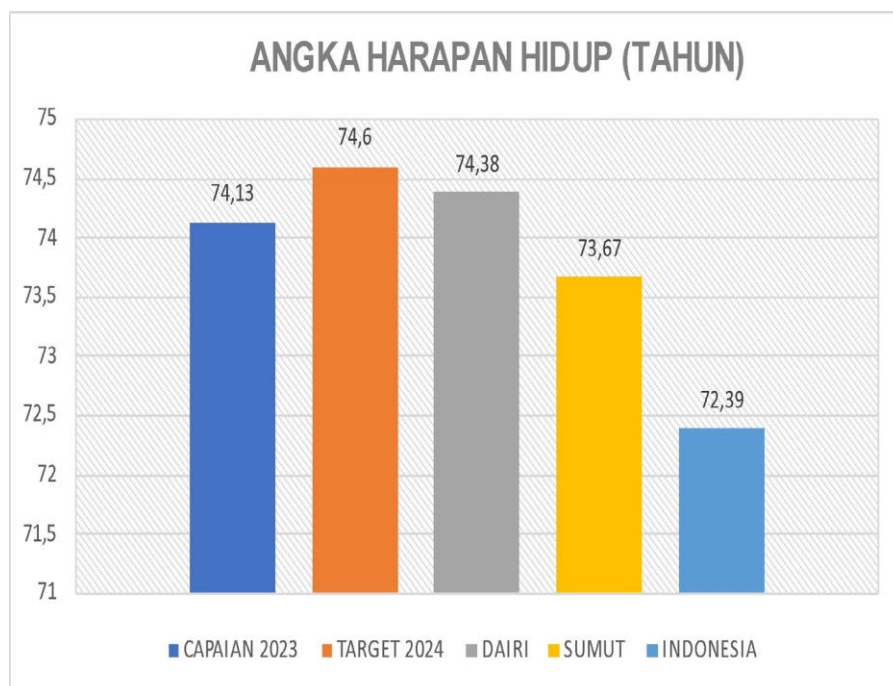
Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Dairi yang sekaligus menggambarkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Dairi pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,38 tahun, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya 74,13 tahun.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Gambar

Benchmark kinerja perbandingan antara capaian AHH 2023, Target Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2024 serta realisasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional





Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil



Pemberian PMT Bagi balita gizi kurang



Pemeriksaan Lansia



Pelaksanaan Kesehatan ODGJ

Permasalahan:

1. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan kematian bayi;
2. Masih tingginya prevalensi Gizi buruk dan Gizi Kurang;
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) yang disebabkan penyakit menular dan tidak menular;
5. Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi yang disebabkan keterbatasan sarana prasarana dan alat Kesehatan, sebaran tenaga Kesehatan yang belum merata, serta kompetensi tenaga Kesehatan yang belum memadai;
7. Belum optimalnya pembudayaan GERMAS.

Solusi :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan balita dengan :
 - a. Pelaksanaan kelas ibu balita, pelaksanaan kelas ibu hamil, pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita.

- b. Pendampingan oleh Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal.
 - c. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (p4k), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi, Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Praktik Mandiri dan Posyandu.
 - d. Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita.
 - e. Melakukan koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi.
2. Melaksanakan Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat yakni dengan :
- a. Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP.
 - c. Pelayanan Imunisasi (imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, *Catch up*, ORI, BLF, crash program, imunisasi tambahan lainnya, skrining status imunisasi) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya.
 - d. Pemantauan Kasus KIPI.
 - e. Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit *Filariasis* dan Kecacingan, dan pemantauan minum oralit dan Zink pada balita diare serta *care seeking Pneumonia*.
 - f. Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya).
 - g. Pelaksanaan *Mobile* Tes HIV dan IMS pada populasi kunci.
 - h. *Tracing Loss to Follow up* (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV.
 - i. Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg.
 - j. Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC.
 - k. Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir.
 - l. Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoir *Leptospirosis*.
 - m. Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN).
 - n. Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes.
 - o. *Surveilans* kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT).
 - p. Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging.
 - q. Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular.
 - r. Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
 - s. Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan *surveilans* PD3I.

- t. Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM.
 - u. Penyediaan media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader.
 - v. Investigasi Kasus KIPI di masyarakat.
 - w. Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah/keracunan pangan, media lingkungan dan Penyakit Infeksi Emerging.
 - x. Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat Kab/Kota atau tingkat provinsi (Surveilans rutin, sentinel, dan dugaan penyakit potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging/penyakit yang tidak lazim, media lingkungan, sampel PD3I, sampel ILI SARI, SHK) serta pengembalian spesimen carier.
 - y. Pembiayaan transportasi dan jasa pemusnahan limbah medis ke rumah sakit atau institusi pemerintah yang memiliki instalasi pemusnah limbah medis, atau instansi swasta berizin.
 - z. Pemeriksaan Sampel ke Lab Rujukan SHK.
 - aa. Pelaksanaan Gerakan Kebugaran Jasmani.
 - bb. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA).
 - cc. Orientasi Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa bagi Petugas Puskesmas.
 - dd. Pembinaan Penyelenggaraan Skrining Kesehatan Jiwa.
3. Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK, Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang.
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di Puskesmas, Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
 5. Pendampingan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Primer (ILP).
 6. Pemerataan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yakni dengan Pelatihan Petugas TBC, Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.,Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa, Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan), Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan, Orientasi Penyelenggaraan ILP bagi petugas puskesmas, Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu Bagi Nakes Puskesmas dan Kader, Optimalisasi upaya KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) PHBS pada masyarakat.
 7. Pemenuhan Sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standart di Puskesmas dan jaringannya antara lain dengan Renovasi Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer, Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer, BMHP Gula Darah.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan**, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Kualitas Kesehatan

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dibagi jumlah Jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	87,26	87,26
2		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
3		Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir dalam satu tahun dikali 100	Persen	100,00	97,32	97,32
4		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dibagi jumlah balita diwilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dikali 100	Persen	100,00	95,86	95,86
5		Cakupan masyarakat menjadi anggota JKN	Jumlah masyarakat kabupaten Dairi yang menjadi peserta JKN dibagi dengan jumlah masyarakat kabupaten Dairi dalam kurun waktu yang sama dikali 100	Persen	90,00	94,24	104,71
6		Prevalensi Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah balita yang diukur dikali 100	Persen	0,55	0,87	63,22
7		Prevalensi Gizi Kurang	Jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah balita yang diukur dikali 100	Persen	1	7,22	13,85

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
8		Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapatkan perawatan Kesehatan	Jumlah bayi/balita gizi buruk yang ditemukan mendapatkan perawatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi/ balita gizi buruk mendapatkan perawatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
9		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
10		Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	Jumlah seluruh kasus TB yang pengobatan lengkap dibagi Jumlah seluruh kasus TB yang diobati dan dilaporkan dalam kurun waktu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	88,10	88,10
11		Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	87,06	87,06
12		Angka kesakitan DBD	Jumlah penderita DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	40,00	50,00	80,00
13		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100	Persen	100,00	94,47	94,47

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
14		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	96,68	96,68
15		Persentase KLB ditangani < 24 jam	Jumlah KLB ditangani <24 Jam dibagi jumlah seluruh KLB dalam satu tahun dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
16		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	72,55	72,55
17		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15–59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	83,58	83,58
18		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
19		Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	100,00	93,03	93,03

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
20		Persentase Keluarga dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Jumlah seluruh keluarga dengan akses sanitasi layak(jamban sehat dibagi jumlah seluruh keluarga dalam kurun waktu satu tahun dikali 100	Persen	100,00	94,00	94,00
21		Cakupan pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar	Jumlah pelayanan kesehatan lapangan sesuai standar dibagi jumlah pelayanan lapangan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
22		Persentase penanganan Kejadian gawat darurat sesuai standar	Jumlah pelayanan kejadian gawat darurat sesuai standar dibagi jumlah pelayanan gawat darurat yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
23		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial	Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan BMHP esensial dibagi jumlah seluruh Puskesmas dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
24		Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat keahlian dibagi jumlah nakes yang wajib memiliki sertifikat keahlian dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
25		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standart	Jumlah FKTP yang memenuhi SPA sesuai standar dibagi jumlah seluruh FKTP dikali 100	Persen	87,00	33,33	38,31
26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (RSUD)	Jumlah SDM yang akan dipenuhidibagi dengan jumlah SDM yang terpenuhi dikali 100	Persen	100,00	82,33	82,33
27	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat dibagi jumlah seluruh TTU/TPM dalam kurun waktu satu tahun dikali 100	Persen	72,00	28,89	40,13
28	Program Pemberdayaan	Cakupan Desa Siaga aktif	Jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah seluruh desa dikali 100	Persen	100,00	97,04	97,04

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
29	Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif dibagi dengan jumlah seluruh posyandu dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
30	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS seluruhnya dikali 100	Persen	1,73	6,24	27,72
31	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS seluruhnya dikali 100	Persen	75,73	62,64	82,71
32		Persentase peningkatan fungsi kampung berkualitas	Jumlah Kampung KB yang berkualitas dibagi jumlah kampung KB seluruhnya dikali 100	Persen	70,37	100,00	142,11
33	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB	Jumlah anggota kelompok kegiatan /POKTAN (Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia) ber-KB dibagi jumlah anggota kegiatan /POKTAN seluruhnya dikali 100	Persen	70,50	38,30	54,33

Sasaran strategis Meningkatnya Standar Hidup

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Standar Hidup

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Pengeluaran Per Kapita	Rata-rata Pengeluaran masyarakat Perkapita Per Tahun	Rp (x1.000)	11.219,5	11.355	101,21

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah Rp(x1.000) 11.355 dari target Rp(x1.000) 11.219,5 atau tercapai sebesar 101,21%. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Standar Hidup** dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 101,21 % dengan predikat kinerja **Sangat Berhasil**.

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2023 adalah Rp(x1.000) 10.969 Realisasi tahun ini meningkat sebesar Rp(x1.000) 386 atau 3,40% dibandingkan realisasi tahun lalu.

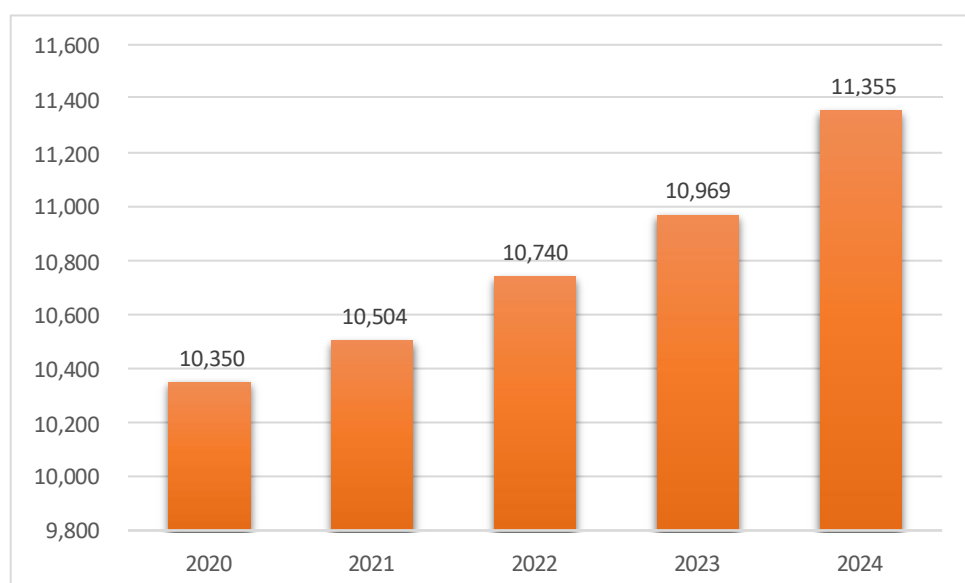
Realisasi Rata-rata Pengeluaran masyarakat Perkapita Per Tahun Kabupaten Dairi Tahun 2024 yang sumber datanya menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi yaitu Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025.

Rata-rata pengeluaran Per Kapita per tahun mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi kesejahteraan penduduk. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya peningkatan pendapatan ataupun kondisi ekonomi yang relatif stabil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak.

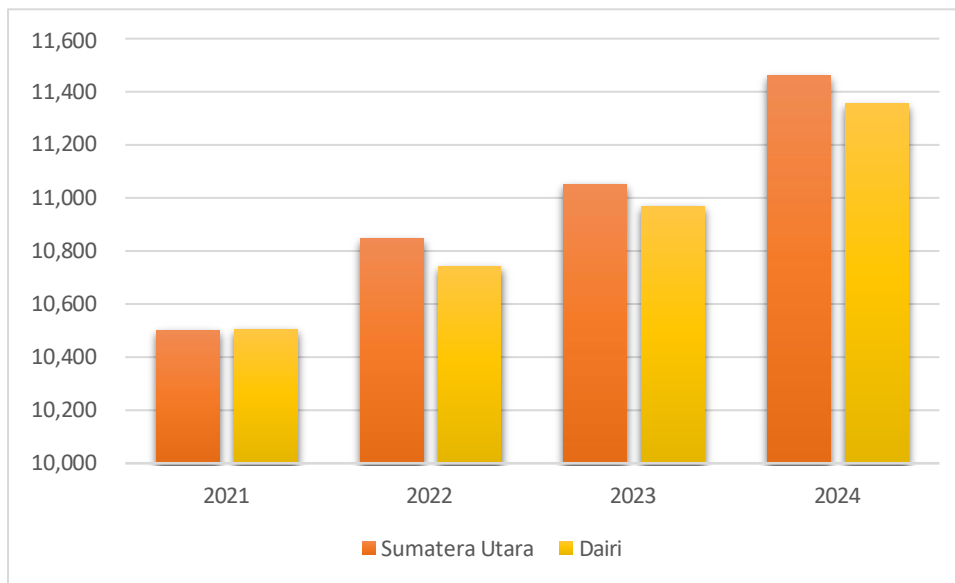
Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan.

GAMBAR
TREND PENGELUARAN PER KAPITA KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2020-2024



Sumber Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025

GAMBAR
PERBANDINGAN *BENCHMARK* KINERJA PENGELUARAN PER KAPITA KABUPATEN DAIRI
DENGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021-2024



Standar Hidup yang Layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Dairi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar Rp. 1.166.398 dari Rp. 1.164.405 atau naik sebesar 0,17% yang terdiri atas makanan 5,48% tetapi yang menarik non makanan mengalami penurunan sebesar 7,42%. Pengeluaran makanan terbesar berasal dari pembelian makanan jadi sebesar 11,56% dan terkecil pembelian umbi-umbian sebesar 0,43%. Pengeluaran non makanan terbesar berasal dari perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 18,35% dan terkecil dari pengeluaran keperluan pesta/upacara sebesar 0,6%.



Sumber Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025

Permasalahan :

Perbaikan kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan diluar sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta kurang optimalnya daya saing dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Solusi :

Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mendukung sektor-sektor non-pertanian seperti industri kecil dan kerajinan, pariwisata, dan jasa. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan mendorong adopsi teknologi modern dalam pertanian dan sektor lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Akses ke teknologi informasi juga dapat memperluas peluang bisnis dan pendidikan.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Standar Hidup**, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Standar Hidup

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pemberdayaan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	PPKS yang mendapatkan pendampingan dibagi Jumlah PPKS dikali 100	Persen	43,83	49,90	111,80

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	Jumlah PPKS (penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis) dibagi Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis dikali 100	Persen	6,00	18,00	300,00
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	Kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial dibagi Jumlah DTKS dikali 100	Persen	44,02	61	138,57
4	Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan	Jumlah korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapatkan penanganan dibagi Jumlah Korban Bencana dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
5	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perempuan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah penduduk perempuan usia >20 tahun dikali 100	Persen	1,30	0,26	20
6		Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	Jumlah OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan dibagi Jumlah Seluruh OPD dikali 100	Persen	41,66	55	132,02
8		Persentase perempuan dalam organisasi publik	Jumlah Perempuan dalam organisasi publik dibagi Jumlah Penduduk perempuan Usia >20 Tahun dikali 100	Persen	6,00	5,71	95,17
9	Perlindungan perempuan	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan	Jumlah Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan dibagi Jumlah Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seluruhnya dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
10	Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan Keterpenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak/Status Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peningkatan Keterpenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak/Status Kabupaten Layak Anak dibagi Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak/Status Kabupaten Layak Anak dikali 100	Persen	70,00	35	50

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
11	Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak pemerlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan	Jumlah Anak Anak pemerlu perlindungan yang mendapatkan pelayanan dibagi Jumlah Anak pemerlu perlindungan seluruhnya dikali 100	Persen	29,00	100,00	344,83

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Diperoleh dari: a. Indeks Kualitas Air (IKA), b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	79	77,90	98,61

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 77,90 poin dari target 79 poin atau tercapai sebesar 98,61 %. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah** dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 98,61 % dengan predikat kinerja **Kurang Berhasil**.

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 78,96 Poin. Realisasi tahun ini menurun sebesar 1,06 Poin atau 1,34 % dibandingkan realisasi tahun lalu.

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2024						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	REALISASI TARGET 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	79,00	77,90	98,61
		2 Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	60,74	69,50	114,42
		3 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	96,56	94,30	97,66
		4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	79,52	62,01	77,98

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dari perhitungan dari angka IKLH diperoleh dari 30% Indeks Kualitas Air (IKA), 30% Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yaitu sebesar 77,90 dan dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 98,61%. Dimana capaian IKLH pada tahun 2024 sebesar 77,90 dari target 79,00. Melalui metode perhitungan angka IKLH diperoleh dari $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$ yaitu sebesar 77,90.
- 2) Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 114,42%. Dimana capaian IKA pada tahun 2024 sebesar 69,50 dari target 60,74. Nilai IKA diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium pada 2 (dua) sungai yang terdapat di Kabupaten Dairi dengan masing-masing sungai diwakili 3 (tiga) titik sampling, yaitu: Lae Nuaha (Hulu), Lae Nuaha (Tengah), Lae Nuaha (Hilir), Lae Simbelin (Hulu), Lae Simbelin (Tengah) dan Lae Simbelin (Hilir). Kedua sungai tersebut dipantau dalam 2 (dua) periode yang mewakili musim hujan dan kemarau. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administrative, letak geografis, mewakili sumber pencemar, *outlet* DAS, titik intake pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Dapat dilihat hasil perhitungan IKA pada tabel di bawah ini

Tabel
Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Dairi 2024

NO.	NAMA SUNGAI	IPJ		NILAI IKA
		PERIODE I	PERIODE II	
1.	Lae Nuaha (Hulu)	1,19	1,42	70
2.	Lae Nuaha (Tengah)	0,95	1,73	70
3.	Lae Nuaha (Hilir)	1,18	0,81	50
4.	Lae Simbelin (Hulu)	1,98	1,14	80
5.	Lae Simbelin (Tengah)	2,02	1,48	87
6.	Lae Simbelin (Hilir)	1,21	1,04	60
Nilai IKA Kabupaten Dairi (Rata-rata 6 sungai)				69,5



Lokasi Lae Nuaha Hulu
Kec. Sitinjo



Lokasi Lae Nuaha Tengah
Kec. Sidikalang



Lokasi Lae Nuaha Hilir
Kec. Siempat Nempu



Lokasi Lae Simbelin Hulu
Kec. Sitinjo



Lokasi Lae Simbelin Tengah
Kec. Siempat Nempu



Lokasi Lae Simbelin Hilir
Kec. Silima Pungga-Pungga

Perhitungan Indeks Kualitas Air

- 3) Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 97,66%. Dimana capaian IKU pada tahun 2024 sebesar 94,30 dari target 96,56. Untuk data kualitas udara ambient, dilakukan pengambilan data lapangan pada 4 (empat) titik sampling yang mewakili daerah transportasi, pemukiman, perdagangan dan perindustrian. Lokasi titik sampling tersebut yaitu: area transportasi, area industri, area pemukiman dan area perindustrian.

Data Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dairi Tahun 2024

NO	Lokasi	Kadar NO ₂ µg/Nm ³	Kadar SO ₂ µg/Nm ³	Ieu Indeks	IKU Indeks
1.	Area Transportasi				
	Periode I	5.32	6.28		
	Periode II	5.21	6.91		
	Rerata	5.27	6.60	0.23	92.8
2.	Area Industri				
	Periode I	7.90	8.50		
	Periode II	7.60	8.33		
	Rerata	7.80	8.40	0.31	88.3
3.	Area Permukiman				
	Periode I	2.13	2.92		
	Periode II	2.20	2.97		
	Rerata	2.17	2.95	0.11	99.4
4.	Area Perkantoran				
	Periode I	3.31	4.47		
	Periode II	4.52	5.60		
	Rerata	2.90	5.04	0.16	96.7
5.	Blanko				
	Periode I	< 0.37	< 2.45		
	Periode II	< 0.37	< 2.45		
	Rerata	-	-		
IKU Rata-rata				94.3	

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara *ambient* dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai indeks kualitas udara sebesar 94,30.





Perhitungan Indeks Kualitas Udara

- 4) Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 77,98%. Dimana capaian IKTL pada tahun 2024 sebesar 62,01 dari target 79,52. Nilai IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada Papua dengan nilai 100, sedangkan daerah- daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKTL} = 100 - ((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Keterangan TH = Tutupan Hutan

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data Citra satelit dari KLHK dan hasil kajian. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sebagai Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari hasil perhitungan diperoleh IKTL Kabupaten Dairi sebesar 62,01.



Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan

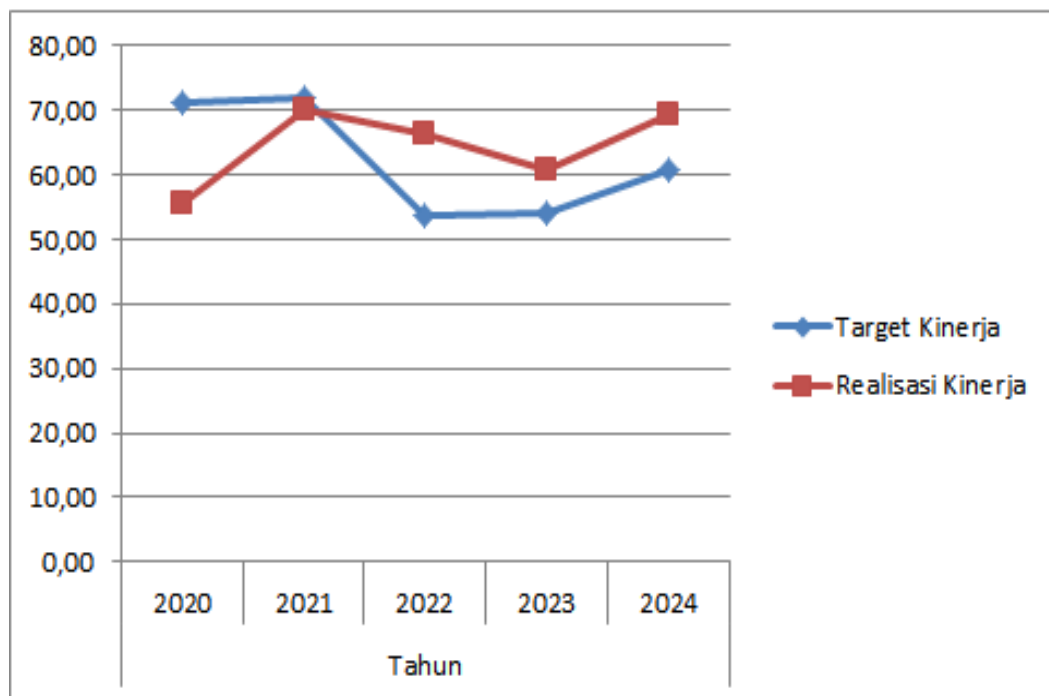
Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 79 % dengan realisasi 77.90 % sehingga persentase capaian 98,61 %, Dalam konteks ini, indeks ini bermakna sebagai sarana pembandingan atau komparasi, dimana suatu subjek relatif terhadap subjek lainnya.

Capaian Kinerja **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah** tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini

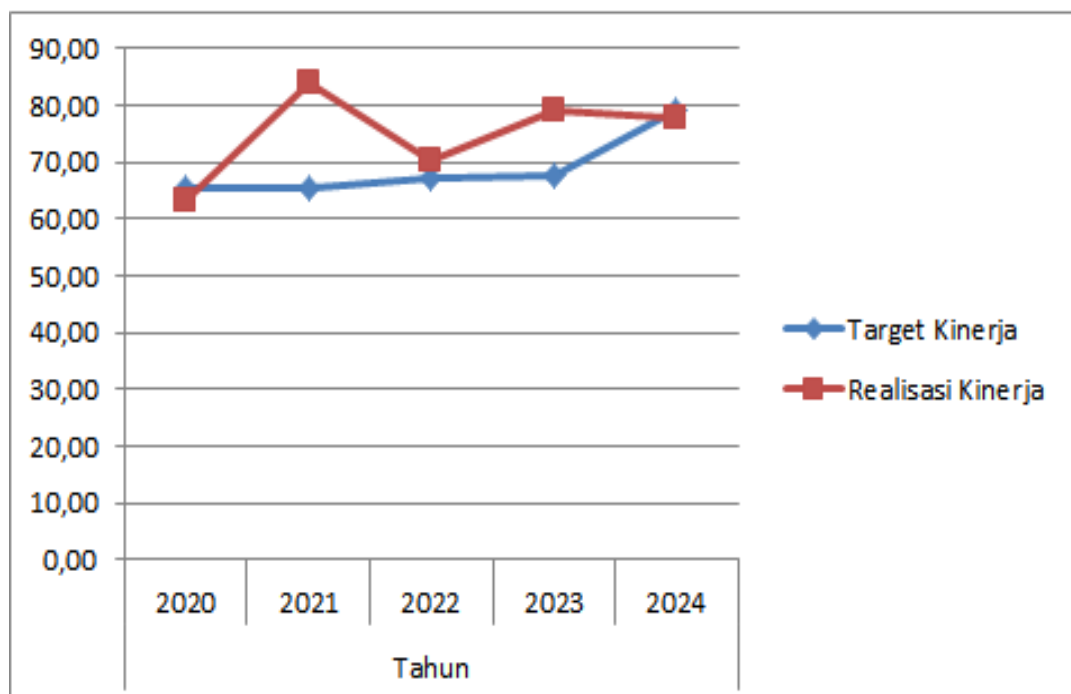
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					%				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,60	65,35	67,31	67,76	79,00	63,05	83,81	70,20	78,96	77,90	96,11	128,25	104,29	116,53	98,61
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,00	72,00	53,81	53,91	60,74	55,58	70,00	66,21	60,70	69,50	78,25	97,22	123,04	112,60	114,42
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,00	82,00	85,79	85,79	96,56	98,02	98,88	61,82	96,52	94,30	121,01	120,59	72,06	112,51	97,66
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,00	51,00	56,49	58,20	79,52	42,45	79,65	79,48	79,48	62,01	84,90	156,18	140,70	136,56	77,98

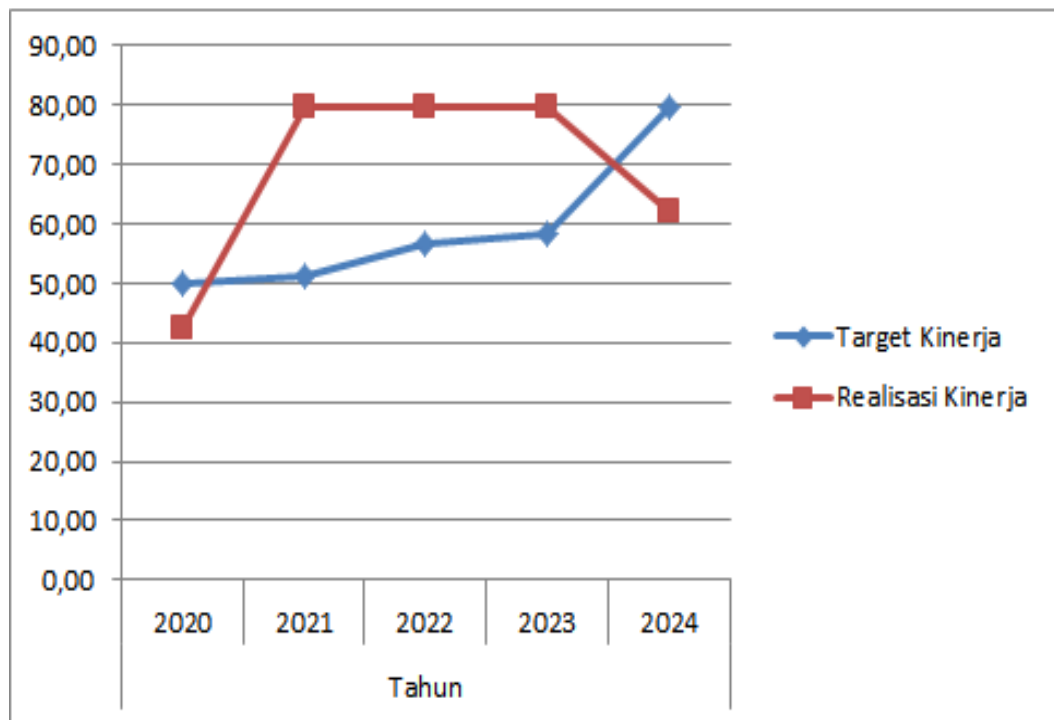
Capaian Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2020 s.d 2024



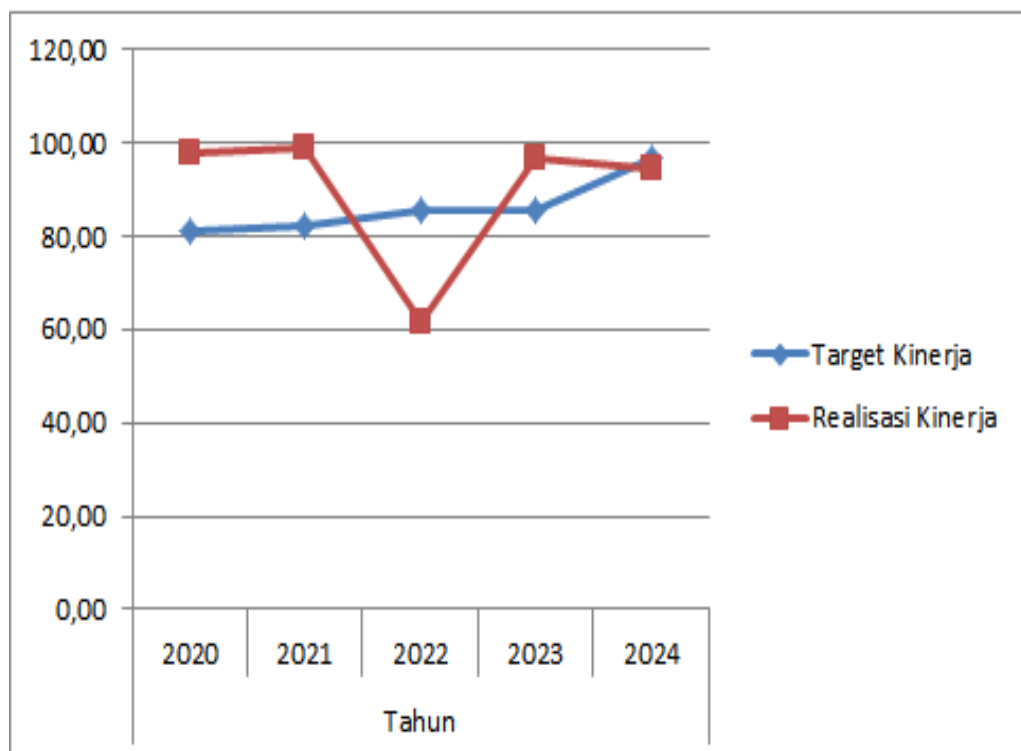
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2020 s.d 2024



Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Tahun 2020 s.d 2024



Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2020 s.d 2024



Permasalahan :

1. Kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan; Lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan atau usaha yang memiliki izin lingkungan;
4. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat;
6. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai;
8. Terjadinya abrasi yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan batu pasir;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, para pengusaha atau stakeholders lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi :

1. Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan cara mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu;
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pengadaan pengangkutan sampah seperti dump truk;
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
4. Meningkatkan kualitas konsultasi/ koordinasi ke tingkat propinsi dan pusat untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi;
5. Tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik, baik masyarakat, para pengusaha ataupun stakeholders lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi harus terus menerus melakukan pemantauan kualitas dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada Masyarakat Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) kepada masyarakat.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola di Kabupaten Dairi	Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Persen	100,00	100,00	100,00
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Persen	100,00	100,00	100,00
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	Persentase kegiatan perencanaan lingkungan hidup yang terlaksana	Persen	100,00	100,00	100,00
5	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan timbunan sampah	Jumlah timbunan sampah yang ditangani	Persen	71,00	31,08	43,78
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Jumlah sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persen	45,00	0,33	0,07

Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi Menpan RB	Predikat	BB	B	87,22

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	20,95	21,22
b. Pengukuran Kinerja	30	17,98	18,14
c. Pelaporan Kinerja	15	10,32	10,58
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,76	11,12
Nilai Hasil Evaluasi	100	60,01	61,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Realisasi Predikat SAKIP Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah predikat B (nilai 61,06) dari target predikat BB (nilai minimal 70.01–80), maka persentase capaian menjadi $((61,06/70.01) \times 100)$ sebesar 87,22%. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel** dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 87,22 % dengan predikat kinerja **kurang berhasil**.

Realisasi Predikat SAKIP Tahun 2023 adalah predikat B (nilai 60,01). Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dalam predikat dan peningkatan nilai sebesar 1,05 Poin, pada akhir RPJMD (Tahun 2024) dengan target BB maka harus mencapai peningkatan level satu tingkat dari realisasi B dengan peningkatan sebanyak 10 poin.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,06 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

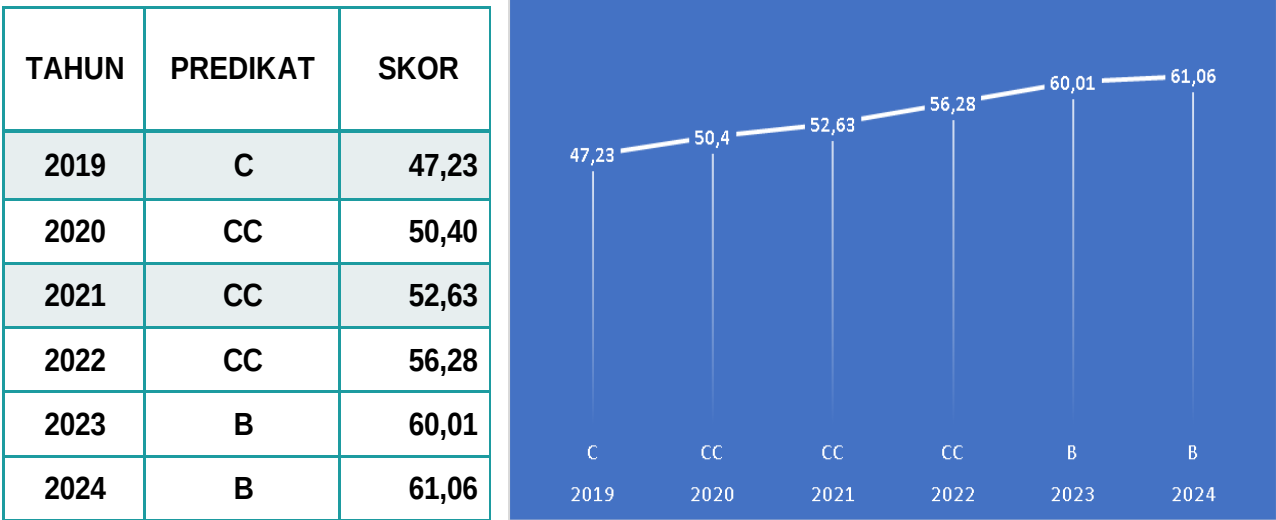
DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI



Dalam hal peningkatan predikat implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Dairi telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan asistensi penyusunan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja yang difokuskan pada cascading di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
3. Melakukan pendampingan dalam penentuan program yang relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.
4. Melaksanakan evaluasi AKIP internal pada seluruh Perangkat Daerah.
5. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan.

Dalam hal peningkatan dalam kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun 2019-2024 telah terdapat peningkatan kinerja dalm implementasi akuntabilitas kinerja yang lebih baik yaitu meningkat dari tahun 2019 dengan Predikat C, Tahun 2020 dengan Predikat CC dan Tahun 2024 menjadi Predikat B.



Progres peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun 2019-2024 dengan peningkatan predikat dan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel**, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Jumlah Produk hukum PD yang di sah kan/Jumlah Produk hukum PD yang diasistensi ke Bagian Hukum x 100	Persen	100,00	100,00	100,00
2		Persentase bahan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti/Jumlah bahan kebijakan bidang bidang pemerintahan yang ada x 100	Persen	100,00	100,00	100,00
3		Persentase bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti/Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ada x 100	Persen	100,00	100,00	100,00
4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti/Jumlah bahan kebijakan bidang perekonomian yang ada x 100	Persen	100,00	98,00	98,00
5		Persentase bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti/Jumlah bahan	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
		yang ditindaklanjuti	kebijakan bidang pembangunan yang ada x 100				
6		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement	Perbandingan jumlah paket/ pekerjaan yang dientry di RUP dengan yang dicatat melalui SPSE (E-katalog, Tender, Seleksi)	Persen	100,00	100,00	100,00
7	Program urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kelembagaan	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Peringkat Komposit	Tingkat Komposit 3	Tingkat Komposit 4	100
8		Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur	(Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat struktur/ Jumlah OPD seluruhnya) x 100	Persen	100,00	100,00	100,00
9		Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Minimal 80	(Jumlah OPD dengan IKM minimal 80/ Jumlah OPD seluruhnya) x 100	Persen	15,00	35,00	233,33
10		Persentase PD dengan SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan SAKIP minimal B/ Jumlah OPD seluruhnya) x 100	Persen	67,00	80,00	119,40
11		Persentase usulan kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti/ Jumlah bahan kebijakan bidang administrasi umum yang ada x 100	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
12		Persentase pelayanan protokol administrasi umum yang sesuai standar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan protokoler sesuai standar selama 1 tahun anggaran/Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran x100	Persen	100,00	100,00	100,00
13	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
14	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan	Jumlah dokumen yang ada dibagi jumlah dokumen yang dimanfaatkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
15	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan indikator kinerja RKPD terhadap RPJMD	Jumlah indikator kinerja RKPD yang selaras terhadap RPJMD dibagi jumlah indikator kinerja RPJMD seluruhnya dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
16	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD	Jumlah nomenklatur program dalam renstra OPD yang selaras terhadap RPJMD dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
17		Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah nomenklatur program dalam RKPD dibagi Jumlah nomenklatur program RPJMD dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
18	Program pengembangan SDM	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100	Persen	79,13	7,70	9,73

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
19		Persentase ASN yang memiliki pendidikan tinggi	Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (Min S1) dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100	Persen	52,92	61,32	115,87
20	Program kepegawaian daerah	Persentase pengisian jabatan sesuai kebutuhan	Jumlah jabatan yang diisi sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh pengisian jabatan dikali 100	Persen	74,34	85,10	114,47
21		Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Jumlah pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
22		Persentase penurunan disiplin pegawai	Jumlah Pegawai yang melanggar disiplin pegawai dibagi jumlah seluruh pegawai dikali 100	Persen	0,17	0,03	182,35

Sasaran strategis Meningkatnya Pemerintah yang Bersih

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerintah yang Bersih

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Opini BPK	Opini BPK Republik Indonesia	Opini	WTP	WTP	100

Realisasi Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari target WTP atau tercapai sebesar 100 %. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pemerintah yang Bersih** dengan 1 (satu) indikator dengan predikat kinerja **berhasil**.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Pemerintah Yang Bersih** tahun 2023 dengan Predikat WTP maka Pemerintah Kabupaten Dairi telah memperoleh Opini WTP sebanyak 10 (sepuluh) kali

berturut-turut, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024., pebandingan target Opini BPK pada akhir tahun RPJMD (Tahun 2024) dengan target WTP maka persentase capaian sebesar 100 %.

Opini Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2024, Badan BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 yang memuat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”/WTP . Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ke 10 (sepuluh) kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2014.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut :
 - a. rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;
 - c. rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;
 - d. rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Utara;
 - e. rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI;
 - f. rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 40 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran);
 - g. melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD, terkait penyusunan laporan keuangan.

2. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi terkait angka aset tetap, aset lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut :
 - a. rekonsiliasi data antara Bidang Pengelolaan BMD, Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pada BKAD dengan SKPD (untuk Aset Tetap);
 - b. rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan SKPD serta Bank Sumut.
 - c. untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.
3. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai aplikasi pendukung serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD.
4. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Dairi.
5. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Dairi.
6. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan melibatkan para stakeholder serta menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilaksanakan dibawah koordinasi BKAD Kabupaten Dairi.
7. Untuk menangani masalah terkait penggunaan aplikasi SIPD RI dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp dimana setiap permasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di BKAD.

Permasalahan :

1. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan,yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.

3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Solusi :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan APBD sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.
6. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD untuk menangani/mengatasi masalah ataupun kendala yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah.



Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi atas Capaian Opini WTP Tahun Anggaran 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut sejak tahun 2014

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih**, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar	(Jumlah PD yang menyusun laporan Keuangan sesuai standar / Jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai standar)x100	Persen	100,00	100,00	100,00
2		Persentase PD yang realisasi belanja minimal 95%	(Jumlah PD yang realisasi belanja minimal 95% / Jumlah seluruh PD)x100	Persen	100,00	19,51	19,51
3		Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu paling lambat 31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu (31 Desember)	Tepat Waktu (18 Desember)	100,00
4		Persentase layanan penatausahaan keuangan sesuai standar	(Jumlah layanan penatausahaan keuangan sesuai standar / jumlah OPD yang	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
			membuat layanan penatausahaan keuangan sesuai standar)x100				
5	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	(Jumlah aset daerah yang telah diinventarisir / jumlah OPD)x100	Persen	100,00	100,00	100,00
6	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	(Realisasi pajak daerah ditambah Realisasi retribusi daerah tahun n) dibagi (Target pajak daerah ditambah realisasi retribusi daerah tahun n) dikali 100%	Persen	100,00	99,92	99,92
7	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase pengawasan internal sesuai standar	(Jumlah audit yang ditangani dibagi Jumlah audit yang wajib ditangani) dikali 100%	Persen	90,00	90,00	100,00
8		Persentase OPD yang memiliki temuan berulang turun	(Jumlah OPD yang memiliki temuan berulang dibagi jumlah seluruh OPD) dikali 100%	Persen	90,00	25,00	172,22
9		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	(Jumlah penanganan pengaduan masyarakat dibagi jumlah pengaduan yang masuk) dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00
10		Persentase OPD yang menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas	(Jumlah OPD yang menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas / jumlah seluruh OPD) x 100%	Persen	90,00	Masih dalam proses evaluasi	-
11	Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona WBK dan WBBM	(Jumlah OPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi dibagi OPD yang dievaluasi) dikali 100%	Persen	50,00	0	0
12		Persentase OPD yang telah memenuhi rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	(Jumlah OPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi dibagi OPD yang dievaluasi) dikali 100%	Persen	100	100	100,00

Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informatika

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis
Teknologi Informatika

No.	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%
1	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi Menpan RB	Poin	3	2.69	89,67
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SIMPARAS online	Poin	87,50	89,97	102,82
	Rata-rata					95,16

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah poin 2,69 dari target nilai 3 Poin atau tercapai sebesar 89,67 % dengan predikat kinerja **Kurang Berhasil**.

Realisasi Indeks SPBE Tahun 2023 adalah 2,67 Poin. Realisasi tahun ini meningkat sebesar 0,02 Poin atau 0,75% dibandingkan realisasi tahun lalu. Hasil ini berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Dairi mendapat nilai 2,69 dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalami kenaikan indeks sebesar 0,02 sehingga nilai indeks SPBE menjadi 2.69. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan metodologi penilaian yaitu Metode Tingkat Kematangan SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Domain Penilaian terdiri dari 4 yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE.

Berdasarkan LHP SPBE Tahun 2024 dapat kami jelaskan bahwa beberapa aspek penilaian SPBE Kabupaten Dairi masih terdapat nilai 1,00 yaitu pada Domain Manajemen dapat kita lihat pada gambar.

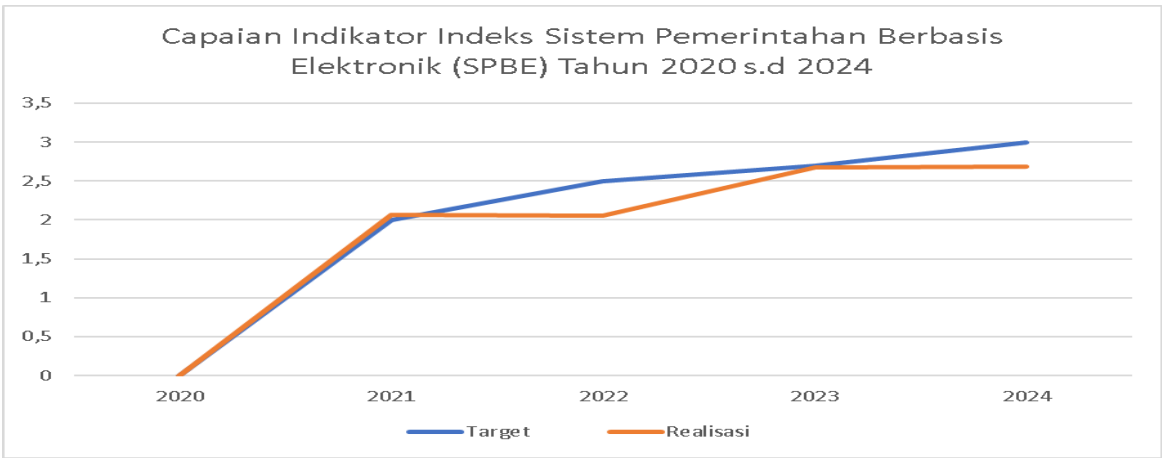
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,69
Domain Kebijakan SPBE	2,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,60
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,87
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

Implementasi SPBE di Kabupaten Dairi tentu tidak hanya dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi harus dilaksanakan secara terintegrasi dan saling berkomitmen dengan beberapa Instansi dalam rangka mencapai target Indeks SPBE sesuai target pada Perubahan Renstra 2019-2024.

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	-	2	2,5	2,7	3,0	-	2,07	2,05	2,67	2,69	-	103,5	82	98,88	89,66
2	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	-	43	65	86	91	-	30	63,07	65	75	-	69,76	97,03	75,58	82,41



Grafik Progres Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024

**Pengguna Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi**

No	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Jumlah Pengguna Tahun 2024	Keterangan
1	Layanan gangguan TIK	silagatik.dairikab.go.id	198 laporan	Jumlah Laporan Pengaduan gangguan aplikasi dan jaringan internet
2	Layanan pengaduan masyarakat	sidumasda.dairikab.go.id	50 pengaduan	Jumlah pengaduan yang diterima
3	Layanan Presensi	iSen (ready on Play Store)	ASN pada 25 OPD	ASN Pemerintah Kabupaten Dairi
4	Layanan kedaruratan	NTPD 112 Kabupaten Dairi	35	Jumlah panggilan yang direspon

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke-4 : “Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dalam hal penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri misal silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presensi (iSen) dan sidumasda.dairikab.go.id yang diintegrasikan pada Layanan Dairi Siaga 112 dari sisi Domain Layanan Publik.

a. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Salah satu kegiatannya yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu banyak media hanya mengcopy-paste data informasi, kompetensi wartawan masih kurang, kurangnya koordinasi dengan jurnalis atau media, kurangnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, belum memiliki dasar pendirian secara hukum untuk lembaga penyiaran publik lokal RPD 101.6 FM, Jangkauan frekwensi RPD yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran pada saat keadaan hujan yang disertai petir.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

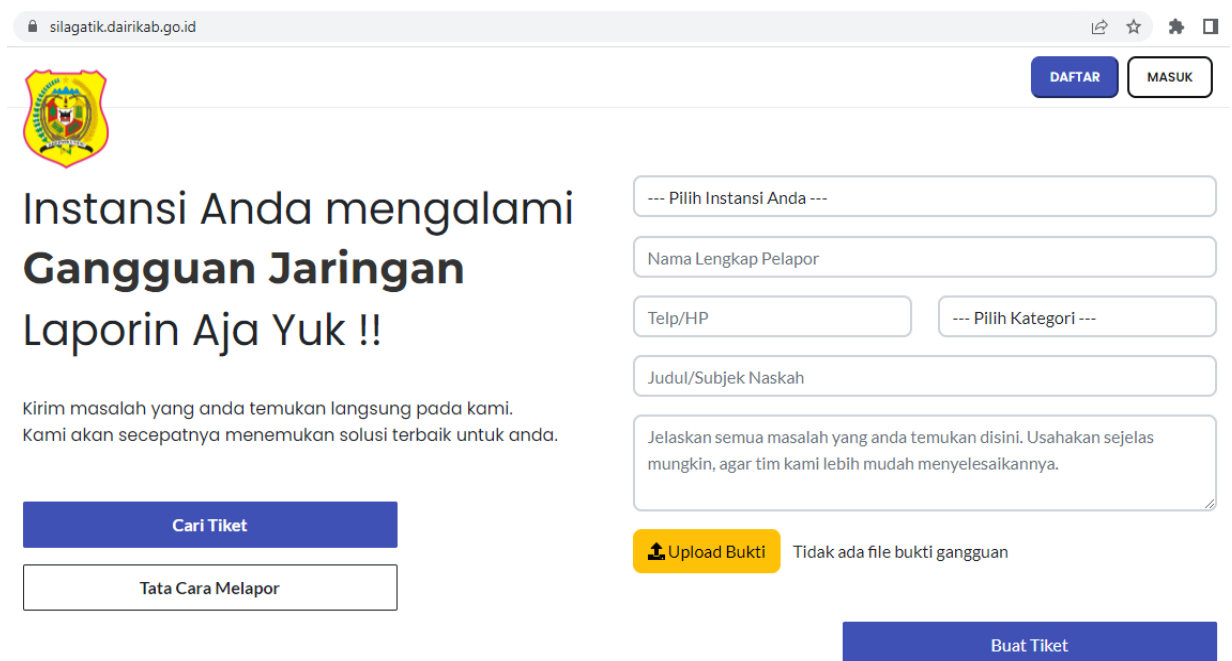
Salah satu kegiatannya yaitu Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu pendistribusian bandwidth masih menggunakan teknologi pemancar radio pita lebar dimana teknologi ini rentan akan perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Salah satu kegiatannya yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Membangun Metadata Statistik Sektor. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu Belum adanya pengelolaan Data Statistik Sektor di daerah dan publikasi secara berkala. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam hal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri melalui website silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presensi (iSen) dan website sidumasda.dairikab.go.id yang diintegrasikan pada Layanan Dairi Siaga 112 dari sisi Domain Layanan Publik.

Implementasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi implementasinya berupa layanan :

- a. Layanan Gangguan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa layanan TIK kepada ASN. Silagatik adalah Sistem Informasi Layanan Gangguan TIK di Kabupaten Dairi, diharapkan kedepan nya jika ada terjadi gangguan di instansi anda, tidak lagi melalui kirim surat manual melainkan dari aplikasi silagatik.dairikab.go.id.



silagatik.dairikab.go.id

DAFTAR MASUK

Instansi Anda mengalami Gangguan Jaringan Laporin Aja Yuk !!

Kirim masalah yang anda temukan langsung pada kami. Kami akan secepatnya menemukan solusi terbaik untuk anda.

Cari Tiket

Tata Cara Melapor

--- Pilih Instansi Anda ---

Nama Lengkap Pelapor

Telp/HP

--- Pilih Kategori ---

Judul/Subjek Naskah

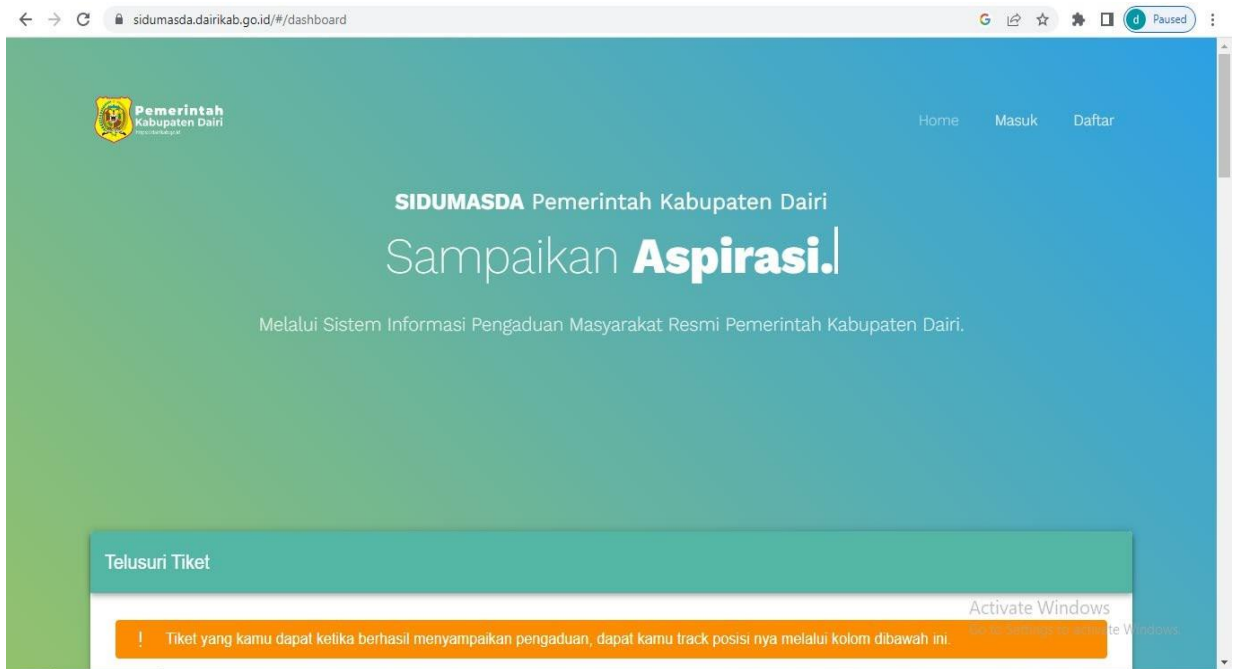
Jelaskan semua masalah yang anda temukan disini. Usahakan se jelas mungkin, agar tim kami lebih mudah menyelesaikannya.

Upload Bukti Tidak ada file bukti gangguan

Buat Tiket

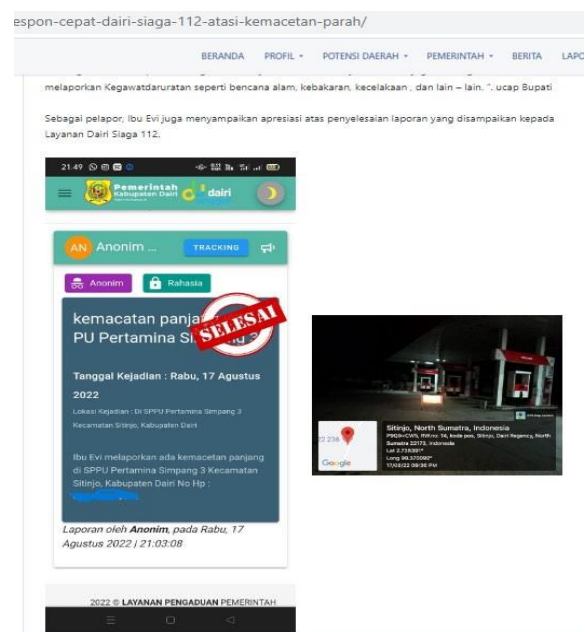
- b. Layanan Pengaduan Masyarakat SIDUMASDA

SIDUMASDA merupakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Resmi Pemerintah Kabupaten Dairi melalui aplikasi sidumasda.dairikab.go.id yang diintegrasikan pada Layanan Dairi Siaga 112



c. Layanan Kedaruratan (Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112)

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) dan pengaduan layanan publik diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan dan pengelolaan pengaduan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan.



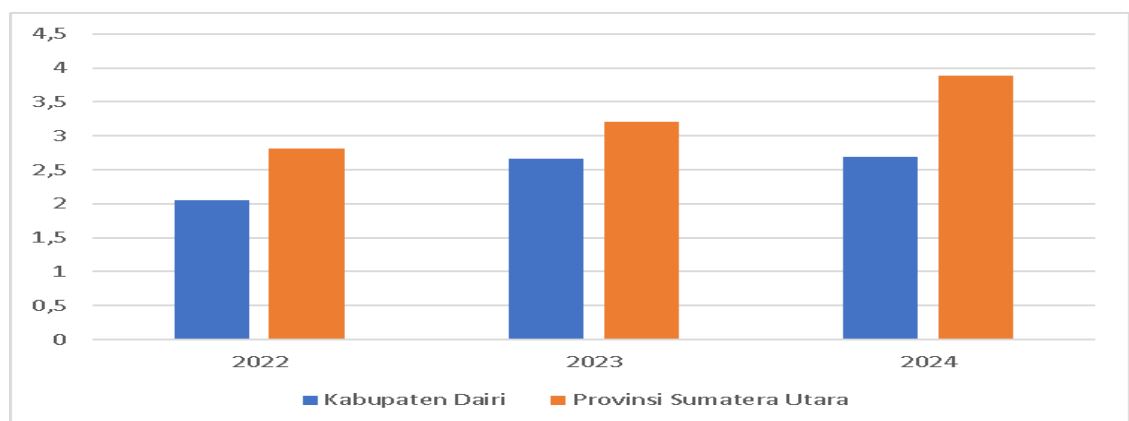
d. Aplikasi berbasis mobile (android) layanan ASN – “iSen” merupakan aplikasi Presensi/absensi ASN.



Benchmark Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara

No	Instansi	Target Nilai SPBE			Realisasi Nilai SPBE		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kabupaten Dairi	2,50	2,70	3,0	2,05	2,67	2,69
2	Provinsi Sumatera Utara	NA	3,0	3,30	2,81	3,21	3,86

Grafik Benchmark kinerja perbandingan antara capaian Indeks SPBE Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara



Permasalahan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra

Pemerintah Daerah Pendistribusian bandwidth yang ke 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 18 Puskesmas, 42 sekolah (6 SD dan 36 SMP) sebagian sudah menggunakan teknologi fiber Optik namun sebagian masih menggunakan teknologi pemancar radio karena topologi daerah yang lebih banyak perbukitan.

2. Layanan Hubungan Media

Masih terdapat media yang belum mendapat kapabilitas dalam peningkatan kualitas jurnalisme dan profesionalisme.

3. Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia pengelola informasi dan dokumentasi masih belum optimal

4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Perda tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sejak didirikan RPD 101.6 FM tahun 2007 belum memiliki dasar pendirian secara hukum dan Jangkauan frekwensi RPD yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran jika keadaan hujan apalagi disertai petir, siaran terpaksa dihentikan.

5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah

Belum maksimalnya pengelolaan Data Statistik Sektor di masing-masing Perangkat Daerah dan publikasi secara berkala di aplikasi iSadari tidak berjalan dengan baik.

Solusi :

1. Perencanaan penganggaran tahun 2024 sudah menerapkan penggunaan teknologi *Fiber Optic* (FO). Diharapkan dengan penggunaan FO ini nantinya pendistribusian bandwidth dapat berjalan dengan baik yang tidak berpengaruh atas kondisi cuaca dan air.
2. Melakukan pelatihan dasar untuk Jurnalis dan melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme.
3. Bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait penyusunan daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
4. Prolegda tahun 2025 dan dalam Perencanaan penganggaran tahun 2025 sudah mengalokasikan penyusunan Perda dan Perbup tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal, direncanakan selambat-lambatnya semester ke I tahun 2024 serta pemeliharaan antena pemancar radio dan frekuensi radio.
5. Tahun 2023 sudah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satu data dan upaya evaluasi pengelolaan data statistik sektoral dimulai dari 2 opd sudah mengajukan rekomendasi statistik ke BPS Kab. Dairi serta mempersiapkan aplikasi statistik di Kabupaten Dairi dengan nama Isadari yang akan dipergunakan tahun 2025 serta melakukan monitoring terkait pengelolaan Data Sektorat secara berkala.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi IKM Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 89,97 poin dari target 87,50 Poin atau tercapai sebesar 102,82% dengan predikat kinerja **Sangat Berhasil**. Realisasi IKM Tahun 2023 adalah 87,11 Poin. Realisasi tahun ini meningkat sebesar 2,86 Poin atau 3,28% dibandingkan realisasi tahun lalu.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui pengisian dan pengukuran kuisisioner yang dilakukan sendiri oleh masyarakat penerima layanan secara online melalui aplikasi Sistem informasi menilai kepuasan masyarakat secara online (SIMPARAS online) dengan alamat <https://simparas.dairikab.go.id> sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

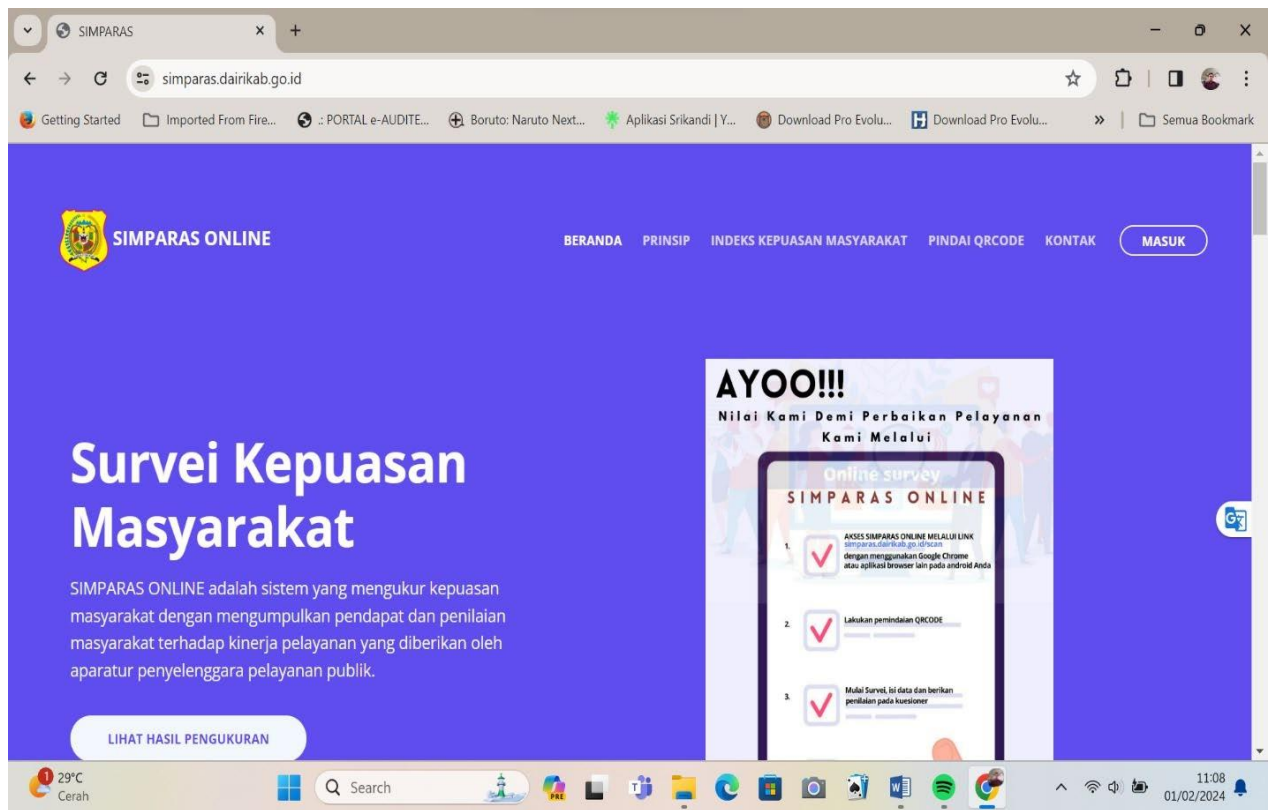
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah

Perangkat Daerah/UPT	Teknik Survei	Indeks
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kuesioner Elektronik dengan Aplikasi Simparas Online	92,49
RSUD Sidikalang	Kuesioner Elektronik dengan Aplikasi Simparas Online	95,79
Badan Pendapatan Daerah	Kuesioner Elektronik dengan Aplikasi Simparas Online	82,83
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Kuesioner Elektronik dengan Aplikasi Simparas Online	81,22
Nilai rata-rata		89,97

Adapun Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang disurvei meliputi :

- Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
- Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Sarana dan prasarana, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

- i. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.



<https://simparas.dairikab.go.id>

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 4 (empat) kali survei kepuasan masyarakat (SKM). Dari empat kali pelaksanaan SKM, unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah Unsur Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan dan Unsur Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan hasil yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat rencana tindak lanjut atas rekomendasi laporan SKM tahun 2024.



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara Online melalui Simparas Online

2. Rumah Sakit Umum Sidikalang

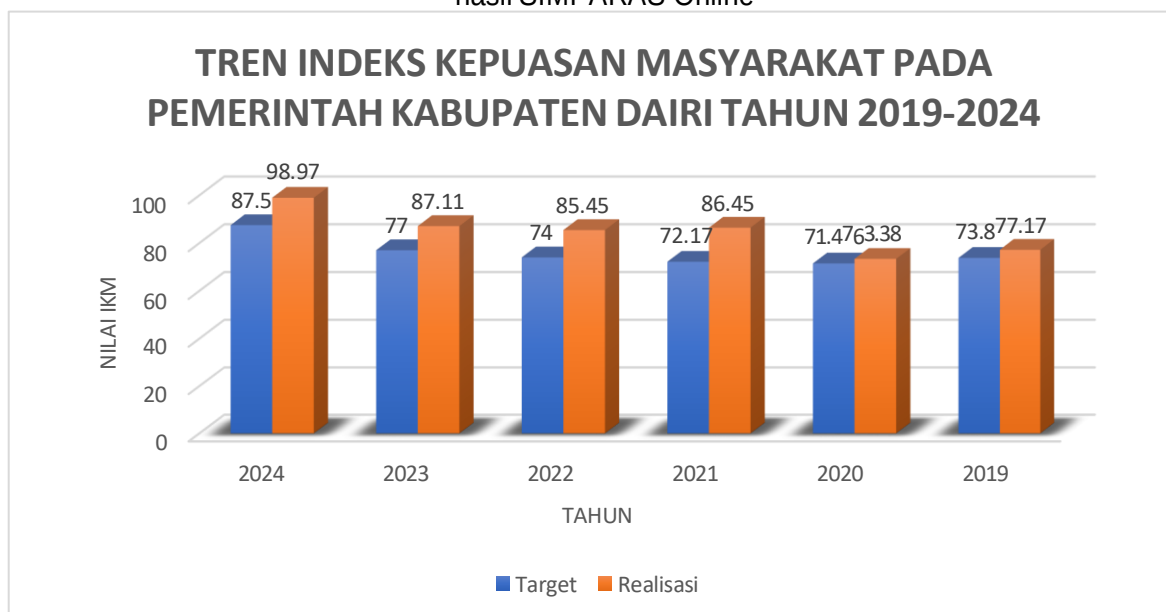
Unsur yang menjadi prioritas pada tahun 2024 adalah unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3,82. Hasil survei ini menunjukkan masih kurangnya kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap kompetensi petugas layanan pada Rumah Sakit Umum Sidikalang.

3. Badan Pendapatan Daerah

Unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur dan unsur Sarana Prasarana. Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat mengeluhkan area parkir yang sempit dan tidak adanya sarana pendukung parkir. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan kurangnya informasi standar pelayanan pada lokasi layanan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,226 dengan mutu pelayanan B pada kategori Baik, artinya rata-rata masyarakat menyatakan bahwa kompetensi pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

Tren IKM Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan
hasil SIMPARAS Online



Sesuai dengan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari tahun 2019 ke tahun 2020 yakni sebesar 3,79. Hal ini terjadi sebagai dampak Covid-19 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Setelah dilaksanakannya perbaikan atau pun pembenahan sarana prasarana, kompetensi pegawai serta unsur-unsur peniliannya, Pemerintah Kabupaten Dairi mengalami peningkatan nilai IKM yang signifikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan sedikit penurunan pada tahun 2022 sebesar dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2021.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai IKM unit layanan Kabupaten Dairi, maka perlu adanya:

1. Pendidikan dan Latihan pada petugas layanan yang luarannya peningkatan kompetensi dan ketrampilan dalam menangani tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Perbaikan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana layanan publik yang mendukung kinerja layanan dari setiap unit kerja ASN Kabupaten Dairi.
3. Penyediaan Sistem Informasi dan Mekanisme Pengaduan yang dilengkapi dengan Pelatihan dan penempatan petugas yang memiliki ide dan terobosan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat; perlu diadakan survei secara berkala 4 (empat) kali setahun atau setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dapat ditindak lanjuti/dievaluasi kinerja pelayanannya menjadi lebih baik.



Bupati Dairi menerima Penghargaan Predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia

Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informatika** dengan 2 (dua) indikator kinerja Indeks SPBE dengan persentase capaian 89,67 % dengan Predikat kinerja **Kurang Berhasil**, dan IKM dengan persentase capaian 102,92 % dengan predikat kinerja **Sangat Berhasil**, sehingga rata-rata capaian **Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informatika** yaitu **95,16 %** $((89,67 + 102,82)/2)$ dengan predikat **Kurang Berhasil**.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informatika**, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informatika

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	Pengaduan masyarakat yang tindak lanjuti dibagi pengaduan masyarakat dikali 100	Persen	100,00	90,00	90,00

2	Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dikali 100	Persen	100,00	90,00	90,00
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang valid	Ketersediaan data statistik sektoral yang valid dibagi ketersediaan data statistik sektoral dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	Jumlah PD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian dibagi jumlah seluruh PD dikali 100%	Persen	100,00	100,00	100,00
5	Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik	(Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP)/(Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas) x 100%	Persen	100,00	99,99	99,99
		"Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA"	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu)hari@yang sudah memiliki KIA)/(Jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari) x 100%	Persen	100,00	63,41	63,41
6	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran)/(Jumlah anak usia 0-18 tahun) x 100%	Persen	100,00	99,25	99,25
		Persentase Perkawinan Tercatat	(Jumlah Perkawinan Tercatat)/(Jumlah penduduk berstatus kawin) x100%	Persen	75,00	43,56	58,08
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	(Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama tahun 2023 dan 2024/(Seluruhnya Jumlah OPD - (Dinas Catpil dan OPD Kecamatan))x100%	Persen	100,00	100,00	100,00
8	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	(jumlah seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan) x 100	Persen	100,00	100,00	100,00

9	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip sesuai dengan standar	Tingkat keberadaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	Persen	70,00	33,33	47,61
---	---------------------------	---	---	--------	-------	-------	-------

Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Indeks Desa Membangun	Rata-rata Indeks Desa Membangun 161 Desa	Poin	0,66	0,67	101,52

Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 0.67 poin dari target 0.66 poin atau tercapai sebesar 101,52 %. Hasil capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kemandirian Desa** yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 101,52 % dengan predikat kinerja **Sangat Berhasil**.

Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 0.65 poin. Realisasi tahun ini meningkat sebesar 0,02 poin atau 3,08 % dibandingkan realisasi tahun lalu.



Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

IDM (Indeks Desa Membangun) merujuk pada ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan kemajuan pembangunan desa di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. Dapat dijelaskan bahwa yang menjadi Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:
 - a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
 - b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
 - c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
 - d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).



IDM menjadi **petunjuk bagi desa dalam melakukan arah pembangunan sesuai situasi tingkat status desa** sehingga membantu dalam memberikan rumusan arah prioritas pembangunan desa.

IDM berfungsi sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan akan lebih tepat sasaran. Tingkat perkembangan desa menentukan prioritas pembangunan di desa sehingga diharapkan dapat mengatasi kendala dan permasalahan di desa.

Selain itu, berikut ini adalah fungsi lainnya:

1. Fungsi lainnya untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
2. Berguna sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri.

Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Dan Penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan k/l, pemerintah daerah dan desa, serta lembaga lain

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Dalam Pengisian Idiam Beberapa hal yang perlu di isi yang menjadi bagian dari Pengisian Kuesioner itu sendiri diantaranya: Identitas Petugas, Identitas Desa, Data Geografi, Topografi dan Demografi, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Ekologi, Aktivitas Desa, Sumber Pendapatan Desa, Total Belanja APBDes, Jarak, Waktu dan Biaya Desa ke Kecamatan dan Kabupaten.



Pengukuran Indeks Desa Membangun sangat penting karena memberikan banyak manfaat dan dampak positif, diantaranya adalah;

1. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Dengan menggunakan IDM, desa-desa dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka. Hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota, serta mengurangi ketimpangan pembangunan yang sering terjadi di Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Melalui implementasi IDM, penduduk desa dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan peningkatan pendapatan, kualitas hidup penduduk desa juga akan meningkat.

3. Meningkatkan akses penduduk desa terhadap informasi dan layanan publik.

Salah satu manfaat IDM adalah meningkatkan akses penduduk desa terhadap informasi dan layanan publik. Melalui teknologi informasi, penduduk desa dapat mengakses informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan dengan lebih mudah dan cepat.

4. Mendorong partisipasi aktif penduduk desa dalam pembangunan.

Dengan adanya IDM, penduduk desa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan di desa mereka. Mereka dapat memberikan masukan, ide, dan melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

5. Meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian global.

Dengan menggunakan IDM, desa-desa dapat mengembangkan produknya dan memasarkannya ke pasar global. Hal ini akan meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian global.

6. Mengurangi tingkat migrasi penduduk dari desa ke kota.

Implementasi IDM dapat mengurangi tingkat migrasi penduduk dari desa ke kota. Dengan adanya peluang dan akses yang lebih baik di desa, penduduk desa tidak perlu lagi mencari kehidupan yang lebih baik di kota.

Untuk mengoptimalkan potensi Desa dengan IDM tersebut dengan mengembangkan ekonomi dan sosial di daerah pedesaan sehingga Implementasi IDM dapat membawa manfaat yang signifikan bagi penduduk desa, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap informasi dan layanan publik yang lebih baik, serta partisipasi yang lebih aktif dalam pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendampingan Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa telah berupaya mendorong desa untuk senantiasa meningkatkan nilai IDM desanya setiap tahun.

Pendataan IDM pada situs Kementerian Desa, PDTT setiap tahun dilakukan oleh desa melalui pendampingan dari Pendamping Desa yang tersebar di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Pendataan ini dilakukan melalui pengisian Kusioner IDM sesuai perkembangan desa faktual.

Tiga Dimensi yang diukur seperti diatas yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) = Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman,
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) = Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah,
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) = Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Implementasi kegiatan yang diharapkan pada tahun 2024 secara umum adalah :

Rekomendasi Peran desa dan Pemerintah Kabupaten:

Desa	Kabupaten
Pasar Desa	Menyediakan Pasar Permanen Desa
Membentuk Bumdes	Fasilitas Pertokoan/ perdangan
Taman Bacaan Desa	Peningkatan Jumlah Industri UMKM
Internet Desa	Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos
Fasilitas/ pembinaan Kader Posyandu	Fasilitas bank/BPR
Pengadaan tempat kursus	Fasilitas Kredit (KUR dan lainnya)
Pembangunan TPS dan TPA	Pengadaan Tenaga Kesehatan (dokter dan bidan)
Warnet desa	Akses jaringan internet
Pembangunan Siskamling	Fasilitas Pelestarian Lingkungan (Darat, air dan udara)
Mengaktifkan Poskamling	Kejar Paket A, B, C
Pembangunan Toko dan warung kelontong > 3 Unit	Fasilitas Transpormasi Umum
	Pembangunan Fasilitas sekolah SMP dan SMU
Kualitas Jalan Desa/ dusun	Kualitas jalan kabupaten
	Angkutan Umum/ Trayek rutin
	Askes Polindes, Puskesmas
	Jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu

Klasifikasi Status Desa

Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat lima status kemajuan dan kemandirian Desa, yaitu:

1. Desa Mandiri atau Desa Madya
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Kondisi Dan Gambaran Umum Desa

Kabupaten Dairi terdiri dari 161 Desa yang masuk dalam 3 klasifikasi status perkembangan desa yaitu:

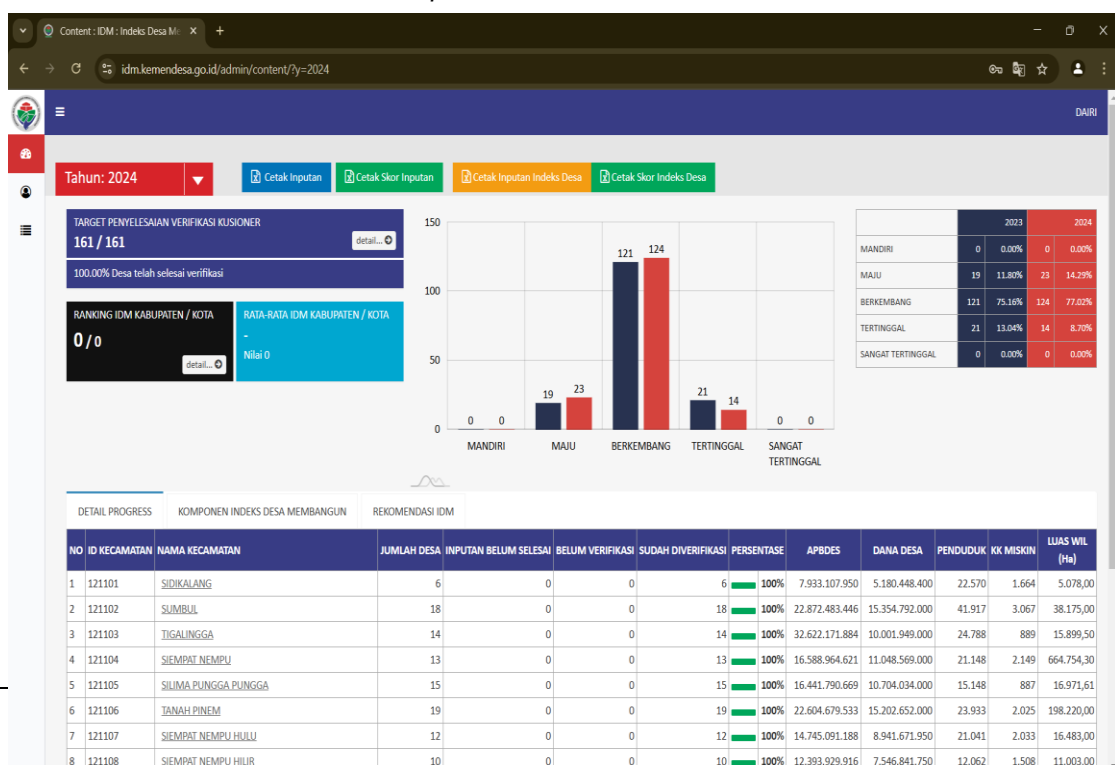
1. Desa Maju sebanyak 23 desa.
2. Desa Berkembang sebanyak 124 desa.
3. Desa Tertinggal sebanyak 14 desa.

Berikut tingkat perkembangan status desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2019 hingga 2024 sebagai berikut :

Perkembangan Tingkat Status Desa Tahun 2019-2024

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2019	2	104	51	4	0
2020	1	99	56	5	0
2021	1	87	68	5	0
2022	0	31	120	10	0
2023	0	21	121	19	0
2024	0	14	124	23	0

Status Desa dari Aplikasi Sistem Informasi Desa Tahun 2024



Implementasi Kegiatan Pembangunan melalui IDM di Desa:

Pendataan IDM pada situs Kementerian Desa, PDTT setiap tahun dilakukan oleh desa melalui pendampingan dari Pendamping Desa yang tersebar di Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

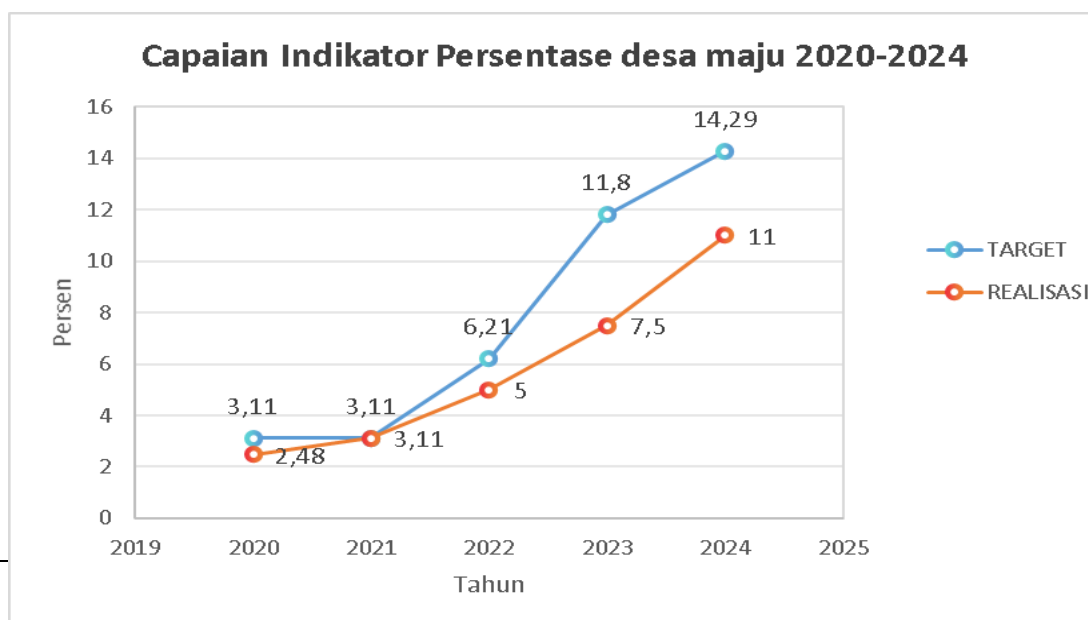
Dari tahun 2023-2024, sebanyak 7 desa mengalami peningkatan status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Sedangkan desa berkembang yang telah berubah menjadi desa maju, ada sebanyak 4 desa. Walaupun begitu, desa mandiri masih belum dapat tercapai. Hal ini diakibatkan masih belum ada desa yang mampu memenuhi standar untuk menjadi desa mandiri.

DESA TERTINGGAL YANG BERUBAH STATUS MENJADI DESA BERKEMBANG TAHUN 2024				
No	KECAMATAN	DESA	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	SIEMPAT NEMPU	SOBAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG
2	TANAH PINEM	LAU PRIMBON	TERTINGGAL	BERKEMBANG
3	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
4	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
5	PEGAGAN HILIR	LAKSA	TERTINGGAL	BERKEMBANG
6	PEGAGAN HILIR	KUTA USANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG
7	GUNUNG SITEMBER	LAU LEBAH	TERTINGGAL	BERKEMBANG
TOTAL				7 DESA

DESA BERKEMBANG YANG BERUBAH STATUS MENJADI DESA MAJU TAHUN 2024				
No	KECAMATAN	DESA	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	SIDIKALANG	KAIANG SIMBARA	BERKEMBANG	MAJU
2	SUMBUL	PEGAGAN JULU VI	BERKEMBANG	MAJU
3	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	BERKEMBANG	MAJU
4	GUNUNG SITEMBER	BATU GUN GUN	BERKEMBANG	MAJU
TOTAL				4 Desa

Capaian indikator kinerja utama dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks desa membangun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan Indikator Indeks Desa Membangun dapat dilihat pada Grafik berikut:



	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					PERSENTASE				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indesk Desa Membangun	0,58	0,59	0,61	0,63	0,66	0,59	0,6	0,62	0,66	0,67	101,72	101,69	101,64	104,76	101,52
2	Persentase Desa Maju	2,48	3,11	5	7,5	11	3,11	3,11	6,21	11,8	14,29	125,40	100,00	124,20	157,33	129,91

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Indeks Desa membangun di Kabupaten Dairi mengalami Peningkatan. Target Tahunan dan Renstra tercapai. Peningkatan IDM tertinggi dicapai pada Tahun 2023 dimana Target 0.63 Realisasi sebesar 0,66 meningkat sebesar 104,76 %.

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Persentase Desa maju di Kabupaten Dairi mengalami Peningkatan. Target Tahunan dan Renstra tercapai.

Permasalahan :

1. Indeks Ketahanan Ekonomi
 - a. BUMDes belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD Desa.
 - b. Kurangnya kegiatan industri mikro di desa.
 - c. Kurangnya akses dan layanan ekonomi serta perbankan di desa.
2. Indeks Ketahanan Sosial
 - a. Belum terdapatnya batas desa yang jelas dan peta desa yang dibuat regulasinya.
 - b. Akses jalan di desa belum semua dapat dilalui dengan baik termasuk akses kepada fasilitas.
 - c. pemerintah dari dusun-dusun menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
 - d. Kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan non formal lainnya.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan
 - a. Desa belum mempersiapkan fasilitas mitigasi / tanggap darurat
 - b. Kurangnya kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan air/sungai.

Solusi :

1. Indeks Ketahanan Ekonomi

Perlunya peningkatan kapasitas pengurus BUMDes yang berorientasi pada penyusunan pelaporan dan pengembangan unit usaha .
2. Indeks Ketahanan Sosial
 - a. Perlu adanya kejelasan batas desa dan harus dibuat Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Akses jalan yang harus diperbaiki dengan baik sehingga dapat dilalui baik fasilitas kesehatan, pendidikan dan non formal termasuk akses fasilitas pemerintah.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan

- a. Fasilitas mitigasi / tanggap darurat yang tersedia dengan baik.
- b. Perlunya kegiatan penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan.

Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kemandirian Desa**, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Kemandirian Desa

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Kecamatan yang mempunyai BKAD dibagi Jumlah Kecamatan yang mempunyai BKAD dikali 100	Persen	39,60	60,00	151,82
2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dibagi Jumlah target Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya terbentuk dikali 100	Persen	80,25	80,00	99,69
3	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tingkat Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana dibagi Jumlah administrasi Pemerintahan Desa yang seharusnya dilaksanakan dikali 100	Persen	61,11	61,11	100,00

Sasaran strategis Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran strategis Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
Indeks Infrastruktur	Total Capaian IKU Dinas PUTR * Bobot / Total Bobot * 100	Persen	63,35	60,07	94,82

Realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah 60,07 poin dari target 63,35 poin atau tercapai sebesar 94,82 %. Hasil capaian kinerja **Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai** dengan 1 (satu) indikator dengan predikat kinerja **kurang berhasil**.

Realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah 61,49 poin realisasi tahun ini menurun sebesar 1,42 poin atau 2,31%. Indeks infrastruktur dapat diperoleh dengan melakukan perkalian masing-masing capaian indikator dengan bobot yang telah ditetapkan dan kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan 100%. Sesuai rumusan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Indikator Kinerja Komponen Indeks Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Keterangan	BOBOT PENILAIAN
Indeks Infrastruktur	Persen	63.35	60.07	94.82	100
Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terlayani jaringan irigasi	Persen	94.85%	94,45%	10.554,47 /11.175 (Ha)	15%
Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	64.14%	52,66%	845,32/1605,29 (Km)	25%
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	84.82%	71,87%	68.366 /95.121 (Rumah Tangga)	20%
Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	Persen	100,00%	6,25%	1/16 (Dokumen)	10%
Cakupan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100,00%	100,00%	100/100 (Unit)	5%
Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persen	100,00%	20%	20/100 (Orang)	5%
Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha	Persen	30.83%	25,39%	173,74/684,41(Ha)	15%
Cakupan Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum	Persen	100%	64,96%	19,24 /29,64 (Ha)	5%

Sumber Laporan Kinerja PUTR Kabupaten Dairi Tahun 2024

Pencapaian Indeks Infrastruktur Tahun 2024 pada dipengaruhi oleh capaian indikator sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang terlayani jaringan irigasi.

Untuk pencapaian indikator ini, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Dairi. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut

memberi dampak positif terhadap kualitas layanan irigasi untuk mengairi lahan sawah. Untuk memastikan irigasi berfungsi secara optimal setiap tahunnya maka dibutuhkan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan yang berkesinambungan mengingat tingkat kerusakan bangunan dan jaringan irigasi cukup tinggi akibat kondisi perletakan saluran irigasi sebagian besar berada pada saluran punggung perbukitan yang rawan longsor.

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini adalah Program
Pengelolaan Sumber Daya Air, melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; dan
- c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Realisasi kinerja Tahun 2024 untuk indikator persentase luas irigasi dalam kondisi baik adalah seluas 10.551,47 Ha dari total luas irigasi 11.175 Ha atau 94,45%.

Uraian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai indikator kinerja “Persentase luas irigasi dalam kondisi baik” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Meriah Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nantombis Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jambur Indonesia Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lae Pakoan Kec. Parbuluan
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sikaleut Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Guru Tuha Kec. Lae Parira
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bantun Kerbo Kec. Lae Parira
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Berampu Kec. Berampu
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Parbuahan, Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Balna, Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Lae Ambat Kec. Silima Punga Punga
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Lae Malum Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Lae Kasurat Kec. Sumbul

[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Kaban Julu Kec. Lae Parira
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Juma Lubang Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Saroha Kec. Silima PunggaPungga
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Lingga Raja Kec. Pegagan Hilir
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lae Pangaroan Kec. Silima PunggaPungga
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Juma Ramba I Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sumbul Berampu Kec. Lae Parira
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Juma Gulangan Kec. Berampu
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sikunihan Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Banjar Toba Kec. Berampu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
[-] Pemeliharaan Rutin Mendesak Jaringan Irigasi



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Juma Ramba I Kec. Sumbul

Permasalahan :

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

Solusi :

Mengoptimalkan kerjasama Petugas Pintu Air dengan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dalam melaksanakan gotong-royong dalam setiap penanggulangan kerusakan irigasi agar layanan air irigasi tidak terganggu.

2. Indikator Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Rekonstruksi Jalan;
- c. Pemeliharaan Berkala Jalan;
- d. Pembangunan Jembatan, dan
- e. Pemeliharaan Rutin Jalan.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan dimaksud adalah :

- a. Pembangunan jalan dengan lapen sepanjang 21.74 Km;
- b. Peningkatan konstruksi jalan menjadi hotmix sepanjang 20.87 Km; dan

Dengan pelaksanaan sub kegiatan ini, maka capaian kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 845,32 Km dari total panjang jalan kabupaten 1605,29 Km atau sebesar 52,66%. .

Uraian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai indikator kinerja “Persentase kondisi jalan dalam kondisi mantap” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan
[-] Pengaspalan Jalan Jrs.Huta Ginjang - Lae Salak, Link. 232, Kec.Tigalingga
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Sp. Logan-Lae Basbas - Sinar Pagi Link 094, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Cekdam - Kebun Desa Parbuluan V, Link 390, Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Simanuk-manuk - Simangaranger - Sileu-leu Link 050, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lingga Julu - Kedebrek, Link.322 Kec. Tigalingga
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Rangkom - Sikunihan I, Link. 245, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Juma Mejan - Onan Lama, Link. 482, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lombang Somaraek - Batu Napal, Link 281, Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Ring Road Kuta Imbaru - Sosor Sikula Link 321 Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lae Panginuman - Siantar Matio, Link. 200, Kec. Silima Pungga punga
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lingkar Lae Meciho - Disbun Dusun Sitinjo I, Link. 297, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Dsn III Lae Meciho - Dusun I Sitinjo Induk, Link. 349, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lae Kombih - Juma Ramba, Link. 338, Kec. Sumbul

[-] Pembangunan Jalan Jrs. Dolok Tolong - Barisan Simbolon - Parbuahan, Link. 178, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Tumanggor - Juma Lubang - Batang Ari, Link. 108, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Juma Batu - Dsn Naga/Bts. Kab. Karo, Link. 198, Kec. Tanah Pinem
[-] Pembangunan Jalan Jrs. KM 3 - Lae Pinang, Link. 415, Kec. Siempat Nempu Hulu/Sidikalang
[-] Pengaspalan Jalan pada Desa Karing (Disamping Pustu) Kec. Berampu
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Sambaliang - Kaban Tengah Link 285, Kec. Berampu
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Tj. Beringin I - Lae Pinagar, Link. 143, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Laksa - Pamuhalan, Link. 243, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Aek Nauli - Lae Markelang Link 396, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan Jalan Gelanggang Desa Tupak Raja, Kec. Gunung Sitember
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Tigalingga - Soban, Link.046 Kec. Tigalingga-Siempat Nempu
[-] Peningkatan Jalan Jurusan Parikki - Pangguruan Link. 314 Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jalan Jurusan Pulo Sileu-leu - Parsaoran, Link. 340, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Trak - Jl. PLTA Renun, Link. 311, Kec. Parbuluan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Tungtung Batu - Sopokomil Link. 087, Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Tumpak Debata-Parluasan - Lae Rias, Link. 179, Kec. Sumbul
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Silumboyah - Nanggar Boang, Link. 093, Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Banjar Toba - Sitangki, Link. 320, Kec. Berampu
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Huta Nadeak - Kuta Songsang, Kelurahan Sidiangkat, Kec. Sidiangkat
[-] Pembangunan Jalan Jrs Sihotang Nahornop - Pangiringan Link. 331, Kec. Parbuluan
[-] Pengaspalan Jalan Jrs.Huta Ginjang - Lae Salak, Link. 232, Kec.Tigalingga
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Sp. Logan-Lae Basbas - Sinar Pagi Link 094, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Cekdam - Kebun Desa Parbuluan V, Link 390, Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Simanuk-manuk - Simangaranger - Sileu-leu Link 050, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan Jalan Jrs. Lingga Julu - Kedebrek, Link.322 Kec. Tigalingga
[-] Pembangunan Jalan Akses Jembatan Gantung Lae Renun di Desa Lau Lebah, Kec. Gunung Sitember (Pembayaran KDP Tahun 2023)
[-] Pengaspalan Jalan Jrs. Barisan Malim-Dusun Lae Maromas Desa Lae Haporas, Kec. Siempat Nempu Hilir (Pembayaran KDP Tahun 2023)
[-] Pembangunan Jalan di Dusun I Lae Bahul Desa Karing
[-] Pembangunan Jembatan Akses Kawasan Pertanian Terpadu KPT Desa Parbuluan V Kec. Parbuluan Link 288 (Pembayaran KDP Tahun 2023)
Rekonstruksi Jalan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Jalan PLTA Renun - Lae Mbontar, Link. 288, Kec. Parbuluan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Sosor - Sosor, Link. 296, Kec. Parbuluan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Situs Boru Deang Namora, Link. 407, Kec. Silahisabungan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Bangun II - Brsn Tigor - Pancur Nauli, Link. 053, Kec. Parbuluan
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Parbakalan - Sosor Gotting - Simalopuk Link.240, Kec. Parbuluan
[#] Dana Bagi Hasil/DBH Sawit
[-] Peningkatan Jalan Jurusan Sopobutar - Pardomuan 2 Link 011, Kec. Siempat Nempu Hilir
Pemeliharaan Berkala Jalan
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Dusun 3 Sileuleu - Pargambiran, Link.474 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Dusun Bukit Lehu - Dusun Kuta Raja Rusak Berat, Link. 125, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Kantor Camat G. Sitember - Puskesmas G. Sitember, Link.438 Kec. Gunung Sitember
[-] Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Panji Porsea-SMK Lae Gerat, Link. 244, Kec.Sitinjo
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Kedebrek - Sarintonu - Lau Pangguh, Link. 060, Kec.Tigalingga
[-] Peningkatan Jalan Sp. Mangan Molih - Bts. Kab. Karo, Link 001, Kec. Tanah Pinem

[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp.Lau Paski - Sp. Mangan Molih, Link. 002, Kec.Tanah Pinem
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Liren - Kempawa - Lau Sungsang Link 072, Kec. Tanah Pinem
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Kuta Imbaru - Lau Primbon Link.007, Kec. Tanah Pinem
[-] Peningkatan Jalan Jurusan Berampu - Pasi Link 096, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tinorpa - Parsaoran Link 103, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Amborgang - Lumban Sinaga Link 138 Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Lae Sikurang - Lae Sikurang, Link. 306, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Bakal - Pandan, Link. 043 Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Pemeliharaan Periodik Jurusan Gundaling - Gunung Gajah Link. 212, Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Hutamanik - Batang Ari Link 038, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Juma Teguh - Lae Parira, Link.161 Kec. Siempat Nempu/Kec. Lae Parira
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Karing - Banjar Toba Link. 168, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Bangun I Lae Meciho 2 Link 113, Kec. Parbuluan
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Kuta Bangun - Kaban Tengah - Kaban Dollong Link 193, Kec. Lae Parira
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lau Kersik - Aek Nauli Link. 190 (Dusun Aek Nauli)
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Gunung Sitember - Tampuk Kite, Link. 032, Kec. Gunung Sitember
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lau Bagot - Barisan Tigor, Link.363 Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Pertumbungen - Pengambaten, Link.033 Kec. Tigalingga
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Jurusan Barisan Sihole - Desa Pargambiran, Link.447 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Adian Nangka - Sempung Baris - Lumban toruan, Link. 228, Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Pardomuan 2 Aek Nauli Link 004, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Pangaroan - Dsn. IV, Link. 351, Kec. Silima Pungga pungga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Sering - Lau Kersik, Link. 119, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Pangiringan - Ht. Nainggolan, Link. 156 Kec. Parbuluan
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Markelang - Lae Haporas, Link. 220, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Siboras - Dolok Tolong Link. 054 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lau Pangguh - Sabungan, Link. 075, Kec. Tigalingga/Tanah Pinem
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lau Mil - Lau Kersik Link. 079 (Desa Lau Kersik) Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Ujung Teran - Gambir - Lau Pangguh Link. 158, Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tigalingga - Lau Mil - Rambaserit Link 059, Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sumbul Jehe - Ujung Teran-Matanari Link.117, Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Juma Gorat - Juma Gorat I, Link. 253, Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Gunung Sitember - Sp Kendet Liang - Lau Kersik, Link 031, Kec. Gunung Sitember
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Pancuran - Sibarung-barung Link. 333, Kec. Sidikalang
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Parratusan-Parhutuan - Sosor Baringin Link. 170, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Bakal - Namotrop II Juma Gunung, Link. 071, Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Lau Patundal - Lau Patundal Link. 162, Kec. Tanah Pinem
[-] Peningkatan Jalan Jrs. Mbinanga - Laksa, Link. 147, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Ujung Baho - Kalang Simbara, Link. 375, Kec. Sidikalang
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Mperik Bue - Mperik Bue, Link. 298, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Lingga Raja - Lingga Raja - Jumatahan, Link. 171, Kec. Pegagan Hilir

[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Meang - Lae Pinang, Link.341 Kec. Sidikalang
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tigalama - Laksa - Kalebaran Link. 078, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Buluduri - Sidumpe - Batu Gualan Link. 069 Dusun Sidumpe Marbun), Kec. Lae Parira
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Jl. Multi - Lae Gorat Link 484, Kec. Sitinjo
Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tanjun Beringin 2 - Lae Tanggiang Link. 061, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sumbul - Parikki - Pangiringan Link., Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Songsang-Ponjian-Batang Ari, Link. 065, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sisolu-solu - Poltak Bintang-Parsaoran Link 213, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Huta Usang - Kuta Rimbaru Link 120, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Juma Temba - Tanjung Saluksuk Link 115, Kec. Pegagan Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Karing - Karing Link 028, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Berampu - Lumban Simatupang Link 294, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Hutasoit - Panagaran I Panagaran II Link 295, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Pargaulan-Banjar Tonga - Juma Siantar Link 173, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Palipi - Palipi Link 249 Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Bukit Baringin - Bakal Gajah Link 219 Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Kaberun - Lae Enggan-enggan Link. 230 Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Siampodi - Longkotan - Sopokomil Link 148 Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sirunde - Kuta Karangan - Lae Sering Link 058 Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Longki - Lae Gambir - Lae Gadong Link 048 Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Gunung Gajah - Juma Padi Link 237 Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Adian Nangka - Adian Gupa Link 235 Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Siampodi - Bonian - Sumbari Link. 057, Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Bunturaja - Soban Link 014 Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Mbale - Lae Garut-Simungun Link 239, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Mbereng II Lae Mbereng I, Link. 221, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tj. Beringin I Barisan nauli Link 493 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sukandebi - Lau Mil Gadong, Link. 030, Kec. Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Lae Pinagar - Soalogogo Link. 271 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Tanjung Beringin - Dolok Tolong Link 318 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sumbul Berampu - Sambaliang Link 102, Kec. Berampu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Parnantian - Buluh Ujung Link 044, Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sileuleu - Sileuleu Dolok - Pargambiran Link 304 Kec. Sumbul
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Sinampang - Tornaui - Batu Kapur Link 080, Kec. Siempat Nempu/Tigalingga
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Kutabuluh - Lau Primbon Link.006, Kec. Tanah Pinem
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Panji-Lae Sirambon - Sp. Tiga Link. 089, Kec. Sitinjo
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Adian Para-para - Huta Ginjang Link 128 Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Amborgang - Sp. Ht. Maha, Link. 114, Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Aek Nauli - Lae Sering, Link. 047, Kec. Siempat Nempu Hilir

[-] Pemeliharaan jalan Jrs. Buluh Ujung - Pargambiran, Link.194 Kec. Sumbul (Pembayaran KDP Tahun 2021)
[-] Pemeliharaan Periodik Jalan Jurusan Sp. Siboras - Dolok Tolong Link. 054 Kec. Sumbul (Pembayaran KDP Tahun 2023)
[-] Pengaspalan Jalan di Desa Sosorlontung
[-] Pengaspalan Jalan di Desa Lae Luhung
[-] Pengaspalan Jalan di Dusun 2 Karing Depan Kantor Desa) Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Simp Karing - Karing Link 028
Pembangunan Jembatan
[-] Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Tj. Beringin I - Lae Pinagar, Link. 143, Kec. Sumbul
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Rutin Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten

Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan setiap tahunnya tidak optimal karena minimnya dana yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi untuk pembenahan infrastruktur jalan



Peningkatan Jalan Jrs. Sp. Sosor - Sosor, Link. 296, Kec. Parbuluan

Permasalahan :

Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kabupaten yang dilakukan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan yang terjadi sehingga tingkat kemantapan yang diperoleh belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dukungan pendanaan untuk penanganan jalan.

Solusi :

Untuk dilakukan pelimpahan sebagian aset jalan menjadi kewenangan desa sehingga untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dimaksud dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ataupun melalui gotongroyong partisipasi masyarakat.

3. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum /SPAM Jaringan Perpipaan;
- b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum /SPAM Jaringan Perpipaan.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan ini, maka persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan adalah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87%.

Uraian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai indikator kinerja "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak dan Berkelanjutan" Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
[-] Pembangunan/ Peningkatan SPAM di Desa Gomit, Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan/ Peningkatan SPAM di Desa Soban, Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan/ Peningkatan SPAM di Desa Sumbul Tengah, Kec. Tiga Lingga
[-] Pembangunan/ Peningkatan SPAM di Desa Sopobutar, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan /Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Sukandebi Kec.Tigalingga
[-] Pembangunan /Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Adian Gupa, Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan /Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Bertungen Julu Kec.Tigalingga
[-] Pembangunan/ Peningkatan SPAM di Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem
[-] Pembangunan/Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Lae Hole Kec. Parbuluan
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan
[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan melalui Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Tupak Raja, Kec. Gunung Sitember
[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan melalui Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Silalahi II, Kec. Silahisabungan
[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Polling Anakanak Kec. Silima Punga Punga
[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan
[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Batu Gun Gun, Kec. Gunung Sitember

[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Gundaling, Kec. Gunung Sitember
[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Pasir Tengah, Kec. Tanah Pinem
[-] Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Harapan, Kec.Tanah Pinem

	Progres :
	0%
	Titik Koordinat : 2.809877' 98.512876'
	Keterangan :
	Pekerjaan Bak Penampung
	Progres :
	50%
	Titik Koordinat : 2.809877' 98.512876'
	Keterangan :
	Pekerjaan Bak Penampung
	Progres :
	100%
	Titik Koordinat : 2.809877' 98.512876'
	Keterangan :
	Pekerjaan Bak Penampung

*Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
di Desa Silalahi II Kecamatan Silalahisabungan*

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pekerjaan perpipaan air bersih, sering terjadi kendala lahan untuk jalur pipa di lapangan yang menyebabkan terganggunya progres pekerjaan.

Solusi :

Melaksanakan pendekatan dan dialog kepada masyarakat pemilik lahan bersama dengan aparat desa untuk mendapat persetujuan penggunaan lahan sebagai jalur pipa.

4. Indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen penting sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan kewilayahan. Kabupaten Dairi telah memiliki dokumen

dimaksud sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034. Disamping itu, untuk memperoleh acuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dan sekaligus mendukung pelaksanaan perizinan yang sudah terintegrasi melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditargetkan bisa tuntas untuk seluruh kecamatan sampai akhir periode Rencana Strategis Tahun 2024. Sesuai dokumen perencanaan, maka pada Tahun 2024 ditargetkan telah tersedia 1 (satu) dokumen RTRW dan 16 (enam belas) dokumen RDTR atau target sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perkembangan pemanfaatan ruang yang ada dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, maka telah dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 yang kemudian akan ditetapkan melalui legislasi perubahan dokumen RTRW, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, penetapan perubahan dokumen RTRW dimaksud belum dapat terselesaikan yang disebabkan masih adanya perbaikan pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kondisi ini juga menyebabkan tertundanya penyusunan RDTR yang ditargetkan ada untuk semua kecamatan atau 15 dokumen RDTR.

Dengan demikian maka persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang adalah sebesar 1 (satu) dokumen tata ruang yaitu RTRW dari target 16 (enam belas) dokumen tata ruang yang dibutuhkan atau sebesar 6,25%.

Permasalahan :

Muatan materi teknis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga harus dilakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen yang telah disusun untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan materi teknis Perubahan RTRW Kabupaten Dairi.

Solusi :

Untuk percepatan penyelesaian, telah dilakukan konsultasi serta dukungan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

5. Indikator Cakupan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan.

Pencapaian indikator ini diukur dari pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dalam setiap tahun anggaran yang mencakup penanganan pemasangan baru dan pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum (PJU). Pada program dimaksud dilaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengansub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

Hasil pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 114 unit dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak ±150 unit. Dengan terlaksananya pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya maka capaian indikator cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan diperoleh sebesar 100%.

Uraian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai indikator kinerja “Cakupan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
[-] Lanjutan Pembangunan Mess Kejaksaan Dairi
[-] Renovasi Kantor Pengadilan Negeri Sidikalang
[-] Rehabilitasi Gedung UPT Peralatan
[-] Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Dairi (Pembayaran KDP Tahun 2023)
[-] Pembangunan Rest Area Lae Pandom
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
[-] Pembuatan Reservoir Air Pemadam Kebakaran Pos Siaga Parongil
[-] Pembuatan Reservoir Air Pemadam Kebakaran Pos Siaga Tiga Lingga
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
[-] Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
[-] Pengadaan Bahan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)



Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum

6. Optimalisasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pencapaian indikator ini diukur dari pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi dalam setiap tahun anggaran yang mencakup sertifikasi tenaga terampil konstruksi. Pada program dimaksud dilaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

Dengan terlaksananya pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi maka capaian indikator optimalisasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diperoleh sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target capaian Tahun 2024 pada Rencana Strategis (2020-2024) sebesar 100% maka capaian indikator optimalisasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 20%.



Dokumentasi Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

7. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 486/648/VI/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Dairi, luas kawasan kumuh di Kabupaten Dairi adalah 684,41 Ha.



Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan penyediaan tangki septik individual, pemeliharaan/ rehabilitasi drainase, pembangunan baru rumah layak huni dan pembangunan/ peningkatan jalan lingkungan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Polling Anak-Anak, Kec. Silima Pungga-Pungga
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Gunung Meriah, Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Bukit Lau Kersik, Kec. Gunung Sitember
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Lau Lebah, Kec. Gunung Sitember
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Tupak Raja, Kec. Gunung Sitember
[-] Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK di Desa Harapan, Kec. Tanah Pinem
[-] Pembangunan Tanki Septik Perdesaan di Desa Lau Lebah Kec. Gunung Sitember (Penggunaan SILPA DAK 2023 Bidang Sanitasi)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
[-] Pembangunan Drainase Jl. Empat Tujuh Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Saluran Drainase Gang Proyek Jerman Dusun IV Desa Sitinjo II, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan Pedisterian/Plat Cover Jalan Ahmad Yani Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Puri Asri Lae Mbulan, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan Saluran Drainase Jalan di Desa Lae Hole 1 Siarung-arung, Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kuta Buluh Kec. Tanah Pinem
[-] Pembangunan Saluran Drainase pada Desa Juma Siulok Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Saluran Drainase Jalan BNKP, Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sudirman/Disamping GBKP, Kec. Sidikalang
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
[-] Pembangunan Drainase pengaman jalan di Jalan SM Raja Parongil Depan Ktr Camat)
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gang Sadar Tapian Nauli (Belakang Hasti Bengkel), Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Tigalingga, Kec. Tigalingga
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Sumbul, Kec. Sumbul
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Sidikalang Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Batang Beruh Kec. Sidikalang
[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Kuta Gambir dan Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang

[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam Kota Parongil , Kec. Silima Pungga-Pungga
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
[-] Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Dairi melalui pendanaan APBN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
[-] Lanjutan pengaspalan Jalan Menuju SD Lae Pinagar Desa Perjuangan
[-] Pembangunan Jalan di Jalan Air Bersih Lingkungan 3 Lae Mbulan Kelurahan Panji Dabutar
[-] Pembangunan Jalan di Jalan Multi Dusun 1 Desa Sitinjo II (Jln Menuju Rencana Pemb PUSTU)
[-] Pembangunan jalan lingkungan di dusun Juma Gunung Desa Bakal Julu
[-] Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Sigalingging Kelurahan Batang Beruh
[-] Pemeliharaan Jalan di Gg, Sepakat Jln, 45 Sidikalang
[-] Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Jalan Lae Gering Desa Bandar Selamat
[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju SMA Gunung Sitember
[-] Lanjutan Pengaspalan Jalan Empat Enam, Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Jalan Menuju Kalang Simbara, Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Jalan Menuju Sentra IKM, Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan Jalan Menuju TPA Bintang Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Agave, Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun 4 menuju Dusun 5 Ring Road SMA, Desa Silumboyah, Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun Amborgang Simanulang Desa Sosorlontung Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun I Menuju Kantor Desa Lae Hole 2 Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Dusun Lumban Julu-Dolok Najagar, Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Gunung Sitember Menuju SMP N Gunung Sitember, Kec. Gunung Sitember
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Komplek Centrum GKPPD Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Komplek Perumahan Puri Asri Sidikalang Lae Mbulan, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkar Pajak Sigalingging Kec. Parbuluan
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkungan Pasar Sumbul Kec. Sumbul
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkungan Rimo Bunga Kelurahan Bintang Hulu Kec. Sidikalang
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Masuk Terminal Sitinjo, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Gereja Bethel Parongil, Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Gereja HKBP Berampu, Kec. Berampu
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Gereja HKBP Lae Rambong, Kec. Silima Pungga Pungga
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Gereja HKBP Lumban Julu Desa Lae Sering, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Gereja HKI Desa Jambur Indonesia, Kec. Siempat Nempu Hilir
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Puskesmas Sitinjo, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Pustu Batangari Kec. Pegagan Hilir Dhi : Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju Pustu Batangari Kec. Sumbul
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju SDN 030364 Dusun Batu Dongkol Desa Sinampang, Kec. Siempat Nempu

[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Menuju SD Soban Kec. Siempat Nempu
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pada Desa Lumbanturuan (SMP Swasta Sempung) Kec. Lae Parira
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Simondor Ondor Menuju SD Negeri 030352 Sipali Pali Desa Pegagan Julu VII, Kec. Sumbul
[-] Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sitinjo I menuju Kantor Desa dan PAUD, Kec. Sitinjo
[-] Pembangunan/Pengaspalan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan pada Dusun IV Ingin Maju Desa Tambahan, Kec. Siempat Nempu Hulu
[-] Pembangunan/Pengaspalan/Pemeliharaan Jalan pada Dusun III Barisan Aritonang Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu
[-] Pemeliharaan Jalan Lae Gerat Kelurahan Panji Dabutar Kec. Sitinjo
[-] Pemeliharaan Jalan Lingkungan Basecamp Sidiangkat, Kec. Sidikalang
[-] Penataan Komplek Jalan Fraksi Kec. Sidikalang
[-] Pengaspalan Jalan Masuk Pustu Lau Meciho, Kec. Tanah Pinem
[-] Pengaspalan Jalan Sentra Pertanian dari SMP Negeri 2 Sungai Raya, Kec. Siempat Nempu Hulu

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 173,74 Ha dari total kawasan kumuh 684,41 Ha atau sebesar 25,39%.



*Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK
di desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu*

Permasalahan :

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan.

Solusi :

Untuk segera dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Cakupan Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Dairi merencanakan pembangunan jalan Bypass dan pelebaran jalan nasional di Perkotaan Sidikalang dan sekaligus pemindahan Jembatan Timbang dengan mekanisme tukar guling aset dengan Kementerian Perhubungan RI. Untuk kebutuhan dimaksud, maka perlu dilakukan pembebasan tanah untuk 3 (tiga) objek sebagai berikut :

- a. Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Nasional Sp. Salak (Kec. Sidikalang) - Sp. TWI (Kec. Sitinjo) Sep. 7,25 Km;
- b. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Bypass Sidikalang Sepanjang 9,2 Km;
- c. Pembebasan Tanah untuk Pemindahan Jembatan Timbang.

Untuk ketiga objek dimaksud, total tanah yang harus dibebaskan adalah 29,62 Ha dan pada kondisi awal perencanaan sudah tersedia tanah yang dibebaskan seluas 18,90 Ha.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaksanakan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan melalui Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot pada sub kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pembebasan tanah sebesar 19,24 Ha dari total tanah yang harus dibebaskan 29,64 Ha atau sebesar 64,91%. Bila dibandingkan dengan target capaian Tahun 2024 pada Rencana Strategis (2020-2024) sebesar 100% maka cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum belum memenuhi target.

Permasalahan :

Terdapat beberapa titik persil tanah yang belum dibebaskan karena penolakan dari pemilik tanah atas dasar ketidakcocokan harga ganti kerugian.

Solusi :

Dilakukan rapat koordinasi bersama unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas langkah-langkah penyelesaian hambatan dalam pembebasan tanah.

Capaian Indeks Infrastruktur Tahun 2020 sampai dengan 2024



Analisis program dan indikator program yang menunjang terdapat pencapaian Indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang memadai, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Program
Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Memadai

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	Panjang jaringan jalan yang ditingkatkan (km) dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten dikali 100	Persen	10,69	104,38	976,43
2		Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	Panjang jaringan jalan yang dibangun (km) dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten dikali 100	Persen	66,83	217,40	325,030
3		Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlahJembatan seluruhnya dikali 100	Persen	93,02	20,45	21,99
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (RT) dibagi rumah tangga seluruhnya (RT) dikali 100	Persen	89,98	5,30	5,89

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan	Jumlah rumah tangga dengan yang terlayani air bersih perpipaan (RT) dibagi rumah tangga seluruhnya (RT) dikali 100	Persen	84,82	35,33	41,65
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	Jumlah kawasan memiliki rencana tata ruang dibagi dokumen rencana tata ruang yang harus disediakan dikali 100	Persen	100,00	6,67	6,67
7		Persentase kawasan memiliki rencana rinci tata ruang	Jumlah kawasan memiliki rencana rinci tata ruang dibagi jumlah kawasan yang membutuhkan rencana rinci tata ruang dikali 100	Persen	100,00	6,67	6,67
8		Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang terkendali	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan dibagi jumlah kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi dikali 100	Persen	100,00	93,62	93,62
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100	Persen	3,00	3,00	100,00
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah permintaan fasilitas penyelenggaraan bangunan gedung dibagi jumlah layanan yang dilaksanakan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
12		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang tersedia dibagi jumlah bangunan pemerintah yang dibutuhkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase lampu jalan yang terpelihara (penerangan jalan umum)	Jumlah lampu jalan yang terpelihara dibagi jumlah lampu jalan seluruhnya dikali 100	Persen	90,00	63,33	70,37

No	Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	%
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase tenaga terampil konstruksi terlatih	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi dibagi jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi di wilayah Kabupaten dikali 100	Persen	72,00	20,00	27,78
15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana	Jumlah rumah layak korban bencana yang disediakan dan direhabilitasi dibagi Total Jumlah rumah layak korban bencana	Persen	100	100	100
16	Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit) dibagi jumlah rumah seluruhnya dikali 100	Persen	73,53	10,93	14,86
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan memadai	Jumlah lingkungan yang memiliki jalan lingkungan dibagi jumlah rumah kabupaten dikali 100	Persen	77,92	65,03	84,13
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase di wilayah perumahan dan permukiman	Panjang drainase jalan dibagi panjang jalan permukiman dikali 100	Persen	63,42	48,63	76,69
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang tersedia dibagi target sarana dan prasarana X 100 %	Persen	70,00	70,00	100,00
20		Cakupan layanan trayek	Jumlah penetapan tarif dibagi jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan perdesaan dikali 100 %	Persen	15,00	1,12	7,47
21		Persentase regulasi bidang perhubungan yang tersedia	Jumlah regulasi bidang perhubungan yang tersedia dibagi jumlah regulasi bidang perhubungan yang seharusnya ada	Persen	80,00	0	0

Pencapaian atas Sasaran yang yang memuat Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama)
Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Indikator
1	> 100	Sangat Berhasil	5
2	= 100	Berhasil	1
3	50 - < 100	Kurang Berhasil	5
4	< 50	Tidak Berhasil	0
	Jumlah		11

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama pada pemerintah Kabupaten Dairi pada tiap sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Kategori Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata- rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran	< 50	50 - < 100	= 100	> 100
				Tidak Berhasil	Kurang Berhasil	Berhasil	Sangat Berhasil
A	Misi 1						
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	1	112,97				Sangat Berhasil
B	Misi 2						
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	100,17				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	1	99,71		Kurang Berhasil		
4	Meningkatnya Standar Hidup	1	101,21				Sangat Berhasil
C	Misi 3						
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1	98,61		Kurang Berhasil		
D	Misi 4						
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	1	100			Berhasil	
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	1	87,22		Kurang Berhasil		
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	2	96,24		Kurang Berhasil		
9	Meningkatnya kemandirian desa	1	101,52				Sangat Berhasil
E	Misi 5						
10	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	1	94,82		Kurang Berhasil		
	Total	11	98,30				

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya

Pada Tahun 2024 merupakan target tahun ketiga Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang memuat memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan target dan realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Dairi tahun 2023 dengan tahun 2024

NO	TAHUN 2023					NO	TAHUN 2024					Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi 2023
	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian												
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,23	129,04	111,98	1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	130,10	146,97	112,97	Meningkat 17,93 poin (13,90%)
MISI II : Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing												
2	Indeks Pendidikan	Poin	69,27	69,93	100,95	2	Indeks Pendidikan	Poin	70,43	70,55	100,17	Meningkat 0,62 poin (8,09 %)
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,81	74,13	104,69	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,60	74,38	99,71	Meningkat 0,25 poin (0,34 %)
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp.(x1.000)	11.095,1	10.969	98,86	4	Pengeluaran Per Kapita	Rp.(x1.000)	11.219,5	11.355	101,21	Meningkat 286 (Rpx.1000) atau 3,40 %
MISI III : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah												
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,76	78,96	116,53	5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	79	77,90	98,61	Menurun 1.06 poin (1,34%)
MISI IV : Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan daerah.												
6	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B	B	100	6	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	BB	B	87,22	Meningkat sebesar 1.05 poin
7	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100	7	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Opini tetap WTP
8	Indeks SPBE	Poin	2,70	2.67	98,89	8	Indeks SPBE	Poin	3	2,69	89,67	Meningkat 0.02 poin (0,75 %)
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	77	87,11	113,13	9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,50	89,97	102,82	Meningkat 2.86 poin (3,28 %)
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0.63	0.65	103.17	10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,66	0,67	101,52	Meningkat 0.02 poin (3,08 %)
MISI V : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.												
1	Indeks Infrastruktur	%	51,16	61.49	120,19	11	Indeks Infrastruktur	%	63,35	60,07	94,82	Menurun 1,42 poin (2,31 %)

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Dairi telah berubah Nomenklatur Program dan kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disesuaikan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disesuaikan lagi berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi dengan total belanja Operasi Rp. 998.719.782.947,00,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 909.963.663.123,20,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,11%, Belanja Modal sebesar Rp. 144.429.549.430. sedangkan realisasi sebesar Rp. 130.216.588.940,88 sehingga persentase capaian sebesar 90,16%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.4.000.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 3.581.937.735 sehingga persentase capaian sebesar 89,55%, Belanja Transfer sebesar Rp 204.997.221.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 204.997.221.000 sehingga persentase capaian sebesar 100% sehingga total anggaran belanja sebesar Rp. 1.352.146.553.377,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.248.759.410.799,08 sehingga persentase realisasi keseluruhan sebesar 92,35%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024, komposisi belanja APBD Kabupaten Dairi, sebagai berikut :

Tabel
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024
(Kondisi unaudit BPK-RI, kondisi 17 Februari 2025)

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	PERSENTASE REALISASI
1	Belanja Operasi	998.719.782.947,00	909.963.663.123,20	91,11
2	Belanja Modal	144.429.549.430,00	130.216.588.940,88	90,16
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.581.937.735,00	89,55
4	Belanja Transfer	204.997.221.000,00	204.997.221.000,00	100,00
	Total Belanja Daerah	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 (periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024

Jika dilihat dari komposisinya, belanja transfer realisasinya paling besar yaitu sebesar 100% dari realisasi belanja Kabupaten Dairi di tahun 2024 dibandingkan dengan belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi per Sasaran Strategis Tahun 2024 yang langsung menyentuh/mengakomodir program dari setiap Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi
Per Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
Misi 1					
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	670.712.000,00	645.582.400,00	96,25
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	6.632.076.954,00	5.948.776.320,00	89,70
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat (Veteriner)	54.592.000,00	54.465.000,00	99,77
		Program penyuluhan pertanian	313.560.000,00	309.670.000,00	98,76
		Total	7.670.940.954,00	6.958.493.720,00	90,71
		Misi 2			
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pengelolaan Pendidikan	92.727.513.346,00	83.198.373.379,20	89,72
		Pendidik dan Tenaga kependidikan	202.865.000,00	100.082.187,00	49,33
		Program Pembinaan Perpustakaan	128.976.000,00	127.154.000,00	98,59
		Total	93.059.354.346,00	83.425.609.566,20	89,65
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.433.569.452,00	60.043.996.611,00	84,06
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.312.170.973,00	2.779.762.805,00	120,22
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	212.834.000,00	189.020.999,00	88,81
		Program Pemberdayaan	757.514.000,00	691.252.634,00	91,25

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Masyarakat Bidang Kesehatan			
		Pengendalian Penduduk	378.795.000,00	286.130.000,00	75,54
		Pembinaan Keluarga Berencana	4.652.409.700,00	3.225.570.150,00	69,33
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.371.219.170,00	1.399.210.000,00	59,01
		Total	82.118.512.295,00	68.614.943.199,00	83,56
4	Meningkatnya standar hidup	Pemberdayaan sosial	340.874.500,00	287.465.800,00	84,33
		Rehabilitasi Sosial	439.970.356,00	318.386.770,00	72,37
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.524.579.900,00	1.448.020.700,00	57,36
		Program Penanganan Bencana	143.160.000,00	135.550.000,00	94,68
		Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	161.913.000,00	142.573.145,00	88,06
		Perlindungan perempuan	20.760.000,00	16.854.000,00	81,18
		Pemenuhan Hak Anak	52.188.350,00	47.118.350,00	90,29
		Program perlindungan khusus anak	124.495.600,00	110.933.600,00	89,11
		Total	3.807.941.706,00	2.506.902.365,00	65,83
Misi 3					
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	245.125.000,00	98,05
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.611.656.415,00	901.467.665,00	19,55
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	200.751.498,00	196.004.220,00	97,64
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	186.427.000,00	169.704.000,00	91,03
		Program Pengelolaan Persampahan	2.679.340.968,00	2.489.080.068,00	92,90

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Total	7.928.175.881,00	4.001.380.953,00	50,47
Misi 4					
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.380.115.350,00	3.020.159.507,00	89,35
		Program perekonomian dan pembangunan	2.447.230.000,00	1.765.015.932,00	72,12
		Program urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	35.452.905.902,00	31.726.576.155,00	89,49
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	18.396.169.000,00	16.781.578.669,00	91,22
		Program penelitian dan pengembangan daerah	886.834.149,00	673.616.010,00	75,96
		Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	998.155.500,00	841.124.972,00	84,27
		Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	602.555.900,00	579.738.356,00	96,21
		Program pengembangan SDM	349.787.000,00	290.303.182,00	82,99
		Program kepegawaian daerah	885.452.000,00	505.114.640,00	57,05
		Total	63.399.204.801,00	56.183.227.423,00	88,62
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Program pengelolaan keuangan daerah	212.745.390.160,00	211.206.910.732,00	99,28
		Program pengelolaan barang milik daerah	1.067.152.000,00	1.009.079.538,00	94,56
		Program pengelolaan pendapatan daerah	1.339.996.330,00	1.337.303.764,00	99,80
		Program penyelenggaraan pengawasan	1.377.160.000,00	1.360.119.000,00	98,76
		Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	244.210.000,00	241.520.000,00	98,90
		Total	216.773.908.490,00	215.154.933.034,00	99,25

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.702.340.050,00	1.692.083.173,00	99,40
		Program Aplikasi Informatika	3.682.619.416,00	3.605.216.625,00	97,90
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	44.484.000,00	44.484.000,00	99,54
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	49.450.520,00	40.398.473,00	81,69
		Program pendaftaran penduduk	378.451.000,00	335.121.500,00	88,55
		Program pencatatan sipil	19.880.000,00	19.750.000,00	99,35
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.980.000,00	37.300.000,00	91,02
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2.268.325.550,00	2.183.409.600,00	96,26
		Program Pengelolaan Arsip	100.000.000,00	97.416.442,00	97,42
		Total	8.286.530.536,00	8.055.179.813,00	97,21
		9	Meningkatnya kemandirian desa	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum Adat	439.142.000,00
Program administrasi pemerintahan desa	3.257.594.604,00			3.157.215.722,00	96,92
Total	3.696.736.604,00			3.484.630.224,00	94,26
Misi 5					
10	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.393.756.835,00	9.047.136.190,88	96,31
		Program Penyelenggaraan Jalan	69.283.485.444,00	66.707.873.151,00	96,28
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.012.752.000,00	3.965.946.000,00	98,83

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.772.918.000,00	14.532.718.600,00	98,37
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	285.822.150,00	281.960.694,00	98,65
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	114.170.000,00	113.920.000,00	99,78
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	-	-	-
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.851.314.411,00	1.516.185.911,00	81,91
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	991.981.850,00	900.418.700,00	90,77
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.900.000,00	37.257.650,00	73,20
		Program Pengembangan Perumahan	91.110.000,00	85.835.800,00	94,21
		Program Kawasan Permukiman	7.241.000,00	7.241.000,00	100,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.564.513.450,00	5.508.538.000,00	98,99
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.210.916.800,00	3.157.805.605,00	98,34
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	332.664.126,00	327.092.900,00	98,33
		TOTAL	109.963.546.066,00	106.189.930.201,88	96,57
	Total seluruh Sasaran (IKU)		596.704.851.679,00	554.575.026.499,08	
	Persentase realisasi				92,94

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2024. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Dairi yang langsung menyentuh Indikator

Kinerja Utama, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Jumlah Program	Anggaran	
					Realisasi (Rp.)	%
A	MISI 1					
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	1	112,97	5	6.958.493.720,00	90,71
	Rata-Rata Capaian Misi 1		112,97			
B	MISI 2					
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	100,17	3	83.425.609.566,20	89,65
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	1	99,71	7	68.614.943.199,00	83,56
4	Meningkatnya Standar Hidup	1	101,21	8	2.506.902.365,00	65,83
	Rata-Rata Capaian Misi 2		100,36			
C	MISI 3					
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1	98,61	5	4.001.380.953,00	50,47
	Rata-Rata Capaian Misi 3		98,61			
D	MISI 4					
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	1	100	9	56.183.227.423,00	88,62
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	1	87,22	5	215.154.933.034,00	99,25
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informatika	2	96,24	9	8.055.179.813,00	97,21
9	Meningkatnya kemandirian desa	1	101,52	2	3.484.630.224,00	94,26
	Rata-Rata Capaian Misi 4		96,24			
E	MISI 5					
10	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	1	94,82	15	106.189.930.201,88	96,57
	Rata-rata Capaian Misi 5		94,82			
	Rata-rata persentase capaian/realisasi		98,97		554.575.026.499,08	92,94

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap dalam pencapaian kinerja sasaran yang langsung menyentuh Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi.

Analisa Efisiensi

Pada analisis Efisiensi menghitungnya dengan menggunakan pendekatan perhitungan efisiensi tingkat satuan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/MK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran, yang pencapaian kinerjanya mencapai 98,97% sedangkan persentase penyerapan/realisasi realisasi anggaran yang langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 92,94% sehingga terdapat efisiensi sebesar 6,03%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pencapaian sasaran yang berhasil dicapai dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya anggaran yang efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis (PK)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	HASIL PERKALIAN CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan			
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	130,10	146,97	112,97%	7.670.940.954	6.958.493.720	90,71%	24,5%	8.665.627.917	1.707.134.197
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	70,43	70,55	100,17%	93.059.354.346	83.425.609.566	89,65%	11,7%	93.217.910.679	9.792.301.113
3	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup	74,60	74,38	99,71%	82.118.512.295	68.614.943.199	83,56%	19,3%	81.876.339.739	13.261.396.540
4	Meningkatnya standar hidup	Pengeluaran Per kapita	11.219,50	11.355,00	101,21%	3.807.941.706	2.506.902.365	65,83%	0,0%	3.853.930.930	1.347.028.565
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,00	77,90	98,61%	7.928.175.881	4.001.380.953	50,47%	95,4%	7.817.783.559	3.816.402.606
6	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	B	87,22%	63.399.204.801	56.183.227.423	88,62%	-1,6%	Inefisiensi	
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih	Opini BPK	WTP	WTP	100%	216.773.908.490	215.154.933.034	99,25%	0,8%	216.773.908.490	1.618.975.456
8	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,00	2,69	89,67%	5.478.893.986	5.381.978.271	98,23%	0,0%	Inefisiensi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,500	89,97	102,82%	2.807.636.550	2.672.997.542	95,20%	8,0%	2.886.892.119	213.894.577
9	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,660	0,67	101,52%	3.696.736.604	3.484.630.224	94,26%	7,7%	3.752.747.765	268.117.541
10	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	63,350	60,07	94,82%	109.963.546.066	106.189.930.202	96,57%	-1,8%	Inefisiensi	
RATA-RATA					98,97	596.545.778.479	554.575.026.499	92,94%	6,03%		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- 1) Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Jenis SPM Daerah Kabupaten terdiri atas:

1. SPM Pendidikan.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Pendidikan anak usia dini.
 - 2) Pendidikan dasar.
 - 3) Pendidikan kesetaraan.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- c. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan:
 - 1) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
 - 2) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar.
 - 3) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4) Pelayanan kesehatan balita;
 - 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis.
 - 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Penerima pelayanan dasar:

- 1) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil.
- 2) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- 3) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- 4) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita.
- 5) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- 7) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- 8) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- 9) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
- 10) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- 11) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- 12) orang dengan risiko terinfeksi virus HIV untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV.

3. SPM Pekerjaan Umum.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum yaitu setiap warga negara.

4. SPM Perumahan Rakyat.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Penerima pelayanan dasar:
 - 1) Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - 2) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2) Pelayanan informasi rawan bencana.
 - 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penerima pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - 1) Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten dan peraturan kepala daerah kabupaten.
 - 2) Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 3) Yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial.

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
 - 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan:
 - 1) Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
 - 2) Anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
 - 3) Lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
 - 4) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
 - 5) Korban bencana kabupaten untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					78.64%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					60.11%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	52.06%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11120	7237	3883	65.08%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.05%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	40.24%	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	75.44	24.56	75.44%	
	2. Angka partisipasi murni	%	100	42.55	57.45	42.55%	
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	37.76	64.49	-26.73	100.00%	
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	51.05	48.95	51.05%	
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0.005	99.995	0.01%	
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	90	10	90.00%	

	7 . Indeks distribusi guru	%	100	0	100	0.00%	
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	2.89	97.11	2.89%	
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	0.25	99.75	0.25%	
2 .	Pendidikan Dasar					93.28%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.53%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		39.507	38.286	1.221	96.91%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.75%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	78.76%	
	SD					80.58%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	96.44	3.56	96.44%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.91	3.09	96.91%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	76.2	76.2	0	100.00%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	73.26	73.26	0	100.00%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	10	9.66	0.34	96.60%	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	17	16.01	0.99	94.18%	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	86.28	13.72	86.28%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	85.07	14.3	85.70%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	68.82	31.18	68.82%	
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	100	0	10.47	89.53%	

	11 . Indeks distribusi guru	%	100	94.91	5.09	94.91%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	37.93	62.07	37.93%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	100	0.25	99.75	0.25%	
	SMP						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	95.23	4.77	95.23%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	74.94	25.06	74.94%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	74.06	74.06	0	100.00%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	69.95	69.95	0	100.00%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00%	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00%	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.26	71.43	2.83	96.19%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	75.07	24.93	75.07%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	58.71	41.29	58.71%	
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00%	
3 .	Pendidikan Kesenjangan					82.53%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.60%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		300	246	54	82.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.93%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.65%	

			Dilayani / Dipenuhi	Terpenuhi			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	0.25	99.75	0.25%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	0.16	99.84	0.16%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	100.00%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	100.00%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00%	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	100.00%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	100.00%	
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00%	

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. DAIRI				0	0	0.00%
1	Program Pengelolaan Pendidikan				0	0	0.00%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			0	0	0.00%

		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1,227,044,000	1,194,334,500	97,33%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	935,591,100	918,306,600	98,15%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	696,112,000	685,159,200	98,43%
		4	Pembanguna Perpustakaan Sekolah	Ruang			0%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	875,313,500	609,849,200	69,67%
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit			0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			0%
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			0%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang			0%
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang			0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	897,333,000	398,528,500	44,41%

		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket			0%
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket			0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik			0%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	413,042,000	406,802,000	98,46%
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	392,918,800	268,565,900	68,35%
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang			0%
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	426,293,000	238,738,400	56,00%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	194,587,500	130,359,200	66,99%
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	35,325,921,169	35,225,530,000	99,72%
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	293,945,400	253,311,750	86,18%

		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1,390,135,000	1,366,088,000	98,27
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang			0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit			0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang			0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		202,092,626	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Konten Digital		272,071,600	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	271,934,000	118,864,400	43,71%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	264,728,000	198,174,000	74,86%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	78,548,800	64,281,400	81,84%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	46,326,500		0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket			0%

		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	136,389,000	101,506,500	74,42%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang			0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku			0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			0%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	899,506,200	879,926,900	97,82%
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,301,474,060	116,073,000	8,92%
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	85,908,900	79,982,900	93,10%
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	110,353,200	97,312,500	88,18%
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5,474,129,550	2,265,615,100	41,39%
	JUMLAH INDIKATOR						0.00%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647					0.00%

		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	99,000,000	98,740,000	99,47%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,294,751,600	1,283,241,600	99,11%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	735,049,600	731,571,400	99,53%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang			0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1,655,187,600	1,640,948,600	99%
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang			0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit			0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit			0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit			0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit			0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	576,871,070	120,230,500	20,84%

		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang			0%
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	120,230,500		0%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang			0%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang			0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit			0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit			0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit			0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	116,66,1200	116,096,200	99,52%
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	352,771,100	152,821,100	43,32%
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket			0%

		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket			0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik			0%
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket			0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket			0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	332,248,800	289,818,668	87,23%
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang			0%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang			0%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan			0%
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	24,561,560,000	24,541,560,000	0%

		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang			0%
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang			0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang			0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit			0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang			0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang			0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital		115,385,900	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	175,275,000		0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			0%
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen			0%

		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	35,652,221		0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan			0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	117,226,600	113,356,600	96,69%
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	0%
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	-	-	0%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	0%
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	-	-	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	386,168,100	385,050,100	99,71%

	JUMLAH INDIKATOR						0.00%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412					0.00%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	349,365,400	347,957,100	99,60%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	-	-	0%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	-	-	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	-	-	0%
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	-	-	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	-	-	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	-	-	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	54,764,000	54,077,000	98,74%
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	-	-	0%

		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	-	-	0%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	230,481,900	-	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	-	186,595,000	0%
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	2,300,660,884	2,039,569,417	88,65%
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	-	-	0%
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	-	-	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	-	-	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	0%

		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	-	-	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	0%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	-	-	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	0%

		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	-	-	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	0%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	0%
	JUMLAH INDIKATOR						0.00%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			-	-	0.00%
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	-	-	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	-	-	0%

		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	-	-	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	0%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	116,311,500	76,550,000	65,81%
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	150,620,000	130,950,000	86,94%
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	0%
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	-	-	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	0%

		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	-	-	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	0%

		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	-	-	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	-	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	-	-	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	0%

		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	92,226,000	92,226,000	100%
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	-	-	0%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	-	-	0%
	JUMLAH INDIKATOR						0.00%
	JUMLAH PROGRAM						0.00%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				88,472,841,789	84,337,552,443	95.33%
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			38,281,743,665	38,281,743,000	100.00%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun	Peserta didik	108,799,607	108,799,000	100.00%

			yang tidak bersekolah				
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	36,942,784,058	36,942,784,058	100.00%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	138,931,000	138,931,000	100.00%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	1,091,229,000	1,091,229,000	100/00%
	JUMLAH INDIKATOR				38,281,743,665	38,281,743,000	100.00%
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			160,610,000	160,610,000	100.00%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	160,610,000	160,610,000	100.00%
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				160,610,000	160,610,000	100.00 %
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket			47,563,678,944	44,503,504,890	93.57%

		A/Paket B)					
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	504,392,900	504,392,900	100.00%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0		0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	9,044,857,632	9,044,300,000	99.99%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	38,014,428,412	34,954,811,990	91.95%
	JUMLAH INDIKATOR				47,563,678,944	44,503,504,890	93.57 %
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			2,466,809,180	1,391,694,553	56.42 %

		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	2,466,809,180	1,391,694,553	56.42 %
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	-	-	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	-	-	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	-	-	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	-	-	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	-	-	0%

	JUMLAH INDIKATOR				2,466,809,180	1,391,694,553	56.42 %
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			1,480,000,000	1,480,000,000	100.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				88,472,841,789	84,337,552,443	95.33 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				863,242,000	863,242,000	100.00 %

	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			133,456,850	133,456,850	100.00 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	0%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	133,456,850	133,456,850	100.00%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				133,456,850	133,456,850	133,456,850
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			0	0	0%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%

	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			729,785,150	729,785,150	100.00 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	55,159,000	55,159,000	100.00%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	518,737,150	518,737,150	100.00%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	155,889,000	155,889,000	100.00%
	JUMLAH INDIKATOR				729,785,150	729,785,150	100.00 %

	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0.00%

		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				863,242,000	863,242,000	100.00 %

B. URUSAN KESEHATAN

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			93.66%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					94.53%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.65%
	Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	3,804	3,597	207	94.56%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.88%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	94.56%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	18,717	14,391	4,326	75.89%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	1,123,020	863460	259560	76.89%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan,	Orang	3,804	3,597	207	94.56%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB,	Paket	3,804	3,597	207	94.56%

5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3,804	3,597	207	94.56%
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	3,804	3,597	207	94.56%
7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3,804	3,597	207	94.56%
8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3,804	3,597	207	94.56%
9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,804	3,597	207	94.56%
10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3,804	3,597	207	94.56%
11. Gel USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	415	415	0	100.00%
12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	26	26	0	100.00%
13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	225	225	0	100.00%
14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	310	310	0	100.00%

	15.Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	16.Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
	17.Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3,804	3,597	207	100.00%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99.46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	99.46%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3,804	3,781	23	99.40%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.95%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	99.73%
	1. Formulir Partograf	Formulir	3,804	3,781	23	99.40%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	3,804	3,781	23	99.40%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,804	3,781	23	99.40%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi	Paket	3,804	3,781	23	99.40%

	(KIE)					
	1. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	25	25	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					97.59%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.86%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3,807	3,705	102	97.32%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.27%
			Jumlah yang Harusdilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belumterlayani	98.66%
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3,807	3,705	102	97.32%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	3,807	3,705	102	97.32%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	3,807	3,705	102	97.32%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	3,807	3,705	102	97.32%

	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	3,807	3,705	102	97.32%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,807	3,705	102	97.32%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3,807	3,705	102	97.32%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	26	26	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	31	31	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	5,858	5,858	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					94.96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.24 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	20,921	22,135	5,429	80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.82 %
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	71.97%

1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrument standar lain yang berlaku	Dokumen	20,921	19,985	936	95.53%
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	20,921	19,985	936	95.53%
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20,921	19,985	936	95.53%
4.	Vitamin A Biru	Kapsul	20,921	19,985	936	95.53%
5.	Vitamin A Merah	Kapsul	20,921	19,985	936	95.53%
6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	81,774	81,774	0	100.00%
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	20,921	19,985	936	95.53%
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	20,921	19,985	936	95.53%

	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	18	18	0	100.00%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	18	18	0	100.00%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	26	26	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00 %
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00 %
	20. Guru PAUD	Orang	0	0	0	0%
	21. Kader Kesehatan	Orang	5,858	5,858	0	100.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					89.72%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.58%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	58,520	55,286	3,234	94.27%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.14%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	70.69%
	1. Buku raport kesehatanku	Buku	58,520	55,286	3,234	94.47%

2. Buku pemantauan kesehatan	Buku	58,520	55,286	3,234	94.47%
3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	58,520	55,286	3,234	94.47%
4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	58,520	55,286	3,234	94.47%
5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	58,520	55,286	10,050	94.47%
6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri	Tablet	2,774,356	0	2,774,356	0.00%
7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	18	18	0	100.00%
8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	53,353	0	53,353	0.00%
9. Media promosi kesehatan	Paket	18	18	0	100.00%
10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	0	0	0	0.00%
11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	28	28	0	100.00%
12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	Orang	0	0	0	0.00%

	kualifikasi tertentu : Guru					
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	0	0.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					83.37%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.86%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	164,712	137,663	27,049	83.58%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.51%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	82.56%
	1. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	18	18	0	100.00 %
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	18	18	0	100.00 %
	3. Alat : Tensimeter	Unit	18	18	0	100.00 %
	4. Alat : Glukometer	Unit	164,712	137,663	27,049	83.58%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	356	356	0	100.00 %
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	164,712	137,663	27,049	83.58%

	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	164,712	137,663	27,049	83.58%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	164,712	137,663	27,049	83.58%
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	164,712	137,663	27,049	83.58%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	164,712	137,663	27,049	83.58%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	0.00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	164,712	137,663	27,049	83.58%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	164,712	137,663	27,049	83.58%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	23	23	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	31	31	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					95.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.35%

	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	34,206	33,071	1,135	96.68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.47 %
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	77.37 %
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	36	36	0	100.00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	34,206	33,071	1,135	96.68%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	34,206	33,071	1,135	96.68%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	34,206	33,071	1,135	96.68%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	34,206	33,071	1,135	96.68%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	34,206	33,071	1,135	96.68%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	23	310	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%

	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					96.96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	74,732	54,221	-54146,286	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.96%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	84.81%
	1. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	18	0	18	0.00%
	2. Obat Hipertensi	Paket	74,732	54,221	20,511	72.55%
	3. Tensimeter	Unit	36	36	0	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	74,732	54,221	0	72.55%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	74,732	54,221	0	72.55%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	23	23	0	100.00%

	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	18	18	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	32	32	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,451	2,451	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	81.04%
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	2,451	2,451	0	100.00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	2,451	2,451	0	100.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah	Unit	2,451	2,451	0	100.00%

	dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet					
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	2,451	2,451	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2,451	2,451	0	100.00 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	23	23	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	10.Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	18	18	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					84.92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.43%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	402	374	28	93.03%

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.49%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	52.46%
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	18	18	0	100.00%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	402	374	28	93.03%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan penyediaan melalui aplikasi	Formulir	402	374	28	93.03%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	402	374	28	93.03%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	402	374	28	93.03%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23	0	23	0.00%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	0	0	0	0.00%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	0	0	0	0.00%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0	0.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	6,920	6,920	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	100.00%
	1. Media promosi komunikasi informai dan edukasi (KIE)	Paket	18	18	0	100.00%
	2. Reagen Zn TB	Kit	6,920	6,920	0	100.00%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	6,920	6,920	0	100.00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan HabisPakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	6,920	6,920	0	100.00%
	5. Catridge tes cepat molekuler	Test	6,920	6,920	0	100.00%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	6,920	6,920	0	100.00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	18	18	0	100.00%
	8. Tuberkulin	Vial	6,920	6,920	0	100.00%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit	Orang	26	26	0	100.00%

	dalam/dokter spesialis paru					
	10.Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	11.Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18	0	100.00%
	12.Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
	13.Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	18	18	0	100.00%
	14.Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	5	5	0	100.00%
	15.Kader Kesehatan	Orang	5,858	5,858	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					86.87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.65%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	8,679	7,556	1,123	87.06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.22%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	77.52 %
	1. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Media	18	18	0	100.00%

	2. Tes cepat HIV (Rapid Diagnostic Test) pertama	Test	8,679	7,556	1,123	87.06%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	8,679	7,556	1,123	87.06%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	8,679	7,556	1,123	87.06%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	36	63	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	310	310	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	225	225	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	18	18	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	31	31	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	0.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DAIRI				3,673,289,400	3,133,364,124	85.30%

1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3,673,289,400	3,133,364,124	85.30%
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3,673,289,400	3,133,364,124	85.30%
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang		1,067,698,000	1,037,186,551	97.14%
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang		303,212,000	262,541,792	86.59%
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang		172,029,600	152,521,400	88.66%
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang		100,000,000	86,180,844	86.18%
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang		363,915,000	346,814,000	95.30%
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang		100,000,000	85,237,000	85.24%
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang		100,000,000	90,924,000	90.92%
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang		150,000,000	133,169,000	88.78%
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang		434,780,000	127,649,000	29.36%
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang		80,000,000	48,818,000	61.02%
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang		687,334,800	664,498,639	96.68%
	12	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang		114,320,000	97,823,898	85.57%

	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB)	Dokumen	-	-	0%
	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	-	-	0%
	JUMLAH INDIKATOR			3,673,289,400	3,133,364,124	85.30%
	JUMLAH PROGRAM			3,673,289,400	3,133,364,124	85.30%

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					56.21%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					27.55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20.00%

	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	7.656	1.914	5.742	25.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7.55%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	37.75%
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	93.63	30.799	62.831	32.89%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	93.63	30.799	62.831	32.89%
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok	Rumah Tangga	93.63	39.885	53.745	42.60%

	minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM					
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	93.63	39.885	53.745	42.60%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					84.87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.228	322	-320.772	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.87%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	24.33%

	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	83.841	4.973	78.868	5.93%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	93.63	1	92.63	1.07%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan	Rumah Tangga	93.63	61.796	31.834	66.00%

	bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					
--	---	--	--	--	--	--

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DAIRI				18.785.670.000	18.498.448.600	98.47%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				14.532.718.600	14.532.718.600	98.37%
	1				14.532.718.600	14.532.718.600	98.37%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%

		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggaraan SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggaraan SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%

		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	12,652,050,000	12,526,720,000	99.01%

		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	2,120,860,000	2,005,998,600	94.58%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				14,772,910,000	14.532.718.600	98.37%
	JUMLAH PROGRAM				14,772,910,000	14.532.718.600	98.37%

2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.012.752.000	3.965.730.000	98.37%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234			4.012.752.000	3.965.730.000	98.37%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0%		
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air	Kelompok Masyarakat	0	0	0%

			Limbah Domestik				
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan	Unit	0	0	0%

			Tertentu				
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	4.012.752.000	3.965.730.000	98.83%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	M ³ /Hari	0	0	0%

			Permukiman Berbasis Masyarakat				
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Penyediaan Sarana	M ³ /Hari	0	0	0%

			Pengangkutan Lumpur Tinja				
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4.012.752.000	3.965.730.000	98.83%
	JUMLAH PROGRAM				4.012.752.000	3.965.730.000	98.83%

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			90.00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		<u>1</u>	1	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		-20%			20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	100.00%
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00%
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					80.00%
	Ada Relokasi Program Pemerintah					

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :		1	1	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		-20%			0.00%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					0.00%
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0.00%
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	0.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DAIRI				0	0	0.00%

1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0	0	0.00%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0.00%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348				0	0	0.00%
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		0	0	0.00%
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0.00%
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha		0	0	0.00%
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		0	0	0.00%
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		0	0	0.00%
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		0	0	0.00%
	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		0	0	0.00%
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		0	0	0.00%
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		0	0	0.00%
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah		0	0	0.00%

		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0.00%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				0	0	0.00%

E. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			96.67%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%

			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		4	4	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		-20%			16.67%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	83.33%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	183	183	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	13	13	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	27	27	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap	Dokumen	0	0	0	0 %

	pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)					
	5. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	0%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			32.09%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					8.73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	4.76%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		38,000	2,259	35,741	5.94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					3.97%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	19.86%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	0.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	37,500	1,887	35,613	5.03%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	500	372	128	74.40%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0	0.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					9.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		126	0	126	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.40%

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	47.00%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	200	188	12	94.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	200	0	200	0.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					78.13%
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		200	172	28	86.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		-20%			9.33%%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang Jasa Yang	Jumlah Mutu Barang Jasa Yang	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum	46.67%

			Dibutuhkan	Tersedia	Tersedia	
	1. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	100	172	-72	100.00%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	1	2	33.33%
	4. Respon Cepat kejadian luarbiasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	0.00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	100	0	100	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / JenisLayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			63.77%
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					63.77%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	53.77%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		122	82	40	67.21%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			10.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	20	9	11	45.00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	0.00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil	Unit	69	176	-107	100.00%

	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	82	82	0	100.00%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	0.00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	20	11	9	55.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DAIRI				4,028,380,900	3,481,291,285	86.42%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,175,487,900	1,018,797,100	86.67%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			830,000,000	748,118,000	90.13%

		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	360,00,00	339,866,000	94.41%
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%

		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%

		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	470,000,000	408,252,000	86.86%
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	Jumlah Indikator				830,000,000	748,118,000	90.13%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			345,487,900	270,679,100	78.35%

		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	80,487,900	68,111,600	84.62 %
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%

		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	345,487,900	270,679,100	78.35%
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	Jumlah Indikator				345,487,900	270,679,100	78.35%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00%
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier	Laporan	0	0	0%

			PPNS				
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM				1,175,487,900	1,018,797,100	86.67%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,650,743,500	1,316,290,981	79.74%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			280,840,500	279,066,481	99.37%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	280,840,500	279,066,481	99.73%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
	Jumlah Indikator				280,840,500	279,066,481	99.37%
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			155,433,000	155,148,500	99.82 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk	Kawasan	0	0	0%

			pencegahan dan kesiapsiagaan				
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	155,433,000	155,148,500	99.82%
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan	Laporan	0	0	0%

			Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
	Jumlah Indikator				155,433,000	155,148,500	99.82%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1,138,980,000	808,386,000	70.97%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	276,999,520	85,450,000	56.95%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	111,600,000	110,382,000	100.00%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%

	Jumlah Indikator			1,138,980,000	808,386,000	70.97%
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			75,490,000	73,690,000	97.62%
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub	Dokumen	0	0	0%

			Urusan Bencana Kabupaten/Kota				
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	75,490,000	73,690,000	97.62%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				75,490,000	73,690,000	97.62%
	JUMLAH PROGRAM				1,650,743,500	1,316,290,981	79.74%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1,202,149,500	1,146,203,204	95.35 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,202,149,500	1,146,203,204	95.35%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian	Dokumen	870,422,500	855,038,004	98.23%

			kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota				
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dokumen	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Unit	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%

		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	331,727,000	291,165,200	87.77%
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	Jumlah Indikator				1,202,149,500	1,146,203,204	95.35%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%

	Jumlah Indikator			0	0	0%
10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00%
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	Jumlah Indikator			0	0	0%
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	0	0.00%
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	Jumlah Indikator			0	0	0%
12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0.00%
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%

	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM			1,202,149,500	1,146,203,204	95.35%

F. URUSAN SOSIAL

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA	60.46%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			61.76%

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	48.80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:		100	61	39	61.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.96%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	64.81%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5	17	-12	100.00%
	2. Penyediaan Permakanan	Orang	40	10	30	25.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan / Layanan reaksi cepat	Orang	15	18	-3	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	40	10	30	25.00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	46	46	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan Sosial	Orang	40	29	11	72.50%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	20	29	-9	100.00%

	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	40	15	25	37.50%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	2	3	40.00%
	13. Layanan rujukan	Orang	40	17	23	42.50%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					77.93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.60%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:		50	41	9	82.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	61.67%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5	4	1	80.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	53	-48	100.00 %

	3. Penyediaan permakanaan	Orang	5	0	5	0.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	5	3	2	60.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	0	5	0.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	20	-15	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	5	10	-5	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Layanan rujukan	Orang	5	8	-3	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					84.62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	• Jumlah yang Harus Dilayani:		150	150	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.62%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	23.08%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5	0	5	0.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	0	5	0.00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	5	0	5	0.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	5	0	5	0.00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0	0.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	0	0	0	0.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00%
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%

	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	13. Layanan rujukan	Orang	0	0	0	0.00%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					0.00 %
	Tidak ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	0.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					0.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	1	1	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00%

	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Belum	Belum	0	0%
	12. Layanan rujukan	Orang	Belum	Belum	0	0%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					78.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:		326	326	0	87.50
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00%
			Jumlah yang Harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	40.00%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	300	438	-138	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	Orang	10	80	-70	100.00 %

	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0	0.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0	0.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0	0.00%

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DAIRI				1,188,070,356	615,830,070	51.83%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				553,070,356	431,085,070	77.94%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			553,070,356	431,085,070	77.94%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	113,100,000	112,698,300	99.64%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	89,460,000	76,850,000	100.00 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%

		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	350,510,356	241,536,770	68.91%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				553,070,356	431,085,070	77.94%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			0	0	0.00 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00%

	JUMLAH PROGRAM	553,070,356	431,085,070	77.94%
--	----------------	-------------	-------------	--------

BAB V

PENUTUP

Penyampaian LPPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus sebagai alat untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

LPPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai rangkuman dari pelaksanaan seluruh kegiatan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi selama Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rangkaian kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya ini menggambarkan upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meskipun telah berupaya sedaya mampu, Pemerintah Kabupaten Dairi menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024, masih ditemukan berbagai hambatan dan ketidaksempurnaan. Hal ini lebih disebabkan berbagai keterbatasan dalam sumber daya baik personil, peralatan maupun pembiayaan sehingga pencapaian target dari indikator sasaran belum seluruhnya dapat terpenuhi. Demikian juga beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, seperti cuaca dan kondisi alam. Kesemuanya ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi perumusan kebijakan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah ke depan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan upaya inovasi, kreasi dan terobosan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan serta menyempurnakan berbagai sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kabupaten Dairi juga tetap mengharapkan tumbuhnya komunikasi dan kerja sama yang baik dari semua *stake holder* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi ini kami perbuat dan sampaikan, seraya mengharapkan saran dan kritik baik atas penyusunan LPPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 ini demi perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam mengemban tugas pengabdian guna mewujudkan Dairi unggul.

Terima kasih, Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

BUPATI DAIRI,

Ir. VICKNER SINAGA, M.M

PELAPORAN IKK 2024
KABUPATEN DAIRI

Tanggal Cetak 27-03-2025 17:11

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	PEMDA		Status	APIP	
								File Bukti	Diperbarui		Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat	57.742249		Ada	2025-03-25	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 37934. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 39740	95.455461		Ada	2025-03-19 11:01:06	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 13:59:38
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 17357. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 21761	79.76196		Ada	2025-03-25 15:02:02	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:38:52

1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkap dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 277. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1781	15.55306	Ada	2025-03-25 15:02:41	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 14:02:56
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 231. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 333335	0.6929965	Ada	2025-03-25 15:03:11	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:44:02
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat akreditasinya	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2. Jumlah RS di kabupaten/kota = 2	100	Ada	2025-03-25 15:03:32	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:45:51
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 3851. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 4413	87.264899	Ada	2025-03-25 15:03:49	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:46:37
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 3804. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 3804	100	Ada	2025-03-25 15:04:03	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:47:21
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 3705. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 3807	97.320725	Ada	2025-03-25 15:04:19	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 07:48:40
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 19422. Jumlah balita di kabupaten/kota = 19422	100	Ada	2025-03-27 07:52:49	OK	Sesuai data dukung	2025-03-27 09:37:55
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 19885. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 61501	32.332808	Ada	2025-03-25 15:05:05	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 08:22:20
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 137663. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 210509	65.395304	Ada	2025-03-25 15:05:20	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 08:26:54
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 33071. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 37850	87.373844	Ada	2025-03-25 15:05:34	OK	Sesuai data dukung.	2025-03-26 13:54:36
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 54221. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 74732	72.553926	Ada	2025-03-25 15:05:53	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 08:30:09

[illegible]

I.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota &	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 865.77. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1605.29	53.932311	Ada	2025-03-27 14:47:13	OK	Sesuai data dukung.	2025-03-27 14:53:26
I.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi &	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 20. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 50	40	Ada	2025-03-27 14:51:27	OK	Sesuai data dukung	2025-03-27 14:53:44
I.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 0. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 0	0 Tidak terdapat proyek yang menjadi kewenangan pengawasan Kabupaten Dairi yang menyebabkan kecelakaan Surat Keterangan	Ada	2025-03-27 11:07:23	OK	Surat Keterangan Pimpinan Perangkat Daerah	2025-03-27 11:53:56

[illegible]

[illegible]

I.e.7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10	Ada	2025-03-25 15:21:08	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:15:19
I.f.1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	 Persentase (%) penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 397. Populasi penyanggand disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 402	98.756219	Ada	2025-03-25 15:13:17	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:16:38
I.f.2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 442. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 442	100	Ada	2025-03-21 12:15:09	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 14:25:48
2.a.1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 0. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 1	0 Tidak tersedia anggaran dalam penyusunan RTKD	Ada	2025-03-20 08:51:14	OK	Surat Keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah	2025-03-26 09:18:20
2.a.2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikatkompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 350. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 196244	0.1783494 Keterbatasan anggaran	Ada	2025-03-21 11:49:43	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 14:29:36
2.a.3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 12693880000000. Jumlah tenaga kerja = 196244	6.468E+09	Ada	2025-03-20 09:21:36	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 14:33:02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 4. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 121	3.3057851	Ada	2025-03-21 12:27:13	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 15:01:04
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 	TFR (Angka Kelahiran Total)		3.0105	Ada	2025-03-25 15:59:17	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:25:44
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 17732. Jumlah Pasangan Usia Subur = 34225	51.81008	Ada	2025-03-25 15:37:28	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:26:42
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 6496. Jumlah Pasangan Usia Subur = 34225	18.980278	Ada	2025-03-25 15:38:54	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:27:35
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota 	Rasio konektivitas kabupaten/kota		45.61	Ada	2025-03-26 15:36:04	OK	Sesuai data dukung	2025-03-27 09:50:37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -84. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 677	-12.40768	Ada	2025-03-25 16:08:36	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 16:22:37
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -13243. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 264865	-4.999906	Ada	2025-03-25 16:09:15	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 16:23:19
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Tingkat hunian akomodasi 	Jumlah kamar yang terjual = 35176. Jumlah kamar yang tersedia = 214620	16.389898	Ada	2025-03-25 16:58:57	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:33:19

3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 32458000000. Total PDRB Berlaku = 12693880000000 	2.5569802 Sesuai pedoman, akomodasi, makan dan minum adalah penyangga PDRB sektor pariwisata	Ada	2025-03-25 17:25:44	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:34:08
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 4079767864. Total realisasi PAD = 100411235107.57 	4.0630591	Ada	2025-03-25 17:21:41	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 09:38:41
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per hektar per tahun 	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 433152.7. luas panen = 68016.05 	636.83895	Ada	2025-03-26 17:25:11	OK	Sesuai data dukung.	2025-03-27 09:51:18
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota 	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 16. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 52 	30.769231	Ada	2025-03-26 17:30:04	OK	Sesuai data dukung.	2025-03-27 09:46:22
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 			100 Tidak ada Tahura di Kabupaten Dairi	Ada	2025-03-17 16:43:26	OK	Surat Keterangan	2025-03-25 16:45:18

[illegible]

4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 52. Jumlah seluruh pengadaan = 940	5.5319149	Ada	2025-03-26 16:12:51	OK	Sesuai data dukung	2025-03-27 10:02:35	
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 143360270408. total belanja operasi dan modal = 1040180252064.1	13.782253	Ada	2025-03-27 09:58:32	OK	Sesuai data dukung	2025-03-27 10:01:50	
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 49658345183. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 190258129710	26.100512	Ada	2025-03-26 16:20:22	OK	Sesuai Data Dukung	2025-03-27 09:50:17	
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 797. Jumlah seluruh pegawai = 1137	70.096746	Ada	2025-03-25 16:32:05	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:18:03	
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 272. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1137	23.922603	Ada	2025-03-20 10:56:15	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:18:55	
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesahatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 87. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 272	31.985294	Data JF bersertifikat sudah diperbaiki	Ada	2025-03-25 20:03:25	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:21:44
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 	Realisasi Belanja = 1248759410799.1. Total Belanja APBD = 1352146553377	7.6461492	Ada	2025-03-25 17:06:33	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:23:02	
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 	Total PAD dalam realisasi = 100411235107.57. Total PAD dalam APBD = 98379074374	2.0656433	sudah disesuaikan, Realisasi memang lebih besar dari target yang ditetapkan	Ada	2025-03-26 12:30:49	OK	Sesuai data dukung.	2025-03-26 14:03:10
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		100	Ada	2025-03-15 15:46:47	OK	Sesuai data dukung	2025-03-25 16:59:49	
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya 	Nilai realisasi SiLPA = 39004969868.14. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1236219013955.5	3.1551828	Ada	2025-03-25 17:14:49	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:25:37	
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) 	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 38493022652. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 44763398138	85.992182	pada laman https://dairikab.go.id/detail/po-stingan/lkpdaudited-2023 telah tersaji anggaran dan realisasi laporan keuangan hasil audit TA.2023	Ada	2025-03-25 17:27:56	OK	Sesuai data dukung	2025-03-26 10:26:49

[illegible]

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/77/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi**
di
Sidikalang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Dairi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan asistensi penyusunan rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah (PD);
- b. Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja yang difokuskan pada *cascading* di level Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD;
- c. Melakukan pendampingan dalam penentuan program yang relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai;
- d. Melaksanakan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan;

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,06** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,95	21,22
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,98	18,14
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,32	10,58
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,76	11,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,01	61,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), rencana aksi, dan dokumen lainnya termasuk pada tingkat PD. Pemerintah Kabupaten Dairi juga telah menyusun perbaikan pohon kinerja dan cascading/penjenjangan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan beberapa PD.

Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan sebagai berikut:

- a. Penjenjangan/*cascading* kinerja pada beberapa PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kien sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- b. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya *crosscutting* antar PD dan pihak-pihak di luar pemerintah daerah yang terkait dengan upaya pencapaian kinerja organisasi;
- c. Terdapat sasaran strategis PD yang masih belum cukup mengakomodir seluruh kinerja PD tersebut. Contohnya PK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang sudah mencakup sasaran “meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sektor UMKM dan usaha ekonomi kreatif” dengan indikator “persentase peningkatan omset IKM”, “persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan”, “persentase peningkatan omset koperasi aktif”, “persentase peningkatan omset UMKM binaan”. Namun belum mengakomodir sasaran kinerja *core business* terkait perindustrian;
- d. Terdapat indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum berorientasi hasil/outcome, yaitu indikator “persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang”, cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan”, persentase penyelenggaraan jasa konstruksi”, “persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha”, cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum”;
- e. Penjabaran kinerja PD ke level kabag yang masih belum baik. Hal ini ditunjukkan pada beberapa pejabat yang memiliki sasaran dan indikator kinerja yang sama pada beberapa bidang. Contohnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika, pada PK Kabid. Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika dengan Pengawas Teknologi Informatika yaitu sasaran “penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah” dengan indikator “tersedianya bandwidth internet” dengan target “1 tahun”;
- f. Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan, contohnya pada Dinas Kesehatan.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun manual IKU yang memuat definisi operasional, formulasi serta sumber data dan melaksanakan pengukuran kinerja organisasi pada seluruh PD. Selanjutnya untuk penilaian kinerja individu telah menggunakan aplikasi E-kinerja dari BKN.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja masih berorientasi pada penyerapan anggaran (monev renja) dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. *Monitoring* dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan sehingga belum diketahui ketercapaiannya;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual, belum memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam perubahan strategi dan aktivitas pencapaian kinerja pada tahun berjalan serta pemberian *reward and punishment*.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan membuat laporan kinerja pada tingkat PD.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja PD tahun 2023 belum seluruhnya dipublikasikan secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (yang tersedia pada *website* Pemda adalah Laporan Kinerja tahun 2021);
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategi. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang sama atau lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contoh pada PK Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2024 terkait indikator “persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan” dengan target 88,11% sedangkan realisasi kinerja tersebut pada tahun 2023 juga telah mencapai angka 88,11%;
- c. Penyajian laporan kinerja PD tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, dan analisis efisiensi sumber daya. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Sosial.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap PD. Evaluasi tersebut juga telah menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang mencakup catatan dan rekomendasi pada setiap PD.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP internal DPMPTSPK yang mendapatkan nilai komponen perencanaan sebesar 28,00 dari bobot 30. Namun dalam LHE disampaikan bahwa unit yang bersangkutan belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja, belum memiliki dokumen ukuran keberhasilan (indikator kinerja Utama) yang memenuhi kriteria *SMART*. Masih terdapat indikator kinerja yang tidak relevan untuk mengukur sasaran strategisnya contohnya pada indikator “persentase peningkatan realisasi penanaman modal” untuk mendukung sasaran “terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan”;
- b. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya;
- c. Belum seluruh PD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal dan belum terdapat media pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut evaluasi AKIP untuk keseluruhan PD;
- d. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemerintah Daerah dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan *cascading* (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memperhatikan *critical success factor (CSF)* dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 2) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada pohon kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD

dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;

- 3) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
- 4) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 5) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 6) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 7) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
- 8) Memastikan pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam perbaikan strategi pencapaian kinerja, struktur organisasi dan pemberian *reward and punishment*;
- 9) Memastikan laporan kinerja Pemda seluruh PD telah dipublikasi melalui berbagai media secara tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- 10) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 11) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, memastikan laporan kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan;
- 12) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 13) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi riil penerapan SAKIP setiap PD sehingga

- rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 14) Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal serta memberikan jasa konsultasi apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh PD terkait pelaksanaan atas rekomendasi yang telah diberikan;
 - 15) Mendorong pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal PD untuk memastikan peningkatan kualitas implementasi SAKIP PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Sumatera Utara;
4. Pj. Bupati Dairi.